

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya jualah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2016-2021 telah selesai kami susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser 2016-2021 merupakan pedoman perencanaan pembangunan daerah lima tahunan dengan memuat penjabaran Visi, Misi dan Janji-janji politik yang kami sampaikan selama masa kampanye. Penyusunan dokumen ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/795/SJ tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD 2017.

Penyusunan RPJMD ditujukan untuk memberi arah pembangunan Kabupaten Paser dengan memperhatikan aspek kondisi daerah, permasalahan pembangunan, isu strategis, gambaran pengelolaan keuangan daerah sehingga mampu merumuskan program strategis dan indikator kinerjanya. Dokumen RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2016-2021 ini juga berfungsi sebagai pedoman penyusunan beberapa dokumen perencanaan lainnya, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Paser, Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Melalui visi daerah **“Terwujudnya Kabupaten Paser Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan”** perencanaan pembangunan harus mampu mewakili semangat kesejahteraan dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dengan memperhatikan aspek keadilan. Visi tersebut dijabarkan dalam sasaran dan program prioritas jangka menengah yang relevan dan kontekstual sesuai kebutuhan Kabupaten Paser.

Dalam penyusunan dokumen ini kami mengucapkan terima kasih kepada Pansus II DPRD Kabupaten Paser, Bappeda dan seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Paser serta seluruh pihak yang telah membantu penyusunan sampai dengan ditetapkannya RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2016-2021. Secara khusus, ucapan terima kasih

disampaikan kepada seluruh Kelompok Kerja (POKJA) Penyusunan RPJMD (Pokja, SDM, Pokja Sarpras, Pokja Ekonomi, Pokja Pemerintahan dan Aparatur, Pokja Lingkungan Hidup dan Pokja KLHS yang dedikasi dan rasa tanggungjawab yang tinggi dapat mengawal seluruh tahapan penyusunan RPJMD sehingga dapat diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. Akhirnya, dengan disusunnya dokumen ini diharapkan semua pihak, kepala daerah termasuk setiap Perangkat Daerah di Kabupaten Paser, mampu mengemban mandat visi misi lima tahunan dengan konsekuen dan seksama sehingga dapat terwujud masyarakat Paser yang sejahtera secara menyeluruh.

Tana Paser, 25 Juli 2016

BUPATI PASER,

H. YUSRIANSYAH SYARKAWI, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR DIAGRAM.....	xii
DAFTAR GRAFIK	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM PENYUSUNAN.....	4
C. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	7
1. Hubungan RPJMD dengan RPJMN.....	7
2. Hubungan RPJMD dengan RPJPD	8
3. Hubungan RPJMD dan RTRW	8
4. Hubungan RPJMD dengan Renstra SKPD	8
5. Hubungan RPJMD dengan RKPD	8
D. SISTEMATIKA PENULISAN.....	9
E. MAKSUD DAN TUJUAN	11
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	13
A. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI	13
1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah	13
2. Potensi Pengembangan Wilayah	28
3. Kawasan rawan Bencana.....	28
4. Demografi	30
B. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	34
1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	34
2. Fokus Kesejahteraan Sosial	37
3. Fokus Seni, Budaya dan Olahraga	41
C. ASPEK PELAYANAN UMUM	42
1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar	42
2. Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar	55
3. Urusan Pemerintahan Pilihan.....	67
D. ASPEK DAYA SAING DAERAH	73
1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	73

2. Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastuktur	75
3. Fokus Iklim Berinvestasi	80
4. Fokus Sumber Daya Manusia	82
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA	
PENDANAAN	83
A. KINERJA KEUANGAN MASA LALU	83
1. Kinerja Pendapatan Daerah.....	83
2. Neraca Daerah.....	88
B. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU.....	91
1. Belanja Daerah.....	92
2. Pembiayaan Daerah.....	96
C. KERANGKA PENDANAAN	102
1. Strategi dan Kebijakan Peningkatan Pendapatan Daerah	102
2. Strategi dan Kebijakan Optimalisasi Belanja Daerah	104
3. Strategi dan Kebijakan Optimalisasi Pembiayaan Daerah.....	106
4. Proyeksi APBD 2017-2021	106
Bab IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS	109
A. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN.....	109
1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar	109
2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar.....	112
3. Urusan Pilihan.....	117
B. ISU-ISU STRATEGIS.....	122
1. Isu Internasional	122
2. Isu Nasional.....	125
3. Isu Provinsi Kalimantan Timur	125
4. Isu Strategis Kabupaten Paser.....	126
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	137
A. VISI DAERAH.....	137
1. Maju.....	137
2. Mandiri	138
3. Sejahtera	138
4. Berkeadilan	139
B. MISI DAERAH.....	139
C. TUJUAN DAN SASARAN	140

1. Misi 1: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Transportasi, Energi, Air Bersih, dan Pemukiman.....	140
2. Misi 2: Meningkatkan Pelayanan Dasar di Bidang Pendidikan dan Kesehatan	143
3. Misi 3: Memperkuat Fondasi Perekonomian yang Berbasis Potensi Lokal dan Berkelanjutan	146
4. Misi 4: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan.....	149
5. Misi 5. Memperkuat Kohesivitas Sosial, Budaya dan Adat Istiadat Lokal	151
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	155
A. MISI 1: MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI, ENERGI, AIR BERSIH, DAN PEMUKIMAN	155
B. MISI 2: MENINGKATKAN PELAYANAN DASAR DI BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	162
C. MISI 3: MEMPERKUAT FONDASI PEREKONOMIAN YANG BERBASIS POTENSI LOKAL DAN BERKELANJUTAN.....	166
D. MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN	169
E. MISI 5: KOHESIVITAS SOSIAL, BUDAYA, DAN ADAT ISTIADAT LOKAL.....	174
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PRORAM PEMBANGUNAN DAERAH.....	178
A. MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI, TELEKOMUNIKASI, ENERGI, AIR BERSIH, DAN PEMUKIMAN	178
1. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Layanan Dasar Bidang Infrastruktur.....	178
B. MENINGKATKAN PELAYANAN DASAR DI BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	186
1. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Pendidikan	186
2. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Kesehatan	186
C. MEMPERKUAT FONDASI PEREKONOMIAN YANG BERBASIS POTENSI LOKAL DAN BERKELANJUTAN.....	192
1. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Pilihan Pertanian, Kelautan dan Perikanan serta Ketahanan Pangan.....	192
2. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Pilihan Pariwisata.....	193
3. Sasaran dan program prioritas urusan wajib non-pelayanan dasar koperasi dan Usaha Kecil Menengah.....	193

4.	Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Non-pelayanan Dasar Perdagangan.....	194
5.	Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Non-pelayanan Dasar Tenaga Kerja.....	194
6.	Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	194
7.	Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Non-pelayanan Dasar Penanaman Modal.....	194
8.	Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Non-pelayanan Dasar Lingkungan Hidup.....	195
D.	MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN.....	201
1.	Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	201
2.	Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.....	201
3.	Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	201
4.	Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	202
5.	Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	202
6.	Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika.....	202
7.	Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar Statistik.....	202
8.	Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar Kearsipan.....	202
9.	Sasaran dan Program Prioritas Urusan Rutin Penunjang Urusan Pemerintahan.....	203
10.	Sasaran dan Program Prioritas Urusan Perencanaan Penunjang Urusan Pemerintahan.....	203
11.	Sasaran dan Program Prioritas Urusan Keuangan Penunjang Urusan Pemerintahan.....	204

12. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Penunjang Urusan Pemerintahan	204
13. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Penelitian dan Pengembangan Penunjang Urusan Pemerintahan	204
14. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Sekretariat DPRD Penunjang Urusan Pemerintahan	205
15. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Sekretariat Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	205
16. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Inspektorat Penunjang Urusan Pemerintahan.....	206
17. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Kecamatan Penunjang Urusan Pemerintahan.....	206
E. KOHESIVITAS SOSIAL, BUDAYA, DAN ADAT ISTIADAT LOKAL.....	217
1. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Sosial.....	217
2. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	218
3. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Kebudayaan	218
4. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	218
5. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	219
6. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga.....	219
7. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Pilihan Transmigrasi	219
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN	225
A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	226
B. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR.....	226
C. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	227
BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH	249
BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN.....	265
A. PEDOMAN TRANSISI	265
B. KAIDAH PELAKSANAAN	265

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Luas Kabupaten Paser Menurut Kecamatan Tahun 2015	14
Tabel 2: Jarak Ibu Kota Kabupaten ke Ibu Kota Kecamatan	16
Tabel 3: Daerah Berdasarkan Kondisi Kemiringan Kabupaten Paser.....	19
Tabel 4: Jumlah Sungai berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Paser	21
Tabel 5: Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi dan Palawija	24
Tabel 6: Luas Panen dan Produksi Padi Kabupaten Paser 2010 - 2015.....	25
Tabel 7: Luas Budidaya dan Produksi Tambak dan Kolam 2011-2015	25
Tabel 8: Luas Areal Perkebunan Menurut Jenis Tanaman 2015.....	26
Tabel 9: Luas Areal Perkebunan rakyat 2015	26
Tabel 10: Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsi 2015	27
Tabel 11: Jenis dan daerah Rawan Bencana di Kabupaten Paser	29
Tabel 12: Jumlah Penduduk Kabupaten Paser	30
Tabel 13: Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur 2015.....	31
Tabel 14: Angka Ketergantungan di Kabupaten Paser 2011 - 2015.....	31
Tabel 15: Rata-Rata Banyaknya Penduduk Tiap Kilometer Persegi.....	33
Tabel 16: PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Paser 2011-2015 (Juta Rupiah).....	34
Tabel 17: Kontribusi Masing-masing Sektor Terhadap PDRB	36
Tabel 18: Persentase Angka Kemiskinan di Kabupaten Paser.....	37
Tabel 19: Persentase Penduduk Kabupaten Paser Usia 10 Tahun ke atas.....	38
Tabel 20: Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Paser	38
Tabel 21: Angka Partisipasi Murni 2011-2015	39
Tabel 22: Angka Harapan Hidup 2011-2015	40
Tabel 23: Banyaknya Permohonan dan Penyelesaian Tentang Pertanahan	41
Tabel 24: Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan, Penyelenggaraan	42
Tabel 25: Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Paser.....	43
Tabel 26: Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru di Kabupaten Paser.....	44
Tabel 27: Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Paser dirinci	45
Tabel 28: Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Paser 2011-2015	46
Tabel 29: Angka Kematian Bayi Kabupaten Paser Tahun 2015	47
Tabel 30: Angka Kematian Balita Kabupaten Paser Tahun 2015	47
Tabel 31: Angka Kematian Ibu Kabupaten Paser Tahun 2015	48

Tabel 32: Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	48
Tabel 33: Persentase Pelayanan Imunisasi	49
Tabel 34: Persentase Pelayanan Gizi.....	50
Tabel 35: Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Status	52
Tabel 36: Fasilitas Tempat Buang Air Besar	52
Tabel 37: Banyaknya Gangguan Kamtibmas.....	53
Tabel 38: Jumlah Anggota Linmas Terlatih di Kabupaten Paser 2015	54
Tabel 39: Jumlah PMKS yang Tertangani	55
Tabel 40: Penduduk Usia Kerja (15 tahun ke atas) Menurut Kegiatan Utama 2015.....	56
Tabel 41: Perkembangan Angkatan Kerja, TPAK, TPT dan TKK	56
Tabel 42: Persentase Penduduk Usia 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Paser	57
Tabel 43: Produksi Padi dan Palawija (Ton) di Kabupaten Paser 2011-2015	59
Tabel 44: Produktivitas Padi Sawah dan Padi Ladang Per Hektar	60
Tabel 45: Jumlah Bangunan Ber-IMB hingga 2015	61
Tabel 46: Aglomerasi Sampah di Kabupaten Paser 2015	61
Tabel 47: Status jalan di Kabupaten Paser.....	63
Tabel 48: Jenis Surat Kabar 2011-2015	63
Tabel 49: Persentase Koperasi Aktif, Jumlah UKM dan UMKM	64
Tabel 50: Jumlah Investor 2011-2016.....	65
Tabel 51: Jumlah Nilai Investasi 2011-2015.....	65
Tabel 52: Urusan Wajib Perpustakaan Kabupaten Paser 2011-2015.....	67
Tabel 53: Jumlah Kunjungan Wisatawan 2011-2015.....	68
Tabel 54: Luas Areal, Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan.....	69
Tabel 55: Populasi Ternak Menurut Jenisnya Tahun 2015	70
Tabel 56: Jumlah Pedagang dan Kelompok Pedagang	72
Tabel 57: Pertumbuhan Riil PDRB Industri di Kabupaten Paser 2011-2015	73
Tabel 58: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita (%) 2011-2015.....	74
Tabel 59: Panjang Jalan (Km) di Kabupaten Paser Tahun 2011-2015	75
Tabel 60: Jumlah Kendaraan di Kabupaten Paser Tahun 2011-2015.....	76
Tabel 61: Jumlah Barang dan Orang yang Terangkut.....	76
Tabel 62: Luas Wilayah Produktif (Ha) di Kabupaten Paser Tahun 2014.....	77
Tabel 63: Jumlah Bank di Kabupaten Paser Tahun 2011-2015.....	77
Tabel 64: Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Penggunaan	78

Tabel 65: Presentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik.....	79
Tabel 66: Jumlah dan Macam Retribusi Daerah Tahun 2011-2015.....	80
Tabel 67: Jumlah Perda yang mendukung Iklim Usaha	81
Tabel 68: Angka Kriminalitas di Kabupaten Paser Tahun 2011-2015	81
Tabel 69: Rasio Ketergantungan di Kabupaten Paser Tahun 2010-2014	82
Tabel 70: Proporsi Realisasi Pendapatan Terhadap Anggaran Pendapatan Kabupaten Paser Tahun 2011-2015.....	84
Tabel 71: Rata-rata Pertumbuhan dan Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2011 – 2015	85
Tabel 72: Neraca Komparatif dan Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Paser 2011- 2015	89
Tabel 73: Rasio Likuiditas Kabupaten Paser Tahun 2011-2014.....	91
Tabel 74: Rasio Solvabilitas Kabupaten Paser Tahun 2011-2014.....	91
Tabel 75: Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Paser Tahun 2011-2015	92
Tabel 76: Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Kabupaten Paser Tahun 2011-2015	93
Tabel 77: Rincian Realisasi Belanja Langsung Kabupaten Paser Tahun 2011-2015	93
Tabel 78: Rincian Realisasi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Paser Tahun 2011-2015	95
Tabel 79: Rincian Pembiayaan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2011-2015	97
Tabel 80: Penutup Defisit Rill Anggaran Kabupaten Paser 2011-2014	99
Tabel 81: Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Paser 2011-2015	101
Tabel 82: Proyeksi Pendapatan, Pengeluaran Wajib Mengikat serta Pembelanjaan Langsung Daerah Kabupaten Paser 2017-2021	107
Tabel 83: Tahapan dan Skala Prioritas RPJPN 2005-2025.....	125
Tabel 84: Tujuan dan Sasaran Misi 1	143
Tabel 85: Tujuan dan Sasaran Misi 2	146
Tabel 86: Tujuan dan Sasaran Misi 3	149
Tabel 87: Tujuan dan Sasaran Misi 4	151
Tabel 88: Tujuan dan Sasaran Misi 5	153
Tabel 89: Strategi dan Arah Kebijakan Misi 1	159
Tabel 90: Strategi dan Arah Kebijakan Misi 2.....	164
Tabel 91: Strategi dan Arah Kebijakan Misi 3.....	167

Tabel 92: Strategi dan Arah Kebijakan Misi 4.....	170
Tabel 93: Strategi dan Arah Kebijakan Misi 5.....	175
Tabel 94: Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Pembangunan Infrastruktur Transportasi, Telekomunikasi, Energi, Air Bersih, dan Pemukiman	181
Tabel 95: Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Pelayanan Dasar di Bidang Pendidikan dan Kesehatan.....	188
Tabel 96: Kebijakan Umum dan Pembangunan Daerah Perekonomian yang Berbasis Potensi Lokal dan Berkelanjutan	196
Tabel 97: Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan	207
Tabel 98: Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kohesivitas Sosial, Budaya dan Adat Istiadat Lokal.....	220
Tabel 99: Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan SKPD Penanggung Jawab	226
Tabel 100: Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar dan SKPD Penanggung Jawab.....	227
Tabel 101: Urusan Pemerintahan Pilihan dan SKPD Penanggung Jawab.....	227
Tabel 102: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Transportasi, Energi, Air Bersih, dan Pemukiman	229
Tabel 103: Meningkatkan Pelayanan Dasar di Bidang Pendidikan dan Kesehatan.....	231
Tabel 104: Memperkuat Fondasi Perekonomian yang Berbasis Potensi Lokal dan Berkelanjutan	234
Tabel 105: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan.....	238
Tabel 106: Kohesivitas Sosial, Budaya dan Adat Istiadat Lokal	245
Tabel 107: Indikator Kinerja Daerah	250

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1: Distribusi Penduduk di Kabupaten Paser Tahun 2015	32
Diagram 2: Kontribusi Nilai Tambah Bruto Sektoral ADHB terhadap PDRB Kabupaten Paser Tahun 2014 (%)	35
Diagram 3: Persentase jalan di Kabupaten Paser menurut kondisi jalan 2015	51
Diagram 4: Luas Kerusakan Hutan di Kabupaten Paser Tahun 2013	71

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1: Rata-rata Curah Hujan per Tahun (mm)	22
Grafik 2: Huruf Penduduk 15 Tahun Ke Atas Di Kabupaten Paser 2011-2015	39
Grafik 3: Perkembangan Angka Keluhan Kesehatan dan Angka Kesakitan Penduduk di Kabupaten Paser 2011-2015	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Skema Keterkaitan Antar Dokumen.....	9
Gambar 2: Peta Administrasi Kabupaten Paser.....	15
Gambar 3: Peta Topografi Wilayah Kabupaten Paser	18
Gambar 4: Peta Kemiringan Lahan Kabupaten Paser.....	19
Gambar 5: Peta Rencana Pola Ruang	23
Gambar 6: Peta Rawan Bencana Kabupaten Paser.....	29

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagai pendahuluan dokumen, Bab ini menguraikan urgensi perencanaan pembangunan daerah dan penyusunan RPJMD. Urgensi tersebut disertai pula rangkaian landasan hukum penyusunan, gambaran tentang hubungan antara RPJMD dengan perencanaan lainnya. Untuk memandu dalam memahami bab-bab selanjutnya, maka dalam Bab 1 ini juga dipaparkan sistematika dokumen RPJMD dari bagian paling awal hingga akhir.

A. LATAR BELAKANG

Distribusi kewenangan antara pusat ke daerah telah disempurnakan dalam 17 tahun terakhir sejak semangat reformasi digulirkan di Indonesia. Undang-Undang (UU) Nomor (No) 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Pemda sebelumnya (UU No. 32 Tahun 2004) semakin melegitimasi bahwa perubahan sistem dari sentralisasi ke desentralisasi secara jelas memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Dalam rangka pengintegrasian pembangunan antar daerah di era desentralisasi, secara peraturan perundang-undangan diatur melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Pasal 2 ayat 2 UU SPPN mengamanatkan setiap daerah untuk menyusun rencana pembangunan berjangka secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan. Rencana pembangunan berjangka tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berjangka menengah maupun panjang ditujukan untuk merealisasikan cita-cita pembangunan yang masih pada level ide hingga tingkat operasionalisasinya. Dasar dari cita-cita pembangunan bermula dari visi dan misi kepala daerah, Bupati Paser **Drs. H. Yusriansyah Syarkawi, M.Si** dan Wakil Bupati Paser **H.M. Mardikansyah, SH. MAP.** yang telah dilantik pada 17 Februari 2016. Kemudian operasionalisasinya dilakukan melalui teknik-teknik yang sistematis dengan kerangka berfikir logis menjadi satu kesatuan utuh perencanaan pembangunan yang mampu diwujudkan.

Dokumen RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2016-2021 secara rasional juga berupaya menjelaskan keterkaitan tahapan mulai dari penjabaran visi dan misi hingga operasionalisasinya ke dalam bentuk program prioritas yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Guna menghasilkan RPJMD yang baik, maka dokumen ini disusun dengan melihat dan menganalisis sumberdaya serta potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, serta evaluasi dari program pembangunan yang sudah dilakukan.

Lingkup RPJMD tidak hanya pada urusan internal Kabupaten, RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang mencakup seluruh persoalan strategis yang ada di lingkup sektoral, lintas sektoral, kabupaten, antar kabupaten, kabupaten dan provinsi hingga kabupaten dengan pusat. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2016-2021 juga melibatkan para pemangku kepentingan terkait, termasuk masyarakat. Selain itu, penyusunannya dilakukan secara transparan dan akuntabel sehingga menghasilkan sebuah dokumen perencanaan yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan.

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2016-2021 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Paser Tahun 2005-2025 dan memperhatikan RPJM Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional, kondisi lingkungan strategis di daerah, dan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, serta disusun berdasarkan kolaborasi empat pendekatan berikut:

1. Pendekatan Politik, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan pasangan kepala daerah sebagai proses penyusunan rencana program. Pemilihan pasangan kepala daerah dilakukan berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon kepala daerah pada saat kampanye.
2. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah dan sistematis oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut.
3. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
4. Pendekatan Atas-Bawah (top-down) dan Bawah-Atas (bottom-up), pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

5. Hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Selain itu, hal yang mendapat perhatian adalah pemahaman awal posisi Kabupaten Paser yang unik atau berbeda dengan daerah lain pada umumnya. Keunikan ini muncul dari faktor karakteristik geo-strategis wilayah yang meliputi geo-ekonomi, geo-politik, geo-sosiobudaya dan geo-histori.

Dokumen RPJMD Kabupaten Paser Periode 2016-2021 merupakan Tahap III RPJPD Kabupaten Paser Tahun 2005-2025. memiliki nilai-nilai strategis dan politis, yaitu:

1. RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2016-2021 merupakan media untuk mengimplementasikan janji pasangan kepala daerah terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat.
2. RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2016-2021 merupakan pedoman pembangunan daerah dan penyelerasan dengan program pembangunan nasional, dan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur selama 5 (lima) tahun ke depan.
3. RPJMD Kabupaten Paser tahun 2016-2021 merupakan pedoman penyusunan RKPD, Keberadaannya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategi (Renstra) SKPD, Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
4. RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2016-2021 merupakan alat atau instrumen pengendalian bagi Satuan evaluasi dan Pengawas Internal (SPI) dan Bappeda.
5. RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2016-2021 merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala daerah selama 5 (lima) tahun.
6. RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2016-2021 merupakan pedoman penilaian keberhasilan Pemerintah Daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2016-2021 melalui berbagai tahapan analisis sektoral, penjaringan aspirasi masyarakat, dialog yang melibatkan stakeholders dan pemangku kepentingan, analisis gambaran umum daerah, analisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan indikatif, perumusan permasalahan pembangunan daerah, hasil analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah, perumusan tujuan dan sasaran, perumusan strategi dan arah kebijakan,

perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah, perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, penetapan indikator kinerja daerah yang dirumuskan secara transparan, responsif, akuntabel, partisipatif dan terukur.

Tahapan lain yang tak kalah pentingnya adalah pengintegrasian hasil reviu Inspektorat kabupaten Paser selaku Aparatur Pengawas Internal Pemerintah, rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan hasil evaluasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2016-2021

B. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan paling fundamental dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2016-2021 yaitu Pancasila sebagai landasan idiil dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional. RPJMD ini juga menjadikan sejumlah regulasi sebagai landasan hukum operasionalnya, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Paser Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2005 -2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser Tahun 2013-2035;

C. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menjelaskan bahwa RPJMD merupakan bagian dari satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal tersebut memberikan pesan khusus bahwa RPJMD harus terintegrasi dengan dokumen lain dan bersifat koordinatif terhadap seluruh pemangku kepentingan yang terlibat.

Pesan lain yang juga penting dalam UU No. 25 Tahun 2004 adalah RPJMD harus sinkron dan sinergis antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian hingga evaluasi.

RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi rujukan di atasnya. Hubungan antara RPJMD dengan dokumen lain dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dijelaskan sebagai berikut:

1. Hubungan RPJMD dengan RPJMN

Rencana Pembangunan Nasional dalam kurun waktu 5 tahun (2015-2019) yang tertuang dalam RPJM Nasional menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Paser dalam merancang pembangunan di daerah sesuai kondisi lokal dan dinamika yang

berkembang di daerah. Substansi tujuan pembangunan nasional lima tahunan untuk kesejahteraan rakyat menjadi inti dari rencana pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021 yang selanjutnya dirinci dalam rencana tahunan dalam RKPD.

2. Hubungan RPJMD dengan RPJPD

RPJMD Tahun 2016-2021 merupakan RPJMD Ketiga dari tahapan pelaksanaan RPJPD Tahun 2005-2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah periode Tahun 2016-2021, juga berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Tahun 2005-2025.

3. Hubungan RPJMD dan RTRW

Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola penataan ruang yang sesuai dengan Peraturan Daerah No 9 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser Tahun 2013-2035 sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Paser

4. Hubungan RPJMD dengan Renstra SKPD

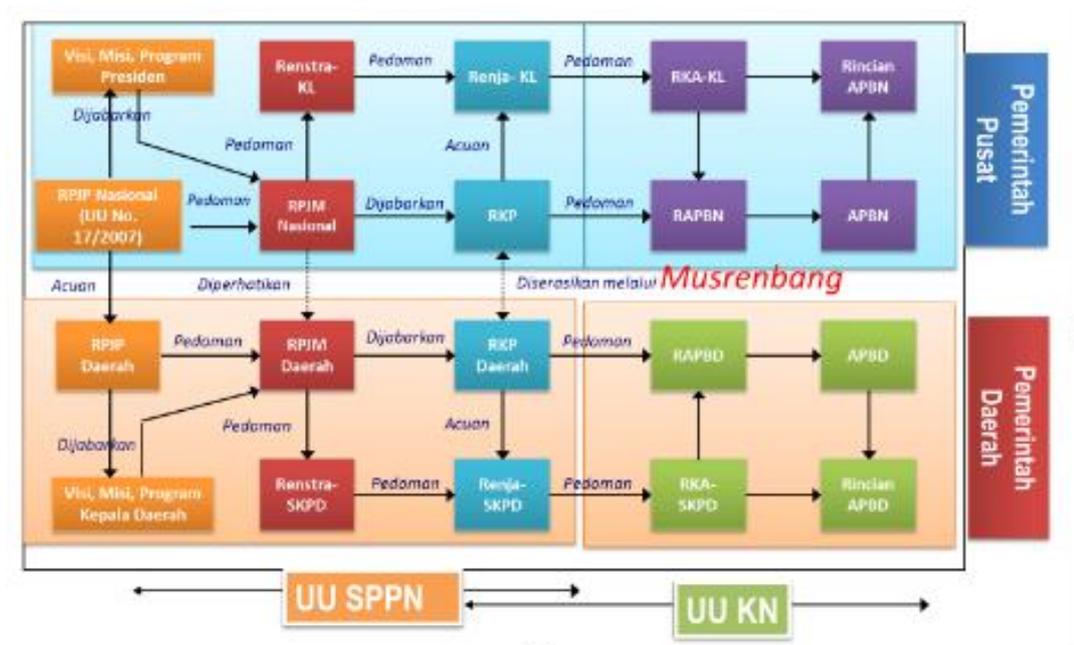
RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap SKPD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Paser.

5. Hubungan RPJMD dengan RKPD

Pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021 setiap tahun dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. RKPD menjadi acuan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten. Selanjutnya SKPD dengan berpedoman pada Renstra SKPD dan RKPD menyusun rencana kerja tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Gambaran tentang hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai kesatuan sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.

Gambar 1: Skema Keterkaitan Antar Dokumen



Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa RPJMD Kabupaten Paser diterjemahkan dari visi dan misi pasangan kepala daerah terpilih, **Drs. H. Yusriansyah Syarkawi, M.Si** dan **H. Mardikansyah, SH, M.AP** yang berpedoman pada RPJPD Kabupaten Paser 2006 - 2025, RPJMD Kalimantan Timur 2014-2018, RPJPD Kalimantan Timur 2005-2025 dan RPJMN 2015-2019. Sebagai dokumen perencanaan kebijakan pembangunan lima tahun, RPJMD Kabupaten Paser tahun 2016-2021 mengacu dan mengarah bagi terwujudnya ketentuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan pemerintah daerah. Dokumen RPJMD juga disusun dengan memperhatikan dokumen RTRW Kabupaten Paser, RTRW Provinsi Kalimantan Timur dan RTRW Nasional. Dokumen RPJMD akan digunakan sebagai acuan perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Dalam Hal ini RPJMD merupakan dokumen penting bagi rujukan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Paser.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008, maka RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Memuat sub-bab mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, landasan penyusunan, ruang lingkup serta sistematika penyusunan.

BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menyajikan gambaran mengenai kondisi geografis dan demografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum serta aspek daya saing daerah.

BAB 3 GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari sub-bab mengenai kinerja keuangan masa lalu serta proyeksi kondisi keuangan masa depan.

BAB 4 ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Memuat sub-bab mengenai permasalahan pembangunan dan isu strategis.

BAB 5 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Memuat uraian mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran.

BAB 6 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat uraian strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.

BAB 7 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat uraian mengenai hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja.

BAB 8 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Memuat uraian mengenai hubungan antara urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD.

BAB 9 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Menyajikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan.

BAB 10 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Memuat sub-bab mengenai pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan

E. MAKSUD DAN TUJUAN

RPJMD Kabupaten Paser disusun dengan maksud untuk memberikan landasan hukum terkait perencanaan pembangunan selama lima tahun dalam rangka perwujudan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Paser. Dokumen ini juga digunakan sebagai tolok ukur pertanggungjawaban Bupati pada akhir masa jabatan. Selain itu, penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Paser tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan sinergi dan keberlanjutan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Paser dalam kurun 2016-2021.

Adapun tujuan dari penyusunan RPJMD Kabupaten Paser ini adalah sebagai berikut:

1. Mengoperasionalkan visi dan misi pasangan kepala daerah terpilih, **Drs. H. Yusriansyah Syarkawi, M.Si** dan **H. Mardikansyah, SH, M.AP** ke dalam berbagai agenda pembangunan daerah dalam waktu lima tahun ke depan;
2. Menetapkan sasaran pembangunan, strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah serta merumuskan program prioritas pembangunan selama lima tahun ke depan agar mekanisme perencanaan dan pembangunan daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik lokal;
3. Sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan DPRD menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan, yang disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan yang akan dibiayai oleh APBD Kabupaten Paser, APBD Provinsi Kalimantan Timur, APBN serta sumber lainnya;
4. Sebagai acuan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Paser dalam mencapai tujuan pembangunan jangka menengah melalui penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD secara terarah, terpadu, dan terukur;

5. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Paser serta dengan kabupaten/kota yang berbatasan.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Analisis kondisi umum pada Bab ini bertujuan untuk menghasilkan dan memutakhirkan gambaran umum kondisi daerah yang diperlukan untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah. Secara garis besar, Bab ini akan menggambarkan dua uraian gambaran umum daerah yaitu aspek geografi dan demografi, serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

A. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Aspek geografi dan demografi memberikan gambaran daerah terkait dua aspek, yaitu aspek fisik berupa kondisi lingkungan alam Kabupaten Paser dan aspek non-fisik atau sosial terkait dinamika penduduk dan berbagai bidang yang terkait dengannya.

1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Pemahaman tentang karakteristik lokasi dan wilayah menjadi hal penting sebagai jalan masuk untuk memahami suatu daerah. Pemahaman ini mencakup karakteristik dan potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana, serta luas wilayah menurut batas administrasi pemerintah Kabupaten Paser.

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Paser terletak di ujung paling selatan dari wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang berada pada ketinggian antara 0-500 meter di atas permukaan laut. Kabupaten yang terletak di sisitimur Pulau Kalimantan ini memiliki luas wilayah ± 11.603,94 km² dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat dan Penajam Paser
Sebelah Timur	: berbatasan dengan Selat Makassar
Sebelah Selatan	: berbatasan dengan Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan
Sebelah Barat	: berbatasan dengan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

Secara administratif Kabupaten Paser terdiri dari 10 kecamatan yang dibagi menjadi 139 desa dan 5 kelurahan, sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 1 berikut:

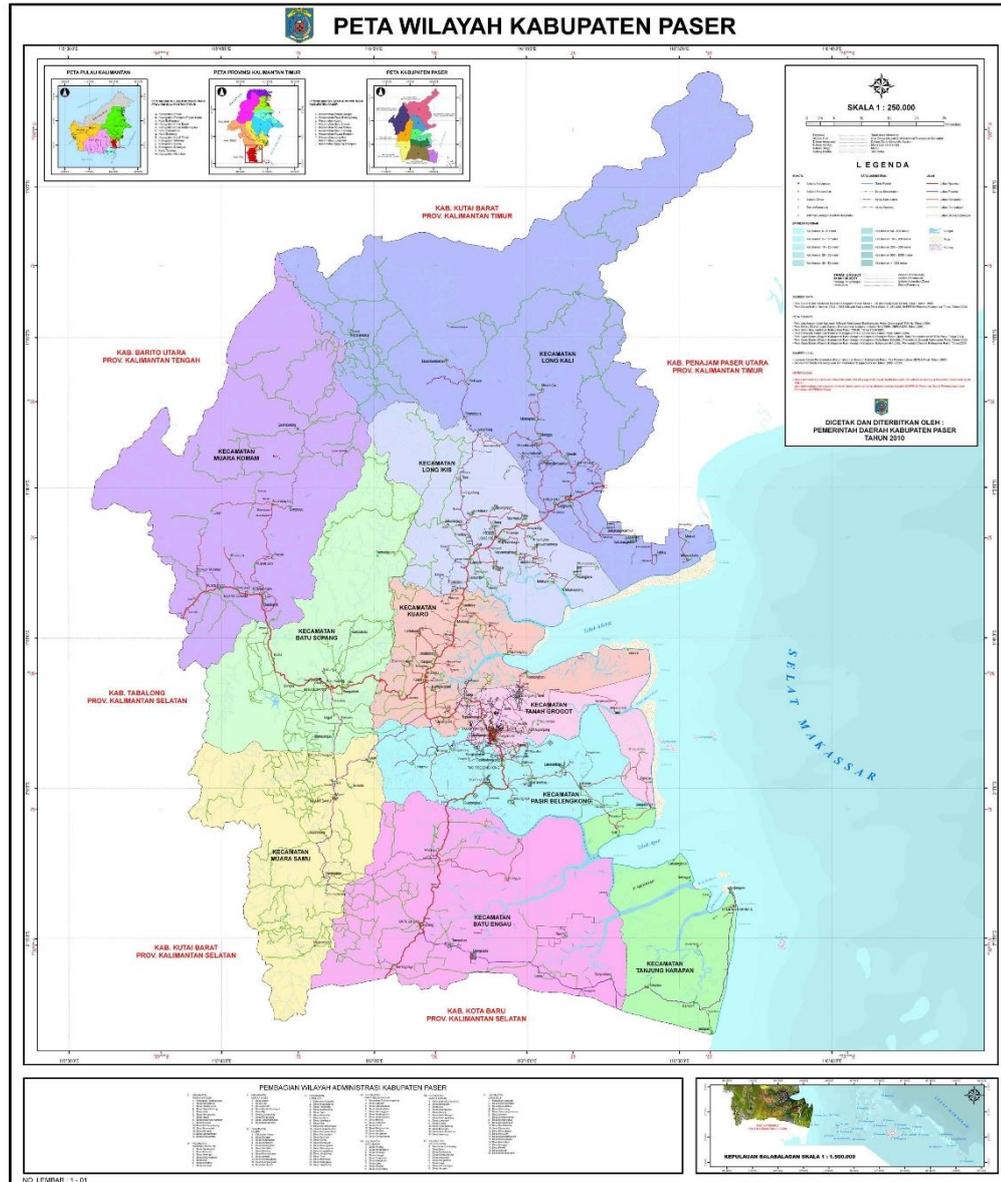
Tabel 1: Luas Kabupaten Paser Menurut Kecamatan Tahun 2015

No	Kecamatan	Luas Wilayah/Area (Km2)		Luas Total (Km2)	%
		Darat	Laut		
1	Batu Sopang	1.111,38	0,00	1.111,38	9,58
2	Muara Samu	855,25	0,00	855,25	7,37
3	Tanjung Harapan	480,40	233,65	714,05	6,15
4	Batu Engau	1.501,61	5,65	1.507,26	12,99
5	Pasir Belengkong	836,62	153,49	990,11	8,53
6	Tanah Grogot	326,95	8,63	335,58	2,89
7	Kuaro	596,76	150,54	747,30	6,44
8	Long Ikis	1.138,37	65,85	1.204,22	10,38
9	Muara Komam	1.753,40	0,00	1.753,40	15,11
10	Long Kali	2.250,44	134,95	2.385,39	20,56
	Kabupaten Paser	10.851,18	752,76	11.603,94	100,00

Sumber: Kabupaten Paser dalam Angka 2016

Berdasarkan data di atas, kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah kecamatan Long Kali, yaitu sekitar 2.385,39 km² atau 20,56% dari luas Kabupaten Paser, sedangkan kecamatan yang luas wilayahnya terkecil adalah Kecamatan Tanah Grogot, yaitu sekitar 335,58 km² atau 2,89% dari luas total Kabupaten Paser. Hampir sepertiga lebih lautan berada di Tanjung Harapan, kecamatan yang terletak paling selatan Kabupaten Paser. Secara geografis, Kabupaten Paser sangat diuntungkan karena memiliki karakteristik wilayah daratan dan lautan. Luas wilayah laut sekitar 6,5% dari daratan dan terhubung langsung dengan Selat Makassar yang strategis untuk perhubungan kawasan timur Indonesia.

Gambar 2: Peta Administrasi Kabupaten Paser



Sumber: Pemerintah Kabupaten Paser (2016)

b. Letak dan Kondisi Geografis

Pembahasan tentang letak dan kondisi geografis terdiri dari deskripsi tentang posisi astronomis dan posisi geostrategis, yaitu sebagai berikut:

a) Posisi Astronomis

Posisi astronomis Kabupaten Paser adalah 0°45'18,37" - 2°27'20,82" Lintang Selatan (LS) dan 115°36'14,5" - 166°57'35,03" Bujur Timur (BT).

b) Posisi Geostrategis

Kabupaten Paser secara geostrategis dilintasi oleh jalan arteri primer (jalan negara/nasional) yang menghubungkan Propinsi Kalimantan Timur dengan Provinsi Kalimantan Selatan. Jarak terjauh antar ibu kota kecamatan dengan ibu kota kabupaten yaitu sejauh 86 km yang kurang lebih dapat memakan waktu empat sampai lima jam. Lihat Tabel 2.

Tabel 2: Jarak Ibu Kota Kabupaten ke Ibu Kota Kecamatan

No	Ibu Kota Kabupaten ke Kota Kecamatan	Jarak (km)	Sarana yang dilalui
1	Tanah Grogot – Tanah Grogot	0	-
2	Tanah Grogot – Muser (Kec. Muara Samu)	60	Darat
3	Tanah Grogot – Batu Engau	55	Darat
4	Tanah Grogot – Tanjung Aru (Kec. Tanjung Harapan)	66/57	Laut/Darat
5	Tanah Grogot – Pasir Belengkong	5	Darat
6	Tanah Grogot – Kuaro	28	Darat
7	Tanah Grogot – Batu Sopang	58	Darat
8	Tanah Grogot – Long Ikis	60	Darat
9	Tanah Grogot – Muara Komam	86	Darat
10	Tanah Grogot – Long Kali	77	Darat

Sumber: Kabupaten Paser dalam Angka 2015

Dari sisi jalur laut, Selat Makassar di bagian timur kawasan memiliki prospek dan fungsi penting sebagai jalur alternatif pelayaran nasional maupun internasional. Pelabuhan laut utama di Kabupaten Paser dipusatkan di Pelabuhan Teluk Adang terletak 12 km ke arah utara ibukota kabupaten (Kota Tanah Grogot), sedangkan Kota Grogot berjarak lebih kurang 145 km dari Kota Balikpapan, atau 260 km dari Ibukota Propinsi Kalimantan Timur (Kota Samarinda).

c) Kondisi Kawasan

Kondisi umum daerah Paser adalah dataran rendah berbukit dan kawasan pesisir di beberapa kecamatan. Lebih detail, kawasan Kabupaten Paser akan digambarkan dalam sub bab berikut yang meliputi kondisi topografi, geologi, hidrologi dan klimatologi.

c. Topografi

Secara garis besar topografi Kabupaten Paser dibagi dalam dua wilayah :

- Wilayah timur merupakan dataran rendah, landai hingga bergelombang dengan ketinggian berkisar 0-1.000 m diatas permukaan laut yang membentang dari utara sampai selatan yang terdiri dari rawa-rawa dan daerah aliran sungai dengan luas 967.100 ha (69,52% dari Luas daratan). Dengan jalan negara Penajam-Kuaro dan Kerang Dayu sebagian batas topografi;
- Wilayah barat merupakan daerah dataran tinggi dan bergelombang, serta berbukit dan bergunung yang berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 424.100 ha (30,48% dari luas daratan). Di wilayah ini terdapat beberapa puncak pegunungan seperti Gunung Serumpaka dengan ketinggian 1.380 m, Gunung Lumut (1.233 m), Gunung Narujan atau Gunung Rambutan dan Gunung Halat.

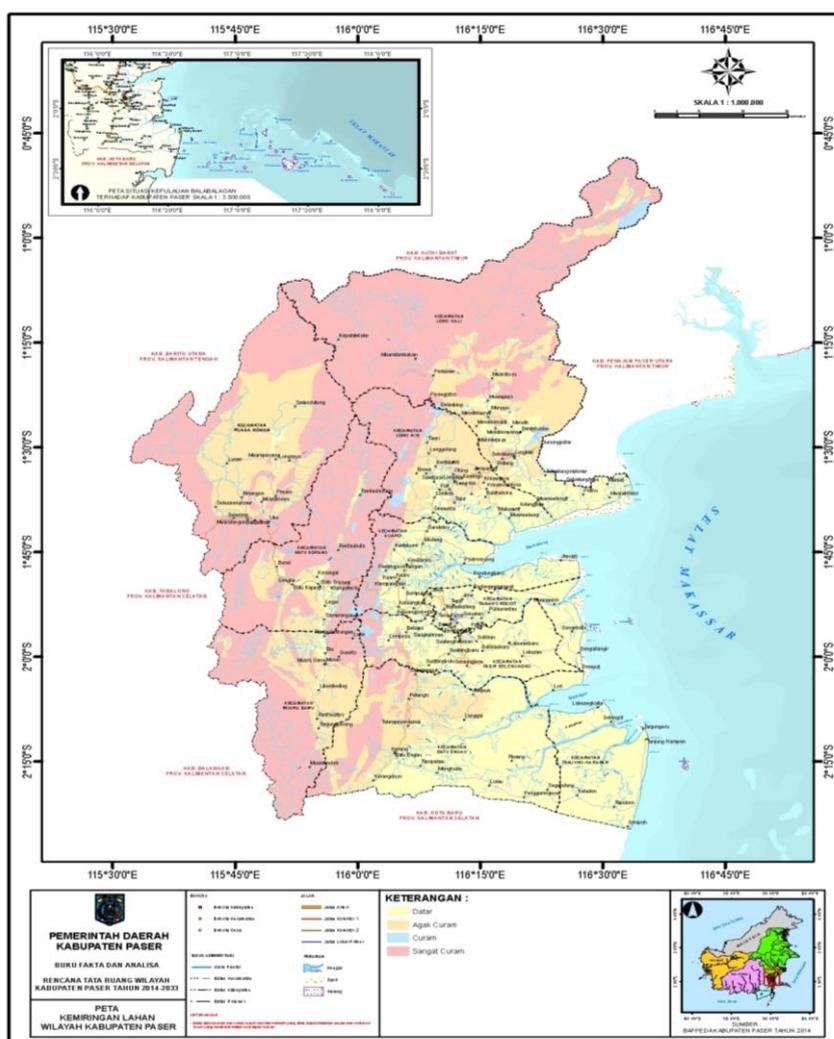
Kondisi wilayah Kabupaten Paser memiliki variasi topografis. Wilayah dataran rendah berada di sebelah timur, berlokasi di wilayah pesisir. Selain itu, juga terdapat beberapa lokasi yang memiliki dataran tinggi walaupun dari segi luasan kurang signifikan, yaitu di kawasan Muara Samu dan Batu Sopang. Pada bagian barat wilayah kabupaten, terdapat deretan perbukitan, dengan ketinggian sekitar 1.000 meter di atas permukaan laut, yang menjadi bagian dari Pegunungan Meratus, salah satu dari empat pegunungan utama di Kalimantan. Lihat Gambar 3.

Tabel 3: Daerah Berdasarkan Kondisi Kemiringan Kabupaten Paser

No	Kemiringan lereng (%)	Kawasan
1	Lereng 0-2 %	Kecamatan Long Kali, Kecamatan Long Ikis, Kecamatan Tanjung Harapan dan Kecamatan Kuaro yang terletak pada bagian pantai menghadap Selat Makasar
2	Lereng 2-15 %	Kecamatan Kuaro, Kecamatan Pasir Belengkong dan Kecamatan Tanah Grogot
3	Lereng < 40 %	Kecamatan Muara Komam dan Kecamatan Long Ikis
4	Lereng > 40 %	Kecamatan Batu Sopang, Kecamatan Long Kali dan Kecamatan Muara Komam

Sumber: LKPJ Bupati Paser 2014

Gambar 4: Peta Kemiringan Lahan Kabupaten Paser



Sumber: Bappeda Kabupaten Paser 2014

Wilayah Kecamatan Batu Engau juga didominasi oleh dataran aluvial, diikuti oleh dataran bergelombang dan hogback. Dataran aluvial juga ditemukan di Kecamatan Pasir Belengkong, Tanah Grogot, Kuaro, Long Ikis dan Long Kali, walaupun dalam luasan yang terbatas. Bentang lahan lain yang penting diperhatikan adalah dataran

banjir. Kalimantan, termasuk di dalamnya Kabupaten Paser, memiliki curah hujan yang tinggi. Kombinasi tersebut penting diperhatikan dalam perencanaan wilayah, terutama pemanfaatan lahan untuk permukiman. Mengingat kawasan Long Kali merupakan salah satu sistem sungai yang terbesar di Kabupaten Paser, dataran banjir dijumpai mendominasi lingkungan sekitar Sungai Long Kali. Dataran banjir juga dijumpai di perbatasan Kecamatan Tanah Grogot dan Pasir Belengkong. Bagian barat Kabupaten Paser didominasi oleh sistem pegunungan atau perbukitan struktural terutama di Kecamatan Muara Samu dan Batu Sopang.

d. Geologi

Secara eksploratif Kabupaten Paser terdiri dari beberapa jenis tanah:

- **Tanah Aluvial/Gambut**, Jenis tanah ini ditemukan di bagian timur, menyebar di daerah dataran rendah, landai dan bergelombang pada lembah-lembah aliran sungai dan pantai dengan luas ± 182.250 ha;
- **Tanah Podzolik Merah Kuning**, jenis tanah ini terdapat dibagian barat, pada daerah-daerah bergelombang dan berbukit pada kiri dan kanan jalan poros Long Kali, Kuaro, menyebar ke selatan di bagian Barat Kecamatan Pasir Belengkong dan selatan Kecamatan Tanjung Harapan dengan Luas ± 517.850 ha;
- **Tanah Campuran/Kompleks**, yaitu jenis tanah yang terdiri dari tanah podzolik coklat/andosol ± 32.750 ha, podzolik/litosol ± 74.000 ha dan organosol/gambut ± 56.000 ha, podzolik ± 422.000 ha dan regosol/gleysol/mediteran 108.400 ha yang menyebar di bagian barat dan utara Kabupaten Paser.

e. Hidrologi

Kawasan rawa banyak dijumpai pada Kecamatan Tanah Grogot, Kuaro, Long Ikis, Long Kali dan Pasir Belengkong. Hampir keseluruhan wilayah Kecamatan Tanjung Harapan didominasi oleh dataran aluvial yang dipengaruhi sedimen jaringan sungai.

a) Daerah Aliran Sungai

Kabupaten Paser memiliki banyak sungai yang tersebar di seluruh kawasan. Berdasarkan data yang dihimpun, kondisi hidrologi di Kabupaten Paser dipengaruhi oleh keberadaan beberapa sungai besar yaitu sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 4 berikut:

Tabel 4: Jumlah Sungai berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Paser

No	Kecamatan	Jumlah Sungai
1	Batu Sopang	29
2	Muara Samu	37
3	Batu Engau	72
4	Tanjung Harapan	20
5	Pasir Belengkong	26
6	Tanah Grogot	18
7	Kuaro	50
8	Long Ikis	33
9	Muara Komam	30
10	Long Kali	52
Total		367

Sumber: Kabupaten Paser dalam Angka 2016

Adapun beberapa sungai yang cukup besar dan panjang tersebut antara lain Sungai Telake (430 km) dan Sungai Kandilo (615 km), Sungai Apar Besar (95 km) dan Sungai Kerang (190 km), yang semuanya bermuara ke Selat Makasar (LKPJ 2014). Sungai-sungai tersebut selain berfungsi sebagai tempat menangkap ikan dan sumber pengairan, juga berfungsi sebagai sarana perhubungan dari dan menuju daerah pedalaman.

b) Sungai, Danau dan Rawa

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Kabupaten Paser memiliki beberapa sungai yang cukup besar dan panjang, antara lain Sungai Telake (430 km) dan Sungai Kandilo (615 km), Sungai Apar Besar (95 km) dan Sungai Kerang (190 km), yang semuanya bermuara ke Selat Makasar. Sungai-sungai tersebut selain berfungsi sebagai sumber irigasi juga digunakan oleh masyarakat untuk tempat menangkap ikan, dan sarana perhubungan dari dan menuju daerah pedalaman.

Pada bagian ini dijelaskan mengenai kondisi sungai, danau dan rawa. Data ini penting untuk diketahui sebagai bahan untuk mempertimbangkan potensi pengembangan pertanian dan perkebunan.

c) Debit Air

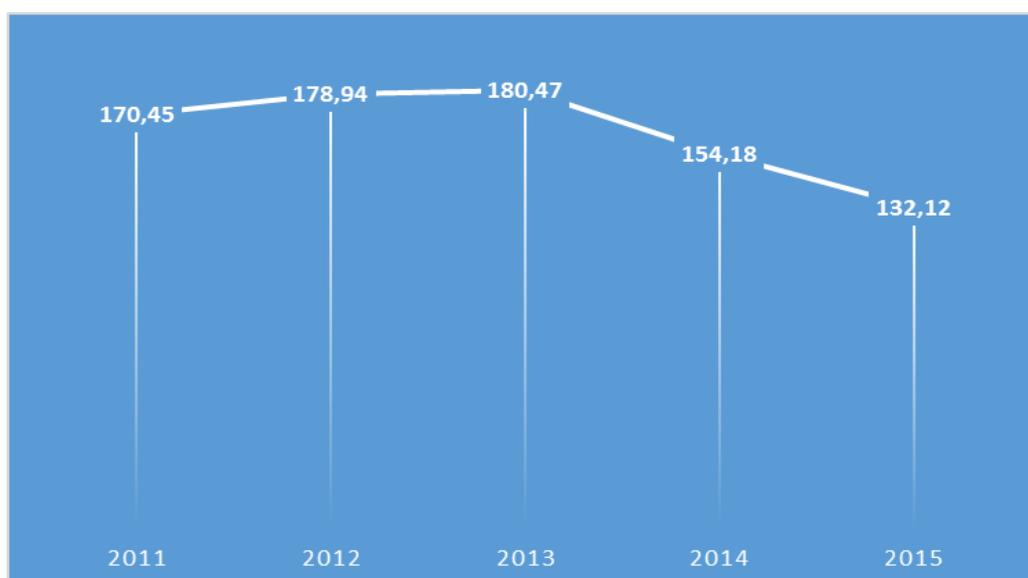
Data debit air sungai berguna untuk mengetahui potensi sekaligus kemungkinan adanya ancaman dari sungai. Potensi itu antara lain, penggunaan debit air sungai untuk pengembangan pertanian dan perkebunan. Sekaligus di sisi lain,

kemungkinan adanya ancaman antara lain berupa bencana banjir jika terdapat debit air sungai yang berlebihan dan tidak terkelola dengan baik.

f. Klimatologi

Kabupaten Paser beriklim tropis basah dengan suhu rata-rata sepanjang tahun adalah sekitar 26°C, sedangkan rata-rata curah hujan mencapai 160 mm per tahun. Didukung kondisi topografi yang beragam, kondisi curah hujan berbeda disetiap daerah. Pada Tahun 2014, rata-rata curah hujan mengalami tingkat curah terendah dalam lima tahun terakhir yaitu 154,18 mm. Sedangkan mempertimbangkan pola curah hujan dalam lima tahun terakhir, rata-rata curah hujan cenderung mengalami penurunan. Lihat grafik 1.

Grafik 1: Rata-rata Curah Hujan per Tahun (mm)



Sumber: Kabupaten Paser dalam Angka 2016

Selain dapat menggambarkan karakter cuaca, curah hujan menentukan kekuatan sumber daya fisik daerah terutama kemampuan untuk mengelola sektor pertanian. Di kecamatan yang memiliki rata-rata curah hujan yang kurang, misalnya di Kecamatan Pasir Belengkong dapat dicarikan alternatif saluran irigasi yang mampu menyuplai kebutuhan lahan pertanian.

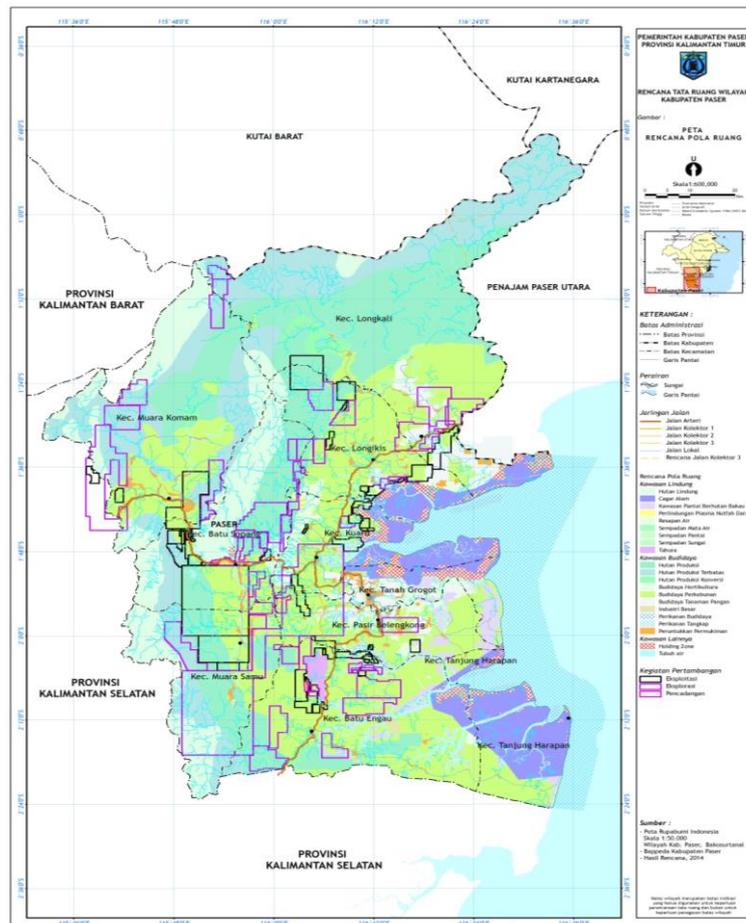
g. Penggunaan Lahan

Pemanfaatan ruang di Kabupaten Paser terbagi menjadi 2 (dua) kawasan, yaitu kawasan non-budidaya dan kawasan budidaya. Untuk kawasan non-budidaya meliputi:

- *Kawasan Lindung*, kawasan ini seluas 116.952 ha terdapat di Kecamatan Muara Komam bagian barat, timur dan selatan, Long Kali bagian timur, Batu Sopang bagian barat dan selatan, dan Long Ikis bagian barat;
- *Kawasan Sempadan Pantai*, kawasan ini sepanjang $\pm 191,93$ km, ditetapkan di sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Batas sempadan dihitung ± 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah daratan;
- *Kawasan Sempadan Sungai*, kawasan ini ditetapkan di sepanjang sungai ± 100 meter di sisi kiri dan kanan sungai besar dan ± 50 meter dari anak sungai.

Sedangkan kawasan budidaya adalah area penggunaan lahan yang dimanfaatkan secara produktif misalnya kawasan produksi hutan, kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non-pertanian. Penjelasan lebih lanjut terkait dengan kawasan ini dapat dielaborasi dalam sub-bab selanjutnya. Peta rencana pola ruang dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5: Peta Rencana Pola Ruang



Sumber: RTRW Kabupaten Paser

a) Penggunaan Lahan Sektor Pertanian

Lahan pertanian khususnya tanaman pangan tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Paser. Jenis tanaman yang cukup ditanam di Kabupaten Paser adalah ubi jalar dan ubi kayu. Selain itu, berbagai macam tanaman sayuran juga banyak ditanam di daerah ini karena terutama didukung oleh iklim yang cocok. Penggunaan lahan untuk budidaya pertanian terbagi dalam tiga kategori sesuai potensi daerah yakni:

Kawasan Sawah, ladang dan palawija. Keberadaan sawah tadah hujan dan irigasi tersebar di Kecamatan Long Kali, Long Ikis, Pasir Belengkong dan Tanah Grogot. Sedangkan tanaman padi ladang banyak ditemukan di Kecamatan Batu Engau, Muara Komam, Muara Samu, Long kali dan Batu Sopang. Tanaman pangan di Kabupaten Paser lebih didominasi komoditas padi, baik padi sawah maupun padi ladang dengan areal pengembangan mencapai kurang lebih 8,923 ha. Disamping itu beberapa kecamatan juga mengembangkan tanaman palawija lainnya seperti jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai dan kacang hijau.

Tabel 5: Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi dan Palawija di Kabupaten Paser 2015

No	Jenis Tanaman	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kw/Ha)
1	Padi Sawah	6.838	6.698	18.642	43,53
2	Padi Ladang	2.085	3.283	6.387	30,05
3	Jagung	302	310	988	30,97
4	Ubi Kayu	89	78	1.145	146,85
5	Ubi Jalar	39	55	529	96,15
6	Kacang Tanah	33	41	55	13,30
7	Kacang Kedele	50	98	148	15,11
8	Kacang Hijau	18	15	17	11,09

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Paser 2015

Secara umum, luas panen padi sawah dan padi ladang terus mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2011 luas panen padi mencapai 9,525 ha, namun pada tahun terakhir luas budidaya pertanian tanaman padi ini berkurang menjadi 9.370 ha. Lihat Tabel 6.

Tabel 6: Luas Panen dan Produksi Padi Kabupaten Paser 2010 - 2015

Tahun	Padi sawah		Padi Ladang	
	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
2015	6.090	26,428	3,280	9,86
2014	6.428	29.488	2.595	7.355
2013	7.240	32.587	3.064	8.512
2012	6.814	27.959	3.399	9.086
2011	6.564	26.336	2.961	8.109

Sumber: Kabupaten Paser dalam Angka 2016

Kawasan Perikanan. Kawasan perikanan tambak tersebar di sekitar kawasan sempadan pantai, tepatnya di Kecamatan Long Kali, Long Ikis, Tanah Grogot, Pasir Belengkong dan Tanjung Harapan dengan penggunaan lahan perikanan adalah budidaya tambak dan kolam air. Lihat Tabel 7.

Tabel 7: Luas Budidaya dan Produksi Tambak dan Kolam 2011-2015

Tahun	Tambak		Kolam	
	Luas Budidaya (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Budidaya (Ha)	Produksi (Ton)
2015	21.411	11.176,80	706	125
2014	20.973	10.429,50	120	43,90
2013	13.932	9.463,70	80	36,10
2012	19.034	9.472,70	147	37,30
2011	19.034	9.454,66	146	36,10

Sumber: Kabupaten Paser dalam Angka 2016

Berdasarkan data diatas terdapat peningkatan luas budidaya tambak dari tahun ke tahun. Walaupun pada 2013 terdapat pengurangan, namun pada 2014 kembali terjadi peningkatan luas tambak. Peningkatan luas lahan budidaya tersebut diikuti dengan produksi tambak, yaitu dengan angka produksi terbesar pada tahun 2015 sebesar 11.176,80 Ton. Sedangkan luas kolam, secara umum terjadi fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2015 terjadi kenaikan produksi yang cukup signifikan mencapai 125 ton dibanding dengan tahun sebelumnya yang hanya berada pada kisaran 43,90 ton. Peningkatan produktivitas budidaya kolam disebabkan adanya perluasan budidaya dari 120 ha menjadi 760 ha pada tahun 2015.

Kawasan Perkebunan seluas ±201.189,33 ha terdiri dari berbagai jenis tanaman berikut:

Tabel 8: Luas Areal Perkebunan Menurut Jenis Tanaman 2015

Jenis Tanaman	Luas Areal (Ha)
Kelapa sawit	182.144,78
Karet	14.168,50
Kelapa dalam	2.840,00
Kopi	1.160,30
Lada	98,25
Kakao	198,00
Lainnya	203,25

Sumber: Kabupaten Paser dalam angka 2016

Dari Tabel 8. di atas, terlihat bahwa kelapa sawit masih merupakan tanaman perkebunan yang memiliki lahan paling luas. Hal ini sekaligus menandakan kelapa sawit masih menjadi komoditas perkebunan favorit di Kabupaten Paser. Kawasan perkebunan ini sebagian peruntukan dan pengelolaannya telah dilimpahkan kepada perusahaan-perusahaan perkebunan.

Tabel 9: Luas Areal Perkebunan rakyat 2015

Jenis Tanaman	Luas Areal (Ha)
Kelapa sawit	71,366.00
Karet	13,709.50
Kelapa dalam	2,840.00
Kopi	1,160.30
Lada	98.25
Kakao	198,00
Lainnya	203.25

Sumber: Kabupaten Paser Dalam Angka 2016

Total area perkebunan yang dikelola masyarakat seluas 86.725,3 ha. Sebagian besar dari luasan tersebut diperuntukkan untuk tanaman kelapa sawit. Hal ini terkait dengan nilai ekonomi kelapa sawit yang tinggi serta perawatan yang relatif mudah.

b) Penggunaan Lahan Sektor Kehutanan

Hutan sebagai paru-paru lingkungan menjadi wilayah suaka yang dilindungi sekaligus sebagian dimanfaatkan untuk sumber produksi. Kawasan hutan lindung tersebar di daerah Gunung Meratus, Gunung Lumut, Sungai Kendilo-Ketam, Hilir Sungai Rawang dan Sungai Samu.

Tabel 10: Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsi 2015

Fungsi Hutan	Luas Kawasan
Hutan konservasi	
• Cagar alam	107.786,93
• Taman hutan raya	3.963
Kawasan budidaya kehutanan	
• Hutan lindung	123.805,23
• Hutan produksi	268.275,83
• Hutan produksi terbatas	176.990,47
Kawasan budidaya non kehutanan	
• Areal penggunaan lain	467.882

Sumber: Kabupaten Paser dalam Angka 2016

Adapun khusus hutan produksi, jenis dan persebarannya adalah sebagai berikut:

- **Kawasan Hutan Produksi Tetap**, tersebar di Kecamatan Batu Sopang bagian tengah, Muara Komam bagian utara, serta Long Ikis bagian utara, dengan luas keseluruhan adalah 268.275,83 ha;
- **Kawasan Hutan Produksi Terbatas**, yaitu kawasan hutan yang ditetapkan sebagai daerah penyangga. Alokasi pemanfaatannya dipertahankan sesuai dengan fungsinya melaluisistem tebang pilih dan tanam. Kawasan ini memiliki luas 176.990,47 ha;
- **Kawasan Hutan Produksi Konversi**, yaitu kawasan yang mempunyai potensi untuk dimanfaatkan bagi pengembangan budidaya pertanian pada umumnya. Kawasan ini tersebar di 8 (delapan) kecamatan dengan luas 504.186,93 ha.

c) Penggunaan Lahan Sektor Pertambangan

Kawasan pertambangan di Kabupaten Paser seluas ±71.000,00 ha, tersebar di Kecamatan Batu Sopang, Tanah Grogot, Pasir Belengkong, Kuaro, Long Ikis dan Batu Engau. Selain untuk kawasan pertambangan batubara juga telah ditetapkan wilayah pertambangan rakyat untuk bahan galian emas dengan luas sekitar 4.958,57 ha, tersebar di Kecamatan Muara Komam dan Kecamatan Batu Sopang. Dari total luas kawasan pertambangan tersebut, sebesar 50,399 ha merupakan kawasan pertambangan milik PT. Kideco Jaya Agung.

d) Penggunaan Lahan Sektor Pariwisata

Kawasan ini merupakan kawasan yang dianggap mempunyai daya tarik tinggi untuk dijadikan objek wisata. Kawasan ini bersifat fleksibel, maksudnya tidak terkait pada batas-batas administrasi ataupun batas lainnya, sehingga kawasan pengembangannya tidak harus didelineasi secara jelas seperti kawasan-kawasan tersebut di atas. Penggunaan lahan untuk sektor pariwisata di Kabupaten Paser setidaknya tersebar dalam 48 obyek wisata. Dari jumlah keseluruhan tersebut, terdapat 10 obyek wisata yang sudah dilakukan pengelolaan oleh pemerintah daerah.

2. Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah ditujukan untuk memacu perkembangan sosial ekonomi serta mengurangi kesenjangan wilayah dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Setidaknya pengembangan wilayah di Kabupaten Paser dapat mengakomodasi tiga komponen yaitu terkait dengan aktivitas manusia, ruang beradaptasi serta sarana komunikasi dan transportasi (Chapin, 2005).

Dari segi konstelasi regional, Kabupaten Paser berada di sebelah Selatan Provinsi Kalimantan Timur yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Timur dengan Provinsi Kalimantan Selatan. Kota Tanah Grogot berjarak lebih kurang dari 145 km dari Balikpapan atau 260 km dari Ibukota Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda. Sarana penghubung dua provinsi tersebut adalah jalan nasional yang selalu dilewati sarana transportasi darat yang menghubungkan antar wilayah di Kalimantan.

Pada bagian timur Kabupaten Paser berhadapan langsung dengan Selat Makassar, yang memiliki prospek dan fungsi penting sebagai jalur alternatif pelayaran internasional apalagi dukungan prioritas kebijakan nasional terkait dengan peningkatan fungsi laut sebagai perwujudan semangat maritim.

3. Kawasan rawan Bencana

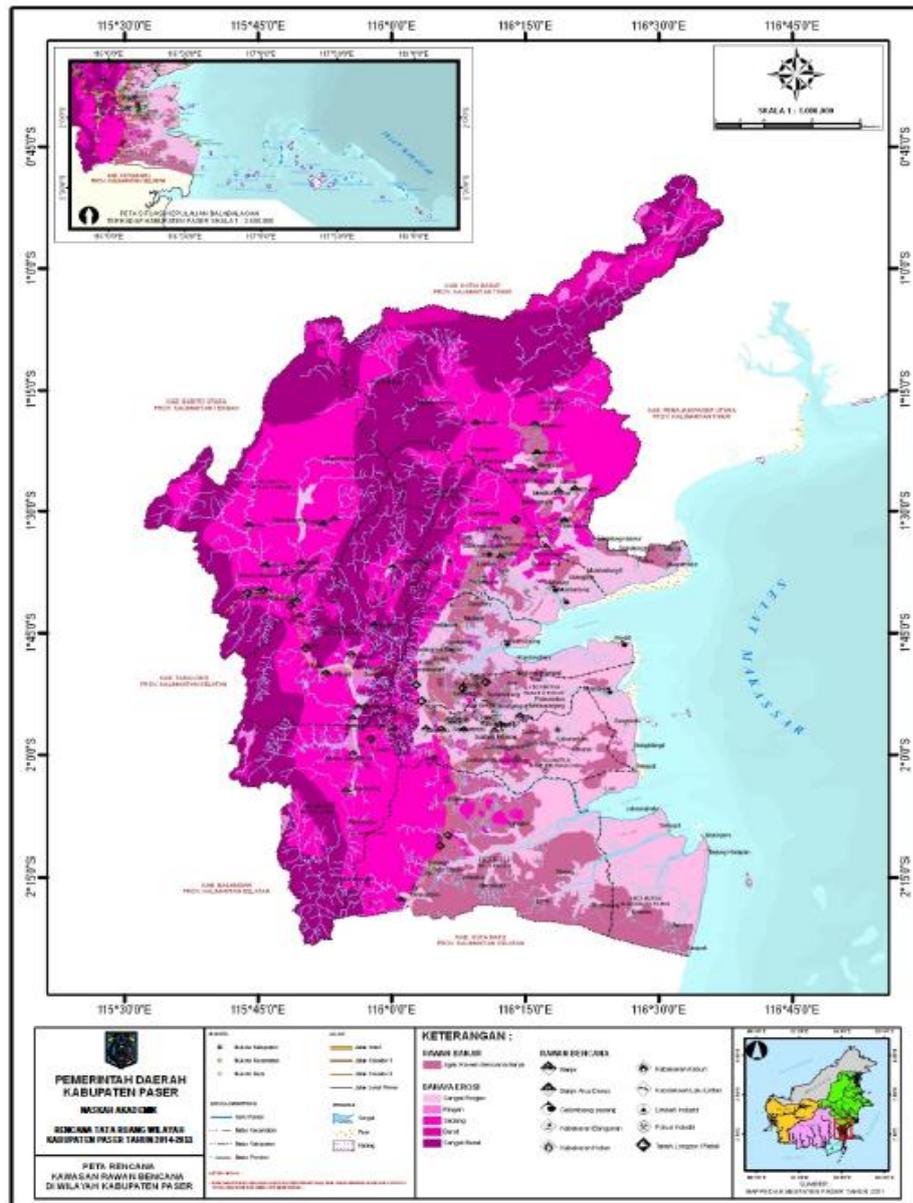
Perlindungan terhadap resiko bencana ditujukan untuk melindungi warga dan lingkungannya dari kerusakan yang ditimbulkan oleh fenomena alam atau aktivitas manusia. Di wilayah Kabupaten Paser, terdapat beberapa identifikasi terkait dengan rawan bencana yaitu bencana banjir, tanah longsor, gelombang pasang, angin topan, kebakaran, gempa dan kekeringan. Lihat Tabel 11.

Tabel 11: Jenis dan daerah Rawan Bencana di Kabupaten Paser

No	Rawan Bencana	Kecamatan Rawan Bencana
1	Banjir	Long Kali, Long Ikis, Kuaro, Tanah Grogot, Pasir Belengkong, Batu Engau, dan Tanjung Harapan
2	Tanah Longsor (gerakan tanah kerentanan tinggi)	Batu Sopang, Long Ikis, Long Kali, Muara komam, Pasir Belengkong dan Tanung harapan
3	Gelombang Pasang	Kawasan yang berhadapan dengan laut
4	Kebakaran	Long Kali, Long Ikis, Kuaro, Tanah Grogot, Batu Sopang, Pasir Belengkong dan Batu Engau

Sumber: RTRW Kabupaten Paser 2012

Gambar 6: Peta Rawan Bencana Kabupaten Paser



Sumber RTRW Kabupaten Paser 2012

4. Demografi

Selain sebagai subjek dalam proses pembangunan, penduduk merupakan tujuan bagi pembangunan itu sendiri. Itu sebabnya analisis kependudukan menentukan berbagai keputusan selama perumusan perencanaan pembangunan daerah.

a. Jumlah Penduduk

Tingginya laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Kalimantan Timur, juga terjadi di Kabupaten Paser yang tampak dalam berbagai fenomena kependudukan termasuk meningkatnya jumlah penduduk, laju pertumbuhan, kepadatan penduduk yang terkonsentrasi di beberapa titik strategis di Kabupaten Paser. Secara gradual, jumlah penduduk di Kabupaten Paser mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan dalam 5 tahun terakhir sebesar 2,54%. Hal tersebut memberi dasar dan gambaran yang semakin jelas tentang meningkatnya kepadatan penduduk setiap tahun. Lihat Tabel 2.12.

Tabel 12: Jumlah Penduduk Kabupaten Paser

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Penduduk	237.783	244.111	249.991	256.175	262.301
2	Komposisi menurut Jenis Kelamin:					
	Laki-laki	126.217	129.680	132.722	135.925	139.219
	Perempuan	111.566	114.431	117.269	120.250	123.082
3	Pertumbuhan(%)	2,63	2,66	2,41	2,47	2,39
4	Tingkat Kepadatan (km ²)		21,04	21,54	22,08	22,60

Sumber : Kabupaten Paser dalam Angka 2016

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa laju pertumbuhan penduduk bersifat fluktuatif, sedangkan tingkat kepadatan penduduk selalu naik. Penduduk sebagai motor sekaligus tujuan pembangunan itu sendiri perlu dipantau, hingga pada titik tertentu perlu dikendalikan.

b. Struktur Penduduk

Sampai saat ini Kabupaten Paser memiliki karakteristik piramida penduduk melebar (piramida muda) yang berarti kelompok balita dan remaja masih sangat besar. Gambaran dari karakteristik penduduk ini satu sisi menyimpan potensi usia produktif yang tinggi, sedangkan di sisi lain menanggung rasio ketergantungan

(dependency ratio) usia tidak produktif yang tinggi pula, sebagaimana dapat dilihat dalam Table 13.

Tabel 13: Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur 2015

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 -- 4	14.119	13.445	27.564
5 -- 9	13.490	12.512	26.002
10 -- 14	12.799	12.180	24.396
15 -- 19	12.104	11.076	24.979
20 -- 24	12.771	11.269	24.040
25 -- 29	13.025	11.281	24.306
30 -- 34	12.796	11.038	23.834
35 -- 39	11.719	9.914	21.633
40 -- 44	10.185	8.963	19.148
45 -- 49	8.758	7.115	15.873
50 -- 54	6.357	5.227	11.584
55 -- 59	4.440	3.295	7.735
60 +	6.360	5.509	11.869

Sumber: Kabupaten Paser dalam angka 2016

Struktur penduduk penting untuk diketahui sebagai bahan menentukan prioritas program dalam memaksimalkan penyediaan layanan dasar dan ketenagakerjaan. Berdasarkan tabel di atas, Kabupaten Paser memiliki penduduk usia sekolah dan usia produktif yang tinggi. Dengan demikian, terdapat implikasi terhadap kebijakan penyediaan layanan pendidikan yang memadai sekaligus didukung penyediaan lapangan kerja segala sektor.

Dari sisi rasio ketergantungan (dependency ratio) pada tahun 2015, 100 kelompok umur produktif (15-60 tahun) Kabupaten Paser menanggung kurang lebih 51,89 penduduk tidak produktif (0-14 dan 60+ tahun). Capaian tersebut sedikit lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu 49,61. Lihat Tabel 14.

Tabel 14: Angka Ketergantungan di Kabupaten Paser 2011 - 2015

Tahun	Angka Ketergantungan
2011	50,98
2012	51,98
2013	52,09
2014	49,61
2015	51,89

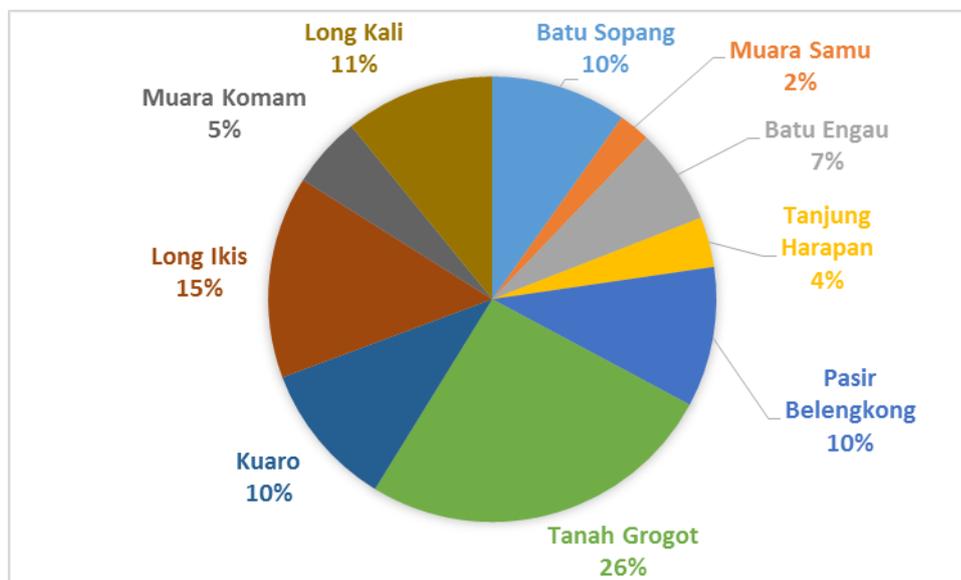
Sumber: Kabupaten Paser dalam Angka 2011 - 2015

Dari tabel di atas, terlihat angka ketergantungan penduduk mengalami penurunan pada tahun 2014. Namun keseluruhan angka ketergantungan penduduk dalam jangka waktu lima tahun terakhir tersebut tetap wajib diperhatikan untuk memproyeksikan kemampuan penduduk produktif. Kabupaten Paser sebagai salah satu daerah dengan percepatan jumlah penduduk yang tinggi harus diimbangi persiapan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan kemudian diikuti penyiapan lapangan kerja yang memadai.

c. Distribusi Penduduk

Persebaran penduduk yang tidak merata perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Saat ini, distribusi penduduk di Kabupaten Paser masih belum merata. Hal tersebut dibuktikan dengan konsentrasi penduduk yang terpusat di Kecamatan Tanah Grogot sebanyak 26% dari total jumlah penduduk. Padahal dilihat dari luas wilayah, Tanah Grogot merukan daerah dengan luas daerah terkecil. Lihat Diagram1.

Diagram 1: Distribusi Penduduk di Kabupaten Paser Tahun 2015



Sumber: Kabupaten Paser dalam angka 2016

Dari diagram di atas, terlihat bahwa distribusi penduduk masih terpusat di ibu kota kabupaten, tepatnya di Kecamatan Tanah Grogot. Kepadatan dan jumlah penduduk yang masih terpusat ini menjadi pola umum di berbagai daerah, yaitu konsentrasi penduduk mengikuti pusat pertumbuhan dan pusat pemerintahan. Konsentrasi penduduk paling banyak setelah Tanah Grogot adalah di Kecamatan Long Ikis, Long kali, dan Kuaro. Ketiga kecamatan tersebut, walaupun terletak cukup jauh dari pusat

pemerintahan daerah, namun terletak di jalan poros utama kalimantan atau antara Tanah Grogot dengan Balikpapan, sehingga aktivitas perekonomian tumbuh cukup pesat. Sedangkan kecamatan yang memiliki distribusi penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Tanjung Harapan. Dari pola distribusi penduduk tersebut dan dipengaruhi luas wilayah kecamatan maka membentuk kepadatan penduduk, sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 15.

Tabel 15: Rata-Rata Banyaknya Penduduk Tiap Kilometer Persegi di Kabupaten Paser Berdasarkan Kecamatan, 2015

Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Jumlah Penduduk	Rata-Rata Penduduk/Km2
Batu Sopang	1.111,38	25.740	23,16
Muara Samu	855,25	5964	6,97
Batu Engau	714,05	18.225	25,52
Tanjung Harapan	1.507,26	9.562	6,34
Pasir Belengkong	990,11	26.685	26,95
Tanah Grogot	335,58	67.981	202,58
Kuaro	747,30	27.592	36,92
Long Ikis	1.204,40	38.569	32,02
Muara Komam	1.753,40	13.571	7,74
Long Kali	2.385,39	28.412	11,91
Total Kabupaten Paser			
2015	11.603,94	262.301	22,60
2014	11.603,94	256.175	22,08
2013	11.603,94	249.991	21,54

Sumber: Kabupaten Paser dalam Angka 2016

Persebaran penduduk yang tidak merata disebabkan beberapa faktor, di antaranya adalah ketersediaan fasilitas publik atau potensi wilayah yang dimiliki. Kondisi penyebaran ini tidak menguntungkan bagi pemerataan pembangunan daerah. Dengan adanya perbedaan kepadatan, maka pola penyebaran penduduk yang terjadi juga mengikuti pola penduduk yang mengelompok pada tempat-tempat tertentu. Penduduk banyak dijumpai pada daerah-daerah yang mempunyai aktivitas ekonomi yang tinggi, tersediannya sarana dan prasarana yang memadai, dan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik. Sebaliknya kepadatan penduduk yang rendah pada umumnya terdapat di daerah-daerah yang mempunyai aktifitas ekonomi yang relatif masih rendah dan keadaan sarana transportasi yang masih terbatas.

B. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Dalam kerangka rencana pembangunan daerah, kesejahteraan masyarakat merupakan proses sekaligus tujuan dari pelaksanaan pembangunan. Untuk itu berbagai aspek terkait kesejahteraan masyarakat perlu dipahami, terutama terkait dengan dimensi kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

PDRB menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Penghitungannya berasal dari jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu. Oleh karena itu, PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu.

Kemampuan pemerintah Kabupaten Paser dalam mengelola sumber daya ekonomi yang dimilikinya terus mengalami peningkatan. Ini bisa digambarkan dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku yang pada tahun 2013 sebesar 36,9 triliun menjadi 39,6 triliun pada tahun 2014. Secara lengkap dapat dilihat dalam Tabel 16.

Tabel 16: PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Paser 2011-2015 (Juta Rupiah)

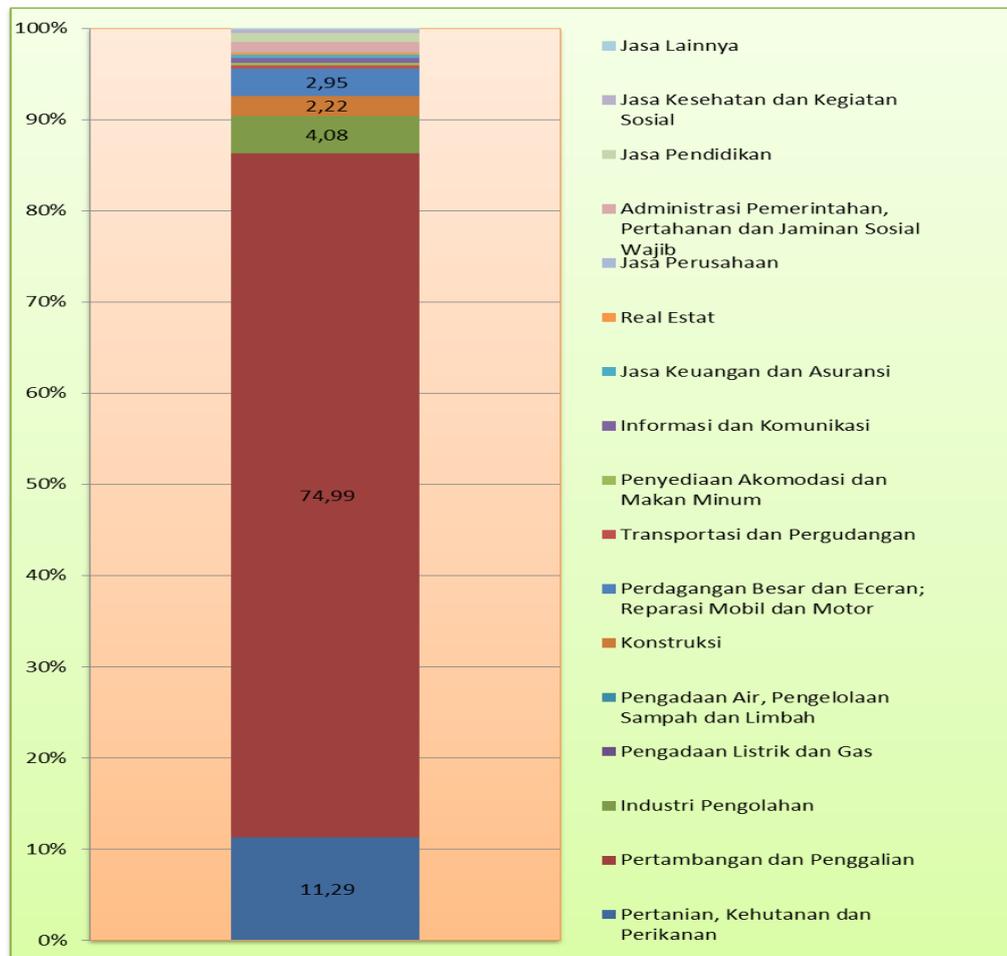
Tahun	PDRB ADHB		PDRB ADHK 2010	
	Dengan Pertambahan Batubara	Tanpa Pertambahan Batubara	Dengan Pertambahan Batubara	Tanpa Pertambahan Batubara
2011	33.744.787,77	8.303.733,33	29.383.234,35	7.728.230,07
2012	35.093.421,58	9.147.545,64	31.160.226,26	8.290.395,84
2013	36.916.266,99	9.757.892,17	33.281.215,38	8.686.387,78
2014	39.249.886,15	11.140.598,30	34.783.336,43	9.357.759,26
2015	38.274.547,11	11.886.173,93	34.446.789,62	9.794.353,40

Sumber : Kabupaten Paser dalam Angka 2016

Namun, besaran nilai PDRB Kabupaten Paser masih disebabkan oleh besarnya nilai kontribusi yang diberikan oleh sektor pertambangan non-migas, yaitu sektor pertambangan batubara. Sedangkan jika dilihat PDRB Kabupaten Paser sesungguhnya tanpa sektor pertambangan batubara tersebut, maka PDRB ADHB Kabupaten Paser pada tahun 2015 hanya sebesar 11,88 triliun, sedangkan untuk PDRB ADHK memiliki nominal lebih kecil, yaitu 9,80 triliun.

Penjelasan diatas dibuktikan dengan gambaran kontribusi sembilan sektor ekonomi terhadap PDRB di Kabupaten Paser. Kontribusi dan peran sembilan sektor tersebut memberi gambaran struktur ekonomi serta pergeserannya dalam jangka tertentu. Dalam jangka lima tahun terakhir, struktur ekonomi Kabupaten Paser masih didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian. Lihat Diagram 2.

Diagram 2: Kontribusi Nilai Tambah Bruto Sektor ADHB terhadap PDRB Kabupaten Paser Tahun 2014 (%)



Sumber : Kabupaten Paser dalam Angka 2015

Diagram di atas menunjukkan bahwa kontribusi sektor pertambangan masih jauh di atas sektor lainnya termasuk pertanian yang justru menyerap banyak tenaga kerja. Secara lebih detail, tingkat kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 17.

Tabel 17: Kontribusi Masing-masing Sektor Terhadap PDRB

Sektor	2011		2012		2013		2014		2015	
	HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK
Pertanian, kehutanan, perikanan	9,10	9,44	9,48	9,65	9,30	9,34	10,51	9,86	11,31	-
Pertambangan dan penggalian	79,15	77,72	77,94	77,43	77,70	77,85	75,79	77,02	73,59	-
Industri pengolahan	3,58	3,81	3,84	3,89	3,80	3,73	3,99	3,78	4,28	-
Pengadaan listrik dan gas	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,02	0,01	0,02	0,02	-
Pengadaan air, pengolahan sampah, limbah	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	-
Konstruksi	1,97	2,17	2,07	2,12	2,19	2,09	2,25	2,09	2,40	-
Perdagangan besar, eceran, reparasi mobil	2,60	2,90	2,80	2,90	2,87	2,95	2,98	2,92	3,36	-
Transportasi dan pergudangan	0,35	0,38	0,37	0,39	0,39	0,39	0,41	0,39	0,46	-
Penyediaan akomodasi dan makan-minum	0,20	0,21	0,22	0,21	0,23	0,22	0,24	0,22	0,26	-
Informasi dan komunikasi	0,50	0,57	0,52	0,57	0,53	0,58	0,55	0,58	0,61	-
Jasa keuangan dan asuransi	0,28	0,30	0,33	0,30	0,35	0,32	0,35	0,31	0,39	-
Real estat	0,25	0,28	0,27	0,28	0,28	0,28	0,29	0,28	0,32	-
Jasa perusahaan	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,04	0,06	0,05	0,06	-
Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial	0,84	0,92	0,88	0,89	0,92	0,91	1,07	0,98	1,23	-
Jasa pendidikan	0,71	0,78	0,79	0,79	0,90	0,87	0,99	0,97	1,14	-
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	0,27	0,29	0,28	0,28	0,30	0,29	0,33	0,31	0,37	-
Jasa lainnya	0,13	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,16	0,15	0,18	-

Sumber: Kabupaten Paser dalam Angka 2016

Apabila diperhatikan, kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap pembentukan nilai PDRB dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Hal ini dapat dilihat dalam satu tahun terakhir, ketika PDRB sektor pertambangan dan penggalian yang mengalami penurunan dari tahun 2015. Hal tersebut dikarenakan penjualan komoditas

batubara dihargai dengan mata uang asing, sehingga fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing sangat mempengaruhi nilai tambah bruto sektor pertambangan dan penggalian. Selain itu, pengurangan produksi dan anjloknya komoditas batubara dipasaran internasional juga berdampak pada penurunan kontribusi dari sektor pertambangan dan penggalian.

Selain berbagai indikator di atas, angka kemiskinan merupakan salah satu indikator kunci yang mampu menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Naik atau turunnya persentase angka kemiskinan sangat dipengaruhi oleh berbagai kebijakan pemerintah di segala bidang pembangunan. Menurut sebuah data, angka kemiskinan di Kabupaten Paser tidak menunjukkan pergerakan yang berarti. Dari tahun 2012 hingga 2013 terjadi kenaikan angka kemiskinan sebesar 0,30%. Hal ini diikuti dengan penurunan sebesar 0,08% pada tahun 2014. Kecilnya pergerakan angka kemiskinan ini mengindikasikan bahwa pemerintah perlu meningkatkan inovasi kebijakan pengentasan kemiskinan. Lihat Tabel 18.

Tabel 18: Persentase Angka Kemiskinan di Kabupaten Paser

Tahun	Persentase angka kemiskinan
2012	7,64%
2013	7,94%
2014	7,86 %
2015	-

Sumber: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)

2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Dalam melihat kesejahteraan masyarakat secara komprehensif, selain kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan sosial juga merupakan dimensi yang sangat penting. Hal ini karena kesejahteraan sosial sekaligus sebagai representasi dari pembangunan kualitas sumber daya manusia daerah. Dimensi kesejahteraan sosial terdiri dari aspek pendidikan, kesehatan, dan pertanian.

a. Pendidikan

Dalam tujuan pembangunan berkelanjutan, pendidikan merupakan elemen penting perencanaan agar individu atau masyarakat mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta memperluas wawasannya. Dengan dasar pendidikan yang kuat, individu atau masyarakat diharapkan mampu meningkatkan partisipasinya dalam

pembangunan dan mampu memberdayakan diri dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga dapat hidup sejahtera.

Namun, dari data terakhir atau tepatnya pada tahun 2015, penduduk Kabupaten Paser umur 10 tahun ke atas, paling besar adalah masyarakat yang berpendidikan dasar, yaitu sebesar 48,90%. Adapaun masyarakat dengan pendidikan diploma atau sarjana, masih merupakan kelompok masyarakat yang mempunyai jumlah paling sedikit, hanya 4,57%. Dengan realitas ini, pendidikan masih menjadi prioritas penting dalam perencanaan pembangunan. Lihat Tabel 19.

Tabel 19: Persentase Penduduk Kabupaten Paser Usia 10 Tahun ke atas Menurut Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan Tahun 2015

Pendidikan Terakhir yang ditamatkan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Tidak punya ijazah	23,96	30,12	26,78
SD	29,27	32,73	30,86
SLTP umum/kejuruan	18,55	17,43	18,04
SLTA umum/kejuruan	23,33	15,54	19,76
Diploma/sarjana	4,89	4,19	4,57
Jumlah	100	100	100

Sumber: Kabupaten Paser dalam Angka 2016

Apabila dibandingkan dengan capaian Provinsi Kalimantan Timur, kondisi pendidikan di Kabupaten Paser masih tertinggal. Sebagai contoh dalam hal rata-rata lama sekolah, dari sepuluh kabupaten dan kota di Kalimantan Timur, Kabupaten Paser menempati urutan nomor dua dari bawah atau satu tingkat diatas Kabupaten Penajam Paser Utara. Tahun 2015, rata-rata lama sekolah di Kalimantan Timur sebesar 9,39 tahun sedangkan di Kabupaten Paser hanya mencapai 8,51 tahun.

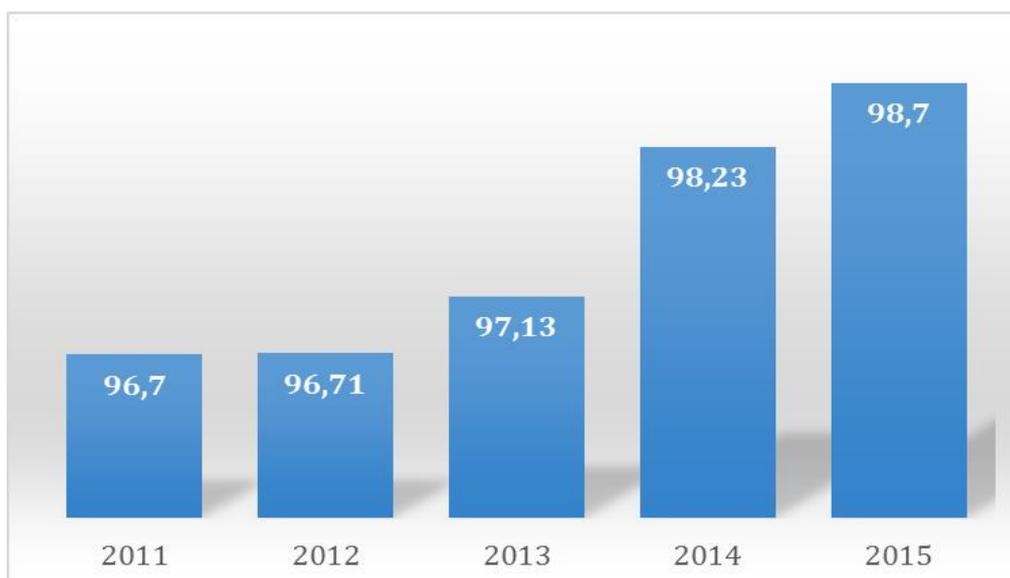
Tabel 20: Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Paser 2011 - 2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Rata-rata Lama sekolah Penduduk 15 Tahun ke Atas	8,08	8,1	8,35	7,99	8,51

Sumber : BPS Kabupaten Paser

Untuk indikator angka melek huruf, meskipun capaiannya berada di atas angka provinsi yaitu 98,70% di Kabupaten Paser berbanding 98,64% di Kalimantan Timur tetapi angka 1.30% yang masih buta huruf perlu mendapat perhatian untuk penuntasannya.

Grafik 2: Huruf Penduduk 15 Tahun Ke Atas Di Kabupaten Paser 2011-2015



Sumber: Kabupaten Paser dalam Angka 2016

Nilai rata-rata APM pada tabel di bawah juga menunjukkan bahwa angka rata-rata APM di Kabupaten Paser belum menggambarkan kemajuan yang signifikan, yaitu 72,47%. Capaian APM SMP di Kabupaten Paser tahun 2015 sebesar 69% masih jauh dari angka 100% sebagaimana yang disyaratkan oleh target MDGs. APM SMP Paser yang masih berada pada kisaran angka 70% merupakan salah satu persoalan pendidikan yang harus segera diatasi. Demikian halnya dengan angka partisipasi pada jenjang SMA sederajat yang hanya mencapai 52,50%. Capaian yang masih jauh dari target adalah pada indikator APM jenjang sekolah menengah. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pendidikan di tingkat sekolah menengah perlu diperhatikan pemerintah apalagi dengan adanya peningkatan dukungan dari pemerintah nasional melalui program wajib belajar 12 tahun.

Tabel 21: Angka Partisipasi Murni 2011-2015

APM	2011	2012	2013	2014	2015
SD	90,11	96,40	97,97	97,79	95,90
SMP	69,29	73,74	74,25	66,02	69,00
SMA	47,32	52,18	53,79	43,65	52,50
Rata-rata APM	69,15	71,37	69,15	69,15	72,47

Sumber: Kabupaten Paser dalam Angka 2016

b. Kesehatan

Kondisi kesehatan menggambarkan salah satu tingkat kesejahteraan suatu masyarakat secara umum. Menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional pada Tahun 2015, Angka Harapan Hidup penduduk Kabupaten Paser sebesar 74 tahun. Apabila disandingkan dengan capaian Provinsi Kalimantan Timur, angka ini relatif lebih baik. Lihat Tabel 22.

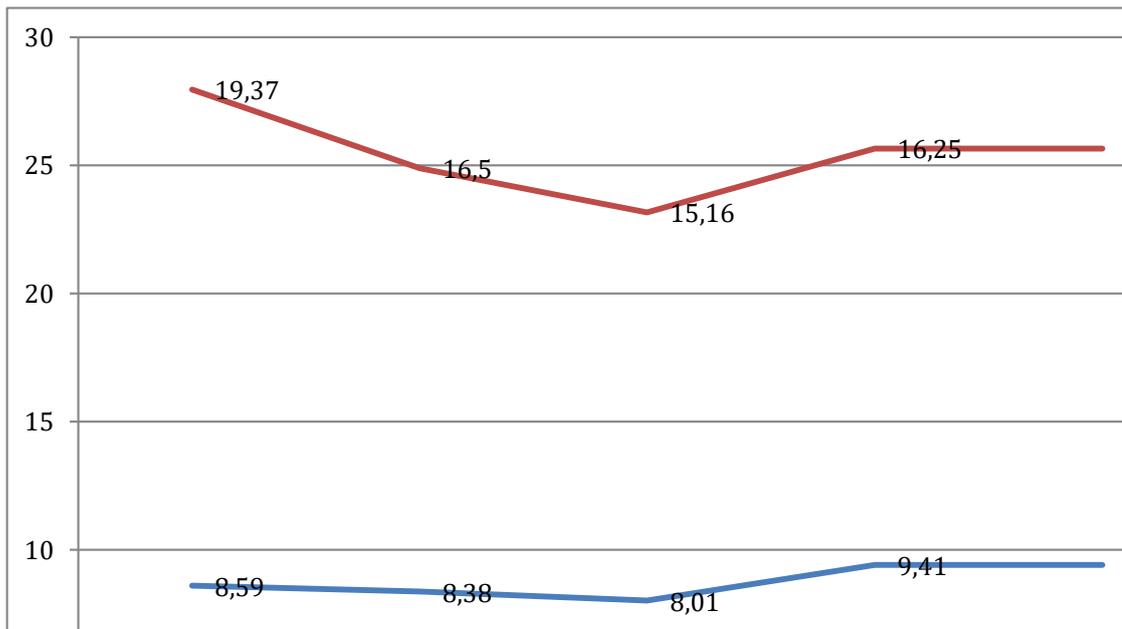
**Tabel 22: Angka Harapan Hidup 2011-2015
Kabupaten Paser dan Kalimantan Timur**

Daerah	Angka Harapan Hidup (Tahun)				
	2011	2012	2013	2014	2015
Kabupaten Paser	71,83	71,85	71,86	71,88	74,00
Provinsi Kalimantan Timur	71,40	71,61	71,78	73,62	73,65

Sumber: BPS Kabupaten Paser dan BPS Kalimantan Timur 2015

Berdasarkan data di atas, angka harapan hidup penduduk Kabupaten Paser terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada sisi sebaliknya, angka kesakitan juga mengalami penurunan dalam kurun waktu 2011-2015. Lihat Grafik 3.

**Grafik 3: Perkembangan Angka Keluhan Kesehatan dan Angka Kesakitan
Penduduk di Kabupaten Paser 2011-2015**



Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Paser 2015

Penduduk di Kabupaten Paser cenderung mengalami peningkatan angka angka kesakitan. Pada Tahun 2015 angka kesakitan sebesar 9,41% sedikit naik dari tahun 2013 yang berada pada angka 8,01%. Sedangkan untuk angka keluhan kesehatan

menunjukkan tren penurunan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2011, angka keluhan kesakitan mencapai sebesar 19,37%. Angka ini bergerak turun sehingga pada tahun 2016 menjadi 16,25%. Turunnya angka keluhan kesehatan tersebut dapat dipengaruhi beberapa faktor terutama pada penyediaan layanan kesehatan, kondisi lingkungan hingga pola hidup masyarakat.

c. *Pertanahan*

Bidang pertanahan merupakan bagian penting dalam pembangunan daerah dan secara khusus berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini karena pertanahan terkait dengan aset masyarakat maupun pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk berbagai hal dalam memenuhi kebutuhan hidup, yaitu antara lain sebagai tempat pemukiman, sebagai sarana produktivitas masyarakat, hingga sarana bagi pemerintah daerah untuk menjalankan pembangunan dan melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Pada bagian ini menyajikan data mengenai berbagai hal terkait pertanahan, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 2.21.

Tabel 23: Banyaknya Permohonan dan Penyelesaian Tentang Pertanahan di Kabupaten Paser 2015

Uraian	Permohonan	Diselesaikan	Sisa
Pengukuran	320	314	6
Peta bidang	202	156	46
Kutipan	0	0	0
SKPT	58	47	11
Sertifikat pemberian hak atas tanah	195	54	141
Sertifikat peralihan hak atas tanah	511	507	4
Sertifikat tanggungan kredit verban dan hipotik	569	565	4

Sumber: Kabupaten Paser dalam Angka 2016

3. Fokus Seni, Budaya dan Olahraga

Dalam pembangunan daerah, bidang seni, budaya dan olahraga merupakan bidang strategis yang menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Hal ini terutama terkait tujuan untuk melestarikan dan mengembangkan seni budaya lokal, serta keberlanjutan pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga dalam berbagai pertandingan atau event olahraga yang diikuti oleh daerah.

Tabel 24: Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan, Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya, Serta Event Olahraga

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	14	14	14	14	5
Penyelenggaraan festival seni dan budaya	2	2	2	2	2
Kegiatan olahraga	24	24	20	2	2

Sumber: LKPJ akhir masa jabatan bupati 2010-2015

Penyelenggaraan festival seni dan budaya Paser mempunyai tujuan untuk melestarikan dan memberi ruang aktualisasi bagi seni dan budaya tradisi, serta tidak kalah penting adalah meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Paser. Terkait pelestarian benda cagar budaya, salah satu upaya pemerintah daerah adalah pelestarian Museum Sadurengas, yang juga menjadi salah satu destinasi wisata menarik di Paser.

C. ASPEK PELAYANAN UMUM

Pembangunan yang mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat tidak bisa dilepaskan dari aspek pelayanan umum. Kualitas pelayanan umum menentukan tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan dari pembangunan daerah. Pelayanan umum terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non-pelayanan dasar, dan urusan pilihan.

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Urusan wajib pelayanan dasar merupakan urusan strategis yang terkait kebutuhan dasar warga negara. Sebagai kebutuhan dasar, urusan ini wajib disediakan dan ditingkatkan kualitasnya secara berkelanjutan. Urusan ini terdiri dari urusan pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; serta urusan sosial.

a. Pendidikan

Jumlah dan laju penduduk yang besar merupakan aset bagi pembangunan apabila diimbangi dengan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang baik. Oleh sebab itu, penanganan kependudukan tidak hanya diarahkan pada upaya penekanan laju pertumbuhan, tetapi juga dititikberatkan pada peningkatan sumber daya manusianya. Usaha peningkatan sumber daya manusia secara sistemik dapat diwujudkan salah satunya melalui pendidikan.

Pada tahun 2019, capaian APS (Angka Partisipasi Sekolah) tingkat SD/MI Kabupaten Paser sebesar 99,98%. Itu artinya meskipun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, partisipasi masyarakat pada umur SD sangat tinggi terhadap pendidikan. Secara umum, nilai APS pada jenjang pendidikan SD mengalami penurunan sebesar 0,51% dan pada jenjang pendidikan SMP terjadi penurunan sebesar 2,88%. Sebaliknya pada jenjang pendidikan SMA mengalami peningkatan sebesar 8,26%. Lihat Tabel 25.

Tabel 25: Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Paser Menurut Kelompok Umur

Usia Sekolah	2011	2012	2013	2014	2015
7 - 12	97,15	98,09	99,73	99,49	98,98
13 - 15	91,85	98,75	97,12	99,40	96,52
16 - 18	66,84	65,09	69,62	73,97	82,23

Sumber: IPM 2015

Berdasarkan data di atas, APS (Angka Partisipasi Sekolah) pada sekolah menengah masih sangat kurang. Masih tergolong rendahnya tingkat partisipasi dan pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Paser disebabkan oleh beberapa faktor, seperti persoalan akses dari sisi jarak tempuh yang cukup jauh terutama untuk pendidikan tingkat SMP dan SMA sebagaimana ditemukan di kawasan pesisir dan pedalaman. Faktor lain yang menjadi persoalan penghambat partisipasi pendidikan adalah faktor kultural dan kesadaran masyarakat dalam menempuh jenjang pendidikan.

Intervensi mendasar terkait dengan dukungan pendidikan adalah tersedianya fasilitas pendukung yang memadai. Capaian APS diatas tidak terlepas dari adanya dukungan fasilitas pendidikan yang memadai termasuk jumlah sekolah, murid, dan guru. Pada tahun 2015, jumlah sekolah semakin bertambah terutama untuk tingkat SMP dan SMA.

**Tabel 26: Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru di Kabupaten Paser
Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2011-2015**

Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
SD/MI/SDLB					
Jumlah Sekolah	225	225	227	230	232
Murid	32.847	34.033	33.242	34,607	34,738
Guru	2.457	3.115	2.335	3,061	2,976
Rasio Murid Sekolah	145,99	151,26	146,44	150,47	149,73
Rasio Murid Guru	13,37	10,93	14,24	14,22	11,67
SMP/MTS/SMPLB					
Jumlah Sekolah	72	75	77	83	85
Murid	11.294	11.439	12.427	13,312	13,199
Guru	834	985	999	995	1,285
Rasio Murid Sekolah	156,86	152,52	161,39	160,39	255,282
Rasio Murid Guru	13,51	11,61	12,44	13,38	10,27
SLTA/SMK/MA					
Jumlah Sekolah	36	36	38	41	42
Murid	8.283	8.040	10.319	9,309	9,137
Guru	736	916	913	735	964
Rasio Murid Sekolah	230,08	223,33	266,29	227,05	217,55
Rasio Murid Guru	11,25	8,78	11,08	12,67	9,47

Sumber: Kabupaten Paser Dalam Angka 2016

Pada level SMP dan SMA, jumlah guru mengalami kenaikan yang signifikan terutama sejak diprioritaskan program wajib belajar 9 tahun, yaitu dari tahun 2014 masing-masing sebanyak 995 dan 735 orang menjadi 1.285 dan 964 orang pada tahun 2015. Sebaliknya pada level SD mengalami penurunan jumlah guru, disamping rasio ketersediaan guru dan murid yang sudah membaik, rasionalisasi ketersediaan guru tidak hanya seputar rasio jumlah semata tetapi lebih ditekankan pada distribusi yang proporsional.

Berdasarkan dokumen capaian MDGs Kabupaten Paser 2014, sektor pendidikan merupakan area pembangunan yang masih tertinggal dari target yang ditetapkan. Sebagian besar ketercapaian target bidang pendidikan masih berkisar pada 90% dari target 100% seperti pada indikator APM (Angka Partisipasi Murni) tingkat SD, AMH (Angka Melek Huruf) usia 15-24 tahun dan APS (Angka Putus Sekolah) tingkat SD maupun SMP. Terdapat perubahan angka statistik sektor pendidikan yang mengalami kenaikan tetapi tidak signifikan. APM SD relatif mengalami kenaikan

yang konsisten, kecuali pada tahun 2012 yang mengalami kenaikan sampai 4% dibandingkan APM pada tahun 2011. Sementara capaian yang cukup bagus adalah pada angka penurunan putus sekolah jenjang SMP. Angka putus sekolah SMP mampu ditekan hingga 10% dalam kurun waktu 4 tahun.

b. Kesehatan

Di samping pelayanan publik di bidang pendidikan, bidang kesehatan juga perlu mendapatkan gambaran yang proporsional dari sisi ketersediaan, penyebaran, dan kualitas pelayanan. Dari sisi ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, pemerintah daerah Kabupaten Paser telah memiliki RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) sebanyak 1 unit, puskesmas sebanyak 17 unit, puskesmas pembantu sebanyak 104 unit, puskesmas keliling sebanyak 26 unit, klinik swasta sebanyak 20 unit dan tenaga kesehatan sebanyak 969 orang pada tahun 2013. Pada tahun 2015, terjadi peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan pemerintah daerah Kabupaten Paser, yaitu Rumah Sakit dan Puskesmas masing-masing bertambah 1 unit menjadi 2 unit dan 18 unit setelah dioperasikannya Rumah Sakit Pratama Kerang dan Puskesmas Sebakung Taka.

Tabel 27: Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Paser dirinci Berdasarkan Kecamatan, Tahun 2011-2015

Kecamatan	Rumah Sakit	Puskesmas	Pustu	Pusling/ Ambulance	Klinik swasta
Batu Sopang	-	1	6	2	15
Muara Samu	-	1	3	2	0
Tanjung Harapan	-	1	6	2	0
Batu Engau	1	1	12	2	0
Pasir Blengkong	-	3	7	5	1
Tanah Grogot	1	1	10	2	0
Kuaro	-	2	10	2	0
Long Ikis	-	3	17	4	3
Muara Komam	-	1	7	2	0
Long Kali	-	2	18	4	2
2015	2	18	96	27	21
2014	1	17	118	12	26
2013	1	17	104	26	20
2012	1	17	95	24	17
2011	-	-	-	-	-

Sumber: Kabupaten Paser dalam Angka 2016

Ketersediaan tenaga kesehatan juga terus bertambah dari tahun ke tahun. Hal tersebut membuktikan keseriusan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan akses masyarakat dengan memperkecil rasio tenaga kesehatan dengan masyarakat yang dilayani. Dibandingkan dengan tahun 2011 hingga tahun 2015, penambahan jumlah tenaga sangat signifikan, yaitu sebesar 58,96%. Walaupun demikian, ketersediaan tersebut perlu dijawab dengan distribusi dan pemerataan tenaga kesehatan di setiap daerah layanan.

Tabel 28: Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Paser 2011-2015

Tahun	Jumlah Tenaga Kesehatan
2015	1.116
2014	1.009
2013	976
2012	801
2011	658

Sumber: Kabupaten Paser dalam Angka Tahun 2016

Selain kondisi kesehatan secara umum, fokus pembangunan kesehatan diprioritaskan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Kesepakatan tersebut tertuang dalam perencanaan pembangunan nasional bahkan dunia melalui amanah MDGs. Beberapa kondisi yang telah ada terkait kesehatan ibu dan anak dapat dilihat dalam beberapa indikator penting di bawah ini:

a) Angka Kematian Bayi (AKB)

AKB di Kabupaten Paser mengalami penurunan dari tahun ke tahun, meskipun dari angka absolut terlihat mengalami peningkatan tetapi dilihat dari per kelahiran 1.000 kelahiran hidup, AKB mengalami penurunan. Misalnya, pada tahun 2009 AKB sebesar 47 per 1.000 kelahiran hidup, selanjutnya turun 46 per 1.000 kelahiran hidup di tahun 2010, hingga pada tahun 2011 tetap 46 per 1.000 kelahiran hidup. Perbaikan kondisi juga terjadi pada tahun 2012, AKB menunjukkan peningkatan menjadi 16,2 per 1.000 dan pada 2013 AKB mencapai 15,5 per 1.000 kelahiran. Angka ini masih dibawah dari standar nasional yaitu 40 per 1.000 kelahiran hidup. Dari observasi umum dan pendataan unit layanan kesehatan, kematian bayi yang terjadi di Kabupaten Paser rata-rata disebabkan oleh penyakit gangguan perinatal, saluran nafas, diare, gangguan sistem syaraf, tetanus dan infeksi lainnya.

Tabel 29: Angka Kematian Bayi Kabupaten Paser Tahun 2015

Uraian	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Kasus Kematian Bayi	57	78	56	76	80

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Paser, 2015

b) Angka Kematian Balita (AKABA)

Angka Kematian Balita (AKABA) di Kabupaten Paser dalam kurun waktu lima tahun ini cenderung meningkat. Pada tahun 2009 sebanyak satu balita per 1.000 kelahiran hidup, kemudian pada tahun 2010 naik menjadi 3 per 1.000 kelahiran hidup. Sedangkan pada tahun 2011 naik menjadi sebesar 6 per 1.000 kelahiran hidup, selanjutnya tahun 2012 semakin meningkat sebesar 8 per 1.000 kelahiran hidup, serta pada tahun 2013 mengalami penurunan 7,5 per 1.000 kelahiran hidup. Walaupun angka ini masih di bawah pencapaian tingkat nasional sebesar 46 per 1.000 kelahiran hidup, fluktuasi capaian AKABA tersebut layak diperhatikan. Penyebab utama kematian balita di Kabupaten Paser adalah ISPA dan diare.

Tabel 30: Angka Kematian Balita Kabupaten Paser Tahun 2015

Uraian	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Kasus Kematian Balita	43	78	60	88	11

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Paser, 2015

c) Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu ibu melahirkan dan masa nifas. Salah satu cara untuk mengatasi masalah kematian ibu melahirkan adalah perlunya mengurangi peran dukun dan meningkatkan peran bidan. Dalam hal ini, bidan di desa benar-benar difungsikan sebagai ujung tombak dalam upaya penurunan AKB dan AKI.

Angka kematian ibu (AKI) di Kabupaten Paser mengalami fluktuasi, hal ini terlihat dari 15 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2009, selanjutnya menjadi 8 per 100.000 kelahiran hidup tahun 2010 dan naik menjadi 12 per 100.000 kelahiran hidup tahun 2011, serta menurun lagi menjadi 11 per 100.000 kelahiran hidup (2012), kemudian naik lagi pada tahun 2013 menjadi 13 per

100.000 kelahiran hidup. Kematian ini disebabkan oleh sebab langsung seperti perdarahan, eklamsia, TB Paru, HPP, peb+jantung, terlambat dirujuk, dan keterampilan petugas yang rendah.

Tabel 31: Angka Kematian Ibu Kabupaten Paser Tahun 2015

Uraian	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Kasus Kematian Ibu	5	10	13	8	8

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Paser, 2015

Ketersediaan dan kualitas pelayanan merupakan faktor penting yang mendukung kesehatan ibu dan anak. Pada Tahun 2015, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan belum mencapai target 100%, yaitu hanya sebesar 77,6%. Capaian pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan ini masih jauh dari capaian nasional tahun 2013, yaitu 90,88%.

Tabel 32: Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

No	Uraian Indikator Pelayanan	Pencapaian				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Cakupan ibu hamil K4	78.71%	70.9%	96.2%	101%	48%
2	Cakupan pertolongan persalinan oleh Nakes	78.71%	68.5%	83.4%	102,7%	77,6%
3	Bumil Resti yang dirujuk	25.76%	28.6%	84.24%		
4	Kunjungan Neonatus	78.57%	94.8%	90.2%		
5	Cakupan kunjungan bayi	74.98%	76.6%	67.63%	106%	31,32%
6	Cakupan BBLR yang ditangani	100%	100.0%	100.0%	100%	100%

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Paser 2015

Tabel 32 menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan ibu dan anak terkait cakupan ibu hamil K4. Pada tahun 2011, cakupan K4 mencapai 78,71%, pada tahun 2012 turun menjadi sebesar 70,90%, selanjutnya 96,20% pada tahun 2013, serta tahun 2014 terjadi kenaikan menjadi 101%. Artinya dari sasaran ibu hamil yang ada, sebanyak 101% ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar paling sedikit empat kali pada tahun 2014, dengan distribusi pemberian pelayanan yang dianjurkan adalah minimal satu kali pada triwulan pertama, satu kali pada triwulan kedua, dan dua kali pada triwulan ketiga umur kehamilan.

Demikian pula dengan angka pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dalam kurun waktu 2011–2015 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2011 ke 2012 mengalami penurunan secara signifikan dari 78,71% menjadi

68,50%. Baru kemudian pada tahun 2013 sampai 2014 terjadi kenaikan ibu melahirkan oleh tenaga kesehatan, yaitu masing-masing 83,4% dan 102,7%. Fakta peningkatan tersebut telah melampaui target yang ditetapkan Kementerian Kesehatan RI, yaitu 90%. Capaian ini perlu terus dipertahankan dengan intens melakukan penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya keselamatan ibu dan anak pada saat persalinan.

Selain pencegahan terhadap kematian ibu melahirkan, pelayanan yang perlu diperhatikan adalah pencegahan kematian pada bayi dan balita. Metode medis yang ditempuh untuk mengurangi kematian bayi adalah pemberian pelayanan imunisasi yang maksimal.

Tabel 33: Persentase Pelayanan Imunisasi

Indikator Pelayanan	Pencapaian				
	2011	2012	2013	2014	2015
Desa kelurahan/UCI	39,58 %	48,5 %	57,9%	61,94%	73%

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Paser 2015

Pelayanan imunisasi di Kabupaten Paser dalam kurun lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari desa/kelurahan UCI dari 39,58% pada tahun 2011 menjadi 48,50% pada tahun 2012 dan terus merangkak naik pada tahun 2013 menjadi 57,9%, tahun 2014 mencapai 61,94% dan menjadi 73% pada tahun 2015. Meskipun cakupan Desa/Kelurahan UCI cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, tetap diperlukan langkah-langkah untuk mencapai target kinerja yang lebih baik. Beberapa langkah yang dapat dilakukan, misalnya membuka akses masyarakat yang tinggal di daerah yang sulit dan jauh dari pelayanan kesehatan, penyediaan fasilitas dan infrastruktur kesehatan yang memadai, penambahan sumber daya kesehatan yang berkapasitas, peningkatan perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah terhadap program imunisasi serta peningkatan pengetahuan masyarakat tentang program imunisasi dan manfaat imunisasi. Beberapa penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi antara lain tuberkulosis, difteri, pertusis (batuk rejan/batuk 100 hari), hepatitis, polio dan campak.

Selain cakupan ASI, dukungan terhadap pelayanan gizi pada ibu dan anak juga perlu digalakkan. Pelayanan yang biasa dilakukan adalah dengan pemberian

kapsul vitamin dan MP-ASI (Makanan Pengganti-Air Susu Ibu) pada balita, serta pemberian tablet FE3 pada ibu hamil.

Tabel 34: Persentase Pelayanan Gizi

No.	Uraian Indikator Pencapaian	Pencapaian				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Cakupan balita mendapat kapsul Vitamin A 2 X /tahun	70,10%	71,50%	70,13%	70,9%	-
2	Cakupan bumil mendapat 90 Tablet FE3	75,00%	66,72%	71,42%	88,7%	-
3	Cakupan pemberian MP-ASI pada bayi BGM dari gakin	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

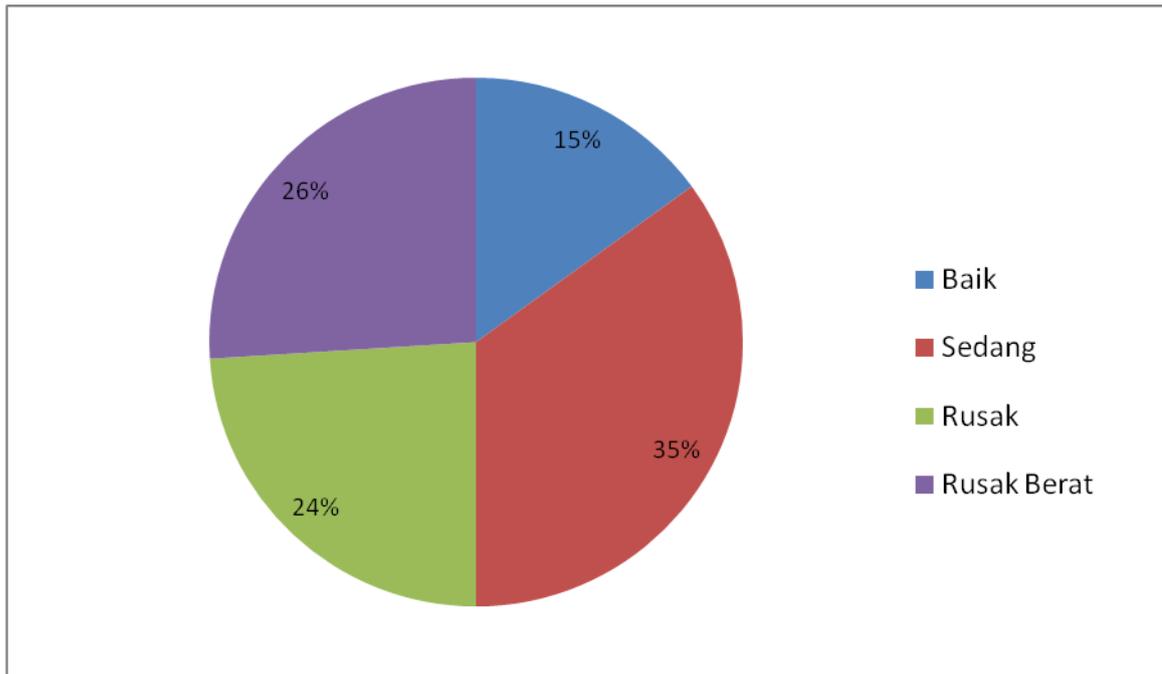
Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Paser 2015

Dalam periode 5 tahun terakhir ini terlihat bahwa capaian pelayanan gizi mengalami fluktuasi. Pada pelayanan pemberian kapsul vitamin A pada balita, 70,13% pada tahun 2013 menjadi 70,90% pada tahun 2014. Demikian pula pelayanan pemberian tablet FE pada ibu hamil mengalami kenaikan dari 71,42% pada tahun 2013 menjadi 88,70% pada tahun 2014. Meskipun demikian pelayanan pemberian MP-ASI pada bayi BGM dari keluarga miskin selalu mencapai angka 100%.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Akses untuk menuju ke tempat pelayanan publik dari desa ke kota di Kabupaten Paser telah terhubung dengan jalan yang dibangun oleh pemerintah daerah, baik berupa jalan raya maupun jembatan. Hal ini untuk menunjang akses pelayanan publik bagi masyarakat Kabupaten Paser. Namun demikian, kondisinya masih kurang memadai pada sisi jalan raya. Lihat Diagram 3.

Diagram 3: Persentase jalan di Kabupaten Paser menurut kondisi jalan 2015



Sumber: Kabupaten Paser dalam Angka 2016

Dari total panjang jalan kabupaten, sekitar 50% mengalami kerusakan, sedangkan khusus untuk jalan provinsi terdapat 34,52% mengalami kerusakan. Adanya kendala koordinasi antar level satuan regional menyebabkan jalan provinsi cenderung sulit untuk ditangani secara cepat. Akses jalan antar kecamatan maupun antar desa juga masih menyisakan persoalan. Hal ini tidak dimungkiri mengakibatkan gangguan pada mobilitas barang, jasa dan orang.

Namun di lain pihak, pemerintah daerah telah membangun jembatan bagi beberapa desa yang dahulunya merupakan jalur yang menggunakan perahu menuju perkotaan, sehingga hal ini membantu meningkatkan mobilitas masyarakat. Pembangunan jembatan yang telah beroperasi dan masih dalam kondisi sangat bagus yaitu jembatan yang menghubungkan antara Kota Tanah Grogot dan Desa Sungai Tuak yang dibangun pada tahun 2008 dan beroperasi pada tahun 2012. Pembangunan jembatan juga sedang dilaksanakan di desa-desa yang berada pada wilayah hutan rawa seperti di Kecamatan Pasir Belengkong dan beberapa kecamatan lainnya.

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Analisis kinerja atas layanan urusan perumahan untuk Kabupaten Paser mengacu pada tingkat ketersediaan pasokan listrik pada rumah tangga. Hal tersebut

digunakan sebagai indikator besarnya kebutuhan pasokan listrik yang akan ditargetkan pemenuhannya dalam jangka lima tahun RPJMD ini. Sehingga data yang dibutuhkan adalah rasio rumah tangga pengguna listrik atau jumlah rumah tangga pengguna listrik dibagi dengan jumlah rumah tangga di Kabupaten Paser.

Tabel 35: Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Status Kepemilikan Tempat di Kabupaten Paser

Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Milik sendiri	70,82	72,82	74,73	78,99	78,50	85,15
Kontrak	3,33	2,17	1,50	1,29	1,58	8,56
Sewa	11,81	7,38	11,56	9,18	6,12	8,56
Bebas sewa	4,11	3,50	3,71	1,88	2,77	3,75
Dinas	2,93	8,95	5,67	4,08	5,89	1,54
Milik orang tua/sanak/saudara	4,50	4,99	2,65	4,58	5,14	-
Lainnya	2,50	0,19	0,18	0,00	0,00	-
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Paser 2015

Selama lima tahun terakhir, persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah sendiri terus mengalami peningkatan sebagaimana terlihat dalam tabel 2.30. Disisi lain, perumahan yang berstatus menyewa atau kontrak mengalami penurunan, pada tahun 2014 persentase rumah tangga yang masih mengontrak/menyewa sebesar 10,47%, padahal tahun sebelumnya masih mencapai 12,35%. Dari aspek kepemilikan tempat tinggal, terdapat perbaikan kesejahteraan masyarakat dengan semakin tingginya kepemilikan status tempat tinggal.

Tabel 36: Fasilitas Tempat Buang Air Besar

Fasilitas Tempat Buang Air Besar	2011	2012	2013	2014	2015
Sendiri	85,61	81,80	82,62	82,43	91,32
Bersama	4,84	3,46	5,19	4,85	3,21
Umum	0,73	0,82	1,46	0,76	2,01
Tidak ada	8,82	14,32	10,73	11,96	3,46

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Paser 2015

Sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Paser sudah memiliki fasilitas tempat buang air besar sendiri (91,32%). Untuk rumah tangga yang fasilitas tempat buang air besarnya secara bersama-sama dan umum, persentasenya masing-masing sebesar 3,21% dan 2,01%. Sementara itu masih terdapat rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas tempat buang air besar yang memiliki persentase pada tahun

2015 mencapai 3,46%. Dari penjelasan data di atas, memperlihatkan bahwa masih terdapat rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas tempat buang air besar. Hal ini disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan kemampuan untuk membuat tempat buang air besar yang memenuhi syarat kesehatan. Kondisi perumahan yang tidak memiliki fasilitas buang air besar perlu mendapat perhatian pemerintah agar perumahan warga memenuhi standar kesehatan dasar.

e. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Bagian ini cukup luas cakupannya, tidak hanya terkait penyediaan layanan dasar tetapi juga mempertimbangkan aspek kepuasan masyarakat. Adapun data-data yang harus tersedia pada bagian ini untuk konteks di Kabupaten Paser adalah mengenai jumlah Polisi Pamong Praja, jumlah petugas Linmas (perlindungan masyarakat), jumlah mobil pemadam kebakaran, serta IKLM (Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat).

Keamanan dan ketertiban merupakan sebuah aspek penting yang dibutuhkan untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Secara umum, selama kurun waktu tahun 2013 jumlah gangguan Kamtibmas di wilayah Kabupaten Paser mengalami penurunan dibandingkan tahun 2012. Pada tahun 2012, jumlah pelanggaran kamtibmas yang terjadi di wilayah Kabupaten Paser sebanyak 522 kejadian dan tahun 2013 turun menjadi 431 kejadian pada tahun 2015. Lihat Tabel 37.

Tabel 37: Banyaknya Gangguan Kamtibmas di Wilayah Hukum Polres Paser 2015

Tahun	Kejadian	Diselesaikan
2015	431	244
2014	-	-
2013	425	221
2012	522	306
2011	484	358
2010	465	255
2009	270	151

Sumber: Kabupaten Paser dalam Angka 2016

Pelanggaran Kamtibmas yang banyak terjadi adalah kasus pencurian hingga mencapai 46%. Sementara untuk angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Paser, pada tahun 2013, mengalami peningkatan 0,8% dibanding tahun sebelumnya.

Jumlah anggota Linmas terlatih di Kabupaten Paser mengalami penurunan dari tahun 2012 ke tahun 2013 dari 2.078 menjadi 464 orang. Pada tahun 2014, jumlah anggota Linmas terlatih di Kabupaten Paser kembali mengalami peningkatan pada tahun 2015 menjadi 2.038 orang.

Tabel 38: Jumlah Anggota Linmas Terlatih di Kabupaten Paser 2015

No	Kecamatan	Jumlah
1	Batu Sopang	142
2	Muara Samu	88
3	Tanjung Harapan	94
4	Batu Engau	144
5	Pasir Belengkong	206
6	Tanah Grogot	365
7	Kuaro	198
8	Long Ikis	343
9	Muara Komam	142
10	Long Kali	266
	Cadangan Kabupaten	50
	2015	2.038
	2014	2.038
	2013	464
	2012	2.078
	2011	765
	2010	755
	2009	1.126

Sumber: Kabupaten Paser Dalam Angka 2016

f. Sosial

Layanan urusan wajib sosial terfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial). Sehingga, sebagai indikator untuk menentukan strategi dalam memenuhi kewajiban tersebut, perlu diketahui data mengenai jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi, serta jumlah PMKS yang menerima bantuan sosial. Kategori PMKS di Kabupaten Paser terdiri dari balita terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, penyandang cacat, KAT (Komunitas Adat Terpencil) dan korban bencana alam. Lihat Tabel 39.

Tabel 39: Jumlah PMKS yang Tertangani

Kategori PMKS	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
Anak balita terlantar	Jiwa	33	63	172	269	210
Anak terlantar	Jiwa	39	379	618	379	1.392
Lansia terlantar	Jiwa	4.905	4.084	2.282	4.084	4.293
Penyandang cacat (disabilitas)	Jiwa	977	477	275	477	384
Komunitas Adat Terpencil (KAT)	KK	475	475	475	275	975
Korban bencana alam	Jiwa	62	860	860	860	1573

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Paser 2015

Berdasarkan data di atas, kategori PMKS yang paling meningkat adalah kasus anak terlantar, yaitu meningkat dari 39 pada tahun 2011 menjadi 1.392 pada tahun 2015. Peningkatan ini dapat juga disebabkan karena giatnya pendataan yang dilaksanakan SKPD terkait.

2. Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar

Urusan wajib non-pelayanan dasar menjadi aspek penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan umum dalam urusan ini menyangkut aspek penguatan sumber penghidupan dan perekonomian masyarakat, sarana untuk mendukung mobilitas dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga terkait keberlanjutan lingkungan hidup.

a. Tenaga Kerja

Dalam perencanaan pembangunan bidang ketenagakerjaan, perlu mempertemukan beberapa bidang perencanaan pembangunan yang saling beririsan yaitu antara lain demografi, ekonomi dan pendidikan. Ketiga bidang tersebut menjadi pilar dalam program pembangunan yang berkaitan dengan perluasan antara kesempatan kerja dan berusaha, produktivitas dan distribusi tenaga kerja serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan angkatan kerja. Tantangan kajian ketenagakerjaan bagi pembangunan adalah mempertemukan ketersediaan angkatan kerja dengan lapangan kerja yang sesuai dan produktif secara ekonomi sehingga mampu menciptakan kemandirian warga.

Dilihat dari struktur penduduk produktif, komposisi penduduk angkatan kerja pada tahun 2013 sebanyak 110.147 orang (62,03%) dan bukan angkatan kerja sebanyak 67.428 orang (37,98%). Sebesar 90,7% dari penduduk angkatan kerja telah bekerja, tetapi masih terdapat 9,3% yang mencari pekerjaan. Lihat Tabel 40.

Tabel 40: Penduduk Usia Kerja (15 tahun ke atas) Menurut Kegiatan Utama 2015

Kegiatan Utama	Jumlah	Persentase
Angkatan Kerja		
• Bekerja	110.511	59,27
• Pengangguran	11.013	5,91
Bukan Angkatan Kerja		
• Sekolah	18.784	10,07
• Mengurus Rumah Tangga	40.775	21,87
• Lainnya	5.377	2,88
Jumlah	186.460	100

Sumber: Kabupaten Paser dalam Angka 2016

Tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami peningkatan dari 64,11% pada tahun 2014 menjadi 65,17% pada tahun 2015. Pada saat yang sama pengangguran penduduk usia kerja juga mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) yaitu sebesar 9,06% pada tahun 2015 dari angka 6,69% pada tahun 2014. Lihat Tabel 41.

Tabel 41: Perkembangan Angkatan Kerja, TPAK, TPT dan TKK Kabupaten Paser 2011-2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Angkatan Kerja (Jiwa)	113.789	124.425	110.147	117.188	121.524**
TPAK (%)	68,64	72,01	62,03	64,11	65,17**
TPT (%)	8,41	10,18	9,25	6,69	9,06**
TKK (%)	91,59	89,82	90,75	93,31	90,94**

Sumber: Kabupaten Paser dalam Angka 2016

Walaupun sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor yang cukup besar memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Paser, bukan berarti sektor tersebut juga berkontribusi secara dominan dalam penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan tabel di bawah ini, sektor pertanian masih menjadi sektor dominan yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Lapangan usaha pertanian sebesar 44,12% pada 2014 dan naik menjadi 44,63% pada tahun 2015. Pada sisi yang lain, persentase sektor pertambangan dan penggalian menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2014, sektor pertambangan dan penggalian sebesar 14,02%, menurun menjadi 9,66% pada tahun 2015. Sektor jasa, dan konstruksi cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hingga 2015. Lihat Tabel 42.

Tabel 42: Persentase Penduduk Usia 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Paser

Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Pertanian	45,37	40,08	37,05	39,81	44,12	44,63
Pertambangan dan Penggalian	11,51	14,79	13,48	13,88	14,02	9,66
Industri	1,97	7,29	7,14	8,68	4,65	2,14
Konstruksi	6,67	2,56	2,95	3,59	2,05	3,61
Perdagangan	12,66	18,51	15,73	14,65	17,41	19,55
Transportasi dan Komunikasi	5,57	1,47	1,44	2,11	2,13	2,47
Jasa	1,77	12,70	20,58	15,70	13,56	16,11
Lainnya	14,49	2,60	1,65	1,58	1,87	1,83
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Kabupaten Paser dalam Angka 2016

Dengan demikian, pertanian masih menjadi sektor terbesar yang mampu menyerap tenaga kerja di Kabupaten Paser walaupun mengalami fluktuasi. Di samping pertanian, sektor jasa dan perdagangan juga cenderung mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Menurunnya daya serap sektor pertambangan dan penggalian dan meningkatnya daya serap sektor lainnya mengindikasikan bahwa sektor lain diluar pertambangan dan penggalian secara perlahan-lahan mengalami penguatan daya serap tenaga kerja.

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Untuk menunjukkan aspek pemberdayaan perempuan dapat dilihat dari kualifikasi sumberdaya manusianya atau dari tingkat pendidikan. Pada tingkat SD, APM perempuan/laki-laki di tahun 2011 sejumlah 103,3%. Namun di tahun 2012 dan 2013, meskipun tidak terlalu signifikan, APM perempuan pada tingkat SD justru menurun secara berturut-turut menjadi 99,19% dan 99,10%. Demikian halnya pada tingkat SMP, APM perempuan/laki-laki di tahun 2011 sejumlah 100,35%, namun pada tahun 2012 menurun menjadi 83,42%, sedangkan pada tahun 2013 kembali naik menjadi 103,75%. Untuk tingkat SMP, jumlah partisipasi sekolah cenderung lebih besar dibandingkan dengan tingkat SD. Kondisi yang sama juga terjadi pada tingkat SMA. Di tahun 2011, APM perempuan/laki-laki pada tingkat SMA sejumlah 120,06% lalu menurun pada tahun 2012 menjadi 82,13% dan kembali meningkat pada tahun 2013 menjadi 143,48%.

Berdasarkan laporan di sektor pekerjaan non-pertanian juga mengalami peningkatan. Dari tahun 2011 sampai 2013 berturut-turut partisipasi perempuan di sektor non-pertanian adalah 6,2%, 6,9% dan 7,5%. Namun proposi ini sebetulnya tidak serta-merta naik dalam arti sebenarnya, sebab pada tahun 2013, jumlah angka pekerja perempuan secara absolut menurun sehingga ketika dihitung jumlah persentase perempuan yang bekerja di sektor non-pertanian seolah-olah meningkat. Angka partisipasi perempuan baik dalam kategori pendidikan sekolah SD hingga SMA maupun melek huruf ternyata tidak diikuti dengan jumlah partisipasi perempuan di ranah politik. Padahal ukuran kesetaraan sebetulnya tidak hanya dilihat dari angka partisipasi sekolahnya, namun juga kemampuan perempuan dalam mengambil keputusan yang salah satunya direpresentasikan dalam partisipasi di ranah politik. Berdasarkan tabel tersebut, angka partisipasi perempuan di ranah politik justru sangat rendah. Pada periode tahun 2010 hingga 2013 perbandingan perempuan dan laki-laki hanya 12%. Angka tersebut tidak mengalami lonjakan yang cukup berarti, sebab pada pemilu legislatif yang terakhir yaitu tahun 2014 perbandingannya hanya 16%.

Sedangkan upaya untuk perlindungan anak masih sangat perlu perhatian lebih intensif. Hingga saat ini masih terdapat balita dan anak terlantar yang membutuhkan pertolongan, untuk balita terlantar mengalami kenaikan dari tahun 2012 sebanyak 172 balita menjadi 269 balita yang perlu ditangani. Sampai saat ini, Kabupaten Paser belum menyediakan panti asuhan anak yang dapat merehabilitasi kasus-kasus anak dan balita terlantar.

c. Pangan

Ketahanan pangan merupakan salah satu bagian dari cita-cita nasional yang harus didukung dengan cita-cita daerah. Produksi tanaman pangan setempat diharapkan mampu menyuplai kebutuhan pangan masyarakat. Sektor pertanian sebagai lapangan pekerjaan dominan dapat dimaksimalkan produksinya agar memenuhi kebutuhan warga Kabupaten Paser secara mandiri.

Pada tahun 2014, produksi padi Kabupaten Paser sebesar 36.843 ton. Angka tersebut mengalami penurunan 4,26% dibandingkan hasil produksi pada tahun 2013 sebesar 41.099 ton. Penurunan produksi komoditas padi terus berlangsung hingga tahun 2014, sehingga menjadi 36.290 ton. Komoditas lainnya seperti Jagung

menunjukkan peningkatan produksi dari tahun ke tahun. Misalnya produksi komoditas Jagung yang menunjukkan konsistensi kenaikan dari 764 ton pada tahun 2013, naik menjadi 849 ton pada tahun 2014 dan terakhir pada tahun 2015 mampu menghasilkan 1.058 ton. Produksi komoditas ubi kayu dan Kaacang Kedele juga mengalami peningkatan, yaitu dari masing-masing 11.344 ton dan 84 ton pada tahun 2014 menjadi 1.643 ton dan 137 ton pada tahun 2015. Sedangkan komoditas ubi jalar, kacang tanah, dan kacang hijau mengalami penurunan pada tahun 2015. Lihat Tabel 2.38.

Tabel 43: Produksi Padi dan Palawija (Ton) di Kabupaten Paser 2011-2015

Jenis Produksi	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Padi Sawah	26.336	27.959	32.587	29.488	26.428
Padi Ladang	8.109	9.086	8.512	7.355	9.862
Jagung	529	1.060	764	849	1.058
Ubi Kayu	2.633	1.875	1.502	1.344	1.643
Ubi Jalar	1.446	767	1.134	635	411
Kacang Tanah	111	111	98	70	45
Kacang Kedele	155	86	174	84	137
Kacang Hijau	54	14	19	25	13

Sumber: Kabupaten Paser dalam Angka 2016

Dilihat dari distribusi hasil panen, kecamatan yang memberikan kontribusi terbesar untuk produksi padi (sawah maupun ladang) adalah Kecamatan Long Kali dengan jumlah produksi 10.065 ton, kemudian Kecamatan Pasir Belengkong dengan jumlah 9.395 ton, disusul Kecamatan Tanah Grogot dengan jumlah produksi padi 5.949 ton. Khusus untuk padi ladang yang biasa tersebar di daerah rawa, kecamatan yang memberikan kontribusi produksi padi ladang terbesar adalah Kecamatan Muara Komam dengan jumlah 2.760 ton, Kecamatan Muara Samu dengan jumlah 1.711 ton dan disusul Kecamatan Long Kali dengan jumlah 1.065 ton. Dari data di atas, terlihat bahwa sampai saat ini, Kecamatan Long Kali merupakan wilayah pertanian hasil pangan yang menyumbang produksi padi paling besar di Kabupaten Paser, yaitu sebesar 26%.

Tabel 44: Produktivitas Padi Sawah dan Padi Ladang Per Hektar di Kabupaten Paser 2011-2015

Tahun	Produktivitas Padi Sawah Per Hektar	Produktivitas Padi Ladang Per Hektar
2011	3,96	2,99
2012	4,01	2,73
2013	4,50	2,78
2014	4,59	2,83
2015	4,34	3,00

Sumber: Statistik Padi Palawija Kabupaten Paser 2014 dan data Statistik Sektorial Dinas Pertanian

dan Perkebunan, Kabupaten Paser

Produktivitas padi sawah per hektar, khususnya padi ladang cenderung menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 0,05 ton per hektar dibanding dengan tahun sebelumnya. Kenaikan ini terulang kembali sebesar 0,17 ton per hektar pada tahun 2015. Lain halnya dengan produktivitas padi ladang, produktivitas padi sawah justru menunjukkan penurunan. Pada tahun 2014 hingga 2015, terjadi penurunan sebesar 0,25 ton per hektar. Tabel di atas menunjukkan bahwa produktivitas padi cenderung berfluktuasi. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi produktivitas padi masih bisa ditingkatkan agar sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk.

d. *Pertanahan*

Aglomerasi penduduk dan peningkatan infrastruktur jasa membutuhkan pengelolaan lahan yang semakin rapi. Salah satu wujud usaha untuk mengendalikan dan mengatur pengelolaan bangunan adalah adanya IMB (Izin Mendirikan Bangunan). IMB merupakan perizinan yang diberikan oleh kepala daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun bangunan baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Dengan adanya penetapan IMB di Kabupaten Paser, diharapkan akan mewujudkan ketertiban masyarakat serta kepastian hukum. Individu atau persekutuan (badan) yang akan mendirikan bangunan harus memiliki IMB sesuai Pasal 5 ayat 1 Perda No. 7 Tahun 2009. Lihat Tabel 45.

Tabel 45: Jumlah Bangunan Ber-IMB hingga 2015

Tahun	Jumlah Bangunan ber-IMB
2013	2.758
2014	3.403
2015	3.895

Sumber: Data BPMPPT Kabupaten Paser 2015

Walaupun pengurusan IMB oleh warga belum maksimal, terjadi peningkatan IMB dari tahun 2013 ke tahun 2014, yaitu dari 2.758 menjadi 3.403 dan terus meningkat sampai ke tahun 2015, yaitu mencapai 3.895. Dengan adanya pengaturan dalam pendirian bangunan diharapkan rencana konstruksi bangunan dapat dipertanggungjawabkan untuk kepentingan bersama.

e. Lingkungan Hidup

Secara garis besar, jenis pelayanan dasar bidang lingkungan hidup Kabupaten Paser pada 2014 diprioritaskan pada pencegahan pencemaran air dan udara, serta penyediaan informasi status kerusakan lahan. Guna melihat kondisi pencemaran air dan udara dapat dilihat dari pengelolaan sampah khususnya mengenai jumlah aglomerasi sampah dan pengelolaan sampah. Saat ini timbunan sampah dipengaruhi oleh kepadatan penduduk yang menyumbang produksi sampah secara signifikan. Lihat Tabel 46.

Tabel 46: Aglomerasi Sampah di Kabupaten Paser 2015

No	Kecamatan	Timbunan Sampah (m ³ /hari)
1	Batu Sopang	36,08
2	Muara Samu	8,24
3	Tanjung Harapan	28,91
4	Batu Engau	11,33
5	Pasir Belengkong	37,09
6	Tanah Grogot	94,90
7	Kuaro	39
8	Long Ikis	57,26
9	Muara Komam	18,05
10	Long Kali	34,79

Sumber: BLH Kabupaten Paser 2014

Sesuai dengan tabel di atas, timbunan sampah terbanyak berada di Tanah Grogot yaitu sebesar 94,90 m³/hari. Selain kondisi demografis yang padat, Tanah Grogot merupakan pusat jasa dan perdagangan sehingga menimbulkan produksi sampah yang berlipat ganda. Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk mengendalikan aglomerasi sampah adalah penetapan izin pembuangan sampah B3

(bahan beracun dan berbahaya) yang dapat merusak lingkungan dan ekosistem hayati. Saat ini hanya sembilan perusahaan yang mendapatkan izin pembuangan air limbah yaitu PT. Kideco Jaya Agung, PTPN Long Kali, PT Borneo Indah, PT Agro Inti Kencanamas, PTPN Semuntai, PTPN Long Pinang, PT Muara Toyu, PT Harapan Sawit dan PT Fajar Surya Swadaya. Perlu adanya aturan yang lebih tegas terkait dengan pemberian izin pembuangan limbah B3. Apalagi sebagian besar limbah tersebut mencemari sumber daya lingkungan yang berpengaruh bagi masyarakat banyak misalnya sungai, hutan, tanahbahkan udara.

f. *Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil*

Layanan dasar kependudukan dan catatan sipil meliputi jumlah penduduk ber-KTP, jumlah penduduk ber-akta kelahiran serta jumlah pasangan berakta nikah. Selain merupakan hak dasar warga negara yang harus dipenuhi, ketersediaan dokumen-dokumen tersebut juga sangat mempengaruhi kualitas pendataan daerah terkait jumlah penduduk. Hal tersebut juga untuk menentukan sasaran target dari program tertentu seperti program keluarga berencana dengan targetnya adalah pasangan telah menikah yang akan diketahui jumlahnya jika terdaftar/pernah memiliki akta nikah.

g. *Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*

Untuk konteks Kabupaten Paser, bagian ini memaparkan data mengenai jumlah program pemberdayaan masyarakat. Data tersebut berdampak pada penentuan prioritas program pemberdayaan masyarakat di tahun berikutnya.

h. *Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*

Untuk masalah kependudukan terkait dengan jumlah penduduk, rata-rata di kawasan pegunungan tengah Kalimantan Timur tidak terlalu bermasalah. Akan tetapi urusan pengendalian tetap menjadi fokus yang kaitannya dengan urusan keluarga berencana adalah dengan mengetahui rata-rata jumlah anak per-keluarga di Kabupaten Paser. Data tersebut penting untuk diketahui agar dapat mengidentifikasi kebutuhan dasar penduduk di tingkat rumah tangga sehingga dapat menentukan strategi penyelesaian yang paling tepat.

i. Perhubungan

Aspek lain terkait pelayanan publik dasar adalah tersedianya infrastruktur transportasi yang menjadi sarana mobilitas masyarakat. Keberadaan infrastruktur transportasi mempengaruhi kemudahan dalam menjangkau akses pasar maupun akses terhadap pelayanan publik yang lain. Kondisi infrastruktur dalam hal ini adalah akses yang digunakan untuk mencapai tempat pelayanan publik yang telah tersedia.

Tabel 47: Status jalan di Kabupaten Paser

Tahun	Status Jalan		
	Desa dan Kabupaten	Provinsi	Nasional
2011	906,00	286,54	224,71
2012	948,00	276,33	224,71
2013	1075,00	276,33	224,71
2014	1075,00	276,33	224,71
2015	1005,00	276,33	224,71

Sumber: Kabupaten Paser dalam Angka 2016

Dari segi jaringan jalan raya, jalan yang menghubungkan antar kecamatan, kabupaten, dan provinsi hanya satu padahal status kewenangan yang berbeda. Sehingga kewenangan dalam memperbaiki jalan harus disesuaikan dengan tanggungjawab pemerintah yang berkaitan. Di jalan tersebut banyak dilalui oleh kendaraan-kendaraan proyek, wisatawan dan penduduk yang melakukan perdagangan yang menghubungkan antara provinsi Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Timur, serta kecamatan-kecamatan yang termasuk wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.

j. Komunikasi dan Informatika

Implikasi bagi terbukanya teknologi informasi, juga berpengaruh terhadap meningkatnya media publik termasuk surat kabar, TV lokal dan radio di Kabupaten Paser. Media lokal berfungsi sebagai sumber informasi sekaligus media politik yang menyuarakan aspirasiwarga. Meningkatnya media publik dapat dilihat dari semakin meningkatnya jenis surat kabar lokal dalam lima tahun terakhir. Lihat Tabel 48.

Tabel 48: Jenis Surat Kabar 2011-2015

Jenis Surat Kabar	2011	2012	2013	2014	2015
Nasional	3	3	3	3	3
Lokal	3	4	4	5	6

Sumber: SIPD Diskominfo Kabupaten Paser 2015

Pada tahun 2015, surat kabar regional sejumlah 6 buah diantaranya Tribun dan Kaltim Pos. Selain surat kabar, bermunculan juga televisi lokal dan radio lokal yang mengudara di kawasan Kabupaten Paser, misalnya Paser TV. Tidak hanya media cetak dan elektronik, sumber informasi juga berasal dari media internet. Salah satu akses bagi warga terhadap internet salah satunya melalui warnet yang dapat dikunjungi oleh masyarakat yang dihadirkan di setiap kecamatan. Pada tahun 2014, rasio jumlah warnet terhadap 1.000 penduduk sebanyak 0,21 atau total jumlah absolutnya adalah 55 unit. Dari total jumlah tersebut, 10 warnet merupakan PLIK (Pusat Layanan Internet Kecamatan) yang merupakan program Kemenkominfo yang menetapkan satu kecamatan satu warnet.

k. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Koperasi dan usaha kecil menengah merupakan bagian dari wujud ekonomi riil masyarakat Paser. Guna menentukan strategi pengembangan yang tepat, perlu diketahui jumlah Koperasi dan UKM di Kabupaten Paser. Kinerja bidang koperasi dapat dilihat dari penambahan jumlah koperasi dan jumlah anggotanya. Dalam kurun waktu 2011 sampai 2015 jumlah koperasi di kabupaten Paser mengalami peningkatan. Tingkat keaktifan koperasi semakin meningkat tajam dalam lima tahun terakhir, yaitu dari 42,2% pada tahun 2011 menjadi 76,9% pada tahun 2014. Tren yang sama juga terlihat pada pertumbuhan jumlah UKM. Data menunjukkan bahwa terjadi peningkatan lebih dari 400% dari 2013 ke 2014 yaitu dari 1.445 menjadi 5.625. Pertumbuhan UKM terus terjadi hingga tahun 2015 yang mencapai 5.666. Peningkatan tersebut dimungkinkan karena adanya peningkatan infrastruktur perdagangan dari pemerintah serta dukungan modal untuk unit usaha kecil di Kabupaten Paser.

Selain itu, sebagai bagian dari pemberdayaan, perlu juga dilihat sejauh mana Koperasi dan UKM mendapat kemudahan modal. Iklim usaha yang semakin membaik tampak dengan semakin banyaknya jumlah UKM. Lihat Tabel 49.

Tabel 49: Persentase Koperasi Aktif, Jumlah UKM dan UMKM

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Presentase Koperasi Aktif	42,2	40,1	77,6	78,7	76,9
2.	Jumlah UKM	807	1.232	1.445	5.625	5.666
3.	Jumlah UMKM	1919	1.970	5.575	5.575	5.575

Sumber: Buku Statistik Disperindakop Kabupaten Paser 2014

I. Penanaman Modal

Potensi perekonomian di Kabupaten Paser tidak hanya terfokus pada pertambangan (batubara) tetapi juga perkebunan kelapa sawit. Kedua sektor usaha padat modal tersebut menarik banyak investor berskala nasional maupun asing. Oleh sebab itu, tolok ukur pengembangan investasi daerah dapat dilihat melalui jumlah investor berskala nasional, baik PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) maupun PMA (Penanaman Modal Asing). Dari data jumlah investor tahun 2013 hingga 2014 menunjukkan bahwa jumlah investor di Paser bertambah sejumlah 5 investor. Hal ini mengindikasikan bahwa iklim perekonomian Paser menjadi semakin baik. Lihat Tabel 50.

Tabel 50: Jumlah Investor 2011-2016

Tahun	Jumlah Investor
2011	9
2012	28
2013	24
2014	19
2015	21
2016 (Triwulan I)	9

Sumber: BPMPT Kabupaten Paser 2015

Iklim investasi yang membaik menyebabkan jumlah investor yang semakin banyak. Industri galian tambang non migas menyerap banyak investor baik dalam negeri maupun luar negeri, apalagi dengan dukungan kemudahan investasi yang diterapkan di Kabupaten Paser. Dari data jumlah nilai investasi Kabupaten Paser tahun 2011 sampai 2015 mengalami kenaikan. Peningkatan yang tajam pada jumlah investasi terjadi pada periode 2012 sampai 2015. Jumlah nilai investasi bertambah dengan angka agregat 200-an milyar rupiah menjadi 1,2 triliun rupiah.

Tabel 51: Jumlah Nilai Investasi 2011-2015

Tahun	Jumlah Nilai investasi berskala nasional dan asing (PMDN/PMA) (Rp.)
2011	465.138.071.889
2012	254.626.866.554
2013	1.221.679.068.111
2014	822.244.787.646
2015	526.348.057.365

Sumber: BPMPT Kabupaten Paser 2015

m. Kepemudaan dan Olahraga

Pengembangan kepemudaan memerlukan berbagai dukungan layanan dasar. Sampai tahun 2014, jumlah organisasi kepemudaan sebanyak 32 unit. Selain bidang kepemudaan, dukungan terhadap organisasi olahraga yang berjumlah 350 unit juga ditingkatkan setiap tahunnya. Olahraga merupakan sarana pemersatu masyarakat karena sifatnya yang mampu menggugah kebersamaan. Wujud dukungan pemerintah terhadap layanan dasar kepemudaan dan olahraga salah satunya dengan program pembangunan Gedung Olahraga (GOR) yang dibangun tidak jauh dari kompleks kantor pemerintah daerah. Sampai tahun 2015, jumlah total lapangan olahraga yang difasilitasi oleh Disbudparpora Kabupaten Paser sebanyak 49 unit yang tersebar di beberapa desa di pelosok kabupaten (LKPJ AMJ 2010-2015).

n. Statistik

Ketersediaan data merupakan kebutuhan dasar yang dibutuhkan dalam merencanakan pembangunan. Analisis kinerja untuk urusan wajib statistik didasarkan pada ketersediaan data mengenai PDRB Kabupaten dan Kabupaten Dalam Angka. Ketersediaan data merupakan langkah maju bagi perencanaan, terutama dengan data yang semakin lengkap dan terus diperbaharui.

o. Kebudayaan

Pemerintah Kabupaten Paser secara rutin menyelenggarakan festival seni dan olahraga. Pemerintah mengadakan festival kebudayaan minimal dua kali dalam setahun, yaitu pada momentum peringatan 17 Agustus dan hari ulang tahun Kabupaten Paser. Festival tersebut menampilkan atraksi kebudayaan lokal dan pasar rakyat.

p. Perpustakaan

Data yang dibutuhkan pada bagian ini adalah mengenai jumlah perpustakaan, jumlah koleksi buku di perpustakaan serta jumlah pengunjung perpustakaan setiap tahunnya. Khusus jumlah perpustakaan di Kabupaten Paser, terdapat 288 unit. Jumlah tersebut termasuk perpustakaan desa/kelurahan yang dikelola oleh pemerintah desa/kelurahan.

Tabel 52: Urusan Wajib Perpustakaan Kabupaten Paser 2011-2015

No.	Urusan Wajib Perpustakaan	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Perpustakaan	178	183	219	274	288
2.	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	11.251	3.575	8.044	66.807	8.325
3.	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	32.685	32.685	40.945	49.345	98.690

Sumber: Statistik Sektor Perpustakaan Daerah Kabupaten Paser 2014

Kenaikan jumlah pengunjung perpustakaan sangat drastis terjadi pada tahun 2013 ke 2014, yaitu dari 8.044 pengunjung menjadi 66.807 pengunjung. Lonjakan tersebut terjadi karena adanya fasilitas internet yang menarik minat masyarakat. Dari segi koleksi buku yang tersedia, terlihat sedikit pertambahan dari tahun ke tahun. Hal lain yang perlu diperhatikan pemerintah adalah tidak mencukupinya pustakawan yang dapat mengelola katalog buku maupun kualitas variasi koleksinya.

3. Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan pemerintahan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerahnya. Dalam RPJMD, pembahasan tentang urusan pemerintahan pilihan ini berguna untuk menggambarkan pencapaian pembangunan yang telah dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Paser. Gambaran pencapaian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor potensial yang sedang dikembangkan oleh Kabupaten Paser. Menurut data statistik, sektor ini selalu menunjukkan perkembangan yang baik dalam empat tahun terakhir. Guna mengidentifikasi perkembangan, potensi dan strategi pengembangan pariwisata Kabupaten Paser ke depan, berikut salah satu representasinya, yaitu data tentang jumlah kunjungan wisatawan:

Tabel 53: Jumlah Kunjungan Wisatawan 2011-2015

Tahun	Jumlah Kunjungan Wisatawan
2011	9.763
2012	15.235
2013	18.358
2014	15.624
2015	19.512

Sumber: LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010-2015

Jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Paser mengalami kenaikan sebesar 5.472 wisatawan pada tahun 2011 hingga 2012. Kenaikan ini terus bertambah sebesar 3.123 wisatawan pada tahun berikutnya. Namun pada tahun 2014 jumlah kunjungan wisatawan justru menunjukkan penurunan sebanyak 2.734, dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2015 dengan jumlah kunjungan mencapai 19.512. Temuan data lapangan mengindikasikan bahwa tren penurunan jumlah kunjungan wisatawan disebabkan oleh kurang memadainya infrastruktur, salah satunya adalah akses jalan menuju desatinasi pariwisata.

b. Pertanian

Pertanian merupakan sektor penyumbang PDRB terbesar kedua di Kabupaten Paser. Sektor ini perlu dikembangkan untuk mendukung perekonomian masyarakat dari sektor non-tambang dan sebagai strategi untuk mengunrangi ketergantungan terhadap sumber daya alam yang tidak terbaharukan. Guna mendukung hal tersebut maka diperlukan data yang berguna untuk menentukan target dan indikator keberhasilan pengembangan pertanian pada masa mendatang.

Salah satu sub sektor pertanian yang menjadi andalan Paser adalah perkebunan. Subsektor perkebunan memainkan peran yang cukup signifikan dalam pembangunan sosial ekonomi masyarakat dan wilayah Kabupaten Paser melalui kontribusi terhadap pembentukan PDRB, penyediaan lapangan kerja dan pengembangan wilayah sentra produksi.

Berdasarkan laporan terakhir bahwa hingga tahun 2015, Kabupaten Paser memiliki areal perkebunan seluas 200.803,08 Ha dengan komoditas yang dominan adalah kelapa sawit seluas 182.144,78 Ha dan karet 14.168,50 Ha. Khusus untuk komoditas kelapa sawit, luas tanaman menghasilkan sebesar 90.410,91 Ha dengan produksi mencapai sebesar 1.364.429.385 Kg Tandan Buah Segar (TBS. Untuk angka

produktivitas kelapa sawit adalah sebesar 15.091,42 kg/Ha. Angka produktivitas ini masih rendah dibandingkan dengan standar produktivitas kelapa sawit untuk kelas lahan S3 (kurang sesuai) yang dikeluarkan oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan, yaitu 23.000 kg/Ha. Sementara untuk komoditas karet luas tanaman menghasilkan seluas 6.216,50 Ha dengan produksi sebesar 10.537.504 Kg (dalam bentuk Lump). Angka produktivitas karet sebesar 1.695,09 kg/Ha,

Keberadaan kebun sawit yang cukup signifikan di Kabupaten Paser diikuti dengan hadirnya beberapa pabrik pengolahan sawit menjadi Crude Palm Oil (CPO). Hingga tahun 2016, jumlah pabrik kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Paser sebanyak 13 unit dengan kapasitas produksi mencapai 272.885,88 Ton Crude Palm Oil (CPO) per tahun.

Tabel 54: Luas Areal, Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan di Kabupaten Paser Tahun 2015

No	Komoditas	Luas Tanaman Belum Menghasilkan (Ha)	Luas Tanaman Menghasilkan (Ha)	Produksi (Kg)	Produktivitas (Kg/Ha)	Jumlah Petani (KK)
1	Kelapa sawit	89.817,87	90.410,91	1.364.429.385,00	15.091,42	25.229,00
2	Karet	7.391,00	6.216,50	10.537.504,00	1.695,09	8.304,00
3	Kelapa Dalam	97,00	2.457,50	5.109.260,00	2.079,05	4.878,00
4	Kopi	50,30	944,00	206.325,00	218,56	2.147,00
5	Lada	18,75	77,00	29.595,00	384,35	287,00
6	Kakao	7,50	180,00	64.700,00	359,44	443,00
7	Aren	12,50	28,50	14.017,00	491,82	134,00
8	Sagu	15,25	9,50	18.300,00	1.926,32	79

Sumber: Statistik Sektor Dinas Pertanian dan Perkebunan Tahun 2015, Kabupaten Paser

Usaha agribisnis di sektor pertanian secara monokultur dengan harga jual yang fluktuatif mengikuti pasar global, sangat rentan terhadap resiko. Salah satu yang perlu didorong dan ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan ekonomi Kalimantan Timur adalah pengembangan industri berbasis CPO di Kabupaten Paser.

Selain sub sektor perkebunan, sub sektor peternakan juga cukup potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Paser. Jenis ternak yang banyak dikembangkan masyarakat adalah ayam buras/kampung dengan jumlah populasi mencapai 820.515 pada tahun 2015. Jenis ternak lain yang menunjukkan perkembangan cukup signifikan dari tahun ke tahun adalah sapi dan kambing. Pada tahun 2011, populasi sapi sebesar 12.189, dan angka bertambah hamper dua kali lipat pada tahun 2015, yaitu sebesar 20.502.

Tabel 55: Populasi Ternak Menurut Jenisnya Tahun 2015

No.	Jenis Ternak	Jumlah Populasi				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Sapi	12.189	15.580	15.326	17.345	20.502
2	Kerbau	553	537	467	528	683
3	Kambing	4.847	5.105	4.547	6.468	7.199
4	Domba	58	23	180	33	48
5	Rusa	-	-	-	34	36
6	Babi	-	-	424	2.885	2.766
7	Ayam Ras/Pedaging	55.150	135.850	-	-	25.000
8	Ayam Buras/Kampung	837.449	169.851	273.256	1.019.348	820.515
9	Itik	12.890	16.012	18.408	35.648	32.702
10	Angsa	-	-	180	165	149
11	Ayam Petelur	1,275	215	400	3.466	-

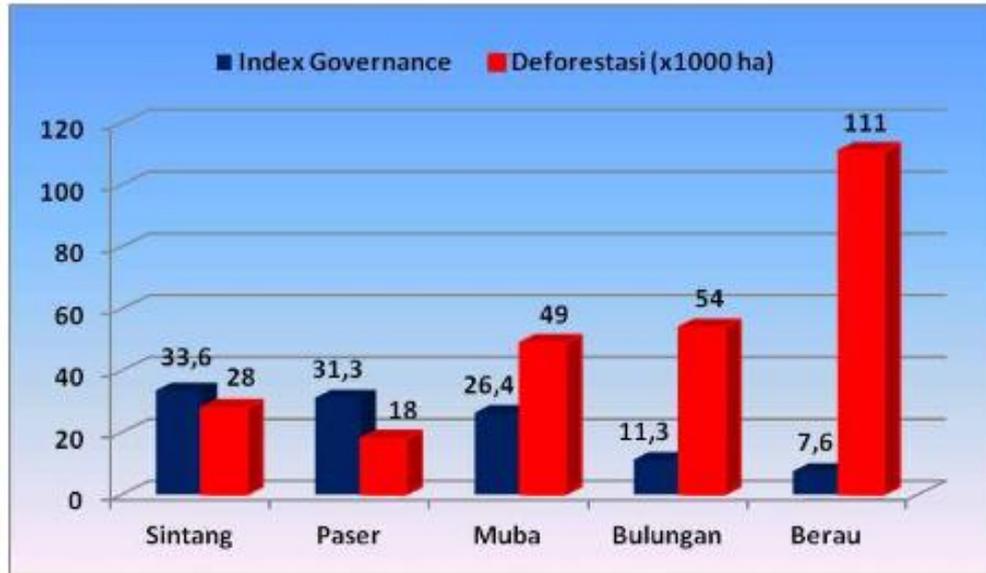
Sumber: Kabupaten Paser dalam Angka 2016

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap satu komoditas adalah diversifikasi jenis usaha. Untuk mewujudkan hal ini diperlukan inovasi teknologi yang sesuai untuk diintegrasikan dalam usaha pokok dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, dan secara teknis, ekonomis, maupun sosial budaya dinilai layak dan dapat diterima secara berkelanjutan. Sistem integrasi ternak dan tanaman perkebunan (SITT) sapi-sawit, merupakan salah satu alternatif upaya diversifikasi yang dapat terus ditumbuh-kembangkan pada perkebunan rakyat.

c. Kehutanan

Kerusakan hutan merupakan persoalan utama yang dihadapi oleh Kabupaten Paser. Dalam rangka menentukan strategi serta prioritas program rehabilitasi hutan pada masa mendatang, diperlukan data tentang kerusakan kawasan hutan di Kabupaten Paser. Berikut merupakan sajian datanya:

Diagram 4: Luas Kerusakan Hutan di Kabupaten Paser Tahun 2013



Sumber: Data olahan FWI analisis citra satelit ETM+7; Index Kelola Hutan, ICEL-FITRA Menurut data tersebut, luas kerusakan hutan di Kabupaten Paser mencapai 18.000 hektar. Isu kerusakan hutan di Kabupaten Paser selalu dihubungkan dengan pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam ekstraktif, terutama sektor pertambangan dan penggalian sebagai penyumbang PDRB terbesar. Hal ini menjadi sebuah permasalahan serius bagi lingkungan terutama jika dihubungkan dengan upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mengedepankan green economy.

d. Perdagangan

Bagian ini menggambarkan kinerja sektor perdagangan di Kabupaten Paser. Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan prioritas program pengembangan di sektor perdagangan, salah satu data dasar yang perlu diketahui adalah jumlah pedagang dan jumlah kelompok pedagang. Berikut adalah data tentang jumlah pedagang di Kabupaten Paser:

Tabel 56: Jumlah Pedagang dan Kelompok Pedagang di Kabupaten Paser 2011-2015

Tahun	Jumlah Pedagang	Jumlah Kelompok Pedagang
2011	6.666	1
2012	7.644	1
2013	8.785	1
2014	10.282	2
2015	9.593	2

Sumber: Buku statistik Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Paser dan Hasil Wawancara

Jumlah pedagang di Kabupaten Paser selalu menunjukkan kenaikan dari tahun 2011 hingga 2014. Hal ini mengindikasikan bahwa pasar di Kabupaten Paser terus berkembang sehingga pedagang di dalamnya mengalami kenaikan, walaupun kondisi ekonomi nasional sangat fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir.

Dibandingkan dengan jumlah pedagang yang semakin berkembang pesat, jumlah kelompok pedagang di Kabupaten Paser justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Dalam kurun waktu 3 tahun, dari 2011 hingga 2013 tidak ada penambahan jumlah kelompok pedagang. Pada tahun 2014 kelompok pedagang hanya bertambah 1, kelompok tersebut adalah kelompok pedagang pasar tradisional. Temuan lapangan mengindikasikan bahwa penambahan kelompok pedagang tersebut terjadi karena adanya perlawanan pedagang pasar tradisional terhadap pasar modern yang semakin menjamur.

e. Perindustrian

Perindustrian merupakan bagian penting dalam pertumbuhan ekonomi. Data mendasar yang diperlukan untuk menentukan strategi pengembangan industri di Kabupaten Paser adalah data mengenai pertumbuhan industri. Berikut adalah uraian data tentang pertumbuhan riil PDRB industri di Kabupaten Paser selama 2011-2015:

Tabel 57: Pertumbuhan Riil PDRB Industri di Kabupaten Paser 2011-2015

Tahun	Pertumbuhan riil PDRB Industri Pengolahan
2011	3,5 %
2012	8,29 %
2013	2,64 %
2014	5,79 %
2015	7,05%

Sumber: PDRB Kabupaten Paser Menurut Lapangan Usaha 2012-2015

Pertumbuhan riil PDRB industri rumah tangga di Kabupaten Paser menunjukkan kondisi yang sangat fluktuatif, walaupun jumlahnya tidak besar jika dibandingkan dengan industri pertambangan. Namun fluktuasi pertumbuhan riil PDRB ini mengindikasikan bahwa naik dan turunnya perekonomian nasional turut serta berpengaruh terhadap fluktuasi pertumbuhan riil PDRB industri di Kabupaten Paser. Kenaikan pertumbuhan riil PDRB industri pengolahan terjadi pada tahun 2011 hingga 2012, yaitu sebesar 4,79%. Angka tersebut turun drastis sebesar 5,65% pada tahun 2013. Walaupun akhirnya mengalami kenaikan pada akhir 2014 sampai 2015 masing-masing sebesar 3,15% dan 1,26%. Namun kenaikan ini tidak signifikan jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2012.

D. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Pada level tersebut, optimalisasi potensi daerah merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapaitingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Sesuai dengan Permendagri No. 54 Tahun 2010, maka kondisi daerah Kabupaten Paser terkait aspek daya saing daerah dapat dilihat dari beberapa variabel, yaitu fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi dan fokus sumber daya manusia (SDM).

1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Pada level tersebut, optimalisasi potensi daerah secara optimal merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam

mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Sesuai dengan Permendagri No. 54 Tahun 2010, maka kondisi daerah Kabupaten Paser terkait aspek daya saing daerah dapat dilihat dari beberapa variabel berikut.

Beberapa indikator yang digunakan dalam kerangka analisis kinerja atas kemampuan ekonomi daerah adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Hal ini bisa dilihat dari pengeluaran konsumsi pangan dan non-pangan per kapita. Dalam skema daya saing daerah, kedua indikator tersebut digunakan untuk mengetahui potensi maupun hambatan bagi daerah dari segi ekonomi untuk mencapai visi pembangunan di bidang ekonomi. Berikut adalah tabel yang memuat data tentang konsumsi rumah tangga sub-sektor pangan dan non-pangan per kapita di Kabupaten Paser:

Tabel 58: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita (%) 2011-2015

Tahun	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita (%)	
	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Sub sektor Pangan Per Kapita	Konsumsi Rumah Tangga Sub sektor Non-Pangan Per Kapita
2011	52,31	47,69
2012	48,93	51,07
2013	50,71	49,29
2014	50,34	49,66
2015	-	-

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Paser 2012-2015

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, indikator tersebut masuk ke dalam fokus kemampuan ekonomi daerah yang menentukan daya saing Kabupaten Paser. Belum ada data terkini tentang konsumsi rumah tangga per kapita. Namun berdasarkan data tahun 2011 hingga 2012, terdapat penurunan konsumsi rumah tangga sub-sektor pangan per kapita sebesar 3,38%. Hal ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan masyarakat Paser di bidang ekonomi sempat menurun. Dua tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2013 dan 2014 konsumsi rumah tangga sub-sektor pangan per kapita meningkat lebih baik, walaupun masih sangat fluktuatif dan belum mampu berada di level yang sama pada tahun 2011. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja perekonomian di Paser masih perlu ditingkatkan.

Berbeda halnya dengan konsumsi rumah tangga sub-sektor pangan per kapita, konsumsi rumah tangga non-pangan per kapita juga mengalami kenaikan sebesar 3,38% pada tahun 2011 sampai 2012. Namun mengalami penurunan yang fluktuatif pada

tahun 2013 dan 2014 jika dibanding dengan pencapaian tahun 2012. Data ini mengindikasikan bahwa terjadi penurunan kesejahteraan masyarakat di bidang konsumsi non-pangan.

2. Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur

Fasilitas wilayah atau infrastruktur sangat menentukan daya saing daerah. Aspek ini menjadi faktor strategis dalam memperlancar mobilitas dan arus informasi dari dan menuju Kabupaten Paser, serta tidak kalah penting adalah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, salah satunya dalam mendukung iklim investasi.

a. Perhubungan

Kondisi layanan dasar perhubungan sangat penting dalam aspek daya saing daerah. Hal tersebut terjadi karena urusan perhubungan berkaitan erat dengan mobilisasi masyarakat serta barang dan jasa. Dua hal tersebut sangat berpengaruh pada kondisi ekonomi, khususnya di Kabupaten Paser. Guna memetakan aspek layanan dasar. Berikut merupakan data tentang panjang jalan dan jumlah kendaraan di Kabupaten Paser:

Tabel 59: Panjang Jalan (Km) di Kabupaten Paser Tahun 2011-2015

Jenis Jalan	2011	2012	2013	2014	2015
Kabupaten dan Desa	906	948	1075	1075	1005,19
Jalan Provinsi	286,54	276,33	276,33	276,33	276,33
Jalan Nasional	224,71	224,71	224,71	224,71	224,71

Sumber: Kabupaten Paser dalam Angka 2016

Dari tabel tersebut diketahui bahwa jalan kabupaten dan desa, dari tahun 2011 hingga 2015 panjang jalan Kabupaten dan desa menunjukkan pertambahan sepanjang 99,19 km, walaupun kurang dari 50% yang kondisinya masuk ke dalam kategori baik. Hal ini mengindikasikan bahwa jalan adalah salah satu persoalan utama yang harus diperhatikan dalam peningkatan daya saing dalam pembangunan.

Seperti halnya jalan, kendaraan juga merupakan salah satu persoalan transportasi di Kabupaten Paser. Berikut adalah data tentang jumlah kendaraan di Kabupaten dari tahun 2011 hingga 2014:

Tabel 60: Jumlah Kendaraan di Kabupaten Paser Tahun 2011-2015

Tahun	Jumlah Kendaraan
2011	96.883
2012	142.656
2013	113.683
2014	109.667
2015	152.672

Sumber: Polres Paser 2014

Tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah kendaraan di Kabupaten Paser mengalami kenaikan sebesar 45.773 unit dari tahun 2011 hingga 2012. Akan tetapi kondisi tersebut tidak bertahan lama, karena pada tahun 2012 hingga 2013 jumlah kendaraan berkurang sebanyak 28.973 unit. Kemudian pada tahun 2013 hingga 2014, jumlah kendaraan justru semakin turun sebesar 4.016 unit, meskipun kemudian mengalami peningkatan sebesar 43.005 unit pada tahun 2015. Hal ini mengindikasikan bahwa kendaraan, khususnya kendaraan umum sebagai alat transportasi darat masih perlu ditingkatkan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Tabel 61: Jumlah Barang dan Orang yang Terangkut Angkutan Umum 2011-2015

Tahun	Jumlah Barang (Ton)	Jumlah Orang
2011	631.322	336.081
2012	609.322	359.223
2013	889.416	326.225
2014	647.416	233.863
2015		249.991

Sumber: SIPD Dinas Perhubungan Kabupaten Paser 2014

Jumlah orang dan barang yang terangkut angkutan umum menunjukkan angka yang masih fluktuatif. Dari tahun 2011 hingga 2012 terjadi penurunan jumlah barang sebesar 22.010 ton. Sedangkan pada tahun 2013, jumlah barang yang terangkut naik sebesar 280.094 ton. Jumlah tersebut kembali mengalami penurunan sebesar 242.000 ton pada tahun 2014. Ada indikasi bahwa naik dan turunnya jumlah barang tersebut terjadi karena kondisi jalan dan kendaraan yang kurang memadai di Kabupaten Paser.

Sama halnya dengan jumlah barang yang terangkut, jumlah orang yang terangkut juga masih fluktuatif. Artinya bahwa angka tersebut belum menunjukkan kenaikan atau penurunan yang stabil. Walaupun sempat mengalami kenaikan pada tahun

2011 hingga 2012, jumlah orang yang terangkut kembali menunjukkan penurunan pada tahun 2012 hingga 2014. Ada indikasi bahwa penurunan tersebut terjadi karena sarana transportasi di Kabupaten Paser belum tersedia dengan baik.

b. Penataan Ruang

Bagian ini memaparkan mengenai kondisi tata ruang di Kabupaten Paser. Secara khusus indikator yang dianalisis adalah data mengenai luas wilayah produktif. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui potensi dan hambatan dalam pengembangan produktivitas dari segi tata ruang di Kabupaten Paser.

Tabel 62: Luas Wilayah Produktif (Ha) di Kabupaten Paser Tahun 2014

Tahun	Luas Wilayah Produktif
2014	872.488,86

Sumber: Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang Kabupaten Paser

Menurut data dari Dinas Bina Marga pada tahun 2014 di Kabupaten Paser terdapat 872.488,86 hektar luas wilayah produktif. Luas wilayah ini berpotensi untuk dikembangkan agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan merata.

c. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Bagian ini secara khusus menganalisis sumber daya internal instansi pemerintah Kabupaten Paser. Hal tersebut dilakukan guna mengetahui potensi dan hambatan dalam hal pengembangan kapasitas pemerintah daerah. Adapun data-data yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

Tabel 63: Jumlah Bank di Kabupaten Paser Tahun 2011-2015

Tahun	Jumlah Bank
2011	7
2012	7
2013	8
2014	9
2015	9

Sumber: Kabupaten Paser dalam Angka Tahun 2012-2015

Kabupaten Paser hanya memiliki 7 bank pada tahun 2011 hingga 2012. Jumlah ini naik menjadi 8 bank pada tahun 2013. Sama halnya dengan tahun 2013, pada tahun 2014 jumlah bank di Kabupaten Paser naik sebanyak 1 unit. Walaupun jumlah kenaikannya sedikit, bank tetap memiliki peran yang strategis bagi perekonomian

masyarakat Paser. Penambahan jumlah bank ini mengindikasikan bahwa perekonomian di Kabupaten Paser semakin membaik.

d. Lingkungan Hidup

Analisis kinerja atas lingkungan hidup secara khusus ditujukan pada data mengenai persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih. Hal tersebut dilakukan sebagai bahan pertimbangan terkait dengan potensi dan hambatan dalam hal menentukan program strategis menuju Paser yang bersih dan sehat.

Berkaitan dengan air bersih, Kabupaten Paser telah memiliki Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang bernama Tirta Kandilo. Perusahaan tersebut memiliki kantor pusat di Kota Tanah Grogot, dengan beberapa unit pengolahan yang terdistribusi cukup baik ke ibukota kecamatan dan sekitarnya. Mengingat lokasi ibukota kecamatan yang tersebar cukup jauh dari ibukota kabupaten, PDAM menggunakan unit-unit yang independen dengan jaringan layanan lokal. Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan data Inkesra Paser 2015 disebutkan bahwa untuk keperluan air minum pada tahun 2015, hanya 79,14% rumah tangga yang menggunakannya secara pribadi. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 64: Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Penggunaan Fasilitas Air Minum

Fasilitas Air Minum	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Sendiri	58,42	56,42	55,86	56,60	54,96	79,14
Bersama	31,54	28,19	16,79	13,92	21,12	14,91
Umum	4,56	6,45	11,68	7,32	6,79	5,02
Tidak ada	5,47	8,94	15,67	22,16	17,14	9,3

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Paser 2012-2015

Dari tabel tersebut terlihat bahwa penduduk yang masih menggunakan fasilitas air bersih milik bersama dan milik umum masih tinggi, walaupun sudah menunjukkan kondisi yang sangat fluktuatif selama lima tahun terakhir. Temuan lapangan menyebutkan bahwa ada sebagian warga yang belum memiliki fasilitas sendiri. Sehingga warga menggunakan fasilitas milik bersama dan umum. Angka penggunaan fasilitas air minum bersama selalu menunjukkan penurunan selama 2011 hingga 2015. Hal ini mengindikasikan bahwa layanan fasilitas air minum di Kabupaten Paser masih perlu ditingkatkan.

Di beberapa desa, seperti di Desa Muara Paser, belum menggunakan fasilitas layanan air minum bersih dari PDAM. Penduduk Desa tersebut memilih menggunakan air kemasan dan air sumur bor. Akibatnya, sebagian penduduk terserang penyakit muntaber karena sanitasi dan air minum yang digunakan kurang bersih. Sedangkan di Desa Sungai Tuak, penduduk justru menggunakan air sungai dan air kemasan untuk konsumsi rumah tangga. Hal ini mengindikasikan bahwa pelayanan PDAM belum mampu menjangkau wilayah-wilayah tersebut.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian kaitannya dengan ketersediaan air baku adalah menjaga Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai sumber air baku.

e. Komunikasi dan Informatika

Sub-bab khusus mengenai analisis kinerja dalam urusan komunikasi dan informatika pada aspek daya saing daerah diperlukan untuk mengetahui sejauh mana potensi dan hambatan daerah dalam memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini perlu dilakukan karena hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini sebagai penentu keberhasilan daerah dalam banyak hal. Adapun data-data yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

Tabel 65: Presentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik

Tahun	Presentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik	
	Listrik PLN	Listrik Non-PLN
2011	73,15	70,85
2012	70,85	19,92
2013	79,92	16,35
2014	76,45	17,56
2015	75,71	22,99

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Paser 2012-2015

Kekurangan sumber energi listrik merupakan salah satu persoalan utama bagi sektor komunikasi dan informatika di Kabupaten Paser. Hingga tahun 2015 hanya ada 75,71% rumah tangga yang menggunakan listrik. Persentase ini turun 0,74% dari tahun sebelumnya. Sementara dari tahun 2011 hingga 2013, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN masih sangat fluktuatif. Ada indikasi bahwa persoalan ini terjadi karena kurang memadainya pasokan daya listrik dan infrastruktur pendukung.

Untuk pemenuhan energi listrik terutama bagi masyarakat yang bermukim jauh dari jaringan listrik PLN, energi listrik alternatif, seperti, solar cell, micro hydro dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan rendahnya tingkat elektrifikasi.

3. Fokus Iklim Berinvestasi

Investasi merupakan salah satu faktor penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan, karena investasi berpengaruh pada kuantitas permodalan di suatu daerah, pembukaan lapangan kerja, permintaan dan penawaran, serta pengaruh lain yang berhubungan dengan kegiatan sosio-ekonomi masyarakat. Dalam rangka mengetahui potensi dan hambatan dalam berinvestasi di Kabupaten Paser, maka dilakukanlah analisis terhadap beberapa indikator dalam tabel berikut:

Berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) BPPPT Kabupaten Paser, pada tahun 2013, rata-rata lama pengurusan izin di Kabupaten Paser memakan waktu selama 5 jam. Hal ini berlaku untuk 6 jenis perijinan, seperti SIUP, TDP, IUI, TDI, IMB dan HO. Lima jam adalah waktu tergolong cepat jika berpijak kepada prosedur standar operasional BPPPT. Cepatnya proses perijinan ini mengindikasikan bahwa proses perijinan semakin baik dan mampu mendukung peningkatan jumlah investasi di Kabupaten Paser.

Tabel 66: Jumlah dan Macam Retribusi Daerah Tahun 2011-2015

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015
Retribusi jasa umum	14	14	14	14	14
Retribusi jasa usaha	11	11	11	11	11
Retribusi perijinan tertentu	5	5	5	5	5
Jumlah Retribusi	30	30	30	30	30

Sumber: SIPD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Paser 2015

Dari tahun 2011 hingga 2015 Kabupaten Paser memiliki 30 jenis retribusi. Retribusi tersebut berhubungan dengan iklim investasi. Ketiga puluh retribusi tersebut terdiri dari 14 retribusi jasa umum, 11 retribusi jasa usaha dan 5 retribusi perijinan tertentu yang ditangani oleh BPPPT Kabupaten Paser. Belum ada indikasi bahwa jenis-jenis retribusi tersebut berpengaruh kurang baik terhadap iklim investasi di Kabupaten Paser selama lima tahun terakhir.

Tabel 67: Jumlah Perda yang mendukung Iklim Usaha di Kabupaten Paser 2011-2015

Jenis Perda	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Perda yang terkait perijinan	12	12	12	12	12
Jumlah Perda terkait lalu lintas barang dan jasa	Na	Na	Na	Na	Na
Jumlah Perda terkait ketenagakerjaan	Na	Na	Na	Na	Na

Sumber: Standar Operasional Prosedur BPMPT Kabupaten Paser

Jumlah perda yang terkait perijinan di Kabupaten Paser berjumlah tetap dari tahun 2011 hingga 2015. Hal ini mengindikasikan bahwa perlu adanya penyesuaian jumlah perda tentang perijinan dengan isu-isu strategis di bidang perijinan, sehingga perda mampu mendukung aspek daya saing Kabupaten Paser dengan baik.

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi investasi adalah kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat setempat. Tabel 2.60 menunjukkan bahwa Angka kriminalitas di Kabupaten Paser mengalami penurunan sebesar 31% pada tahun 2014. Menurut Kapolres Paser, penurunan persentase terbesar berada pada kasus pencurian dengan kekerasan, yaitu sebesar 22% hingga 67%. Walaupun demikian, angka kriminalitas di sejumlah kasus menunjukkan peningkatan. Beberapa kasus tersebut seperti kasus pelecehan seksual anak, dari 1 kasus pada tahun 2013 menjadi 12 kasus pada tahun 2014. Kasus pengeroyokan, dari 13 kasus pada tahun 2013 menjadi 16 kasus pada tahun 2014, serta pembunuhan yang meningkat menjadi 3 kasus pada tahun 2014. Hal ini mengindikasikan bahwa perlindungan anak adalah persoalan strategis yang patut diperhatikan. Sedangkan kasus pengeroyokan dan pembunuhan harus ditekan dengan tindak pencegahan yang lebih intensif.

Tabel 68: Angka Kriminalitas di Kabupaten Paser Tahun 2011-2015

Tahun	Angka Kriminalitas
2011	192 Kasus
2012	350 Kasus
2013	425 Kasus
2014	292 Kasus
2015	218 kasus

Sumber: Polres Paser 2014

4. Fokus Sumber Daya Manusia

SDM merupakan faktor terpenting dalam rangka mewujudkan visi pembangunan, karena SDM secara teknis menentukan kualitas kerja pemerintah mulai dari aspek perencanaan hingga implementasi. Selain itu, kualitas SDM berpengaruh signifikan terhadap perwujudan visi pemerintah daerah karena bersentuhan langsung dengan aspek strategis maupun teknis. Sehingga, analisis kinerja pada fokus SDM dimaksudkan untuk mengetahui potensi serta kelemahan yang dialami. Adapun data yang dibutuhkan dalam analisis kinerja adalah yang berkaitan dengan fokus SDM yaitu rasio ketergantungan (jumlah penduduk usia 0-15 s/d >64 dibagi dengan jumlah penduduk usia 16 s/d 64 tahun).

Tabel 69: Rasio Ketergantungan di Kabupaten Paser Tahun 2010-2014

Tahun	Rasio Ketergantungan		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
2010	49,48	52,67	50,91
2011	54,82	46,75	50,98
2012	50,46	53,76	51,98
2013	52,08	52,10	52,09
2014	46,43	53,37	49,61

Sumber: Kabupaten Paser dalam Angka Tahun 2011-2015

Jumlah rasio ketergantungan di Kabupaten Paser selalu menunjukkan angka yang dinamis. Dari tahun 2010 hingga 2011, terjadi kenaikan jumlah sebesar 0,07%. Tahun berikutnya naik sebesar 1%. Kenaikan ini terus berlanjut pada tahun 2013, yaitu sebesar 0,11%. Sebaliknya, pada tahun 2014 jumlah rasio ketergantungan di Kabupaten Paser justru turun 2,48%. Penurunan ini mengindikasikan bahwa serapan tenaga kerja di Kabupaten Paser mulai menunjukkan perbaikan.

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Bab ini akan menguraikan gambaran pengelolaan keuangan daerah pada periode sebelumnya dan kerangka pendanaan untuk satu periode mendatang. Pengelolaan keuangan daerah terkait dengan kinerja dan kebijakan pengelolaan keuangan dalam bentuk APBD maupun kondisi neraca daerah. Gambaran tersebut selanjutnya berguna untuk mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial, alokasi belanja dan pengeluaran daerah yang lebih optimal dan sesuai kebutuhan, potensi pembiayaan daerah jika terdapat defisit anggaran, serta kondisi aset dan kewajiban daerah yang harus dipenuhi. Analisis di dalam Bab 3 ini, diharapkan dapat menjadi pembelajaran dan salah satu dasar pengalokasian anggaran dalam kerangka RPJMD untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran daerah.

A. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Kinerja keuangan daerah yang termaktub dalam APBD, secara umum dapat dilihat dari anggaran pendapatan yang direncanakan dalam awal tahun anggaran dan realisasinya di akhir tahun anggaran. Selanjutnya akan dapat dilihat apakah realisasinya akan sesuai, melebihi, atau bahkan kurang dari yang direncanakan. Kinerja keuangan juga dapat dilihat dari segi komponen penyusun pendapatan daerah. Komponen pendapatan daerah dapat bersumber dari kinerja pemerintah daerah secara langsung dalam bentuk pendapatan asli daerah, maupun bersumber dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selain itu, lancarnya kinerja keuangan dapat diidentifikasi dari kondisi neraca daerah yang merupakan gambaran nominal aset daerah di satu sisi, dan di sisi lain merupakan kewajiban-kewajiban daerah yang harus dipenuhi.

1. Kinerja Pendapatan Daerah

Kinerja pendapatan daerah di Kabupaten Paser dalam kurun waktu tahun 2011 hingga 2015 hampir selalu melebihi target anggaran, kecuali di tahun 2013 dan 2015 target anggaran pendapatan tidak terpenuhi, yaitu hanya mampu mencapai realisasi anggaran masing-masing sebesar 95,42% dan 82,34%. Berdasarkan laporan realisasi anggaran, hal ini disebabkan oleh beberapa komponen pembentuk pendapatan daerah yang tidak memenuhi target anggaran, antara lain retribusi daerah, dana alokasi khusus, dana

penyesuaian, dana bagi hasil pajak, dan bahkan dari dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam).

Tabel 70: Proporsi Realisasi Pendapatan Terhadap Anggaran Pendapatan Kabupaten Paser Tahun 2011-2015

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2011	1,369,218,222,575.17	1,606,039,874,952.42	117.30
2	2012	1,834,348,610,799.00	2,006,104,956,176.53	109.36
3	2013	2,104,796,681,637.84	2,008,391,101,761.18	95.42
4	2014	2,084,624,142,975.62	2,125,759,692,755.87	101.97
5	2015	2.358.880.738.480,22	1.942.320.695.224,29	82,34

Sumber: BPKAD

Walaupun realisasi pendapatan hampir selalu melebihi target anggaran, namun kapasitas pendapatan daerah masih tergantung pada dana perimbangan. Artinya Kabupaten Paser masih seperti daerah lain pada umumnya di Indonesia, yaitu ketika dana transfer dari pemerintah pusat menjadi komponen utama penyusun pendapatan daerah. Ketergantungan pada dana transfer tersebut terutama berasal dari dana bagi hasil bukan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Paser masih merasakan keberlimpahan hasil sumber daya alam batu bara. Namun sebagaimana kewaspadaan berbagai elemen di Paser, maka kondisi tersebut perlu dicarikan alternatif sumber pendapatan. Mengingat batu bara merupakan sumber daya yang memiliki limitasi waktu proses eksploitasi atau tidak terbarukan, sekaligus bersifat rentan terhadap berbagai kondisi global.

Tabel 71: Rata-rata Pertumbuhan dan Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2011 – 2015

No	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	Proporsi Rata-rata Terhadap Total Pendapatan
		2011	2012	2013	2014	2015		
1	Pendapatan Asli daerah	111.504.056.786,42	70.910.353.405,90	97.601.467.545,18	111.052.683.654,88	104.953.830.748,79	2,4	5,14
1.1	Pajak daerah	14.755.526.769,10	14.683.831.994,14	35.674.176.249,72	43.452.036.191,20	24.773.780.639,39	30,3	1,36
1.2	Retribusi daerah	15.891.873.187,08	13.482.492.515,77	15.930.385.792,25	15.469.144.088,18	8.361.371.479,04	(11,5)	0,79
1.3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	8.363.137.666,17	6.919.808.190,96	8.232.520.711,84	7.331.754.134,42	6.380.602.789,10	(5,6)	0,40
1.4	Lain-lain PAD yang sah	72.493.519.164,07	35.824.220.705,03	37.764.384.791,37	44.799.749.241,08	65.438.075.841,26	4,9	2,57
2	Dana Perimbangan	1.164.383.890.346,00	1.418.669.782.479,00	1.321.724.837.616,00	1.377.664.405.076,00	1.264.213.318.793,00	2,8	68,45
2.1	Dana bagi hasil pajak	71.578.516.441,00	118.348.360.976,00	126.976.172.824,00	98.805.506.432,00	80.617.474.983,00	1,9	5,33
2.2	Dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam)	875.942.491.905,00	1.011.956.911.503,00	881.453.386.792,00	964.828.440.644,00	916.291.861.810,00	4,03	48,56
2.3	Dana alokasi umum	208.204.282.000,00	280.966.870.000,00	301.950.343.000,00	308.251.183.000,00	260.435.716.000,00	7,2	14,12
2.4	Dana alokasi khusus	8.658.600.000,00	7.397.640.000,00	11.344.935.000,00	5.779.275.000,00	6.868.266.000,00	2,1	0,43
3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	330.151.927.820,00	516.524.820.291,63	589.064.796.600,00	637.042.604.025,00	573.153.545.682,50	17,2	26,40
3.1	Hibah	318.065.000,00	22.405.088.691,63	71.540.000,00	3.561.886.000,00	-	3907,78	3,46
3.2	Dana darurat	-	-	-	-	-		
3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah	165.491.855.000,00	194.853.514.000,00	252.701.418.600,00	250.752.830.025,00	266.338.321.125,00	13,2	11,09

	daerah lainnya							
3.4	Transfer pemerintah pusat lainnya (Dana penyesuaian)	74.578.157.820,00	36.500.837.000,00	77.895.338.000,00	74.765.388.000,00	122.071.012.000,00	30,4	0,32
3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	89.763.850.000,00	262.765.380.600,00	258.396.500.000,00	307.962.500.000,00	182.011.250.000,00	46,6	11,51
3.6	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	2.732.962.557,50		
	Total Pendapatan	1.606.039.874.952,42	2.006.104.956.176,53	2.008.391.101.761,18	2.125.759.692.755,87	1.942.320.695.224,29	5,6	

Sumber: Anggaran dan realisasi APBD Kabupaten Paser 2011-2015

Signifikannya nominal dana perimbangan tersebut juga ditunjang oleh DAU (Dana Alokasi Umum). Meskipun Kabupaten Paser memiliki kapasitas fiskal yang baik dengan besarnya dana bagi hasil sumber daya alam, namun nominal dana alokasi umum tetap mengalami peningkatan setiap tahun. Terdapat berbagai sebab yang mempengaruhi peningkatan DAU, antara lain kebutuhan PNS daerah dan terdapat celah fiskal yang sempit, yaitu ketika kapasitas fiskal yang tinggi sekaligus diiringi dengan kebutuhan fiskal yang tinggi pula. Selain dari dana bagi hasil dan alokasi umum, kapasitas fiskal semakin kuat dengan signifikannya sumber lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dari kondisi tersebut, Kabupaten Paser tidak mengalami persoalan kesenjangan fiskal. Sebagaimana peta kapasitas fiskal daerah yang diidentifikasi Kementerian Keuangan, Kabupaten Paser memiliki kapasitas fiskal sangat tinggi, yaitu dengan indeks 3,73. Indeks sangat tinggi tersebut terdapat di hampir semua kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur, sekaligus cermin dari kapasitas fiskal provinsi sendiri yang menempati indeks terbesar kedua se-Indonesia, yaitu sebesar 3,66 (Permen Keuangan No. 33/PMK.07/2015).

Meskipun demikian, ketika berbicara kemandirian daerah yang dikaitkan dengan kemampuan dalam menghasilkan sumber pendapatan asli daerah, maka Kabupaten Paser masih harus berupaya lebih keras. PAD belum menunjukkan angka signifikan sebagai komponen penyusun pendapatan daerah. Bahkan beberapa komponennya, termasuk dari hasil kerja BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) mengalami angka pertumbuhan minus. Hal ini menjadi agenda penting untuk dilaksanakan perbaikan kinerja dan intensifikasi hasil BUMD, agar lebih signifikan menjadi penyumbang PAD dalam komponen hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan.

Sedangkan dalam komponen retribusi daerah, juga masih perlu upaya peningkatan. Upaya peningkatan tersebut berhubungan dengan kualitas layanan objek retribusi itu sendiri. Sebagai contoh di bidang pariwisata, retribusi dari usaha pariwisata yang dijalankan pemerintah daerah masih minim. Ini disebabkan oleh tingkat kesulitan akses menuju destinasi wisata sekaligus kualitas destinasi yang belum memiliki daya saing. Selain peningkatan kualitas, potensi peningkatan retribusi tetap terbuka lebar dengan masih aktifnya berbagai objek retribusi, antara lain terminal dan dermaga.

Komponen PAD yang memiliki tingkat pertumbuhan paling tinggi adalah pajak daerah. Namun kedepan terdapat hal penting yang patut diperhatikan dalam komponen

ini, terutama terkait dengan penarikan beberapa kewenangan daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan provinsi sebagaimana termaktub dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu kewenangan yang ditarik ke provinsi adalah penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan. Padahal selama ini kewenangan tersebut menjadi salah satu sumber pajak Kabupaten Paser yang menyusun pendapatan asli daerah paling signifikan.

2. Neraca Daerah

Kinerja keuangan daerah dilihat pula dari kondisi neraca daerah, karena merupakan gambaran posisi keuangan yang terdiri dari aset, kewajiban serta ekuitas dana. Sebagai sebuah kinerja keuangan, aset daerah dilihat dari nilai uang yang terkandung di dalam aset, sekaligus manfaat sosial dan ekonomi kepada pemerintah daerah maupun masyarakat yang merupakan hasil pembelanjaan daerah di masa lalu. Namun untuk memenuhi kebutuhan daerah, kadang kondisi keuangan tidak mendukung sepenuhnya, sehingga mengharuskan pemerintah daerah mengambil hutang. Hutang sebagai sebuah kewajiban daerah, diambil dalam jangka panjang atau jangka pendek. Selanjutnya dapat dilihat antara nilai aset daerah dengan kewajiban mempunyai selisih yang besar atau kecil. Selisih itu disebut ekuitas dana.

Tabel 72: Neraca Komparatif dan Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Paser 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan (%)
1.	Aset						
1.1.	Aset lancar	530,352,277,334.34	639,410,752,984.23	344,607,109,661.25	427,594,751,618.52	349.910.382.151,05	-0,48
1.2.	Investasi jangka panjang	163,387,387,081.22	158,974,906,743.31	162,761,785,328.83	162,871,058,175.78	169.751.550.578,83	-0,08
1.3.	Aset tetap	3,506,517,766,063.52	4,454,629,185,744.27	5,540,961,694,129.82	6,464,826,294,095.74	5.651.764.459.595,36	22,69
1.4.	Dana cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0
1.5.	Aset lainnya	41,383,542,797.77	80,734,128,980.15	67,726,862,123.89	58,392,063,655.07	15.699.665.501,47	21,73
	Jumlah Aset	4,241,640,973,276.85	5,333,748,974,451.96	6,116,057,451,243.79	7,113,684,167,545.11	6.187.126.057.826,72	18,90
2.	Kewajiban						
2.1.	Kewajiban jangka pendek	0.00	0.00	0.00	7,308,745,267.00	91.216.332.525,98	~
2.2.	Kewajiban jangka panjang	26,804,764,179.50	38,553,357,650.50	0.00	0.00	0,00	-18,72
	Jumlah Kewajiban	26,804,764,179.50	38,553,357,650.50	0.00	7,308,745,267.00	91.216.332.525,98	-28,08
3.	Ekuitas Dana						
3.1.	Ekuitas dana lancar	530,352,277,334.34	639,410,752,984.23	344,607,109,661.25	420,286,006,351.52	0,00	-1,19
3.2.	Ekuitas dana investasi	3,684,483,931,763.01	4,655,784,863,817.23	5,771,450,341,582.54	6,686,089,415,926.59	0,00	22,05
3.3.	Ekuitas dana cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0
	Jumlah Ekuitas Dana	4,214,836,209,097.35	5,295,195,616,801.46	6,116,057,451,243.79	7,106,375,422,278.11	6.095.909.725.300,74	19,10
	Jumlah Ekuitas Dana dan Kewajiban	4,241,640,973,276.85	5,333,748,974,451.96	6,116,057,451,243.79	7,113,684,167,545.11	6.187.126.057.826,72	18,90

Sumber: Lampiran Perda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2011-2015

Selama tahun 2011 hingga 2015, aset tetap mengalami persentase pertumbuhan paling tinggi. Dengan penambahan aset tetap berarti Kabupaten Paser merealisasikan belanja modal yang besar untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah. Kebutuhan itu antara lain peningkatan aksesibilitas berupa jalan, serta peningkatan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan sektoral maupun untuk menunjang operasional pemerintah daerah, misalnya melalui peningkatan dan pembangunan aset tetap berupa jaringan, irigasi, mesin, serta gedung dan bangunan.

Dari sisi kewajiban, Kabupaten Paser baru memiliki hutang jangka pendek pada tahun 2014. Adapun kewajiban tersebut muncul karena terdapat hutang pada pihak ketiga dan hutang jangka pendek lainnya. Sedikit berbeda pada komponen kewajiban jangka panjang. Kabupaten Paser memiliki hutang tersebut pada dua tahun berturut-turut awal periode pembangunan jangka menengah, namun pada dua tahun terakhir mampu menihilkan komponen tersebut. Ini menandakan adanya kemampuan keuangan daerah yang cukup baik untuk menjalankan pembangunan.

Dengan kondisi aset dan kewajiban tersebut, maka ekuitas dana Kabupaten Paser memiliki angka pertumbuhan rata-rata sebesar 19,10%. Nilai riil ekuitas dana selalu meningkat dari tahun ke tahun, terutama disusun dari ekuitas dana investasi dan ekuitas dana lancar, sedangkan ekuitas dana cadangan selalu nihil.

Guna memahami kinerja keuangan daerah, neraca daerah perlu dianalisis lebih mendalam. Metode analisisnya, pertama dilakukan melalui perhitungan rasio likuiditas, yaitu kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini terdiri dari rasio lancar yang merupakan perbandingan antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek, serta rasio quick, yaitu rasio antara aset lancar dikurangi persediaan, dengan kewajiban jangka pendek. Melihat tabel 3.3. di atas, Kabupaten Paser tidak memiliki kewajiban jangka pendek dari tahun 2011 hingga 2013, maka hal ini berpengaruh pada perhitungan rasio likuiditas, yaitu memiliki angka perhitungan tidak terdefinisi (~), baik untuk rasio lancar maupun rasio quick. Artinya aset Kabupaten Paser tidak terpengaruh adanya keharusan untuk memenuhi kewajiban. Adapun di tahun 2014 ketika Pemerintah Kabupaten Paser memiliki hutang jangka pendek, maka rasio likuiditas memunculkan angka 58,50 untuk rasio lancar dan 57,27 untuk rasio quick. Dengan besarnya angka perhitungan kedua rasio tersebut,

pemerintah daerah tidak mengalami kesulitan untuk mencairkan asetnya guna memenuhi kewajiban jangka pendek.

Tabel 73: Rasio Likuiditas Kabupaten Paser Tahun 2011-2014

No	Uraian	2011	2012	2013	2014
1	Rasio Lancar (Current Ratio)	~	~	~	58,50
2	Rasio Quick (Quick Ratio)	~	~	~	57,27

Sedangkan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya, analisis neraca dilakukan melalui perhitungan rasio solvabilitas, yaitu kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio ini terdiri dari rasio total hutang terhadap total aset, dan rasio hutang terhadap modal atau ekuitas. Berbeda dengan rasio likuiditas, yaitu semakin besar rasio semakin mudah bagi pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya, namun dalam rasio solvabilitas ini ketika nilai rasio semakin kecil maka semakin baik rasio kewajiban jangka panjang untuk dipenuhi oleh aset daerah dan ekuitas dana. Hasil perhitungan rasio solvabilitas sebagaimana di dalam tabel 3.5., memperlihatkan bahwa angka perhitungan sangat kecil di bawah 0,75. Artinya Pemerintah Kabupaten Paser tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya.

Tabel 74: Rasio Solvabilitas Kabupaten Paser Tahun 2011-2014

No	Uraian	2011	2012	2013	2014
1	Rasio total hutang terhadap total aset	0,006319	0,007228	0	0,001027
2	Rasio hutang terhadap modal	0,00636	0,007281	0	0,001028

B. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Kapasitas fiskal sekaligus pendapatan daerah yang sangat tinggi, secara ideal diharapkan menggerakkan pembangunan Kabupaten Paser yang progresif. Namun hal ini membutuhkan syarat berupa kebijakan pengelolaan keuangan yang baik. APBD sebagai sebuah produk kebijakan, telah memberikan gambaran tentang tata kelola keuangan daerah. Khususnya tata kelola berupa alokasi dan proporsi anggaran pada setiap urusan pemerintahan atau bidang pembangunan yang disesuaikan dengan visi hingga sasaran yang akan dicapai daerah.

1. Belanja Daerah

Di dalam anggaran belanja daerah, komponen belanja selalu dianggarkan melebihi anggaran pendapatan. Namun dalam kurun waktu tahun 2011 hingga 2015, realisasi komponen belanja tidak pernah melebihi target anggaran belanja yang dicanangkan, sekaligus tidak melebihi realisasi pendapatan. Realisasi yang tidak melebihi anggaran ini, satu sisi bisa bernilai positif terutama sebagai bentuk penghematan anggaran, sedangkan di sisi lain bisa bermakna sebaliknya karena menjadi pertanda serapan anggaran untuk pembangunan yang tidak optimal.

Tabel 75: Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Paser Tahun 2011-2015

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2011	1,615,444,975,010.07	1,367,724,299,979.71	84.67
2	2012	2,324,829,477,543.61	1,928,428,642,191.43	82.95
3	2013	2,660,328,351,695.76	2,292,916,011,204.00	86.19
4	2014	2,347,486,320,243.94	2,059,405,397,887.61	87.73
5	2015	2.681.809.918.951,41	2.230.721.237.667,61	83,18

Sumber: BPKAD

Realitas di atas tidak menjadi indikator tunggal dalam melihat kinerja belanja daerah. Lebih detail, dapat ditelaah kinerja komponen belanja tidak langsung dan belanja langsung. Struktur belanja Kabupaten Paser paling banyak telah direalisasikan untuk belanja langsung. Kegiatan pembangunan untuk pemenuhan kebutuhan daerah dan masyarakat ini telah disuplai oleh belanja modal dan barang sebesar 58,93% dari total realisasi belanja.

Tabel 76: Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Kabupaten Paser Tahun 2011-2015

No	Uraian Belanja	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	Proporsi Rata-rata (%)
		2011	2012	2013	2014	2015		
1	Belanja tidak langsung	636,611,834,954.40	728,199,551,738.65	839,436,569,236.71	892,521,238,229.93	1.006.340.847.137,40	12,0	41,06
2	Belanja langsung	731,112,465,025.31	1,200,229,090,452.78	1,453,479,441,967.29	1,166,884,159,657.68	1.232.194.718.521,44	21,85	58,93
Total Belanja		1,367,724,299,979.71	1,928,428,642,191.43	2,292,916,011,204.00	2,059,405,397,887.61	2,238,535,565,658.84	16,57	

Sumber: Lampiran Perda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2011-2015

Tabel 77: Rincian Realisasi Belanja Langsung Kabupaten Paser Tahun 2011-2015

No	Rincian Belanja Langsung	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	Proporsi Rata-rata Terhadap Total Belanja (%)
		2011	2012	2013	2014	2015		
1	Belanja tanah	35,488,158,213.00	58,134,384,348.00	114,222,361,802.00	54,610,424,984.00	47,287,793,476.00	36,03	3,31
2	Belanja barang dan jasa	201,414,844,477.00	228,804,292,014.23	332,173,769,853.00	310,800,982,478.00	286.154.531.461,23	17,44	14,04
3	Belanja peralatan dan mesin	94,296,604,954.00	139,106,690,937.00	94,443,660,541.00	91,377,126,400.00	43,846,524,934.00	4,05	5,66
4	Belanja bangunan dan gedung	142,359,935,762.47	276,936,574,203.55	340,427,952,223.29	260,438,949,457.68	247,115,088,736.21	31,32	13,06
5	Belanja jalan, irigasi dan jaringan	257,480,214,118.84	497,089,738,950.00	571,677,947,158.00	448,675,349,065.00	461,074,346,621.00	28,84	22,83
6	Belanja aset tetap lainnya	72,707,500.00	157,410,000.00	522,990,390.00	793,887,273.00	4,019,885,900.00	133,51	0,018
7	Belanja aset lainnya			10,760,000.00	187,440,000.00	0,00	1642,00	0,002

Sumber: Lampiran Perda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2011-2015

Proporsi rata-rata dari belanja langsung paling besar direalisasikan untuk belanja jalan, irigasi dan jaringan. Di dalamnya termasuk pembangunan infrastruktur baru maupun pemeliharaan. Alokasi dan realisasi belanja ini menyesuaikan dengan urgensi kebutuhan pembangunan, terutama terkait jaringan infrastruktur jalan yang belum terbangun merata di Kabupaten Paser. Apalagi ketidaktersediaan infrastruktur yang memadai tersebut menimbulkan persoalan serius ketika berdampak pada lambannya berbagai aktivitas ekonomi.

Tabel 78: Rincian Realisasi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Paser Tahun 2011-2015

No	Rincian Belanja Tidak Langsung	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	Proporsi Rata-rata Terhadap Total Belanja (%)
		2011	2012	2013	2014	2015		
1	Belanja pegawai	465,116,922,612.54	531,103,592,750.83	579,487,176,126.25	618,134,911,319.50	663.665.022.986,00	9,98	29,20
2	Belanja subsidi	-	2,500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	0	-90	0,05
3	Belanja hibah	46,875,709,200.00	57,604,684,000.00	37,876,745,492.80	34,206,657,829.00	89.435.260.939,00	-7,01	2,43
4	Belanja bantuan sosial	20,315,450,000.00	3,317,000,000.00	21,188,930,000.00	47,343,598,000.00	27.500.000.000,00	192,85	1,22
5	Belanja bantuan keuangan	101,184,459,800.29	129,559,888,646.00	199,290,740,117.66	192,486,750,560.11	224.957.733.212,40	26,15	8,03
6	Belanja tidak terduga	3,119,293,341.57	4,114,386,341.82	1,092,977,500.00	349,320,521.32	782.830.000,00	-36,52	0,12

Sumber: Lampiran Perda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2011-2015

Dalam komponen belanja tidak langsung sebagian besar dialokasikan untuk belanja pegawai, yaitu sebagai bentuk belanja gaji beserta operasi dalam menjalankan tugas dan fungsi aparatur pemerintahan. Selebihnya, realisasi belanja tidak langsung yang termasuk besar adalah untuk belanja bantuan keuangan. Meskipun berada di dalam komponen belanja tidak langsung, belanja bantuan keuangan berpengaruh pada bergeraknya pembangunan daerah, terutama di pedesaan, karena di dalamnya termasuk anggaran untuk ADD (Alokasi Dana Desa). Terlebih Kabupaten Paser telah memiliki kebijakan ADD dengan nominal besar sebelum disyaratkan oleh regulasi tentang desa yang terbaru. Sedangkan alokasi untuk belanja hibah dan sosial terkait pula dengan pilihan kebijakan dan program yang diambil oleh pemerintah daerah. Di Kabupaten Paser terdapat program unggulan yang menyerap komponen anggaran ini, terutama program rumah layak huni serta program untuk memenuhi visi daerah sebagai kabupaten yang agamais.

2. Pembiayaan Daerah

Di dalam pelaksanaan APBD, kadang tidak bisa dihindari adanya realisasi belanja daerah yang melebihi realisasi pendapatan, maka mengharuskan adanya pembiayaan daerah untuk menutup defisit. Pembiayaan daerah sendiri mempunyai dua komponen penyusun, yaitu pertama penerimaan pembiayaan yang di Kabupaten Paser selama kurun waktu 2011 hingga 2014 bersumber dari penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah. Sedangkan kedua adalah pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah dan pembayaran pokok hutang.

Tabel 79: Rincian Pembiayaan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2011-2015

No	Uraian Pembiayaan		2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan Rata-rata
1	Penerimaan Pembiayaan	Penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA)	264,228,500,488.14	490,574,332,974.61	568,291,670,057.92	271,092,177,268.32	329.309.180.471,19	16,40
		Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	6,203,880,497.76	102,083,328.21	85,416,653.22	92,708,334.60	11.458.333,33	-35,38
2	Pengeluaran Pembiayaan	Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	11,800,000,000.00	0.00	12,760,000,000.00	8,230,000,000.00	6.380.000.000,00	-67,75
		Pembayaran pokok utang	6,373,622,984.00	61,060,230.00	0.00	0.00	0.00	-99,52
Pembiayaan Netto (Penerimaan pembiayaan - pengeluaran pembiayaan)			252,258,758,001.90	490,615,356,072.82	555,617,086,711.14	262,954,885,602.92	322.940.638.804,52	18,35

Sumber: Lampiran Perda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2011-2015

Secara riil, kinerja pembiayaan daerah mempunyai peran penting pada tahun 2013 ketika APBD mengalami defisit. Penutup defisit itu, terutama bersumber dari penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dan ditopang oleh sumber pembiayaan berupa penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah. Pembiayaan daerah memang masih bergantung pada SiLPA yang mempunyai pertumbuhan rata-rata sebesar 16,40%. Sedangkan pada tahun 2011, 2012 serta 2014, yaitu ketika terjadi surplus riil, maka penerimaan pembiayaan justru semakin menambah sisa lebih pembiayaan anggaran tahun tersebut.

Tabel 80: Penutup Defisit Rill Anggaran Kabupaten Paser 2011-2014

No	Uraian Pendapatan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Realisasi pendapatan daerah	1,606,039,874,952.42	2,006,104,956,176.53	2,008,391,101,761.18	2,125,759,692,755.87	1.942.320.695.224,29
	Dikurangi realisasi					
2	Belanja daerah	1,367,724,299,979.71	1,928,428,642,191.43	2,292,916,011,204.00	2,059,405,397,887.61	2.237.954.602.158,84
3	Pengeluaran pembiayaan daerah	18,173,622,984.00	61,060,230.00	12,760,000,000.00	8,230,000,000.00	6.380.000.000,00
A	Surplus/defisit rill	220,141,951,988.71	77,615,253,755.10	(297,284,909,442.82)	58,124,294,868.26	
	Ditutup oleh realisasi penerimaan pembiayaan :					
4	Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya	264,228,500,488.14	490,574,332,974.61	568,291,670,057.92	271,092,177,268.32	329,309,180,471.19
5	Pencairan dana cadangan					
6	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan					
7	Penerimaan pinjaman daerah					
8	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	6,203,880,497.76	102,083,328.21	85,416,653.22	92,708,334.60	11.458.333,33
9	Penerimaan piutang daerah					
B	Total realisasi penerimaan pembiayaan daerah	270,432,380,985.90	490,676,416,302.82	568,291,670,057.92	271,184,885,602.92	322,940,638,804.52
A-B	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	490,574,332,974.61	568,291,670,057.92	271,092,177,268.32	329,309,180,471.19	26,861,677,932.97

Sumber: Lampiran Perda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2011-2015

Besaran sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan di atas, bisa menjadi potensi penting bagi pembiayaan anggaran pada tahun anggaran selanjutnya, terutama jika terjadi defisit realisasi APBD. Namun dalam melihat kebijakan dan kinerja keuangan daerah, besaran SiLPA tersebut patut ditelaah lebih mendalam untuk mengetahui komponen penyusunnya.

Dari Tabel 81 tersebut, memperlihatkan bahwa komponen penyusun SiLPA paling besar adalah sisa penghematan belanja atau karena akibat lainnya. Ini artinya satu sisi pemborosan belanja daerah mampu ditekan, namun dalam sejumlah kasus atau kinerja sektoral justru kurang optimal dalam menyerap anggaran belanja, sehingga dapat berpengaruh pada pencapaian sasaran pembangunan. Selain itu, SiLPA juga tersusun dari penerimaan pendapatan daerah yang melampaui target anggaran, terutama dalam komponen PAD dan dana perimbangan. Pelampauan pendapatan ini bagian dari kinerja keuangan daerah yang cukup baik, meskipun selama kurun waktu 2011 hingga 2015 pelampauan itu mengalami trend fluktuatif, dan bahkan penurunan. Dari trend tersebut, juga dapat dibaca adanya relasi berbanding terbalik di dalam SiLPA, yaitu antara komponen pelampauan pendapatan dengan komponen penghematan belanja atau akibat lainnya. Relasi itu adalah jika pelampauan pendapatan semakin tinggi maka semakin kecil nominal penghematan belanja atau akibat lainnya. Sebaliknya, jika pelampauan pendapatan semakin menurun, maka semakin tinggi nominal sisa penghematan belanja atau akibat lainnya. Relasi itu merupakan gambaran kinerja keuangan daerah dalam menggali sumber pendapatan yang berpengaruh pada realisasi belanja daerah untuk pembangunan.

Tabel 81: Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Paser 2011-2015

No	Uraian	2011		2012		2013		2014		2015	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
	Jumlah SiLPA	490,574,332,974.61	100	568,291,670,057.92	100	271,092,177,268.32	100	329,309,180,471.19	100	329,309,180,471.19	
1	Pelampauan penerimaan PAD	28,209,469,787.25	5,75	9,500,660,572.90	1,67	28,667,336,833.34	10,57	4,370,431,524.26	1,32	0	
2	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	212,977,167,090.00	43,41	165,131,321,513.00	29,05	(123,433,350,454.00)	-45,53	37,260,358,231.00	11,31	0	
3	Pelampauan lain-lain pendapatan daerah yang sah	(4,364,984,500.00)	-0,88	(2,875,636,708.37)	-0,50	(1,639,566,256.00)	-0,60	(495,239,975.00)	-0,15	0	
4	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	247,720,675,030.36	50,49	396,400,835,352.18	69,75	367,412,340,491.76	135,53	288,080,922,356.33	87,48	0	
5	Pelampauan pembiayaan netto	6,032,005,567.00	1,22	134,489,328.21	0,02	85,416,653.22	0,03	92,708,334.60	0,02	11,458,333.33	

Sumber: Lampiran Perda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2011-2014

C. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan yang akan diuraikan dalam sub bab ini terdiri dari, *pertama* strategi dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah untuk lima tahun kedepan. Hal ini merupakan kerangka acuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, serta optimalisasi belanja daerah dan pembiayaan daerah. Sedangkan *kedua*, pada komponen keuangan daerah tersebut, baik itu pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah, akan disertai proyeksi masing-masing jumlahnya untuk lima tahun mendatang.

Sedangkan secara makro, pengelolaan anggaran daerah juga harus memperhatikan berbagai asas dalam pengelolaan keuangan. Hal ini agar pengelolaan anggaran selaku nadi dari pembangunan daerah diharapkan dapat linier untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran daerah, serta untuk menghindari adanya persoalan terkait pertanggungjawaban dalam penggunaan anggaran daerah. Berbagai asas tersebut adalah sebagai berikut:

- Akuntabilitas, yaitu asas pengelolaan keuangan agar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik maupun internal institusi pemerintahan
- Profesionalitas, yaitu membutuhkan prasyarat berupa kapasitas dan integritas yang tinggi, terutama dari aparatur pemerintah daerah
- Proporsionalitas, yaitu anggaran daerah dapat dikelola secara tepat dengan distribusi yang sesuai dengan perencanaan atau berdasarkan kebutuhan pembangunan daerah
- Transparansi, yaitu pengelolaan anggaran yang terbuka sehingga dapat memperkuat kepercayaan publik
- Pengawasan yang dapat dilaksanakan oleh publik maupun badan pengawasan dan pemeriksa yang bebas dan mandiri

1. Strategi dan Kebijakan Peningkatan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah terdiri dari tiga komponen, yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Ketiganya mempunyai strategi dan kebijakan sebagai berikut:

- Dalam komponen PAD selaku representasi kinerja riil pemerintah daerah dalam menggali pendapatan daerah secara mandiri, strategi peningkatan pendapatan yang

dijalankan adalah melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan publik sebagai penghasil PAD, penyesuaian tarif pajak, serta koordinasi lintas instansi. Strategi tersebut mempunyai arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Menjalankan kebijakan alternatif ketika ada beberapa komponen pembentuk PAD yang tidak lagi menjadi wewenang kabupaten, yaitu melalui identifikasi dan pengoptimalan sumber PAD potensial, misalnya melalui revitalisasi destinasi pariwisata
 - b. Meningkatkan hasil pendapatan dari retribusi dan pajak daerah melalui peningkatan manajemen pemungutan disertai peningkatan kualitas pelayanan objek retribusi/pajak daerah
 - c. Pelaksanaan penyesuaian tarif pajak berdasarkan pertimbangan kepentingan umum daerah, termasuk dalam rangka meningkatkan investasi ke daerah yang berbasis pada potensi daerah, menyerap tenaga kerja lokal, serta mampu menjaga keberlanjutan alam, sosial, dan ekonomi
 - d. Meningkatkan hasil BUMD melalui revitalisasi manajemen dan peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan BUMD
 - e. Melakukan koordinasi secara intensif antar instansi vertikal maupun horizontal, yaitu dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kepolisian, SKPD teknis penghasil, dan kecamatan
 - f. Penataan kelembagaan dan peningkatan kualitas pelayanan SKPD penghasil beserta Unit Pelayanan Teknis
 - g. Optimalisasi berbagai aset daerah, misalnya sarana olahraga
- Bagi daerah kabupaten/kota termasuk Kabupaten Paser, komponen dana perimbangan masih menempati peran strategis dalam menyusun pendapatan daerah, karena itu strategi yang dijalankan terutama melalui peningkatan koordinasi vertikal. Strategi tersebut mempunyai arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan antar kabupaten/kota dalam pengelolaan dana perimbangan
 - b. Optimalisasi dana perimbangan dari sumber daya alam batu bara melalui peningkatan akurasi data sebagai dasar pembagian hasil sumber daya alam

- c. Upaya peningkatan jumlah DAU ketika terjadi penurunan DBH melalui koordinasi dengan Kemendagri dan Kemenkeu
 - d. Menjalankan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, pajak orang pribadi dalam negeri (PPh OPDN), PPh 21, dan BPHTB, disertai upaya sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak
 - e. Identifikasi kebutuhan daerah untuk disesuaikan dengan peruntukkan Dana Alokasi Khusus (DAK)
- Dalam komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah, strategi yang dijalankan melalui koordinasi dengan provinsi dan kabupaten/kota. Strategi tersebut mempunyai arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, terutama dalam rangka bagi hasil pajak/retribusi serta alokasi bantuan keuangan dari provinsi dan kabupaten/kota lainnya
 - b. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, terutama dalam hal transfer dana penyesuaian
 - Selain melalui ketiga komponen pendapatan di atas, upaya akselerasi pembangunan daerah juga dapat ditunjang melalui peningkatan kemitraan dengan lembaga non pemerintah atau sektor swasta. Hal ini bertujuan untuk menghimpun dan mengoptimalkan peran CSR (corporate social responsibility) dan PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan), sekaligus agar bersinergi dalam kerangka rencana pembangunan daerah. Kecenderungan pendapatan daerah yang mengalami penurunan dibanding dengan pendapatan daerah lima tahun terakhir maka upaya pencarian sumber pendapatan lain yang selama ini belum tergarap oleh Pemerintah Daerah perlu dipertimbangkan. Salah satu sumber pendapatan daerah yang secara konstitusional dapat dilakukan pemerintah daerah adalah “Pinjaman Daerah”. Alternatif pendapatan ini dapat dipertimbangkan untuk menutup defisit belanja yang cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

2. Strategi dan Kebijakan Optimalisasi Belanja Daerah

Belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung yang keduanya menjadi penentu berlangsungnya pembangunan daerah, untuk itu dibutuhkan strategi pengalokasian belanja daerah yang tepat sasaran dan tujuan, yaitu melalui :

- Strategi penganggaran berbasis kinerja, yaitu berdasarkan pada indikator kinerja yang jelas dan terukur. Indikator kinerja yang digunakan adalah pencapaian kinerja dalam tahun anggaran/periode sebelumnya maupun indikator kinerja yang terdapat dalam dokumen perencanaan
- Selanjutnya penganggaran disinergikan dengan berbagai dokumen perencanaan, baik itu perencanaan jangka menengah dalam bentuk RPJMD dan renstra SKPD maupun perencanaan teknis setiap tahun dalam bentuk RKPD dan renja SKPD
- Strategi penganggaran berbasis urgensi kebutuhan daerah dan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran daerah.

Strategi di atas dijalankan melalui berbagai kebijakan belanja daerah yang berdasarkan kapasitas riil keuangan daerah yang terdiri dari:

- a. Prioritas Utama : merupakan belanja daerah yang digunakan untuk menjalankan program pembangunan daerah yang menjadi unggulan kepala daerah, bersifat wajib dan mengikat, mempunyai manfaat yang luas kepada publik, serta untuk melaksanakan amanah kebijakan nasional, terutama anggaran pendidikan sebesar 20% dan kesehatan sebesar 10%.
- b. Prioritas Pendukung I : merupakan belanja daerah berdasarkan program prioritas dalam setiap SKPD
- c. Prioritas Pendukung II : merupakan belanja tidak langsung daerah yang antara lain adalah belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, dan tambahan penghasilan PNS
- d. Kebijakan belanja daerah langsung juga diarahkan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan sehingga dapat dinikmati seluruh elemen masyarakat Kabupaten Paser, serta mampu menyerap tenaga kerja dan mengentaskan kemiskinan
- e. Alokasi belanja tidak langsung, terutama berupa belanja bantuan sosial dan belanja keuangan diarahkan untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan akselerasi pembangunan desa serta sebagai stimulus bagi berbagai kelompok masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah

3. Strategi dan Kebijakan Optimalisasi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah dilaksanakan ketika terjadi defisit anggaran, yaitu ketika pendapatan daerah tidak mampu memenuhi kebutuhan belanja daerah. Pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, mempunyai arah kebijakan sebagai berikut :

- Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya yang dimasukkan sebagai sumber penerimaan APBD, namun dengan besaran SiLPA yang diupayakan seminimal mungkin dari tahun ke tahun
- Penyertaan modal pada BUMD disertai upaya revitalisasi kelembagaan dan peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan BUMD
- Penyertaan modal daerah terutama dari dana yang bersumber dari bagi hasil sumber daya alam batu bara. Kebijakan ini sebagai bentuk menjaga keberlanjutan pendapatan daerah ketika hasil sumber daya alam semakin menurun.

4. Proyeksi APBD 2017-2021

Proyeksi APBD Kabupaten Paser untuk periode 2017-2021 disusun dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain berupa trend APBD pada periode lima tahun sebelumnya, baik dari sisi pendapatan maupun pembelanjaan. Di samping itu, tidak kalah penting adalah dengan memperhatikan dinamika perekonomian secara umum. Dalam hal ini, faktor yang menjadi perhatian penting bagi Kabupaten Paser adalah terkait sisi pendapatan, terutama pada komponen dana perimbangan. Komposisi dana perimbangan Kabupaten Paser sangat dipengaruhi oleh Dana Bagi Hasil (DBH), yaitu bagi hasil sumber daya alam. Memperhatikan realitas pada periode sebelumnya serta proyeksi kondisi perekonomian kedepan, maka DBH diprediksi akan mengalami penurunan. Kondisi tersebut diharapkan bisa diantisipasi dengan mengoptimalkan sumber pendapat lainnya, terutama dengan memproyeksi kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) meskipun tetap disesuaikan dengan kapasitas internal pemerintah daerah selaku institusi penghasil PAD.

Tabel 82: Proyeksi Pendapatan, Pengeluaran Wajib Mengikat serta Pembelanjaan Langsung Daerah Kabupaten Paser 2017-2021

No	Uraian Pendapatan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Pendapatan Daerah	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	86,850,148,008.72	95,570,780,570.00	100,954,846,553.40	106,364,984,280.45	112,917,971,544.00	120,298,239,196.80
2	Dana Perimbangan	1,610,857,519,548.00	1,360,794,564,360.00	1,408,443,401,290.80	1,457,862,953,329.52	1,509,123,404,429.41	1,562,297,897,187.29
3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	554,767,743,000.00	327,010,032,982.50	376,394,656,521.98	397,260,358,417.64	430,482,224,757.67	437,191,263,777.15
	Total Pendapatan	2,252,475,410,556.72	1,783,375,377,912.46	1,885,792,904,366.18	1,961,488,296,027.61	2,052,523,600,731.08	2,119,787,400,161.24
	Belanja Wajib dan Mengikat						
1	Gaji pegawai		328,000,000,000.00	336,200,000,000.00	344,605,000,000.00	353,220,125,000.00	362,050,628,125.00
	TPP		276,000,000,000.00	276,000,000,000.00	276,000,000,000.00	276,000,000,000.00	276,000,000,000.00
2	Alokasi Dana Desa (ADD)		129,599,482,320.00	134,137,466,789.60	138,844,090,793.29	143,726,038,517.09	148,790,275,922.60
3	Operasional kantor		98,378,773,322.00	99,362,561,055.22	100,356,186,665.77	101,359,748,532.43	102,373,346,017.75
4	Bantuan keuangan desa		3,165,685,611.70	3,209,340,800.00	3,260,526,324.00	3,378,960,986.20	3,517,015,003.60
5	Gaji PTT		116,220,053,291.00	116,220,053,291.00	116,220,053,291.00	116,220,053,291.00	116,220,053,291.00
6	Deviden Bank Kaltim		6,300,000,000.00	6,300,000,000.00	6,300,000,000.00	6,300,000,000.00	6,300,000,000.00
7	Hibah		20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
8	Bantuan kepada partai politik		676,000,000.00	676,000,000.00	676,000,000.00	676,000,000.00	676,000,000.00
9	Belanja tak terduga		1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
10	BPJS kesehatan PNS		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
11	Taspen Ketenagakerjaan		1,380,000,000.00	1,380,000,000.00	1,380,000,000.00	1,380,000,000.00	1,380,000,000.00
	Total Belanja Wajib dan Mengikat		991,219,994,544.70	1,004,985,421,935.82	1,019,141,857,074.06	1,033,760,926,326.72	1,048,807,318,359.95
	Belanja Langsung (Pendapatan – Belanja Wajib dan Mengikat)						
1	Belanja Langsung		792,155,383,367.76	880,807,482,430.36	942,346,438,953.55	1,018,762,674,404.36	1,070,980,081,801.28

Titik tekan proyeksi pendapatan bersumber dari PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Ketiganya diharapkan merepresentasikan kapasitas pendapatan daerah. Dalam arti lain, perhitungan pendapatan dalam proyeksi ini tidak mengikutsertakan perhitungan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bantuan keuangan dari Provinsi Kalimantan Timur. Dari hasil proyeksi pendapatan, selanjutnya digunakan untuk pembelanjaan terutama yang bersifat wajib dan mengikat. Setelah dikurangi pembelanjaan wajib dan mengikat, selanjutnya dapat diketahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk menjalankan belanja langsung bagi pembangunan Kabupaten Paser.

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini secara khusus akan membahas mengenai analisis lingkungan strategis terkait peluang, potensi, resiko dan tantangan pembangunan di Kabupaten Paser pada periode pembangunan sebelumnya, yaitu tahun 2011-2015. Pada pokok pembahasan mengenai permasalahan pembangunan akan diuraikan khusus mengenai apresiasi terhadap keberhasilan pembangunan di Kabupaten Paser, juga masukan dan analisis mengenai capaian-capaian pembangunan yang masih harus diberi ruang khusus pada penyusunan perencanaan pembangunan yang akan datang.

Diharapkan dengan pendekatan pada prioritas pembangunan mengenai sektor-sektor strategis dan krusial ini, arah, strategi, kebijakan dan target pembangunan jangka menengah bisa diperoleh demi keberhasilan penyusunan RPJMD Kabupaten Paser maupun implementasi pembangunan ke depannya. Data-data pembangunan yang diulas pada bab ini diambil dari Bab2: Gambaran Umum Kondisi Daerah.

A. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Dalam sub bab ini akan diulas dinamika pembangunan yang dialami oleh Kabupaten Paser. Dinamika pembangunan diulas secara komprehensif, mulai dari pembangunan yang terkait urusan wajib dasar, urusan wajib non-dasar, hingga urusan pilihan. Selain itu sub bab ini juga akan mengulas isu-isu pembangunan di level nasional (RPJMN), isu di level provinsi (RPJMD Provinsi Kalimantan Timur), RPJPD dan RTRW Kabupaten Paser. Dari analisis dinamika pembangunan tersebut, akan diketahui permasalahan krusial dan strategis yang telah, sedang, dan kemungkinan tetap menjadi tantangan bagi Kabupaten Paser ke depannya. Ulasan permasalahan tersebut, selanjutnya dijadikan sebagai pembelajaran dan pijakan untuk menyusun solusi strategis, yang secara umum juga mulai dijabarkan dalam sub bab ini.

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Analisis pembangunan terkait urusan wajib dasar menjadi sektor strategis dalam kerangka pembangunan jangka menengah. Urusan ini menjadi hajat hidup yang mendasar bagi seluruh warga negara, termasuk masyarakat Kabupaten Paser. Urusan wajib dasar terdiri dari urusan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur perhubungan.

a. Pendidikan

Berdasarkan data jumlah murid dan jumlah guru untuk tingkat pendidikan SD dan SMP, dapat dikatakan bahwa rasio murid terhadap guru untuk dua jenjang pendidikan ini di Kabupaten Paser sudah cukup baik. Namun, yang perlu disadari adalah disparitas terkait akses terhadap pendidikan antara masyarakat yang bermukim di kota dengan yang di desa atau di wilayah-wilayah pedalaman. Minimnya fasilitas pendidikan di wilayah pesisir dan pedalaman menjadi salah satu faktor penghambat terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan.

Kenyataan ini akan sangat berpengaruh terhadap angka partisipasi sekolah anak-anak di pesisir dan pedalaman. Selain berpengaruh terhadap angka partisipasi sekolah, kurangnya sarana pendidikan di wilayah pedalaman dan pesisir berpengaruh juga terhadap sebaran tenaga-tenaga guru yang lebih terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Tidak heran bila rasio murid terhadap guru di Kabupaten Paser terlihat cukup proporsional, tetapi dalam kenyataannya justru sedang tercipta kesenjangan antara masyarakat kota dengan masyarakat di pesisir dan pedalaman terkait akses terhadap pendidikan ini.

Kesenjangan akses ini dapat terlihat dari semakin berkurangnya jumlah murid pada level pendidikan yang lebih tinggi. Artinya sebaran sarana dan prasarana pendidikan untuk level SMP masih belum merata untuk seluruh wilayah, sehingga jumlah murid pada level pendidikan lanjutan jauh menurun jika dibandingkan dengan jumlah murid SD yang mencapai jumlah di atas 30 ribu (Kabupaten Paser dalam Angka 2016). Kondisi ini bisa terbaca dengan jelas ketika lama waktu sekolah yang digalakkan negara, yaitu pendidikan dasar 9 tahun, namun Kabupaten Paser selama lima tahun terakhir hanya mampu mencapai titik 8,3. Jika dibandingkan dengan daerah lain, kondisi ini masih cukup baik, namun ketika lama waktu sekolah ini didetailkan pada level analisis perkotaan dan pedesaan, maka akan terlihat bahwa lama waktu sekolah anak-anak di daerah perkotaan dan sentra perekonomian lebih lama dibanding anak-anak yang tinggal di pesisir dan pedalaman yang belum memiliki akses dan kualitas pendidikan yang kompetitif. Hal ini berimplikasi pada pola pikir anak-anak usia sekolah yang lebih berorientasi untuk mencari pekerjaan daripada peningkatan kualitas dan kapasitas.

Ketika pemerintah berupaya menyentuh sekaligus melecut semangat untuk meningkatkan daya saing dan profesionalitas yang tentunya berintikan kompetensi, maka pendidikan dasar, menengah dan bahkan pendidikan tinggi menjadi salah satu sarana strategis. Hal tersebut disertai pemerataan akses dan kualitas yang proporsional, karena pendidikan yang kompetitif tidak harus melebarkan kesenjangan. Salah satu solusi ideal dalam mengurai problematika ini adalah kesiapan pemerintah Kabupaten Paser dalam lima tahun mendatang untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, khususnya bagi wilayah yang berada jauh di pedalaman dan pesisir.

Dengan keterbatasan anggaran, penentuan prioritas penanganan menjadi sangat penting. Wilayah-wilayah yang tingkat partisipasi sekolah masih sangat rendah dan akses pendidikan yang sulit terjangkau, seperti di wilayah desa terjauh dan pesisir perlu mendapat prioritas penanganan.

b. Kesehatan

Jumlah fasilitas dan tenaga kesehatan di Kabupaten Paser dapat dikatakan cukup memadai untuk menjamin pelayanan kepada masyarakat. Namun dalam kenyataannya, angka kematian bayi, balita dan ibu hamil masih bersifat fluktuatif. Salah satu persoalan yang patut diperhatikan secara khusus adalah semakin meningkatnya angka kematian balita. Hal ini terkait dengan kualitas pelayanan imunisasi yang cenderung menurun. Padahal, imunisasi menjadi salah satu cara menekan angka kematian balita, sebab banyak penyakit yang dapat dicegah lewat pemberian vaksin saat imunisasi.

Persoalan utamanya kembali pada keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di pesisir atau wilayah pedalaman Kabupaten Paser. Realitas lain menunjukkan bahwa penyebab utama kematian balita ialah ispa dan diare. Hal ini berarti tenaga-tenaga kesehatan perlu disebar secara lebih merata untuk memberi pelayanan yang berkualitas terutama dalam mendorong masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.

Keterbatasan akses masyarakat terhadap sarana-sarana kesehatan perlu dicarikan solusi, salah satunya dengan menyebar tenaga-tenaga kesehatan ke wilayah pesisir dan pedalaman, serta mendorong mereka untuk memberi pelayanan kesehatan yang berkualitas dan tepat sasaran demi meningkatkan perilaku hidup sehat

masyarakat. Dengan demikian, kebijakan kesehatan tidak saja dengan membangun fasilitas kesehatan dan menunggu masyarakat datang ke fasilitas tersebut, tetapi lebih menggunakan strategi “jemput bola”, yaitu tenaga-tenaga kesehatan yang diterjunkan hingga ke wilayah-wilayah yang mengalami keterbatasan akses untuk sampai ke fasilitas-fasilitas kesehatan.

c. Infrastruktur Perhubungan

Perhubungan berkaitan erat dengan mobilisasi dan konektivitas masyarakat baik dalam wilayah Kabupaten Paser maupun dengan wilayah lain di luar Kabupaten Paser. Kendala yang paling banyak dihadapi dalam bidang perhubungan adalah minimnya moda transportasi serta belum memadainya sarana dan prasarana perhubungan. Di Kabupaten Paser, panjang jalan dengan kondisi baik tidak mencapai 50% dari keseluruhan panjang jalan, sedangkan sisanya adalah jalan dengan kondisi sedang, rusak dan rusak berat.

Isu strategis lain adalah jumlah kendaraan darat yang beroperasi sebagai sarana angkutan di Kabupaten Paser yang masih fluktuatif dalam kurun 2011-2013, bahkan mempunyai kecenderungan menurun. Minimnya moda transportasi darat dan kurang memadainya sarana dan prasarana serta kualitas layanan yang belum memuaskan menjadi persoalan yang harus dipecahkan oleh Pemerintah Kabupaten Paser. Artinya, selain meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perhubungan untuk menarik ketersediaan moda transportasi darat dalam jumlah besar, kualitas layanan transportasi masyarakat juga perlu ditingkatkan agar semakin baik.

Menurunnya jumlah penumpang angkutan darat menjadi bukti berkurangnya mobilitas masyarakat yang menggunakan fasilitas transportasi publik dan cermin ketidakpuasan masyarakat atas layanan yang diberikan serta kualitas sarana dan prasarana perhubungan. Ketiga aspek ini harus bisa ditangani pemerintah untuk memperlancar mobilitas masyarakat dan meningkatkan konektivitas antar wilayah di Kabupaten Paser.

2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Urusan yang bersifat wajib non-dasar juga merupakan bidang strategis yang perlu diketahui dinamika pembangunannya selama ini. Bidang-bidang dalam urusan ini terkait dengan urusan kependudukan dan pencatatan sipil yang berhubungan erat

dengan hak dasar warga negara, urusan keberlanjutan dan daya dukung lingkungan, urusan terkait berbagai sektor yang memperkuat perekonomian masyarakat, hingga urusan kebudayaan yang terkait dengan pembangunan identitas dan pelestarian tradisi luhur daerah.

a. *Lingkungan Hidup*

Aspek lingkungan hidup menjadi salah satu isu penting yang perlu diperhatikan, mengingat Kabupaten Paser sebagai salah satu wilayah dengan persentase aktivitas pertambangan yang cukup tinggi. Pencemaran lingkungan hidup oleh sampah B3 (bahan beracun dan berbahaya) akan menjadi persoalan bagi pengembangan potensi daerah selain tambang. Indikator persoalan ini salah satunya direpresentasikan oleh data yang menunjukkan bahwa hanya 9 perusahaan yang memiliki izin pembuangan air limbah.

Oleh karena itu, perlu peningkatan pengawasan dan memperketat perizinan bagi pembuangan limbah-limbah perusahaan yang beresiko tinggi mencemari lingkungan hidup, terutama tanah, udara dan air. Untuk itu perlu menata strategi pelestarian lingkungan hidup dengan mendorong investasi di luar tambang terutama bidang pertanian dan perkebunan yang terkait erat dengan lingkungan hidup. Selain mengurangi ketergantungan yang berlebihan pada sektor tambang, pertanian dan perkebunan tidak saja memberi sumbangsih bagi PDRB tetapi secara tidak langsung membawa pengaruh positif bagi kelestarian lingkungan hidup.

Hal ini akan sejalan dengan apa yang menjadi cita-cita Provinsi Kalimantan Timur yang memberi penekanan baru pada geliat ekonomi hijau (green economy) sebagai salah satu jawaban terhadap degradasi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan. Lingkungan Hidup adalah salah satu urusan penting yang harus bisa mengawal isu ini.

b. *Kependudukan dan Catatan Sipil*

Salah satu persoalan yang perlu diperhatikan secara serius oleh SKPD kependudukan dan catatan sipil adalah manajemen administrasi bagi penduduk lokal dan penduduk yang bermigrasi masuk ke Kabupaten Paser. Tujuannya adalah menghindari duplikasi data dari mereka yang bermigrasi ke Kabupaten Paser. Masyarakat yang bermigrasi ke Kabupaten Paser secara administratif juga harus

menjadi penduduk Paser. Dengan demikian, mereka masuk dalam hitungan sebagai wajib pajak Kabupaten Paser, sehingga kehadiran kelompok migran ini memberi sumbangsih bagi pendapatan Paser, bukan hanya meraup keuntungan dari Kabupaten Paser.

c. Tenaga Kerja

Komposisi penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Paser masih didominasi oleh sektor pertanian dengan kecenderungan yang terus menurun. Hal ini menandakan masih belum terbukanya bidang-bidang pekerjaan lain, terutama yang berhubungan dengan kewirausahaan. Mereka yang masuk dalam usia angkatan kerja di Kabupaten Paser masih memiliki kecenderungan untuk terjun ke bidang-bidang pekerjaan yang sudah ada, dan belum beralih ke upaya menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.

Di samping itu, kecenderungan ini dapat dilihat sebagai gambaran kualitas tenaga kerja yang tersedia di Kabupaten Paser. Maka, salah satu agenda penting adalah melakukan pendampingan secara rutin untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas angkatan kerja yang ada di Kabupaten Paser. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat sektor-sektor yang menjanjikan penyerapan tenaga kerja, misalnya sektor kelautan dan perikanan, serta kewirausahaan. Tujuannya adalah tersedianya angkatan kerja yang kompeten dan mampu bersaing, serta memiliki daya untuk membuka bidang-bidang pekerjaan baru di luar yang sudah ada. Kreativitas ini membutuhkan adanya stimulan berupa potensi-potensi perekonomian baru yang sekaligus bisa menjadi jawaban ketika sektor andalan seperti pertambangan semakin tidak menentu.

d. Koperasi dan UMKM

Meningkatnya jumlah koperasi dan UMKM di Kabupaten Paser dalam kurun waktu antara 2011 hingga 2015 mengindikasikan kecenderungan masyarakat Paser untuk secara mandiri menggerakkan ekonomi pada skala mikro. Namun, kecenderungan ini belum diimbangi oleh penanaman modal (investasi) karena para investor lebih memilih menanamkan modalnya pada sektor pertambangan.

Kenyataan ini perlu disikapi dengan seksama, terutama mengarahkan para investor agar bersedia terlibat dalam penanaman modal di luar sektor

pertambangan, misalnya berinvestasi dalam bidang pertanian, perkebunan dan perikanan. Selain itu, tidak kalah penting adalah keberadaan koperasi dan UMKM sebagai salah satu urusan yang mampu meningkatkan nilai tambah dari potensi-potensi non-tambang yang ada di Kabupaten Paser. Misalnya menjadikan koperasi dan UMKM sebagai unit pengelola hasil-hasil pertanian dan perkebunan sebelum dilepas ke pasar, sehingga hasil pertanian dan perkebunan tidak lagi berupa bahan mentah, tetapi sebagai bahan olahan yang telah ditingkatkan nilai jualnya lewat aktivitas di koperasi atau UMKM.

e. *Kebudayaan*

Persoalan yang perlu diselesaikan pemerintah dalam bidang kebudayaan adalah melakukan inventarisasi budaya-budaya lokal Kabupaten Paser. Hal ini perlu dilakukan demi mengenalkan secara tepat unsur-unsur kebudayaan lokal Kabupaten Paser sebelum ditampilkan dalam festival-festival atau pameran budaya. Identifikasi, inventarisasi dan pengembangan nilai dan pesona budaya ini berkorelasi positif terhadap kemampuan Kabupaten Paser dalam menemukan ruang-ruang kreatif baru baik dari segi sosial, politik, perekonomian dan lain sebagainya.

Pengenalan dan inventarisasi terhadap budaya asli masyarakat lokal Paser ini perlu dilakukan, mengingat Paser sebagai salah satu daerah yang didiami oleh banyak orang dari berbagai wilayah lain. Pengenalan atas budaya asli Paser serta nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya juga dapat dijadikan sebagai pegangan dalam menentukan semangat dan arah pembangunan Paser di masa yang akan datang.

f. *Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*

Pengembangan potensi serta pemberdayaan masyarakat desa yang didukung oleh alokasi dana yang lebih dari 1 miliar rupiah ditambah pengadaan satu unit mobil dan ragam fasilitas lain untuk masing-masing desa menunjukkan kesungguhan Pemerintah Kabupaten Paser dalam melaksanakan dan mensukseskan penguatan perekonomian dari desa. Namun demikian, kucuran dana yang sedemikian besar untuk setiap desa ini perlu mendapat kontrol yang ketat dari berbagai pemangku

kepentingan agar tidak terjadi penyalahgunaan dan dapat berkelanjutan dalam menggerakkan dan mewujudkan semangat desa membangun.

g. Komunikasi dan Informasi

Jaringan komunikasi yang ada di Kabupaten Paser meliputi jaringan telepon rumah dan telepon genggam, televisi, radio, internet serta surat kabar, baik nasional maupun lokal. Kehadiran jaringan komunikasi ini tentu saja mempermudah akses warga Kabupaten Paser terhadap beragam informasi atau berita yang berasal dari luar serta mempererat jalinan komunikasi antar warga. Ini juga menandakan keterbukaan wilayah Kabupaten Paser terhadap informasi-informasi yang berasal dari luar daerah.

Melihat pentingnya jaringan komunikasi dan informasi ini, maka pemerintah berkewajiban memperluas jangkauan jaringan komunikasi hingga ke wilayah-wilayah pedalaman agar masyarakat di wilayah tersebut juga bisa memperoleh akses bagi komunikasi dan memperoleh informasi dari dunia luar. Perluasan jaringan ini harus pula diimbangi dengan peningkatan kapasitas jaringan tidak saja GSM, tetapi juga 3G dan 3,5G sebagaimana yang terjadi dalam perkembangan jaringan komunikasi saat ini.

Selain kedua hal di atas, pemerintah harus menggunakan jaringan komunikasi dan informasi ini untuk mengembangkan keterbukaan dan kemudahan akses data informasi publik. Misalnya melalui website resmi milik pemerintah daerah yang datanya konsisten diperbaharui. Website pemerintah daerah diharapkan mampu menyajikan data-data yang dapat diakses bagi kepentingan publik, serta memanfaatkannya sebagai sarana untuk menerima masukan atau aspirasi masyarakat.

h. Ketahanan Pangan

Secara umum, tanaman padi, baik padi sawah maupun padi ladang masih menjadi komoditi pangan yang dominan di Kabupaten Paser. Hal ini terbukti dari besarnya lahan yang diperuntukkan bagi tanaman ini dibandingkan dengan lahan bagi tanaman pangan yang lain. Namun, persoalannya adalah ketika produksi tanaman padi meningkat, produksi tanaman pangan lain, misalnya jagung justru menurun.

Hal ini tidak berimplikasi bagus untuk jangka panjang, sebab akan menimbulkan ketergantungan berlebihan terhadap beras sebagai bahan pangan pokok.

Untuk mengatasi persoalan ini, yang perlu dilakukan adalah memaksimalkan diversifikasi tanaman pangan dan peningkatan produktivitas hasil panen secara berimbang. Artinya masyarakat disadarkan untuk melihat tanaman pangan lain di luar padi sebagai bahan pangan dan sumber makanan pokok. Keberhasilan meningkatkan produktivitas padi perlu diimbangi dengan peningkatan produktivitas tanaman lain misalnya jagung, singkong, dan ubi rambat. Kesemuanya adalah bahan pangan yang bila diupayakan peningkatan produktivitasnya secara berimbang akan membantu meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Paser.

3. Urusan Pilihan

Meskipun berada dalam urusan pilihan, namun berbagai bidang di dalam urusan ini tetap menjadi hal strategis yang perlu diulas dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah. Urusan ini terkait dengan dinamika optimalisasi potensi lokal daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bahkan berbagai bidang dalam urusan pilihan, merupakan bidang strategis yang menentukan masa depan pembangunan Kabupaten Paser.

a. Energi Dan Sumber Daya Mineral

Kekurangan energi listrik telah menjadi salah satu persoalan besar bagi masyarakat Kabupaten Paser yang berpengaruh juga terhadap aspek lain, misalnya aspek komunikasi dan informatika. Selain itu, kekurangan pasokan energi listrik telah menyebabkan masih banyak rumah tangga yang belum menggunakan listrik.

Persoalan ini menjadikan sumber energi listrik alternatif perlu segera dioptimalkan. Dari hal tersebut perlu diupayakan pengembangan sarana pembangkit listrik dengan mengandalkan potensi yang tersedia di Kabupaten Paser, misalnya pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga air, atau pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Pengembangan pembangkit listrik baru dengan mengandalkan potensi alam ini diarahkan untuk memenuhi pasokan energi listrik ke wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh pasokan dari pembangkit listrik yang ada.

Selain masalah pasokan energi listrik, hal lain yang perlu dipikirkan terkait sumber daya mineral adalah exit strategy yang bisa diambil untuk mengurangi ketergantungan terhadap pertambangan yang kewenangan perizinannya telah diambil alih oleh pemerintah provinsi. Salah satu strategi yang memungkinkan adalah menggalakkan dan meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perkebunan, serta sektor kelautan dan perikanan. Selain mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan mineral, sektor-sektor ini juga akan memberi dampak positif bagi kelestarian lingkungan hidup.

Rasio elektrifikasi menjadi salah satu kunci penentuan arah kebijakan Provinsi Kalimantan Timur dalam spirit besar *green economy*. Hal tersebut juga harus bisa memiliki gaung bagi Kabupaten Paser. Hal ini harus disinergikan dengan kegiatan, program dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Paser, khususnya dalam pemerataan pembangunan fasilitas dan jaringan kelistrikan.

b. Pariwisata

Fakta bahwa Kabupaten Paser merupakan salah satu kabupaten dengan kekayaan alam terutama bahan tambang yang melimpah tidak serta merta menutup kemungkinan bagi pengembangan sektor pariwisata. Karena itu yang harus segera dilakukan pemerintah adalah mengidentifikasi tempat-tempat yang berpotensi menjadi destinasi wisata dan mulai secara serius mengembangkannya.

Upaya ini tentu perlu diimbangi juga dengan perbaikan fasilitas di tempat-tempat pariwisata yang sudah ada saat ini. Peningkatan fasilitas penunjang pariwisata serta pembentukan kelompok-kelompok sadar wisata akan mempermudah upaya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Paser sebagaimana terjadi selama ini. Kehadiran kelompok-kelompok sadar wisata dengan dampingan dan fasilitas dari SKPD terkait akan meningkatkan minat masyarakat Paser sendiri terhadap pengembangan potensi wisata yang ada di daerahnya.

Selain itu, pihak swasta juga perlu dilibatkan untuk menjamin ketersediaan sarana penunjang pariwisata seperti hotel atau penginapan yang memudahkan akomodasi bagi para wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Paser.

c. Perdagangan

Tantangan bagi sektor perdagangan di Kabupaten Paser adalah upaya meningkatkan penjualan komoditas-komoditas andalan dari sektor pertanian ke luar Kabupaten Paser. Hal ini penting dilakukan untuk mengimbangi kecenderungan jasa layanan yang masih menjadi fokus perdagangan masyarakat Kabupaten Paser. Upaya ini juga menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan posisi tawar pedagang-pedagang tradisional berhadapan dengan pedagang-pedagang besar yang hadir dengan modal raksasa.

Pemerintah perlu fokus memperhatikan keberlangsungan usaha para pedagang tradisional di tengah gempuran pedagang-pedagang modern. Artinya, dibutuhkan kebijakan yang menguntungkan para pedagang tradisional dalam memasarkan berbagai komoditas andalan mereka, bukan hanya dalam wilayah Kabupaten Paser, tetapi sampai ke luar Kabupaten Paser.

d. Industri

Problem utama terkait dengan sektor industri di Kabupaten Paser adalah belum terlalu kuatnya upaya peningkatan nilai tambah bagi bahan-bahan baku yang dihasilkan daerah ini. Hal tersebut menjadikan potensi lokal sebagai bahan baku industri memiliki nilai jual yang rendah. Realitas ini, tentu berbeda dengan bahan baku yang telah diolah sebelum dijual.

Kedepan, industri yang perlu digalakkan adalah industri pengolahan bahan baku yang tidak saja bermanfaat untuk meningkatkan nilai jual, tetapi membuka kesempatan bagi penyerapan tenaga kerja. Jika hal tersebut tidak dioptimalkan, maka daerah lain yang mengembangkan industri pengolahan bahan bakulah yang akan diuntungkan. Tidak menutup kemungkinan dengan memanfaatkan bahan baku berharga murah yang berasal dari Kabupaten Paser.

e. Transmigrasi

Kabupaten Paser merupakan salah satu daerah tujuan transmigrasi pada masa lalu. Bahkan ada tiga gelombang transmigrasi yang masuk daerah ini, yaitu gelombang pertama pada era sebelum tahun 70-an, gelombang kedua pada kurun waktu tahun 70-an hingga tahun 80-an, dan terakhir pada kurun waktu setelahnya, yaitu sejak tahun 90-an.

Kehadiran kelompok-kelompok transmigran ini di satu sisi membawa perubahan berupa kemajuan dan perkembangan Kabupaten Paser. Namun isu kesenjangan antara warga transmigran dengan warga pribumi atau suku-suku asli masih menjadi tantangan Pemerintah Kabupaten Paser. Oleh karena itu diperlukan evaluasi komprehensif terhadap pola-pola kebijakan terkait transmigrasi yang selama ini dilaksanakan dan untuk memberi kesempatan lebih pada upaya mengurangi disparitas kesejahteraan antara kaum transmigran dengan warga asli.

f. Pertanian

Tahun 2013, sektor pertanian menyumbang 12,05% bagi PDRB Kabupaten Paser. Kontribusi ini jauh di bawah sektor pertambangan dan penggalian yang mencapai angka 76,32%. Kecilnya kontribusi sektor pertanian ini berbanding lurus dengan semakin berkurangnya lahan pertanian akibat dialihfungsikan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit, padahal kontribusi sektor perkebunan hanya 4,65%. Namun persentase tersebut, tetap menjadikan kelapa sawit sebagai komoditas andalan sektor perkebunan. Selain berkurangnya lahan pertanian, minimnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Paser juga disebabkan oleh semakin berkurangnya jumlah petani.

Ini menjadi sebuah permasalahan serius yang butuh untuk segera ditangani oleh pemerintah, sebab sektor pertanian lebih dominan bergantung pada produktivitas padi yang juga semakin menurun dari tahun ke tahun. Salah satu alternatif yang bisa diterapkan adalah dengan menggalakkan program diversifikasi pertanian, yaitu lahan pertanian yang tersedia tidak hanya ditanami padi, sekaligus ditanami tanaman pangan lainnya seperti jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang hijau, dan kacang tanah. Dengan demikian petani tidak hanya bergantung pada produktivitas padi, terutama ketika harga padi anjlok setelah panen raya, para petani mengalami kerugian yang cukup besar. Diversifikasi memungkinkan petani untuk tetap bisa bertahan dengan mengandalkan hasil panen lain, selain padi.

Pada sisi lain, pemerintah juga perlu melakukan pemerataan dalam pembagian lahan pertanian bagi kaum transmigran dengan warga asli Kabupaten Paser, terutama yang berada di pedalaman dan bermatapencaharian sebagai petani. Kebijakan pemerintah memberi lahan seluas 2 hektar kepada para transmigran

perlu ditinjau kembali untuk menjamin adanya kesetaraan akses dan kesamaan peluang mengusahakan lahan bagi warga lainnya.

g. Kehutanan

Meskipun kewenangan pengelolaan hutan telah dialihkan ke pemerintah provinsi, pola-pola perambahan hutan yang selama ini terjadi patut dijadikan perhatian serius oleh pemerintah Kabupaten Paser. Paling tidak ada tiga pola perambahan hutan yang terjadi yaitu; pertama, perambahan hutan oleh masyarakat untuk dijadikan lahan bertani/berkebun, kedua, perambahan hutan untuk dijadikan pemukiman, dan ketiga, perambahan hutan oleh perusahaan pemegang izin HPH.

Fokus perhatian pemerintah adalah pada pola perambahan yang ketiga, yang dilakukan oleh perusahaan pemegang izin HPH. Ada kecenderungan pihak perusahaan melakukan kecurangan melalui perambahan hutan yang melampaui batas pada setiap tahunnya demi meningkatkan produktivitas. Akibatnya, sebelum masa kontrak berakhir, hutan yang ada telah habis dirambah dan ada kekhawatiran berupa kepergian perusahaan sebelum melakukan upaya pemulihan kembali.

Kecurangan yang dilakukan perusahaan yang mengantongi izin HPH ini berbanding terbalik dengan kondisi 26 desa yang berada dalam wilayah hutan lindung dan cagar alam. Mereka tidak memiliki kewenangan apapun dan kehilangan hak untuk memanfaatkan hasil hutan tempat mereka bermukim, padahal mereka sudah lebih dahulu ada di sana sebelum penetapan kawasan tersebut sebagai hutan lindung atau cagar alam. Karena itu, perlu diupayakan pengakuan atas hak-hak tenurial warga desa yang sudah mendiami sebuah kawasan secara turun temurun, sekaligus untuk memenuhi hak-hak dasar mereka sebagai warga negara. Jika tidak, hal ini menjadi bentuk ketidakadilan terhadap warga negara. Koordinasi, konsultasi dan negosiasi dengan level pemerintah yang lebih tinggi (provinsi dan pusat) menjadi sesuatu yang urgen, ketika pembangunan di Kabupaten Paser mulai menysar hak-hak dasar warga negara yang secara empiris berada dalam situasi serba sulit, dan secara hukum prosedural terbayang oleh tuduhan pelanggaran dan penyerobotan hutan.

h. Kelautan dan Perikanan

Potensi yang paling mungkin untuk dikembangkan di Kabupaten Paser adalah perikanan air tawar, sebab kewenangan atas sektor kelautan sudah ditarik menjadi

tanggung jawab provinsi. Permasalahan yang terjadi dan berhubungan dengan sektor perikanan air tawar ini adalah masih minimnya upaya pengembangan yang dilakukan pemerintah, termasuk dalam mendorong masyarakat untuk terjun menjadi pekerja pada sektor ini.

Kendala yang dihadapi terkait pengembangan sektor ini dan minimnya minat masyarakat adalah belum terbukanya jalur-jalur distribusi bagi pemasaran hasil perikanan air tawar. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab yang seharusnya dijalankan pemerintah adalah membuka jalur-jalur distribusi bagi pemasaran hasil usaha ikan air tawar ini. Jika jalur distribusi telah terbuka dan permintaan terhadap ikan air tawar meningkat maka masyarakat akan tertarik untuk terlibat dalam membudidayakan ikan air tawar dan menjadikan sektor ini sebagai salah satu sektor andalan yang bisa mendatangkan keuntungan dan menyerap tenaga kerja.

Karena itu, pada langkah awal, perlu mengidentifikasi potensi ikan air tawar yang bisa dibudidayakan dan banyak diminati untuk konsumsi masyarakat. Hal ini mempunyai tujuan agar masyarakat yang menekuni sektor ini tidak menderita kerugian dan bisa menjadikan sektor perikanan sebagai sektor mata pencaharian pokok.

B. ISU-ISU STRATEGIS

1. Isu Internasional

Perumusan isu strategis juga harus mempertimbangkan isu internasional. Meskipun hanya berada dalam level kabupaten, perencanaan pembangunan tidak terlepas juga dari isu krusial di level internasional. Beberapa isu strategis di bawah ini dipilih berdasarkan kesesuaiannya dengan konteks Paser.

a. MDGs/SDGs

Pada tahun 2014, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) melakukan pembaruan Millenium Development Goals (MDGs) dengan agenda pembangunan global yang bernama Sustainable Development Goals (SDGs). Tujuan-tujuan yang tertuang dalam SDGs merupakan penyempurnaan tujuan pembangunan MDGs. Melalui mandat SDGs, PBB berupaya untuk mewujudkan sumberdaya manusia global yang berkualitas, meningkatkan perekonomian global yang tidak mengesampingkan

kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) untuk 2016-2030 meliputi:

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya.
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan.
3. Memastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua pada segala usia.
4. Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua.
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan.
7. Menjamin akses energi modern yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan untuk semua.
8. Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua.
9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi.
10. Mengurangi ketimpangan dalam dan di antara negara-negara.
11. Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.
12. Memastikan pola-pola konsumsi dan produksi berkelanjutan.
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Melestarikan dan memanfaatkan samudera, laut dan sumberdaya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan ekosistem darat dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati.

16. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan.
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

b. *Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi*

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi saat ini menyebabkan perkembangan internet semakin pesat. Disertai perkembangan teknologi media telekomunikasi yang menciptakan konvergensi media, internet telah meruntuhkan sekat antar masyarakat bahkan dalam level global. Membanjirnya informasi bisa dimaknai sebagai peluang maupun tantangan bagi pemerintah daerah.

Bagi pemerintah kabupaten Paser, teknologi komunikasi dan informasi (TIK) penting untuk membantu proses pembangunan daerah. Penyediaan teknologi dan sistem informasi akan mempermudah pemerintah kabupaten untuk aktivitas penyediaan data, transparansi, penyebaran informasi, sosialisasi, dan promosi daerah melalui website. Namun di sisi lain, pemerintah kabupaten juga harus menyiapkan substansi informasi agar nantinya teknologi dan infrastruktur yang disiapkan dapat benar-benar dimanfaatkan secara optimal.

c. *Ekonomi ekologis (Green economy)*

Pembangunan ekonomi global saat ini sudah mulai bergeser ke konsep green economy, yaitu ekonomi ekologis. Pengertian green economy merujuk pada ekonomi yang mempertimbangkan aspek lingkungan dan ekologi sehingga praktiknya sangat memperhitungkan pengurangan resiko terhadap kelestarian lingkungan. Ekonomi ekologis tidak berarti ekonomi yang berbasis sektor lingkungan atau agraris melainkan ekonomi yang tidak mengesampingkan resiko kerusakan lingkungan dan ekologi. Misalnya perekonomian berbasis industri dengan meminimalkan penggunaan bahan bakar minyak dan gas, dan mereduksi polusi.

Prinsip-prinsip ekonomi berkelanjutan dalam green economy tersebut menjadi pedoman perubahan arah pembangunan. Pertumbuhan ekonomi harus mengarah pada keberlanjutan ekologi. Misalnya, perekonomian yang berbasis industri harus

meminimalkan dampak lingkungan. Bahkan pembangunan berbasis ekonomi agraris pun harus direncanakan dengan pertimbangan dampak ekologis yang minimalis. Hal penting yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendukung perkembangan ekonomi hijau tersebut adalah dalam level perencanaan pembangunan dengan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan minimalisir dampak lingkungannya.

2. Isu Nasional

Isu jangka panjang nasional yang dapat dijadikan referensi dalam merumuskan isu strategis diantaranya adalah dokumen RPJP Nasional dan RPJMN. Rujukan terhadap RPJPN bertujuan untuk mengetahui arah pembangunan nasional dan sasaran pembangunan pada setiap tahapan lima tahunan. Dengan mengetahui arah dan sasaran RPJPD Provinsi Kalimantan Timur, maka isu strategis Kabupaten Paser dapat selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Adapun tahapan dan skala prioritas pada RPJPN 2005-2025 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 83: Tahapan dan Skala Prioritas RPJPN 2005-2025

RPJMN I (2005-2009)	Menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik
RPJMN II (2010-2014)	Memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, memperkuat daya saing daerah
RPJMN III (2015-2019)	Menetapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan IPTEK
RPJMN IV (2020-2024)	Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif

Sumber: RPJP Nasional, 2005-2025

3. Isu Provinsi Kalimantan Timur

Selain merujuk pada RPJPN dan RPJMN, arah pembangunan Paser mempertimbangkan perencanaan pembangunan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Sinergi perencanaan pembangunan tersebut dapat dilihat dalam dokumen RPJMD, hal ini untuk memudahkan perencanaan dan

pengawasan pembangunan, serta pemerataannya di segala bidang. Perencanaan pembangunan tersebut dapat dilakukan sebagai berikut (RPJMD Kalimantan Timur 2013-2018):

- a. Diperlukannya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing,
- b. Diperlukannya pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing berbasis masyarakat dengan menggunakan sumber daya serta energi yang terbarukan. Pertumbuhan ekonomi ini dapat dijalankan dengan penerapan konsep ekonomi hijau (green economy).
- c. Diperlukannya peningkatan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat secara merata,
- d. Diperlukannya peningkatan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik
- e. Diperlukannya peningkatan kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berperspektif perubahan iklim.

4. Isu Strategis Kabupaten Paser

Berdasarkan hasil identifikasi dan pemetaan permasalahan pembangunan pada sub bab 4.1. dan isu-isu strategis di level nasional serta provinsi Kalimantan Timur, maka dapat dirumuskan sejumlah isu strategis pembangunan daerah di Kabupaten untuk lima tahun mendatang, yaitu sebagai berikut:

- a. Peningkatan layanan dasar terutama layanan pendidikan dan kesehatan melalui ketersediaan dan keterjangkauan infrastruktur, sumberdaya manusia, dan peningkatan mutu layanan.
- b. Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berhubungan langsung dengan aktivitas perekonomian masyarakat, terutama jalan dan listrik.
- c. Peningkatan tatakelola pemerintahan yang mengakomodasi berbagai isu strategis: pemberantasan korupsi, pengelolaan aset daerah profesional, ketepatan sasaran pembangunan, pemerataan pembangunan, dan perkembangan kawasan sekitar.

- d. Peningkatan produktivitas perekonomian daerah dengan mengakomodasi berbagai isu strategis: pengelolaan sumber dan peningkatan PAD secara optimal, peningkatan produktivitas dari sektor non-tambang melalui diversifikasi usaha pertanian dan perkebunan, perikanan dan jasa berbasis spirit ekonomi hijau secara merata dan berkelanjutan.
- e. Peningkatan sumberdaya manusia yang berhubungan langsung dengan kebutuhan daerah, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal, yang ditujukan bagi aparatur desa maupun masyarakat.
- f. Pemberdayaan masyarakat adat dan pelestarian nilai-nilai sosial-budaya secara berkesinambungan.
- g. Terbukanya investasi di level regional (ASEAN) terutama di sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.

Penentuan isu strategis di atas berdasarkan pada beberapa kriteria, yaitu: signifikansi terhadap sasaran pembangunan nasional dan provinsi; memiliki dampak yang luas terhadap masyarakat dan daerah; mampu menjadi katalisator dan memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah; serta kemungkinan untuk dikelola. Selanjutnya, rumusan isu strategis tersebut diulas secara lengkap sebagai berikut:

a. Peningkatan layanan dasar terutama layanan pendidikan dan kesehatan melalui ketersediaan dan keterjangkauan infrastruktur, sumberdaya manusia, dan peningkatan mutu layanan.

Skema-skema pembangunan yang digunakan untuk masing-masing wilayah harus bisa merepresentasikan pembangunan yang mengacu konteks masing-masing. Kontekstualisasi ini memerlukan kajian yang mendalam mengenai perkembangan dan kemajuan yang ingin dicapai dan cara pembuktiannya. Keterjangkauan infrastruktur, khususnya transportasi, energi dan komunikasi, bisa menjadi hal yang mempercepat atau bahkan memperlambat proses menuju tujuan-tujuan yang ingin dicapai.

Di titik ini, pembangunan infrastruktur di Kabupaten yang terkonsentrasi hanya di wilayah perkotaan dan beberapa sentra perekonomian, sepantasnya membidik potensi-potensi dan titik-titik strategis lainnya yang berada di luar wilayah urban. Mengingat PAD yang besar berasal dari wilayah-wilayah penghasil berbagai komoditas pertambangan, kehutanan, dan kelautan. Sebagian besar daerah-daerah

ini tidak berada di wilayah perkotaan, melainkan jauh berada di wilayah pesisir, pedalaman dan pinggiran yang hampir tak tersentuh pembangunan infrastruktur yang standar sekalipun. Dari sini, konsepsi 70:30 harus dapat diterjemahkan dalam penanganan infrastruktur di kabupaten Paser.

Kaitannya dengan RPJMN pembangunan infrastruktur di harus dijalankan secara berkesinambungan untuk merespon isu-isu nasional, seperti: peningkatan kualitas konektivitas nasional dalam rangka mencapai keseimbangan pembangunan, percepatan penyediaan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman (air minum dan sanitasi) serta infrastruktur kelistrikan, peningkatan ketahanan air, pangan dan energi untuk mendukung ketahanan nasional, dan mengembangkan sistem transportasi massal perkotaan (RPJMN 2015-2019). Guna mendukung hal tersebut, pembangunan infrastruktur di Kabupaten harus mendapat perhatian secara komprehensif.

Merespon isu-isu strategis di tingkat nasional, Kabupaten juga telah menyiapkan RTRW. Di bidang infrastruktur, terdapat beberapa poin hendak diperbaiki seperti: kualitas sarana prasarana pemukiman, saluran irigasi, transportasi, jalan, jaringan komunikasi dan energi menjadi isu penting yang harus diperhatikan (RTRW Kabupaten 2014-2033).

Menurut amanah RPJPD, pembangunan infrastruktur tersebut harus dijalankan untuk membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, sehingga pemerataan pertumbuhan ekonomi/ keseimbangan pembangunan dapat berjalan dengan baik (RPJPD Kabupaten 2006-2025). Langkah-langkah strategis ini juga sejalan dengan amanah RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, menurut RPJMD Kalimantan Timur kualitas pembangunan infrastruktur harus ditingkatkan untuk mendukung daya saing ekonomi kerakyatan yang berbasis sumber daya alam yang terbarukan (RPJMD Kalimantan Timur 2013-2018).

Dengan memperhatikan berbagai isu strategis di atas, maka Pemerintah Kabupaten perlu melihat beberapa hal krusial sebagai katalisator dalam pembangunan. Sedangkan langkah-langkah strategis yang ingin dicapai antara lain:

1. Pembangunan infrastruktur (sarana prasarana pemukiman, saluran irigasi, transportasi, jalan, jaringan komunikasi dan energi) sudah harus melihat posisi Kabupaten yang sangat strategis. merupakan titik penghubung kabupaten-

kabupaten di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, sekaligus merupakan sentra yang bisa menjadi daerah penghubung Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Hal ini dijalankan untuk mendukung konektivitas antar daerah/ nasional sehingga keseimbangan pembangunan dapat terjaga, sesuai amanah RPJMN dan kebutuhan daerah. Pembangunan infrastruktur (sarana prasarana pemukiman, saluran irigasi, transportasi, jalan, jaringan komunikasi dan energi) harus bisa didorong ke daerah-daerah yang ada di perbatasan, baik batas kabupaten maupun batas provinsi, agar berbagai hasil bumi Kabupaten benar-benar dinikmati kemanfaatannya oleh penduduk. Beberapa kecamatan di wilayah selatan justru memberi kemanfaatan ekonomi yang cukup besar bagi Provinsi Kalimantan Selatan khususnya dalam distribusi dan peningkatan nilai jual komoditas. Hal ini karena wilayah tersebut memiliki akses yang lebih dekat ke wilayah kabupaten atau provinsi lain.

2. Pembangunan Infrastruktur (sarana prasarana pemukiman, saluran irigasi, transportasi, jalan, jaringan komunikasi dan energi) harus bisa memiliki standar-standar dan prioritas utama yang bisa menjadi dasar seluruh kajian perencanaan. Pembangunan mega proyek di pusat Kabupaten (Kecamatan Tanah Grogot) harus juga diimbangi dengan penyediaan infrastruktur dasar transportasi (jalan, jembatan, dermaga) serta energi (PLTD, PLTS, PLTA, dll) yang bisa menunjukkan keberpihakan dan dukungan pemerintah kabupaten dalam menunjukkan pemerataan sekaligus upaya bagi perkembangan dan kemajuan di Kabupaten. Pengembangan kualitas jalan, baik pembangunan infrastruktur jalan lingkungan dan jalan kabupaten, koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat yang intensif khususnya mengenai pembangunan jalan provinsi dan jalan negara, koordinasi dengan PLN dan penyedia layanan telepon selular untuk menjangkau daerah-daerah pedesaan, hingga pengembangan skema-skema percepatan pembangunan. Selain itu perumahan dan kawasan permukiman (air minum dan sanitasi) juga harus ditingkatkan. Semua ini bisa dilakukan untuk menghadirkan kesejahteraan yang dengan sendirinya juga akan meningkatkan kualitas layanan dasar di beberapa sektor.
3. Pembangunan dan penyediaan infrastruktur dasar (sarana prasarana pemukiman, saluran irigasi, transportasi, jalan, jaringan komunikasi dan energi)

tidak pernah membenarkan adanya disparitas berbasis kepentingan bahkan tendensi ekonomi. Situasi kesenjangan dan kemiskinan yang sangat berbeda antara kecamatan yang ada di wilayah selatan, juga desa-desa yang berada jauh dari jalur jalan trans-Kalimantan membutuhkan pendekatan berbeda khususnya terkait ketersediaan infrastruktur dasar. Pembangunan yang terlalu terkonsentrasi di wilayah sepanjang jalan trans-Kalimantan Timur menjadikan beberapa daerah dengan cepat bertumbuh sebagai pusat ekonomi di sektor jasa, sementara potensi yang ada di wilayah-wilayah pedesaan sering kali terabaikan. Hal ini harus dihindari untuk menjaga keseimbangan pembangunan, sesuai dengan amanah RPJMN dan RPJPD Kabupaten .

b. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas infrastruktur yang berhubungan langsung dengan aktivitas perekonomian masyarakat, terutama jalan, air dan listrik.

Ketersediaan infrastruktur yang selama ini sudah baik, diupayakan untuk terus dikembangkan dan dikuatkan, khususnya untuk wilayah desa dan kecamatan yang selama ini belum banyak disentuh oleh peningkatan kualitas infrastruktur. Dalam RPJMN peningkatan kualitas infrastruktur ini penting untuk mendukung percepatan penyediaan infrastruktur di daerah (RPJMN 2015-2019).

Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas (sarana prasarana air, jalan dan listrik) menjadi isu penting yang harus diperhatikan, hal ini sesuai dengan amanah RPJMN dan RPJPD termasuk juga RTRW. Menurut RPJMD Kalimantan Timur, langkah ini harus ditempuh untuk membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, khususnya dalam rangka menumbuhkan daya saing ekonomi kerakyatan yang berbasis sumber daya alam yang terbarukan (RPJMD Kalimantan Timur 2013-2018). Dalam hal ini langkah strategis yang harus diambil, terdiri dari:

1. Perbaiki kualitas, standar serta kelas jalan.
2. Pengembangan sarana prasarana air minum dan irigasi.
3. Pembangunan infrastruktur jalan lingkungan di wilayah-wilayah sentra ekonomi (jalan di perkebunan sawit, karet, dan hutan-hutan produksi rakyat).
4. Peningkatan kapasitas pembangkit listrik yang sudah ada, dan pengembangan potensi listrik yang mengandalkan enegeri alternatif tenaga micro hydro, diesel, tenaga surya, maupun tenaga uap. Selain itu juga perlu peningkatan dan

perluasan jaringan kelistrikan, khususnya instalasi listrik di desa-desa yang belum bisa mengakses listrik, termasuk koordinasi dengan PLN tentang prasyarat yang dibutuhkan PLN dalam memperluas jaringan kelistrikan.

c. Peningkatan tatakelola pemerintahan yang mengakomodasi berbagai isu strategis: pemberantasan korupsi, pengelolaan aset daerah profesional, ketepatan sasaran pembangunan, pemerataan pembangunan, dan perkembangan kawasan sekitar.

Persoalan tata kelola pemerintahan seringkali menjadi isu penting yang harus diperbaiki. Analisis mengenai tata kelola yang terkadang tidak menyentuh problematika dan meta-masalah yang ada, akhirnya menggiring upaya perbaikan dan pembaruan hanya berakhir sebagai persoalan baru. Berikut adalah isu-isu strategis yang terkait tata kelola pemerintahan yang memerlukan solusi dan langkah strategis:

1. Perlu adanya usaha pemberantasan korupsi secara berkesinambungan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel dan transparan.
2. Perlu adanya pengelolaan aset daerah secara profesional di berbagai bidang untuk meningkatkan aspek efisiensi, efektivitas dan ekonomis di berbagai aspek pembangunan.
3. Perlu adanya perimbangan anggaran yang proporsional dan efisien khususnya dalam memprioritaskan pembangunan yang berbasis pada analisis mengenai persoalan-persoalan yang ada di daerah. Hal ini sekaligus menghindarkan Kabupaten pada imajinasi kemajuan dan perkembangan yang secara inkremental diulang terus berdasarkan capaian wilayah lain, karena mengingat Kabupaten sendiri telah memiliki banyak potensi dan peluang. Perimbangan anggaran bisa menjadi salah satu kunci untuk menjelaskan karakteristik ini, dan tentunya desain rencana pembangunan dan implementasi pembangunan berbasis karakter daerah juga bisa menghadirkan nilai strategis bagi Kabupaten .
4. Isu lain yang masih menjadi halangan bagi perbaikan tata kelola adalah pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang belum menyentuh pengarusutamaan gender, kelompok minoritas, struktur dan tatanan sosial. Jika kelompok-kelompok ini terabaikan, maka akan semakin memunculkan disparitas

dan dapat berujung pada terbebannya pemerintah dalam memikirkan kebijakan yang rasional dan konstruktif. Dalam RPJMN isu ini harus diperhatikan untuk mendukung keseimbangan pembangunan Kawasan Timur Indonesia (KTI), sesuai amanah RPJMN 2014-2019. Selain itu isu ini juga menjadi perhatian bagi pasangan Bupati dan Wakil Bupati saat ini.

5. Tata kelola pemerintahan dan berjalannya pembangunan di Kabupaten sangat penting untuk menjadi solusi atas disparitas antara beberapa kutub yang berbeda, yaitu antara lain kelompok masyarakat di desa-desa pedalaman/pesisir dengan penduduk wilayah perkotaan, kelompok warga yang sudah lama bermukim dengan kelompok yang menikmati kebijakan transmigrasi, serta adanya pendidikan dan daya saing penduduk asli yang cenderung menurun dari waktu ke waktu. Pada level nasional, khususnya dalam RPJMN peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan harus dilakukan untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia (RPJMN 2014-2019).
6. Hal lain terkait dengan tata kelola yang harus menjadi fokus pembangunan adalah isu mengenai daya saing. Sudah saatnya Kabupaten yang hampir tidak memiliki kekurangan dalam sumber daya alam maupun sumber daya manusia masuk dalam peningkatan kualitas di segala lini untuk menjamin adanya perbaikan dan daya saing sektor dan komoditas andalan. Tenaga profesional dan transparan yang berorientasi pada pelayanan publik menjadi kunci Kabupaten yang kompetitif, hal ini sesuai dengan amanah RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018. Kondisi mendatang, selain membutuhkan pengejawantahan daya saing dengan kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Timur, perlu juga meningkatkan daya saingnya dengan wilayah-wilayah lain yang ada di Pulau Kalimantan. Kapasitas harus menjadi tolok ukur daerah maju yang bisa diteladani oleh wilayah lain di kawasan Kalimantan.
7. Dengan perbaikan dan persiapan yang matang, khususnya terkait poin “d”, Kabupaten bisa memiliki ruang lebih leluasa untuk menajamkan daya saingnya di level kerja sama di kawasan Borneo yang juga meliputi sebagian negara Malaysia dan seluruh Brunei Darussalam. Tumpuan dan pijakan yang matang, tentunya akan menguatkan posisi sebagai salah satu andalan Indonesia untuk menghadapi paradigma perubahan ekonomi regional seperti Masyarakat

Ekonomi Asean (MEA) Hal ini sesuai dengan amanah RPJMN 2014-2019, RPJMD Kalimantan Timur 2013-2016 dan RPJPD Kabupaten 2006-2025.

d. Mendorong peningkatan produktivitas perekonomian daerah dengan mengkomodasi berbagai isu strategis: pengelolaan sumber dan peningkatan PAD secara optimal, peningkatan produktivitas dari sektor non-tambang melalui diversifikasi usaha pertanian dan perkebunan, perikanan dan jasa berbasis spirit ekonomi hijau secara merata dan berkelanjutan.

Produktivitas ekonomi yang harus dilihat sebagai salah satu strategi transisi untuk menengarai masa dan lama waktu pertambangan dan industri ekstraktif yang akan berhenti. Peningkatan produktivitas ini salah satunya melalui diversifikasi usaha pertanian, perkebunan perikanan dan jasa. Hal ini harus disertai dengan peningkatan kualitas dan keberlanjutan perekonomian non-tambang untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, sesuai amanah Green Economy Provinsi Kalimantan Timur. RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018 mengamanahkan bahwa permbangunan daya saing ekonomi ke depan harus berbasis pada sumber daya alam yang terbarukan dengan memperhatikan aspek kelestarian alam (RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018). Selain itu, diperlukan ketersediaan infrastruktur bidang transportasi (jalan, jembatan dan dermaga angkut), khususnya ke daerah-daerah dan kawasan strategis untuk pertanian dan perkebunan untuk mendukung pembangunan daya saing ekonomi. Hal ini sesuai dengan amanah RPJPD Kabupaten 2006-2025 dan RTRW Kabupaten 2014-2033. Beberapa poin yang menjadi langkah strategis periode ini adalah:

1. Pengembangan dan peningkatan hasil untuk komoditas-komoditas andalan Kabupaten dari sektor pertanian, perkebunan, hutan rakyat, perikanan serta jasa. Pengembangan ini memerlukan kesiapan dalam mengontrol ancaman perusakan lingkungan yang masif dari keinginan menggenjot produksi dengan solusi mengalih-fungsikan lahan. Dengan demikian, perlu mengawal upaya peningkatan produksi ekstraktif dengan langkah dan cara yang tepat. Hal ini akan memberi ruang pertumbuhan bagi pengarusutamaan ekonomi hijau. Pemerintah akan bisa membangun konsensus baru dalam penertiban pertambangan-pertambangan yang liar, kontrol produksi hingga reklamasi-rehabilitasi dan revegetasi lahan pasca tambang.

2. Diversifikasi hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan juga harus bisa sejalan dengan inisiatif Provinsi Kalimantan Timur yang mengampanyekan pengarusutamaan ekonomi hijau (green economy). Prinsip-prinsip dasar ekonomi hijau yang ditopang oleh pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan hidup dan stabilitas sosial yang manusiawi (profit, planet, people) perlu juga mengintegrasikan dua dasar lain yaitu kemitraan dan jejaringan (partnership) ekonomi yang tidak monopolistik, serta serangkaian usaha membangun kembali kepercayaan masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan sejumlah konflik agraria (peace). Dengan dasar ini, pertumbuhan ekonomi perlahan-lahan dapat melepas ketergantungannya dari industri ekstraktif, sekaligus akan menemukan ruang lain yang bisa menjamin kesinambungan dan keberlanjutannya. Di titik ini, ekonomi hijau (green economy) bisa dimengerti bukan sebagai wacana semata, melainkan sesuatu yang dekat dan realistis dengan situasi dan Kalimantan Timur umumnya.
 3. Pengembangan perekonomian di sektor jasa dan sektor-sektor lain dengan dasar yang sudah kokoh diletakkan oleh periode sebelumnya dengan konsep One Village, One Product (OVOP).
 4. Pemerintah juga diharapkan bisa membaca peluang pengayaan sumber dan aset perekonomian. Pariwisata, budaya dan jasa bisa menjadi jawaban yang membutuhkan keseriusan dalam mengurainya. Ruang alternatif dan kreatif ini juga menjadi bukti hubungan Kabupaten dan Provinsi Kalimantan Timur yang sinergis. Melalui penguatan dan pengembangan sektor-sektor ini, cita-cita besar ekonomi hijau bisa direalisasikan (Pengarusutamaan Perubahan Iklim dan Green Economy Provinsi Kalimantan Timur).
 5. Berbagai upaya di atas juga harus didukung oleh pengelolaan dan peningkatan sumber PAD secara optimal.
- e. Peningkatan sumberdaya manusia yang berhubungan langsung dengan kebutuhan daerah, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal, yang ditujukan bagi aparatur desa maupun masyarakat.***
- Sumberdaya manusia merupakan elemen penting bagi keberhasilan dan keberlangsungan pembangunan di segala bidang, khususnya dalam penyediaan aspek pelayanan dasar dan ekonomi (RPJPD Kabupaten 2006-2025). Pada aspek

pelayanan dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia memiliki peranan penting untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur dan kualitas masyarakat pada umumnya. Sedangkan dalam bidang ekonomi, pendidikan memiliki peran penting agar daya saing ekonomi berbasis masyarakat dapat berjalan dengan baik (RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018). Penguatan SDM juga menjadi isu strategis di level nasional, oleh karena itu isu strategis ini tersinergi dengan isu strategis di dalam RPJMN 2015-2019. Dalam konteks lokal, Kabupaten menghadapi tiga tantangan SDM di bidang aparatur desa, pendidikan dan kesehatan, yaitu:

- a. Lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang yang lebih luas kepada desa, baik melalui penguatan kewenangan politis maupun sumberdaya finansial untuk membangun masyarakatnya sendiri. Peluang ini harus disertai dengan penguatan kelembagaan desa dan peningkatan kualitas perangkat desa dalam mengelola pembangunan desa dan pengelolaan anggaran yang efektif, transparan dan akuntabel.
 - b. Kondisi masyarakat yang menyebar dari sisi geografis menuntut peningkatan akses pendidikan dan kesehatan berupa tersedianya fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan yang menyebar hingga ke daerah-daerah terpencil. Untuk mencapai pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, maka hal ini harus disertai dengan ketersediaan tenaga pendidik dan tenaga layanan kesehatan yang bersedia bekerja di kawasan terpencil, sesuai amanah RPJMN.
- f. Pemberdayaan masyarakat adat dan pelestarian nilai-nilai sosial-budaya secara berkesinambungan.***

Pemberdayaan masyarakat adata merupakan isu penting yang harus diperhatikan. Pada umumnya masyarakat adat di Paser tinggal jauh dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, hal ini dapat mengakibatkan ketidakseimbangan pembangunan yang dapat berakibat pada terganggunya kohesivitas sosial. Selain itu, penanaman nilai-nilai budaya dalam masyarakat, khususnya bagi generasi muda perlu digerakan secara komprehensif untuk memperkuat jati diri dan kepribadian generasi muda Kabupaten Paser. Hal ini dapat dijalankan melalui pendidikan formal dan non-formal dan berbagai upaya lain, seperti pengembangan dan pelestarian seni budaya, lembaga adat, situs sejarah dan lain-lain.

g. Terbukanya investasi di level regional (ASEAN) terutama di sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan

Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang dimulai sejak akhir 2015 perlu disikapi sebagai peluang bagi Kabupaten untuk meningkatkan kondisi perekonomian daerah, dimaknai sebagai terbukanya peluang investasi dari pelaku bisnis dalam sektor-sektor potensial dan berdaya saing di level regional (RPJPD Kabupaten 2006-2025). Di sektor pertanian, terbuka peluang investasi berupa pertanian padi dan palawija, sedangkan di sektor perkebunan terutama tiga produk utama yaitu sawit, karet dan kopi. Di sektor perikanan, investasi dapat dikembangkan pada perikanan darat, sedangkan pada sektor peternakan terutama pengembangan investasi pada peternakan sapi, kerbau, domba, kambing dan ayam buras. Pengembangan produk-produk yang bernilai strategis ini harus disertai dengan peningkatan kualitas SDM, tenaga kerja dan penyiapan sistem birokrasi yang mengakomodasi kemudahan berinvestasi (RPJMN 2015-2019). Sedangkan pengembangan sektor-sektor potensial tersebut harus mampu diwadahi dalam RTRW secara komprehensif.

Pada bab selanjutnya, uraian mengenai isu-isu strategis di Bab 4 ini akan menjadi dasar sekaligus rujukan dalam menyusun dan menentukan langkah-langkah perencanaan pembangunan. Secara khusus di Bab 5, visi, misi, tujuan, dan sasaran disusun berdasarkan basis pijakan yang sama. Isu-isu strategis menjadi acuan utama penyusunan bab-bab selanjutnya, khususnya mengenai perencanaan strategis dan prioritas yang dikedepankan dalam membidik kebutuhan riil Kabupaten. Kesemua itu dikerangkai tema-tema terkait peningkatan akses dan kualitas dengan semangat pemerataan, kesejahteraan, kompetitif (berdaya saing) serta berkelanjutan, yang selanjutnya akan mendasari ulasan pada Bab 5.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini akan menguraikan visi, misi, tujuan dan sasaran daerah. Bab ini sangat penting dalam menyusun keseluruhan dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah, karena dalam perencanaan pembangunan, setiap daerah tentu mempunyai harapan atau cita-cita yang akan dicapai. Cita-cita tersebut merupakan rangkaian proses untuk terus maju dan semakin memberi kebermanfaatn kepada masyarakat. Sebagai sebuah rangkaian, cita-cita selain diarahkan pada kondisi yang akan datang, juga berpijak dan belajar dari pembangunan yang telah dijalankan.

A. VISI DAERAH

Visi merupakan kondisi ideal sekaligus landasan konseptual bagi daerah. Visi daerah ini disusun dengan memperhatikan aspek substantif yang berpijak pada isu strategis, maupun aspek teknis berupa susunan kata yang sederhana dan mudah dipahami. Dalam pembangunan lima tahun mendatang, Kabupaten Paser memiliki visi:

**“Terwujudnya Kabupaten Paser yang Maju, Mandiri,
Sejahtera, dan Berkeadilan”**

Visi di atas merupakan keberlanjutan dan penegasan dari visi pembangunan lima tahun kebelakang. Visi ini juga bermakna sebagai keberlanjutan dan apresiasi pada pembangunan yang telah dijalankan pada periode sebelumnya yang didasarkan pada realitas dan telaah obyektif. Selain itu juga memiliki makna berupa harapan untuk terus bergerak progresif menuju kondisi ideal.

Ketika memiliki modalitas dari hasil pembangunan yang ada, selanjutnya fokus pembangunan lima tahun mendatang terwakili oleh empat kata kunci di dalam visi ini, yaitu:

1. Maju

Maju mempunyai makna menjadikan Kabupaten Paser sebagai daerah yang maju dan mampu sejajar dengan daerah lain. Maju juga berarti berdaya saing, hal yang dibutuhkan bagi setiap daerah untuk responsif dan dapat unggul di tengah perkembangan kondisi lokal, regional dan global yang dinamis. Dalam visi ini, maju merujuk pada beberapa hal, yaitu: pertama meningkatnya kualitas sumber daya manusia dengan terpenuhinya

kebutuhan dan peningkatan akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Kedua, sebagai suatu kondisi semakin meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Paser. Kondisi tersebut mencakup ketersediaan dan akses pelayanan kesehatan yang semakin baik dan merata serta kualitas pelayanan yang semakin meningkat. Ketiga, adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Paser agar selaras dengan kebutuhan pasar kerja yang semakin kompetitif. SDM berkualitas selain berperan dalam menghadapi perubahan sistem global, salah satunya melalui pelaksanaan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), juga mempunyai peran penting sebagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

2. Mandiri

Mandiri adalah suatu kondisi masyarakat Kabupaten Paser yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri untuk lebih maju dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Mandiri juga merujuk pada kondisi yang berkesinambungan dalam proses pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek ekologi, ekonomi dan sosial. Kabupaten Paser dibayangkan akan menjadi mandiri dengan mengandalkan sumber daya yang berkualitas dengan perkonomian yang merata dan berlandaskan pada potensi lokal.

3. Sejahtera

Sejahtera merupakan sebuah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang dapat memenuhi standar kehidupan yang layak sehingga tercipta kehidupan yang aman, sentosa dan makmur. Sejahtera juga dimaknai sebagai sebuah kondisi derajat kehidupan masyarakat Paser yang semakin membaik pada berbagai bidang pembangunan terutama pada sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Masyarakat membutuhkan dua prasyarat utama yaitu pendidikan dan kesehatan. Dua prasyarat tersebut sebagai modal untuk mengoptimalkan potensi masyarakat agar lebih berdaya, mandiri, produktif dan berbudaya. Semakin membaiknya tingkat kesejahteraan tersebut antara lain ditandai dengan meningkatnya produktivitas ekonomi masyarakat, meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat, hingga meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kesehatan masyarakat. Kesejahteraan bermakna pula secara sosial dan budaya, yaitu ketika masyarakat memiliki kohesivitas sosial yang menjadikannya sebagai modal untuk berpartisipasi aktif, serta budaya yang menjadikan setiap komponen merasa memiliki daerah dan bertanggung jawab atas berjalannya pembangunan daerah. Kondisi

tersebut akan menciptakan situasi yang kondusif untuk menjalankan roda pembangunan. Namun untuk mencapainya dibutuhkan syarat berupa tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu adanya sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat serta sektor privat dan organisasi masyarakat sipil.

4. Berkeadilan

Berkeadilan merupakan perwujudan kesamaan hak dan kewajiban dalam segala aspek kehidupan tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras dan golongan. Adil juga bermakna bahwa pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang dilaksanakan secara merata. Merata berarti menghilangkan kesenjangan antar wilayah, termasuk kesenjangan antar masyarakat. Nilai ini sekaligus bermakna menutup/memperkecil kesenjangan dalam mendapatkan pelayanan publik, mengelola sumber daya strategis serta memperoleh distribusi hasil pembangunan. Kondisi pembangunan yang merata merupakan wujud penghormatan pada semua masyarakat yang tinggal dan mencari penghidupan di Kabupaten Paser, dan khususnya sebagai pengakuan, afirmasi, dan pemberdayaan masyarakat Paser yang masih merasakan persoalan terkait pembangunan. Harapannya akan tercipta stabilitas sosial sekaligus modal dasar bagi pembangunan dari waktu ke waktu. Kesenjangan adalah problema pembangunan bagi daerah yang mempunyai wilayah sangat luas, sekaligus tertundanya pemenuhan hak bagi setiap masyarakat daerah untuk menikmati hasil pembangunan. Dengan demikian, pemerataan adalah kewajiban pembangunan yang harus terpenuhi melalui berbagai urusan pemerintahan.

Rumusan visi di atas terbangun dalam satu kesatuan dan saling melengkapi. Secara substantif, rangkaian visi tersebut bertujuan meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur, peningkatan perekonomian masyarakat dan daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Serta tidak kalah penting, untuk mewujudkan dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta mewujudkan kohesi sosial di tengah masyarakat Paser.

B. MISI DAERAH

Guna mewujudkan visi kabupaten 2016-2021 sebagai Kabupaten Paser yang semakin sejahtera, merata, berdaya saing dan berkelanjutan diperlukan adanya misi sebagai

perwujudan dari penjabaraan visi. Adapun misi pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Paser 2016-2021 adalah:

1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Transportasi, Energi, Air Bersih, dan Pemukiman.
2. Meningkatkan Pelayanan Dasar di Bidang Pendidikan dan Kesehatan.
3. Memperkuat Fondasi Perekonomian yang Berbasis Potensi Lokal dan Berkelanjutan
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan.
5. Memperkuat Kohesivitas Sosial, Budaya, dan Adat Istiadat Lokal

C. TUJUAN DAN SASARAN

Agar misi yang diagendakan dapat diimplementasikan secara operasional dan fokus diperlukan arahan umum dalam bentuk tujuan dan sasaran. Tujuan merupakan pernyataan arahan umum dari sebuah perencanaan yang hendak dicapai, sedangkan sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai dengan rujukan yang lebih spesifik dan terarah. Adapun tujuan dan sasaran yang akan dijabarkan di bawah ini sesuai urutan yang terdapat pada misi.

1. Misi 1: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Transportasi, Energi, Air Bersih, dan Pemukiman

Bagian ini akan secara khusus membahas misi pertama yang diturunkan dari Visi yang telah ada khususnya mengenai peningkatan pembangunan infrastruktur transportasi, energi, air bersih dan pemukiman. Misi ini masih memberikan ruang bagi diimplementasikannya pembangunan (ketersediaan) dan peningkatan (akses dan kualitas) infrastruktur yang menjadi urusan wajib dasar. Pemerataan pembangunan dari sisi akses dan kualitas infrastruktur transportasi, energi, air bersih dan pemukiman yang layak masih menjadi sesuatu yang harus diprioritaskan. Selain peningkatan yang sudah ada, beberapa titik kritis di Paser masih membutuhkan ketersediaan sejumlah infrastruktur tersebut.

Pembangunan infrastruktur harus bisa dimengerti sebagai ruang tempat bertemunya berbagai dimensi dan sektor pembangunan. Fokus peningkatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Paser juga dapat menjadi penjamin terealisasinya

perencanaan yang sudah dirumuskan. Misi ini akan diturunkan ke dalam 4 tujuan besar yang mencakup bidang infrastruktur darat dan laut, komunikasi dan informasi, energi dan air bersih, dan pemukiman dengan poin-poin tujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan transportasi publik.
- b. Meningkatkan akses jaringan komunikasi.
- c. Meningkatkan akses air bersih.
- d. Mengembangkan infrastruktur pemukiman rakyat

Sebagai penunjang mobilitas masyarakat dan sektor pendukung yang menggerakkan aktivitas perekonomian, ketersediaan infrastruktur perhubungan yang berkualitas dan menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Paser menjadi prasyarat yang mesti dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Paser. Ketersediaan infrastruktur perhubungan ini mencakup perhubungan darat dan perhubungan laut sesuai kondisi geografis dan topografi Kabupaten Paser.

Peningkatan akses dan kualitas transportasi publik diarahkan untuk meningkatkan infrastruktur transportasi darat dan laut. Di darat, infrastruktur transportasi difokuskan pada peningkatan kualitas jalan dan jembatan yang menghubungkan wilayah yang terisolir dengan pusat-pusat layanan publik dan pusat kegiatan perekonomian. Hal ini sangat penting untuk memperlancar interaksi masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan.

Perbaikan kualitas jalan dan jembatan juga mencakup berbagai pembangunan fasilitas pelengkap jalan seperti turap penahan di wilayah yang rawan longsor dan tanah amblas, penguatan jalan dan bantaran sungai dengan jaring batu penahan (bronjong) serta penyediaan fasilitas penerangan jalan, rambu dan taman hijau di sempadan jalan. Hal itu dimaksudkan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna jalan.

Selain infrastruktur transportasi darat, infrastruktur transportasi laut dan sungai juga perlu ditingkatkan, mengingat wilayah Kabupaten Paser yang dilalui beberapa sungai besar dan berbatasan dengan Selat Makassar. Kabupaten Paser hanya memiliki satu infrastruktur pendukung perhubungan laut berupa pelabuhan penyeberangan yaitu Pelabuhan Teluk Adang yang terletak 12 km dari ibu kota kabupaten (Kecamatan Tanah Grogot). Karena itu, selain pelabuhan penyeberangan, yang perlu dibangun di wilayah-

wilayah pesisir adalah dermaga untuk perahu kecil (ketinting) sebagai penghubung desa-desa dan kecamatan yang ada di pesisir.

Selain itu, infrastruktur pendukung transportasi sungai juga perlu ditingkatkan dengan membangun lebih banyak dermaga bagi perahu motor yang berfungsi sebagai sarana transportasi ke wilayah-wilayah pedalaman. Untuk itu, yang perlu diperhatikan adalah keseimbangan rasio antara jumlah perahu motor dengan jumlah penduduk yang menggunakan sarana angkutan ini. Peningkatan infrastruktur pendukung transportasi sungai ini sangat penting mengingat wilayah-wilayah pedalaman sulit dijangkau dengan transportasi darat, sementara banyak desa terletak di daerah aliran sungai. Dermaga-dermaga angkutan perahu motor perlu dibangun lebih banyak di desa-desa yang terletak di daerah aliran sungai ini.

Perbaikan fasilitas transportasi publik juga tidak terbatas pada pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur fisik berupa jalan dan jembatan tapi juga termasuk perbaikan tata kelola sarana dan prasarana perhubungan. Hal itu dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas dan kapasitas transportasi publik dan perbaikan pelayanan angkutan umum. Hal ini juga didorong untuk memperbaiki pelayanan urusan transportasi baik di darat maupun di laut.

Peningkatan akses jaringan komunikasi juga menjadi aspek penting dalam percepatan pembangunan di Kabupaten Paser. Upaya ini dapat dilakukan dengan peningkatan jangkauan jaringan komunikasi seluler dan jaringan internet ke seluruh wilayah yang sulit mendapatkan jaringan. Keberadaan sarana komunikasi dan informasi ini perlu diperluas jangkauannya agar mampu mencapai dan diakses juga oleh masyarakat di pedalaman, pesisir dan wilayah yang belum sepenuhnya terbuka terhadap akses informasi dan komunikasi.

Tujuan selanjutnya dari misi ini adalah peningkatan akses air bersih. Karena itu misi peningkatan infrastruktur air bersih perlu dilakukan secara serius mengingat besarnya jumlah pemakaian air bersih dan terus meningkatnya jumlah penduduk Kabupaten Paser dari tahun ke tahun. Upaya ini dapat dilakukan dengan peningkatan jangkauan layanan air bersih baik jenis perpipaan maupun non perpipaan. Ketersediaan air bersih merupakan aspek sentral dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Paser.

Pengembangan infrastruktur pemukiman rakyat juga menjadi tujuan tersendiri dalam perencanaan pembangunan lima tahunan Kabupaten Paser. Keberadaan infrastruktur pemukiman merupakan hal mendesak dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Tujuan ini konsen terhadap dua hal yaitu peningkatan kawasan pemukiman yang berwawasan lingkungan dan antisipatif bencana serta peningkatan kualitas pemukiman masyarakat yang didalamnya termasuk perbaikan sanitasi dan ruang terbuka hijau. Berikut tabel lengkap misi pertama dalam RPJMD Kabupaten Paser 2016-2021.

Tabel 84: Tujuan dan Sasaran Misi 1

Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan transportasi publik	1.1. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan
	1.2. Meningkatnya pelayanan transportasi publik
	1.3. Meningkatnya keamanan dan kenyamanan pengguna jalan
2. Meningkatkan akses jaringan komunikasi	1.1. Meningkatnya jangkauan jaringan komunikasi
	1.2. Meningkatnya jangkauan jaringan internet
3. Meningkatkan akses air bersih	1.1. Meningkatnya akses Air Bersih
4. Mengembangkan infrastruktur pemukiman rakyat	1.1. Meningkatnya kawasan pemukiman rakyat yang berwawasan lingkungan dan antisipatif bencana
	1.2. Meningkatnya kualitas pemukiman masyarakat

Keempat tujuan pada misi pertama ini berupaya mewadahi berbagai upaya perbaikan infrastruktur fisik dalam bidang transportasi, telekomunikasi, energi, air bersih, dan pemukiman. Dengan demikian, keberadaan tujuan dan sasaran pada misi ini diharapkan mampu mengcover kondisi kontekstual dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Paser.

2. Misi 2: Meningkatkan Pelayanan Dasar di Bidang Pendidikan dan Kesehatan

RPJMD Kabupaten Paser 2016-2021 sangat memperhatikan perencanaan pembangunan terutama yang bersifat pelayanan dasar yakni pendidikan dan kesehatan. Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusia sebagai pelaksana pembangunan, oleh karenanya kualitas sumberdaya manusia harus menjadi prioritas penting pembangunan. Di antara indikator dari kualitas sumberdaya manusia adalah pada kualitas pendidikan dan derajat kesehatan yang baik.

Mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan merupakan tugas nasional bagi semua aparatur pemerintahan di tingkat nasional maupun daerah telah diatur melalui Peraturan Menteri yakni Permendiknas nomor 15 Tahun 2010 tentang Standard Pendidikan Minimum (SPM) bidang pendidikan sebagai tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar. Sedangkan di bidang kesehatan, pemerintah melalui Menteri Kesehatan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 741 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang menyangkut empat aspek yakni pelayanan dasar, pelayanan rujukan, tanggapan terhadap kejadian luar biasa, dan promosi kesehatan. Pemerintah Daerah Kabupaten Paser dalam memenuhi kewajibannya melakukan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat menggunakan indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam dua peraturan menteri tersebut.

Dalam rangka misi peningkatan pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan, terdapat enam tujuan yaitu:

- a. Meningkatkan akses pelayanan pendidikan.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan.
- c. Memperkuat pelayanan pendidikan yang berdaya saing.
- d. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan.
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
- f. Memperkuat pelayanan Kesehatan yang berdaya saing.

Dalam hal peningkatan pelayanan pendidikan tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Paser adalah untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan agar memiliki daya saing. *Pertama*, terkait dengan pemenuhan akses pendidikan meliputi ketersediaan sekolah, guru dan keterjangkauan siswa terhadap pelayanan pendidikan. Kondisi riil saat ini dalam bidang pelayanan pendidikan dan kesehatan masih terfokus pada program penyediaan dan infrastruktur. Padahal isu yang lebih penting dari isu pelayanan adalah soal keterjangkauan masyarakat dan pelaksana pendidikan yang sesuai kompetensi sehingga menyebabkan tingkat pelayanan yang rendah. Dengan kondisi geografis yang sulit dan sarana perhubungan yang terbatas, pelayanan pendidikan juga tidak akan dapat dijangkau oleh siswa-siswa yang bertempat tinggal jauh dari lokasi-lokasi sekolah. Oleh karenanya untuk meningkatkan

keterjangkauan masyarakat terhadap pendidikan diperlukan peningkatan akses masyarakat maupun pelaksana lapangan, kedepan hal ini harus dilakukan untuk meningkatkan angka partisipasi siswa usia sekolah dan usia dini.

Kedua, peningkatan kualitas pendidikan difokuskan pada kualitas siswa dan lulusan sekolah baik melalui perbaikan kurikulum, manajemen sekolah dan optimalisasi kegiatan belajar mengajar. *Ketiga*, pelayanan pendidikan yang berdaya saing tidak hanya dari aspek akreditasi sekolah dan guru tetapi dengan dibuktikan hasil lulusan siswa sekolah yang mampu bersaing dalam jenjang pendidikan yang lebih baik atau pasar kerja yang kompetitif.

Pemerintah Kabupaten Paser menyadari bahwa tingkat pelayanan dasar di bidang pendidikan masih belum optimal, sehingga masyarakat kabupaten Paser masih tertinggal dalam hal kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Paser memprioritaskan dalam misi pembangunan untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan pendidikan yang berdaya saing sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang mandiri dan berbudaya.

Dalam hal pelayanan kesehatan, tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Paser adalah mengoptimalkan pelayanan kesehatan, meningkatkan ketersediaan pelayanan kesehatan rujukan, meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui standar akreditasi yang berdaya saing. Pertama, akses pelayanan kesehatan meliputi ketersediaan unit layanan dan tenaga kesehatan yang memadai disertai keterjangkauan masyarakat yang dijamin dengan asuransi kesehatan baik berupa KIS (Kartu Indonesia Sehat) atau BPJS. Kedua, peningkatan kualitas diintegrasikan antara kompetensi tenaga kesehatan dengan kualitas pelayanan di tingkat unit kesehatan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas kesehatan keluarga. Sedangkan poin ketiga, pelayanan kesehatan yang berdaya saing ditunjukkan dengan peningkatan standar pelayanan yang semakin baik misalnya perbaikan tipe rumah sakit dan akreditasi puskesmas.

Kondisi kesehatan di Kabupaten Paser masih menjadi pekerjaan rumah yang layak dijadikan prioritas terutama dengan adanya temuan minimnya kualitas pelayanan, angka mortalitas ibu yang masih tinggi hingga pengelolaan sistem pelayanan yang

belum optimal. Sehingga perlu usaha strategis yang dirumuskan secara terarah agar tujuan pemerataan kesehatan yang terpadu dapat terwujud dengan maksimal. Pada tabel di bawah ini dipaparkan sasaran dari setiap tujuan pada Misi Kedua.

Tabel 85: Tujuan dan Sasaran Misi 2

Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan akses pelayanan pendidikan	1.1. Meningkatnya angka partisipasi siswa usia sekolah
	1.2. Meningkatnya angka partisipasi anak usia dini
	1.3. Meningkatnya Angka Melek Huruf
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan	2.1. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
3. Memperkuat pelayanan pendidikan yang berdaya saing	3.1. Berkembangnya pelayanan pendidikan yang berdaya saing
4. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan	4.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer
	4.2. Meningkatnya cakupan jaminan kesehatan masyarakat
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	5.1. Meningkatnya derajat kesehatan
	5.2. Meningkatnya kualitas kesehatan keluarga
6. Memperkuat pelayanan Kesehatan yang berdaya saing	6.1. Berkembangnya pelayanan kesehatan yang berdaya saing

Dengan demikian, misi peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan fokus pada tiga hal yaitu akses, kualitas dan daya saing yang semuanya difokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Paser.

3. Misi 3: Memperkuat Fondasi Perekonomian yang Berbasis Potensi Lokal dan Berkelanjutan

Potensi lokal adalah dasar yang kuat untuk menggerakkan dimensi ekonomi dalam konsep pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Paser. Potensi tersebut harus dijaga dan dimanfaatkan dengan baik agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Paser pada masa kini dan akan datang. Walaupun Kabupaten Paser memiliki sektor potensial berupa hutan dan pertambangan, namun kedua sektor tersebut sudah ditarik ke dalam urusan Pemerintah Pusat setelah pelaksanaan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan pertimbangan tersebut, maka beberapa sektor potensial penggerak ekonomi lokal yang menjadi otoritas Kabupaten Paser berasal dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan dan jasa. Sektor pertanian, perkebunan dan perikanan adalah beberapa sektor penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Paser. Kebutuhan akan

produk-produk dari sektor ini terus bertambah, seiring dengan pesatnya laju pertumbuhan penduduk. Oleh karena itu, misi pembangunan pertanian, perkebunan dan perikanan ke depan ditujukan untuk memperkuat produktivitas, kualitas dan kontinuitas produk-produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Selain ketiga sektor potensial di atas, sektor perdagangan, jasa dan investasi merupakan sektor pendukung yang sangat potensial untuk dikembangkan. Sebagian besar masyarakat Paser berprofesi sebagai pedagang, sebagian yang lain bergerak di bidang jasa, seperti pariwisata, penginapan atau perhotelan. Dengan pertimbangan tersebut, maka dasar perekonomian dari bidang perdagangan, jasa dan investasi akan menjadi prioritas. Selain itu isu tentang degradasi lingkungan karena pertumbuhan ekonomi juga akan menjadi prioritas untuk diperbaiki, sehingga konsep green economy mampu diterapkan secara baik.

Dengan demikian, untuk memenuhi misi tiga RPJMD, prioritas dasar perekonomian yang berbasis potensi lokal dan berkelanjutan yang akan dikelola oleh Kabupaten Paser adalah:

- a. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
- b. Mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat yang berkelanjutan.
- c. Meningkatkan kinerja pasar tradisional, koperasi dan UMKM.
- d. Meningkatkan iklim investasi.
- e. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Pengembangan produktivitas, kualitas, dan kontinuitas produk-produk sektor perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan merupakan salah satu isu prioritas yang dihadapi oleh Kabupaten Paser. Isu ini tidak hanya berhubungan dengan masalah ekonomi, namun juga berhubungan dengan masalah ketahanan pangan, keseimbangan lingkungan dan mitigasi bencana. Produk-produk pertanian, perikanan, dan peternakan berperan penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Sementara pengelolaan sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan menjadi kajian yang harus benar-benar diperhatikan, agar stabilitas sosial-ekonomi dan kualitas lingkungan dapat terjaga secara berkesinambungan. Sektor perkebunan di Kabupaten Paser didominasi oleh perkebunan kelapa sawit. Produk hasil olahan kelapa sawit memiliki nilai jual yang baik,

namun berdampak kurang baik terhadap ketersediaan air dalam tanah. Sehingga mitigasi terhadap bencana kekeringan harus diperhatikan.

Selain sektor-sektor di atas, pariwisata adalah sektor potensial yang harus dikembangkan ke depan. Pengembangan sektor pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan, akan mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Pengembangan ini perlu dilakukan agar aspek keberlanjutan perekonomian Paser menjadi semakin kuat. Di masa depan, meningkatnya lahan konversi eks-tambang diharapkan mampu berkontribusi terhadap perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Paser. Untuk itu, reklamasi dan rehabilitasi lahan pasca tambang perlu dilakukan.

Sedangkan perdagangan, jasa dan investasi merupakan sektor pendukung yang sangat potensial untuk dikelola. Jumlah pedagang di Kabupaten Paser meningkat tiap tahun, akan tetapi belum terkelola dengan baik agar mampu bersaing dengan pedagang dari pasar modern. Jika tidak dikelola dengan baik, lambat laun pasar modern akan menjadi persoalan bagi pedagang pasar tradisional. Oleh karena itu pengembangan pasar tradisional, koperasi, UMKM dan IKM perlu ditingkatkan. Sedangkan kualitas lingkungan selalu menjadi dasar terkuat untuk membangun perekonomian yang berkelanjutan di masa depan. Pada tabel di bawah ini dipaparkan sasaran dari setiap tujuan pada misi ketiga:

Tabel 86: Tujuan dan Sasaran Misi 3

Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	1.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
	1.2. Meningkatnya kualitas produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
2. Mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat yang berkelanjutan	2.1. Berkembangnya sektor pariwisata
3. Meningkatkan kinerja pasar tradisional, koperasi dan UMKM	3.1. Meningkatnya kinerja UMKM
	3.2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pasar tradisional
	3.3. Meningkatnya koperasi aktif
	3.4. Meningkatnya kinerja Industri Kecil Menengah
	3.5. Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja
	3.6. Meningkatnya kinerja BUMDes
4. Meningkatkan iklim investasi	4.1. Meningkatnya investasi
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	5.1. Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup
	5.2. Meningkatnya kualitas kawasan konservasi

Dengan demikian, misi peningkatan fondasi perekonomian dengan basis potensi ekonomi lokal dan berkelanjutan berupaya memperkuat perekonomian tanpa merusak atau mendegradasi kualitas lingkungan. Sasaran-sasaran pada tiap tujuan di atas secara spesifik menekankan perlunya penyelamatan lingkungan hidup pada satu sisi tapi juga mendorong investasi dan pengembangan ekonomi lokal dengan partisipasi masyarakat yang lebih kuat.

4. Misi 4: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan kualitas tatakelola merupakan pra-syarat yang menopang berkerjanya misi-misi yang lain. Pembangunan infrastruktur fisik dan peningkatan kualitas pelayanan publik terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan membutuhkan tatakelola pemerintahan yang lebih baik. Selain itu, pelaksanaan pembangunan juga sangat bergantung dengan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang tidak hanya berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas, dan sinergitas, tapi juga berkaitan dengan partisipasi publik dalam pembangunan. Oleh karena itu, misi keempat ini mempunyai empat tujuan, yaitu:

- a. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah.

- b. Meningkatkan sinergi perencanaan pembangunan daerah.
- c. Meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah daerah.
- d. Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pembangunan.

Pelaksanaan urusan pemerintahan dalam rangka pembangunan daerah membutuhkan sistem dan sumber daya manusia yang berkualitas. Keduanya menjalankan peran penting pemerintah sebagai pembuat kebijakan bersama legislatif daerah, sekaligus sebagai pelaksana kebijakan dan pelaksana anggaran. Dengan kewenangan yang besar itu, untuk mencapai misi 4 RPJMD maka pengembangan sistem akuntabilitas pemerintahan menjadi hal yang mutlak diperlukan. Sistem akuntabilitas dibangun secara internal maupun eksternal.

Akuntabilitas internal untuk menjalankan tertib administrasi dan tata kelola keuangan daerah. Sedangkan akuntabilitas eksternal merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat sebagai warga negara yang mempunyai hak untuk mengetahui dan menerima manfaat dari berbagai kebijakan, tata kelola dan capaian pembangunan daerah. Adanya akuntabilitas eksternal tersebut sekaligus sebagai wujud transparansi pemerintah daerah.

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan juga diarahkan untuk meningkatkan sinergi antar dokumen perencanaan. Peningkatan sinergitas agar terdapat ketersatuan arah untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran daerah. Dalam hal ini merupakan sinergi antar dokumen perencanaan, maupun antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran. Perencanaan melalui berbagai dokumen tersebut, tidak lain untuk menjalankan fungsi pemerintah sebagai pelayan publik. Dengan tidak sedikitnya layanan yang diberikan, baik terkait urusan wajib maupun pilihan, maka dalam pencapaian misi 4 ini, juga ditempuh melalui peningkatan kinerja pelayanan pemerintah daerah.

Seiring pula dengan tuntutan jaman yang membawa perubahan paradigma berpemerintahan, maka tata kelola pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterlibatan aktif aktor di luar pemerintah, yaitu masyarakat sipil dan sektor swasta. Dalam menjalankan pembangunan, keterlibatan antar komponen daerah itu diperoleh dengan semakin terbukanya ruang partisipasi. Keterbukaan ruang partisipasi tidak saja dalam bentuk partisipasi pasif seperti halnya masyarakat mengetahui berbagai informasi kebijakan pemerintah, sekaligus partisipasi aktif ketika publik dapat berperan

dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Hal tersebut merupakan partisipasi yang menekankan adanya kepastian aspirasi masyarakat untuk ditindaklanjuti dan direalisasikan. Penjabaran misi 4 ke dalam tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 87: Tujuan dan Sasaran Misi 4

Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah	1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah
	1.2. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah
	1.3. Meningkatnya akses terhadap pelayanan publik
2. Meningkatkan sinergi perencanaan pembangunan daerah	2.1. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran
	2.2. Meningkatnya sinergi antar dokumen perencanaan lainnya
3. Meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah daerah	3.1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah
	3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
	3.3. Terciptanya birokrasi yang bersih dan dipercaya masyarakat
4. Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pembangunan	4.1. Meningkatnya partisipasi publik

Sasaran-sasaran dari tiap tujuan tersebut menggambarkan kondisi yang diinginkan oleh Pemda Paser dalam periode RPJMD dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

5. Misi 5. Memperkuat Kohesivitas Sosial, Budaya dan Adat Istiadat Lokal

Pembangunan di bidang pertambangan ternyata belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Persoalan tersebut tidak hanya disebabkan oleh permasalahan ekonomi tetapi juga terjadi karena persoalan sosial. Selayaknya pembangunan pada umumnya, pembangunan akan menciptakan kelas sosial baru. Kelas sosial ini akan membentuk persoalan baru, apabila tidak diimbangi dengan perhatian terhadap dimensi sosial dalam pembangunan berkelanjutan. Berpijak kepada pemikiran tersebut, dalam RPJMD ini Pemerintah Kabupaten Paser berencana untuk memperkuat kohesivitas sosial sebagai salah satu misi pembangunan selama lima tahun ke depan. Kohesivitas sosial akan menjadi salah satu perhatian utama di dalam proses pembangunan Kabupaten Paser.

Dalam RPJMD ini, misi tentang kohesivitas sosial dipandang sebagai salah satu misi yang perlu diperhatikan dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Mengingat adanya dua hal besar yang perlu diperhatikan. Pertama, Kabupaten Paser memiliki penduduk yang berasal dari berbagai latar belakang sosial (suku) yang beragam. Kedua, pemerataan hasil pembangunan ekonomi di Kabupaten Paser belum mampu berjalan dengan optimal.

Secara umum misi ini berhubungan dengan proses penciptaan keselarasan/ harmoni kehidupan sosial dalam masyarakat. Harmoni sosial ini perlu diciptakan dan dikelola dengan baik untuk menghindari adanya persoalan-persoalan sosial, seperti konflik dan berbagai masalah sosial lainnya. Dengan demikian guna memenuhi misi tiga RPJMD, pembangunan di bidang sosial yang menjadi prioritas Kabupaten Paser adalah:

- e. Meningkatkan Rekognisi dan Promosi;
- f. Meningkatkan Stabilitas Sosial;
- g. Meningkatkan Pengelolaan Kependudukan.

Rekognisi dan promosi adalah dua hal yang perlu ditingkatkan untuk memberi ruang bagi masyarakat pribumi untuk mendapatkan pengakuan dalam pembangunan. Pengakuan tersebut dapat dijalankan dengan membuka akses partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, mulai dari perencanaan, implementasi, evaluasi hingga menikmati hasil pembangunan. Selama ini masyarakat pribumi berada di luar pusat aglomerasi ekonomi. Oleh karena itu rekognisi dan promosi keterlibatan masyarakat perlu ditingkatkan.

Selain rekognisi dan promosi, stabilitas sosial juga perlu ditingkatkan. Kondisi ini bisa bersifat fluktuatif karena persoalan lingkungan dan ekonomi. Persoalan lingkungan seperti bencana kekeringan, sedangkan persoalan ekonomi dapat berupa kemiskinan dan kurangnya pemerataan. Dalam RPJMD ini, Pemerintah Kabupaten Paser akan meningkatkan perhatian pada bidang stabilitas sosial untuk menjaga dimensi sosial dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Meningkatkan stabilitas sosial merupakan tujuan yang dirumuskan untuk meningkatkan kerukunan dan kohesivitas sosial di Kabupaten Paser. Hingga saat ini, masyarakat Paser dikenal sebagai masyarakat yang heterogen baik dari sisi etnis maupun agama, tapi mampu hidup berdampingan dan harmonis.

Pengelolaan kependudukan juga menjadi konsen Pemda Paser dalam merumuskan tujuan pembangunan dalam rangka memperkuat kohesivitas sosial. Pengelolaan kependudukan bisa ditafsirkan lebih mengerucut pada perbaikan tata kelola administrasi kependudukan di lingkungan Kabupaten Paser. Data kependudukan merupakan modal penting dalam perumusan kebijakan yang tepat sasaran sehingga keberadaanya menjadi sangat sentral.

Pengelolaan migrasi juga menjadi tujuan yang penting dalam memperkuat kohesivitas sosial. Pengelolaan ini dilakukan agar tidak terjadi persoalan sosial baru di dalam masyarakat. Sebagian besar penduduk Paser adalah imigran dari berbagai wilayah di Indonesia. Umumnya mereka berasal dari Jawa, Bugis dan Makassar. Pengelolaan harus dilakukan agar tidak terjadi kecemburuan sosial antara penduduk pribumi dan pendatang.

Secara lebih detail, sasaran dari ketiga tujuan pada misi kelima ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 88: Tujuan dan Sasaran Misi 5

Tujuan	Sasaran
1 Meningkatkan rekognisi dan promosi	1.1. Meningkatnya akses masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam berbagai proses pembangunan 1.2. Meningkatnya akses perempuan untuk berpartisipasi dalam berbagai proses pembangunan 1.3. Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan 1.4. Meningkatnya promosi nilai-nilai kearifan lokal dalam pembangunan
2 Meningkatkan stabilitas sosial	2.1. Meningkatnya kerukunan, keamanan dan ketertiban masyarakat 2.2. Meningkatnya akses bantuan bagi masyarakat yang terkena bencana sosial 2.3. Meningkatnya kesiapsiagaan terhadap bencana alam 2.4. Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat 2.5. Meningkatnya perlindungan bagi perempuan 2.6. Meningkatnya pemenuhan hak anak
3 Meningkatkan pengelolaan kependudukan	3.1. Meningkatnya ketersediaan data kependudukan yang selalu diperbaharui 3.2. Meningkatnya pengendalian dan pengelolaan migrasi

Seluruh ulasan pada Bab 5 akan diperdalam dan dilengkapi dengan alur logika perencanaan dari visi-misi hingga ke program-kegiatan beserta indikator-indikatornya. Sinergi beberapa dokumen perencanaan mulai dari RPJMN, RPJMD Provinsi Kalimantan

Timur, dan dokumen pengarusutamaan ekonomi hijau berusaha ditampilkan dengan dasar yang ada di Bab 5. Bab 6 secara khusus akan melengkapi ulasan pada Bab 5 dengan refleksi khusus mengenai strategi yang harus diambil untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang menopang visi-misi pembangunan Kabupaten Paser. Hal lain yang akan diperdalam adalah mengenai arah kebijakan. Beberapa pilihan teknokratis seputar fokus program dan kegiatan yang akan dipilih maupun lokus wilayah yang diprioritaskan bagi implementasi perencanaan. Semua ini akan menjadi bagian formal dan substansial yang tidak bisa dipisahkan dari Bab 6 yang akan dibahas.

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan visi dan misi yang telah ditetapkan di Bab 5 perlu diperjelas dengan menentukan sasaran pokok, arah kebijakan, dan prioritas tahapan untuk mencapainya. Bab 6 memaparkan ketiga hal itu secara komprehensif dan berurutan. Sasaran pokok merupakan kondisi yang menjadi target untuk diwujudkan dari setiap misi yang telah ditetapkan selama 5 tahun ke depan. Sedangkan arah kebijakan adalah strategi yang relevan untuk diterapkan dalam rangka mencapai setiap sasaran pokok. Agar pencapaian sasaran pokok lebih realistis, sistematis, dan berkesinambungan untuk dicapai maka pada bagian terakhir bab ini dipaparkan tahapan pencapaian yang berisi capaian-capaian yang diprioritaskan dari setiap tahapan pembangunan lima tahunan.

A. MISI 1: MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI, ENERGI, AIR BERSIH, DAN PEMUKIMAN

Bagian ini secara khusus akan membahas strategi dan arah kebijakan untuk memaksimalkan tercapainya tujuan pembangunan melalui sasaran-sasaran yang telah teridentifikasi pada Bab 5. Semua tujuan yang berorientasi pada pemenuhan fungsi layanan dasar di bidang infrastruktur membutuhkan strategi dan arah kebijakan yang benar-benar bisa memenuhi ekspektasi konteks riil di Kabupaten Paser.

Peningkatan akses dan kualitas pelayanan transportasi darat dilakukan untuk menunjang aktivitas masyarakat di segala bidang kehidupan serta menunjang kinerja pelayanan publik. Upaya ini dapat dilakukan dengan cara melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan yang menghubungkan akses antar wilayah. Pembangunan diprioritaskan pada jalan dan jembatan yang menghubungkan wilayah rural dengan wilayah urban dan pusat-pusat perekonomian serta pusat-pusat pemerintahan dan layanan publik.

Di Kabupaten Paser, setidaknya terdapat tiga zona perkembangan Paser yaitu, selatan, utara (pedalaman dan pesisir) serta wilayah tengah perlu memperoleh sentuhan pembangunan infrastruktur yang berbeda. Jika fokus pembangunan selama ini hanya di wilayah tengah, maka fokus pembangunan perlu diperluas dan diarahkan ke wilayah selatan dan pedalaman/pesisir. Perbaikan infrastruktur tersebut dimaksudkan untuk mempermudah akses masyarakat terutama di wilayah terisolir terhadap pusat-pusat pelayanan publik dan pusat kegiatan perekonomian.

Peningkatan akses dan kualitas pelayanan transportasi publik juga dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pelayanan terminal angkutan darat terpadu dengan cara memperluas terminal angkutan sehingga mampu menampung jumlah kendaraan. Luas terminal angkutan darat terpadu harus disesuaikan dengan kondisi daerah, sehingga tidak terjadi penumpukan penumpang dan barang. Untuk menghindari adanya penumpukan penumpang dan barang, perlu dibangun beberapa terminal penghubung.

Peningkatan moda transportasi publik dapat memperlancar mobilitas masyarakat dan menekan jumlah kepemilikan alat transportasi pribadi. Peningkatan moda transportasi darat juga diharapkan dapat diakses oleh seluruh masyarakat, khususnya masyarakat yang sulit mendapat akses transportasi darat. Oleh karena itu dalam pengelolaan, perlu ada pembagian trayek yang merata sehingga dapat menjangkau seluruh masyarakat di semua wilayah.

Di samping itu, peningkatan kualitas transportasi juga dilakukan dengan penambahan fasilitas pengaman jalan yang bisa meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna jalan. Hal ini dapat dilakukan dengan perbaikan fasilitas pelengkap jalan dan pemeriksaan kelaikan kendaraan bermotor. Untuk kelengkapan jalan-jalan kabupaten yang sudah ada harus ada kelengkapan dan dukungan fasilitas jalan yang lain seperti penerangan jalan, taman/jalur hijau di sempadan jalan, rambu-rambu, turap-gorong-gorong-bronjong serta fasilitas pendukung lainnya seperti marka jalan dan pilar-pilar penentu jarak. Hal ini untuk menambah kenyamanan dan memberi pengaruh langsung pada perbaikan kualitas layanan yang nantinya bisa diukur dengan ketepatan rencana perjalanan (lama waktu tempuh).

Peningkatan akses dan kualitas pelayanan transportasi tidak hanya berlaku di daratan tapi juga di laut dan sungai. Kabupaten Paser memiliki garis pantai yang panjang dan sungai sebagai salah satu akses transportasi non darat. Daerah-daerah yang terletak di pesisir laut atau sungai membutuhkan akses dan kualitas transportasi air yang memadai. Pelabuhan rakyat merupakan sarana transportasi laut yang menghubungkan masyarakat satu wilayah dengan wilayah lain yang tidak terjangkau oleh transportasi darat.

Peningkatan kualitas dan kapasitas daya tampung pelabuhan rakyat dan dermaga akan menjadi sarana untuk meningkatkan mobilitas orang dan barang di wilayah-wilayah yang mengandalkan transportasi laut dan sungai. Hal ini akan memicu peningkatan

interaksi penduduk pada wilayah pesisir Kabupaten Paser dan mempermudah akses masyarakat terhadap pusat layanan publik dan akses masyarakat ke pusat-pusat kegiatan perekonomian.

Perbaikan sarana dan prasarana tersebut harus dibarengi dengan peningkatan jumlah alat transportasi air seperti kapal dan sampan dapat memperlancar mobilitas masyarakat, baik masyarakat yang berasal dari wilayah tersebut maupun masyarakat dari luar wilayah. Bertambahnya moda transportasi sungai dan laut dapat memperlancar distribusi barang masuk atau barang keluar ke wilayah lain. Selain itu, bertambahnya moda alat transportasi laut dan sungai dapat memperlancar dan mempercepat mobilisasi masyarakat.

Selain bidang transportasi darat dan laut, bidang komunikasi dan informasi juga perlu mendapatkan perhatian serius di Kabupaten Paser. Peningkatan akses jaringan komunikasi dapat dilakukan dengan peningkatan jaringan komunikasi dan jangkauan internet ke seluruh kecamatan dan desa. Upaya tersebut dilakukan untuk memperluas jangkauan jaringan informasi dan memperluas sebaran informasi khususnya ke wilayah-wilayah yang sulit mendapatkan jaringan informasi seluler maupun jaringan internet. Penguatan jaringan komunikasi nirkabel melalui kerjasama pemerintah dengan provider telepon selular bisa menjadi salah satu hal penting yang mendorong komunikasi, konektivitas dan hubungan antar wilayah yang intens. Penguatan kapasitas dan jangkauan ini juga mengandaikan adanya niatan baik pemerintah dalam membuka kesempatan yang luas bagi masyarakat khususnya dalam penyebaran informasi.

Wilayah Kabupaten Paser juga perlu meningkatkan akses jaringan energi secara terus-menerus. Peningkatan akses jaringan energi seperti fasilitas pembangkit listrik perlu memadai agar menunjang aktifitas masyarakat. Peningkatan fasilitas pembangkit listrik bisa menggunakan tenaga alternatif sumber daya alam yang sudah tersedia seperti pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga air dan sebagainya. Selain itu, pengembangan tenaga listrik dapat dikembangkan berbasis komunitas dan kelompok masyarakat. Peningkatan ketersediaan listrik berbasis komunitas ini dapat dikembangkan pada wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh layanan listrik dari PLN.

Peningkatan akses dan kualitas air bersih juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Paser. Pelayanan air bersih kepada masyarakat bisa dilakukan dengan

membangun tempat penampungan di setiap wilayah yang belum memiliki akses langsung ke penyaluran air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penyaluran air bersih bisa dilakukan dengan jaringan perpipaan maupun non perpipaan, baik yang menjadi bagian dari strategi PDAM maupun yang diinisiasi oleh pemerintah sendiri, khususnya untuk wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kegiatan administratif dan ekonomi.

Di samping itu, pengembangan infrastruktur pemukiman rakyat juga sangat diperlukan untuk memperbaiki kualitas lingkungan. Pengembangan infrastruktur pemukiman rakyat, harus ramah lingkungan dan jauh dari resiko bencana. Pengembangan infrastruktur pemukiman rakyat juga harus mengedepankan kualitas sanitasi. Pemukiman yang bersih dapat menunjang kesehatan masyarakat. Pengembangan kualitas sanitasi pemukiman dilakukan dengan cara membuat tempat pembuangan akhir, pengolahan limbah rumah tangga serta meningkatkan kebersihan dalam rumah tangga. Selain itu, pengembangan infrastruktur pemukiman rakyat mempertimbangkan kualitas lingkungan dan ketaatan menggunakan ruang. Kualitas lingkungan dapat ditingkatkan dengan memperluas ruang hijau atau ruang terbuka, sedangkan ketaatan terkait dengan konsisten penerapan aturan perizinan.

Berikut daftar strategi dan arah kebijakan lengkap untuk semua tujuan dan sasaran yang diidentifikasi sebagai bagian strategis dan prioritas pembangunan Kabupaten Paser lima tahun ke depan.

Tabel 89. Strategi dan Arah Kebijakan Misi 1

MISI 1: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Transportasi, Energi, Air Bersih, dan Pemukiman			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan transportasi publik	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Peningkatan Akses dan Kualitas Jembatan untuk Memperlancar akses Desa-Pusat Kecamatan, dan Kecamatan-Pusat Kabupaten	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas jembatan Khususnya yang menghubungkan sentra-sentra perekonomian, pertanian, perkebunan Peningkatan akses, kualitas jembatan ke pusat-pusat layanan masyarakat Perlu ada upaya pemerataan pembangunan jembatan
		Peningkatan dan Pengembangan Jalan dan Kualitas Jalan	Fokus: Kecamatan di Wilayah Selatan Pedalaman Long Kali dan Long Ikis Pesisir Long Ikis dan Kuaro
		Perbaikan Penerangan Rambu, Jalur Hijau dan Saluran Irigasi di Sempadan Jalan	Khususnya di wilayah - wilayah yang padat dilalui kendaraan
		Peningkatan kualitas dan kelas jalan lingkungan	Khususnya di desa - desa Tanjung Harapan, Muara Samu, Muara Komam dan Batu Engau
		Peningkatan dan Pembangunan Penerangan Jalan, Turap, Gorong - Gorong, Bronjong dan Fasilitas Pendukung Jalan	Pembangunan Turap di lokasi jalan yang rawan longsor dan amblas
		Meningkatnya pelayanan transportasi publik	Pembangunan dan peningkatan kualitas terminal angkutan darat terpadu

	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan pengguna jalan	Penambahan sarana pelengkap jalan	Peningkatan pengamanan lalu lintas di jalur padat lalu lintas
		Operasi kendaraan bermotor layak jalan	Cek fisik rutin kendaraan bermotor
Meningkatkan akses jaringan komunikasi	Meningkatnya jangkauan jaringan komunikasi	Pengembangan dan peningkatan jaringan komunikasi yang ada	Wilayah yang Belum Bisa mengakses Jaringan Komunikasi Seluler Penguatan dan penambahan Provider dan Menara untuk jaringan Komunikasi
		Peningkatan kerjasama dengan media massa nasional/Lokal	Fokus Ke penyebaran dan penguatan sebaran informasi ke wilayah - wilayah perdesaan dan daerah yang sulit mengakses informasi publik
	Meningkatnya jangkauan jaringan internet	Peningkatan akses internet	Kecamatan dan desa-desa yang belum bisa mengakses Internet
Meningkatkan akses air bersih	Meningkatnya akses Air Bersih	Peningkatan jumlah dan kualitas sarana penampungan air bersih	Desa - desa yang belum memiliki jaringan air bersih (mulai dari penampungan sampai instalasi RT)
		Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas perpipaan	Desa - desa yang belum memiliki jaringan air bersih (mulai dari penampungan sampai instalasi RT)
			Distribusi air minum yang merata
		Peningkatan dan pemerataan jumlah rumah tangga pengguna layanan air bersih	Distribusi air minum yang merata
		Peningkatan jumlah desa yang sudah menikmati fasilitas air bersih	Pemerataan dan prioritas desa - desa yang belum terlayani kebutuhan air bersih
Mengembangkan infrastruktur pemukiman rakyat	Meningkatnya kawasan pemukiman rakyat yang berwawasan lingkungan dan antisipatif bencana	Peningkatan sistem pengelolaan banjir	Permukiman di wilayah perkotaan dan perdesaan Kawasan permukiman
	Meningkatnya kualitas	Peningkatan sanitasi Pemukiman	Sampah dan limbah pemukiman perkotaan,

pemukiman masyarakat	Penataan areal pemakaman dan terbuka hijau	pemukiman perdesaan dan pusat ekonomi Fokus pada penataan fisik dan non fisik areal pemakaman umum dan penataan arena - arena terbuka hijau
----------------------	--	--

Strategi dan arah kebijakan tersebut menjadi petunjuk bagi perumusan program dan kegiatan dalam rangka terwujudnya sasaran-sasaran SKPD. Dengan demikian, strategi dan arah kebijakan untuk misi 1 ini berusaha mendetailkan upaya-upaya yang akan dilakukan dengan fokus yang lebih jelas.

B. MISI 2: MENINGKATKAN PELAYANAN DASAR DI BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

Pendidikan dan kesehatan merupakan dasar bagi pembangunan sosial masyarakat. Dua bidang ini merupakan basis pembangunan yang menjadi hak warga masyarakat Paser agar mampu meningkatkan kualitas hidupnya. Mengingat pentingnya bidang Pendidikan dan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Paser berupaya menyusun perencanaan bagi masyarakat agar mendapat pemerataan kesempatan dalam mendapatkan pelayanan, baik dari sisi akses, kualitas dan daya saing.

Salah satu persoalan yang menjadi penghambat laju pembangunan di Kabupaten Paser adalah rendahnya kualitas SDM karena belum optimalnya layanan pendidikan, karena itu pengembangan pelayanan pendidikan dasar sembilan tahun dan menengah secara lebih memadai menjadi solusi mutlak untuk memperbaiki kondisi ini. Infrastruktur pendidikan di kabupaten Paser secara umum sudah memadai, dibuktikan dengan rasio ketersediaan sekolah dan siswa yang telah sesuai standar pelayanan minimal nasional. Tantangan dari sisi akses pelayanan terdapat pada persebaran guru yang tidak merata antar kecamatan dan antar unit sekolah. Kondisi ini disebabkan oleh keengganan para guru untuk ditempatkan di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Selain itu, minat untuk bersekolah masih rendah karena banyak masyarakat Paser yang belum memahami pentingnya pendidikan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya rata-rata lama sekolah yang rendah sehingga perlu formulasi khusus untuk meningkatkan partisipasi tersebut. Pembangunan pendidikan dari sisi kualitas dapat dibuktikan dengan kualitas lulusan siswa melalui peningkatan kualitas guru dan kegiatan belajar mengajar sehingga prioritas pembangunan tidak hanya difokuskan pada penyediaan sarana prasarana semata.

Pelayanan kesehatan di Paser masih perlu peningkatan terutama dari sisi akses, kualitas dan daya saing. Ketersediaan pelayanan kesehatan belum berfungsi optimal karena beberapa fasilitas kesehatan, terutama puskesmas pembantu di tingkat desa tidak menyediakan pelayanan maksimal. Rendahnya komitmen dari sebagian petugas

pelayanan menjadi penyebab sejumlah fasilitas kesehatan di beberapa wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kesadaran dan wawasan masyarakat tentang kesehatan juga masih rendah sehingga berakibat juga pada cakupan layanan kesehatan yang rendah pula. Di beberapa kecamatan, masih terdapat masyarakat yang lebih memilih untuk berobat ke dukun daripada ke fasilitas kesehatan. Memperhatikan sejumlah tantangan tersebut dan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Bab 5, strategi umum dan arah kebijakan pembangunan pendidikan dan kesehatan Kabupaten Paser periode 2016-2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 90: Strategi dan Arah Kebijakan Misi 2

MISI 2: Meningkatkan pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan akses pelayanan pendidikan	Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah	Menguatkan akses pendidikan kepada semua kalangan masyarakat	Peningkatan akses bagi anak usia sekolah baik dari level SD, SMP dan SMA
	Meningkatnya angka partisipasi anak usia dini	Peningkatan ketersediaan layanan pendidikan bagi anak usia dini	Peningkatan akses bagi pendidikan anak usia dini
Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Peningkatan kompetensi Guru	Peningkatan kompetensi guru berdasarkan pemetaan sekolah
Memperkuat pelayanan pendidikan yang berdaya saing	Berkembangnya pelayanan pendidikan yang berdaya saing	Pengembangan Manajemen sekolah berbasis masyarakat	Pengembangan MBS, optimalisasi kinerja Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan
		Pengembangan pelayanan pendidikan yang kompetitif	Pengembangan standar pelayanan unit pendidikan dan hasil lulusan siswa yang kompetitif
Meningkatkan akses pelayanan kesehatan	Meningkatnya pelayanan kesehatan primer	Meningkatkan berbagai pelayanan primer hingga unit pelayanan terkecil	Peningkatan kualitas layanan dengan perbaikan sarana prasarana dari Rumah Sakit, Puskesmas, hingga Pustu/Pusban
	Meningkatnya cakupan jaminan kesehatan masyarakat	Peningkatan masyarakat yang mendapatkan jaminan kesehatan	Memastikan masyarakat mendapat jaminan kesehatan terutama untuk warga miskin dan peningkatan pengguna BPJS
Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan menurunkan resiko kematian dari penyakit	Peningkatan kualitas derajat kesehatan dengan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular
	Meningkatnya kualitas kesehatan	Peningkatan pelayanan kesehatan	Penyelenggaraan pelayanan keluarga,

	keluarga	keluarga, remaja, dan balita	kesehatan remaja, dan balita
Memperkuat pelayanan Kesehatan yang berdaya saing	Berkembangnya pelayanan kesehatan yang berdaya saing	Peningkatan kualitas kelembagaan dan sumber daya	Peningkatan kualitas unit layanan (puskesmas dan Rumah sakit) dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dan administrasi kesehatan

Strategi dan arah kebijakan pada misi dua tersebut diarahkan pada upaya peningkatan ketersediaan dan akses layanan pendidikan dan kesehatan, kemudian distribusi yang lebih merata terhadap guru dan tenaga kesehatan. Di samping itu, strategi dan kebijakan ini menekankan perlunya penguatan daya saing daerah khususnya bidang pendidikan dan kesehatan dengan memperkuat standardisasi kelembagaan dan standardisasi pelayanan. Dengan demikian, untuk mewujudkan masing-masing sasaran, strategi dan arah kebijakan ini juga menjadi petunjuk bagi program-program dan kegiatan dalam menunjang peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan.

C. MISI 3: MEMPERKUAT FONDASI PEREKONOMIAN YANG BERBASIS POTENSI LOKAL DAN BERKELANJUTAN

Fondasi perekonomian yang berbasis potensi lokal adalah salah satu misi penting dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Paser. Misi ini tidak hanya berhubungan dengan tingginya pertumbuhan ekonomi, namun juga berhubungan dengan isu pemerataan, keberlanjutan, mitigasi bencana dan responsif gender. Penerapan konsep pemerataan menjadi penting, karena persoalan disparitas di Paser masih besar. Sedangkan penerapan konsep tentang keberlanjutan, mitigasi bencana dan responsif gender menjadi penting untuk dijalankan, agar pembangunan perekonomian di Kabupaten Paser menjadi semakin baik di masa depan.

Secara garis besar konsep-konsep tersebut diletakan ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan perekonomian Kabupaten Paser, yang di topang oleh sektor perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, perdagangan dan pengelolaan lahan pasca tambang. Dalam rangka memperkuat fondasi perekonomian yang berbasis potensi lokal dan berkelanjutan maka disusunlah strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Tabel 91: Strategi dan Arah Kebijakan Misi 3

Misi 3:Memperkuat Fondasi Perekonomian yang Berbasis Potensi Lokal dan Berkelanjutan					
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
Meningkatkan produksi dan produktivitas, pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Peningkatan produktivitas pertanian	Pengembangan inovasi IPTEK, perlindungan lahan dan pemberdayaan penyuluh pertanian secara merata dan berkelanjutan		
		Peningkatan produktivitas pertanian	Pengembangan inovasi IPTEK dan pemberdayaan penyuluh lapangan perkebunan secara merata dan berkelanjutan		
		Peningkatan produksi dan produktivitas peternakan	Pengembangan inovasi IPTEK dan penanggulangan penyakit ternak secara merata dan berkelanjutan		
		Peningkatan produksi dan produktivitas perikanan	Pengembangan budidaya perikanan secara berkelanjutan		
	Meningkatnya kualitas produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Peningkatan kualitas produk pertanian	Peningkatan kualitas produk pertanian	Pengembangan kualitas produk pertanian Pengembangan sentra produksi pertanian	
			Peningkatan kualitas produk perkebunan	Pengembangan kualitas produk perkebunan Pengembangan sentra produksi perkebunan	
		Peningkatan kualitas produk peternakan	Peningkatan kualitas produk peternakan	Pengembangan kualitas produk peternakan Pengembangan sentra produksi peternakan	
			Peningkatan kualitas produk perikanan	Pengembangan kualitas produk perikanan Pengembangan sentra produksi perikanan	
		Mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat yang berkelanjutan	Berkembangnya sektor pariwisata	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata	Pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata secara berkelanjutan
				Peningkatan kontribusi pariwisata terhadap perekonomian lokal	Pengembangan potensi wisata daerah dan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sektor pariwisata

Meningkatkan kinerja pasar tradisional, koperasi dan UMKM	Meningkatnya kinerja UMKM	Pengembangan UMKM	Pengembangan kapasitas manajemen UMKM secara menyeluruh dan berkelanjutan
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pasar tradisional	Peningkatan akses masyarakat terhadap pasar tradisional	Peningkatan akses masyarakat dan perlindungan pasar tradisional secara merata
	Meningkatnya koperasi aktif	Pengembangan koperasi aktif	Revitalisasi koperasi secara merata dan berkelanjutan
	Meningkatnya kinerja industri kecil menengah	Pengembangan industri kecil dan menengah	Pengembangan kecil dan menengah secara merata dan berkelanjutan
	Meningkatnya kualitas tenaga kerja	Peningkatan kualitas tenaga kerja	Peningkatan kualitas, produktivitas dan serapan tenaga kerja secara merata
	Meningkatnya kinerja Bumdes	Pemberdayaan Bumdes	Fasilitasi pembenahan pengelolaan Bumdes
Meningkatkan iklim investasi	Meningkatnya investasi	Peningkatan investasi non-tambang dan non-sawit serta peningkatan kinerja pelayanan perijinan terpadu	Peningkatan nilai investasi dan kinerja pelayanan perijinan secara berkelanjutan
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup	Penguatan regulasi perlindungan hutan dan pemberdayaan sekitar hutan	Penguatan regulasi, pemberdayaan masyarakat dan konservasi lingkungan secara berkelanjutan
	Meningkatnya kualitas kawasan konservasi	Perbaikan kawasan konservasi	Kawasan konservasi, wilayah DAS dan lahan kritis di Kabupaten Paser

Dalam upaya mewujudkan sasaran meningkatnya produksi, produktivitas, dan kualitas produk pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan disusun beberapa strategi dan arah kebijakan yang fokus pada penggunaan teknologi terbaru dan pengembangan strategi budidaya. Dalam rangka peningkatan kualitas produk, strategi dan arah kebijakan diarahkan pada penguatan sentra-sentra produk pengolahan.

Dalam hal peningkatan pariwisata, strategi diarahkan pada upaya memperkuat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan wisata. Selain itu, pengembangan wisata diharapkan mampu mendasarkan diri pada prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan yang mampu menghasilkan kebermanfaatan sosial dan ekonomi serta tetap menjaga kelestarian lingkungan. Pada tahap yang lebih lanjut, sektor pariwisata ini juga diarahkan untuk mampu meningkatkan kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Paser.

Strategi dan arah kebijakan dalam rangka meningkatkan kinerja pasar tradisional, UMKM, koperasi, dan industri kecil menengah disusun berdasarkan kebutuhan untuk peningkatan kapasitas manajemen baik UMKM, koperasi, maupun pasar tradisional. Kebijakan untuk sasaran tersebut juga diharapkan mampu mengadopsi prinsip-prinsip keberlanjutan dan partisipasi masyarakat lokal. Upaya ini juga didorong dengan strategi dan arah kebijakan peningkatan investasi yang tidak lagi menggantungkan diri pada sektor tambang. Hal ini juga sejalan dengan semangat dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan menggandalkan perekonomian non tambang.

D. MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Tata kelola pemerintahan memegang peran penting dalam proses pembangunan daerah. Isu tata kelola berkaitan dengan kapasitas aparatur pemerintah sekaligus seperangkat kelembagaan beserta prinsip yang menjamin kelancaran proses perencanaan pembangunan beserta pelaksanaan pembangunan atau penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, dalam mencapai misi 4, beserta tujuan dan sasarannya, dibutuhkan strategi dan arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan berfungsi menjaga capaian baik yang telah diperoleh dalam proses pembangunan sebelumnya, sekaligus jika capaian sebelumnya masih kurang, maka strategi dan arah kebijakan berguna sebagai pandu arah agar kedepan mampu meningkatkan capaian yang semakin baik dari tahun ke tahun.

Tabel 92: Strategi dan Arah Kebijakan Misi 4

Misi 4: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Menjaga konsistensi pencapaian opini BPK WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	Pelaksanaan APBD yang semakin efektif dan efisien	
		Pengoptimalan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan efektivitas penggunaan SIMDA	
		Pengoptimalan kinerja penyelenggaraan SPIP dan TEPR (Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran)	Pelaksanaan evaluasi dan pengawasan secara berkala	
		Peningkatan kualitas tata keuangan dan administrasi desa	Peningkatan kapasitas penyusunan APBDes Peningkatan penggunaan sistem elektronik dalam pengadaan barang dan jasa	
	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Pengelolaan parkir serta sumber-sumber pajak dan retribusi daerah	
	Meningkatnya akses terhadap informasi publik	Transparansi kinerja keuangan daerah dan capaian pembangunan sektoral	Transparansi kinerja keuangan daerah dan capaian pembangunan sektoral	Transparansi alokasi belanja daerah dan kinerja pendapatan daerah Transparansi capaian kinerja sektoral atau setiap urusan pemerintahan
			Penguatan kelembagaan pengelolaan informasi dan dokumen	Pembentukan PPID (Pejabat Pengelola Informasi Daerah) di setiap SKPD
Pemanfaatan berbagai media sebagai sarana transparansi			Optimalisasi peran media dalam jaringan (online) sebagai sarana publikasi dan transparansi Peningkatan efektivitas dan cakupan media sebagai sarana publikasi	
Meningkatkan sinergi perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan	Menjadikan RPJMD dan Renstra SKPD sebagai acuan penganggaran tahunan	Keterpaduan penganggaran dalam dokumen perencanaan jangka menengah Penyusunan dokumen penganggaran teknis berdasarkan pagu indikatif RPJMD dan Renstra	

	dengan penganggaran	Menjadikan pelaksanaan RPJMD dan Renstra SKPD sesuai dengan dokumen perencanaan	SKPD Penyusunan dokumen pengendalian serta evaluasi RPJMD dan Renstar SKPD Alokasi anggaran pada setiap sektor/SKPD berdasarkan kerangka pendanaan program dan kegiatan pada renstra SKPD
	Meningkatnya sinergi antar dokumen perencanaan lainnya	Peningkatan kepatuhan terhadap RTRW	Rencana penataan ruang dan pemanfaat ruang pada RPJMD, RKPD serta renstra dan renja SKPD berdasarkan zonasi dan pemanfaatan yang telah diatur dalam RTRW
		Peningkatan responsivitas terhadap dinamika sosial	Perencanaan pembangunan daerah yang memperhatikan perkembangan serta dinamika lingkungan regional maupun internasional Penataan wilayah perbatasan
Meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah daerah	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah	Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur	Pelaksanaan diklat struktural bagi pemangku jabatan baru Mengintensifkan pelaksanaan diklat fungsional dan pendalaman materi
		Mengintensifkan pembinaan dan pengembangan aparatur	Pengadaan CPNS berdasarkan analisis kebutuhan daerah yang urgen Pemberian tunjangan berbasis kinerja
		Peningkatan pengawasan internal di lingkungan pemerintah daerah	Penanganan kasus pengaduan dan temuan pengawasan secara tepat
		Peningkatan pelayanan perangkat daerah	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur
		Penguatan kelembagaan KORPRI	Fasilitasi dan pemberian dukungan penguatan kelembagaan KORPRI
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Peningkatan standar pelayanan		Pelaksanaan SPM Perumusan dan pelaksanaan standar pelayanan sebagai pengembangan SPM
		Peningkatan pelayanan terhadap	Peningkatan sarana operasional penanggulangan

	kebutuhan keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat	bencana kebakaran Peningkatan cakupan patroli Satpol PP Menjaga ketersediaan SDM Satpol PP dan petugas Linmas dan sarana dan prasarananya
	Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan	Peningkatan akses pelayanan KTP, KK dan Akte Catatan Sipil
	Peningkatan perumusan kebijakan, koordinasi, dan pelayanan administrasi	Memperkuat peran strategis sekretariat daerah dalam perumusan kebijakan, kordinasi, dan pelayanan administrasi sesuai tugas dan fungsinya.
	Peningkatan peran kecamatan	Menguatkan peran kecamatan dalam penyelenggaraan urusan umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Perkada, pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan, Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan
	Penataan produk hukum	Merumuskan dan menetapkan produk hukum daerah yang mendukung peningkatan pelayanan publik
Terciptanya birokrasi yang bersih dan dipercaya masyarakat	Penyusunan rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Membangun kemitraan dengan KPK dan aparat penegak hukum di daerah
	Pelebagaan dan peningkatan pelaksanaan inovasi daerah	Perumusan peraturan kepala daerah tentang inovasi daerah
	Peningkatan pelayanan kearasipan	Peningkatan kualitas sistem administrasi pengarsipan
Meningkatkan	Peningkatan forum partisipasi dan	Peningkatan pelaksanaan musrenbang di semua

partisipasi publik dalam proses pembangunan	Meningkatnya partisipasi publik	perluasan akses bagi masyarakat	desa
		Pengembangan saluran aspirasi masyarakat	Efektivitas pelaksanaan public hearing dan kegiatan reses anggota DPRD
		Peningkatan pendidikan politik masyarakat	Penguatan peran kedinasan dalam menjangkau aspirasi dan pengaduan masyarakat
		Menjadikan aspirasi masyarakat sebagai basis utama dalam perumusan kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah	Penguatan peran masyarakat sipil dalam pembangunan daerah
			Peningkatan partisipasi pemilih dalam pemilihan umum
			Peningkatan tindak lanjut dan realisasi atas aduan masyarakat yang masuk dalam unit layanan pengaduan

Seperti dijabarkan pada tabel di atas, sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah akan diupayakan dengan strategi dan kebijakan yang fokus pada optimalisasi kinerja berbasis IT. Dengan begitu, integrasi sistem pengelolaan daerah akan dilakukan dengan harapan mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan. Hal ini berkaitan juga dengan sasaran meningkatnya akses informasi publik dengan arah kebijakan salah satunya dengan optimalisasi Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID).

Titik tekan lain yang dimunculkan dalam strategi dan arah kebijakan ini adalah dengan mendorong sinergitas antar dokumen perencanaan yang selama ini digunakan. Keselarasan perencanaan menjadi titik awal dalam melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan. Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan, maka akan dilakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia dengan berbagai strategi penguatan kapasitas sumber daya aparatur. Hal itu diharapkan mampu meningkatkan kinerja pelayanan publik dalam berbagai bidang. Kombinasi peningkatan kualitas sumber daya akan menjadi pintu masuk dalam rangka peningkatan kapasitas birokrasi secara umum. Di samping itu, perbaikan tatakelola pemerintahan juga mendorong adanya partisipasi publik yang mampu memberikan masukan yang konstruktif terhadap pembangunan Paser secara umum.

E. MISI 5: KOHESIVITAS SOSIAL, BUDAYA, DAN ADAT ISTIADAT LOKAL

Misi Kabupaten Paser dalam penguatan kohesivitas sosial, budaya dan adat istiadat lokal memiliki arti penting sebagai basis pembangunan sektor lain sekaligus untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Misi ini mengandung beberapa nilai utama berupa pengakuan terhadap masyarakat lokal (rekognisi), pemerataan hasil-hasil pembangunan (equity dan equality), pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan (partisipatif), dan pemberian perhatian terhadap kelompok-kelompok marjinal, seperti perempuan, lansia, anak, penyandang disabilitas, dan sebagainya. Pengarusutamaan nilai-nilai tersebut dalam proses pembangunan diharapkan akan dapat menciptakan stabilitas sosial yang merupakan pra-syarat sekaligus tujuan pembangunan daerah. Nilai-nilai tersebut menjiwai perwujudan misi kelima Kabupaten Paser yang diterjemahkan dalam berbagai tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah selama lima tahun mendatang, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 93: Strategi dan Arah Kebijakan Misi 5

Misi 5: Memperkuat Kohesivitas Sosial, budaya dan adat istiadat lokal			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya pengendalian dan pengelolaan migrasi	Penguatan akulturasi dan asimilasi antara penduduk asli dan pendatang	Pelibatan masyarakat lokal dalam pengembangan wilayah transmigrasi
Meningkatkan rekognisi dan promosi	Meningkatnya akses masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam berbagai proses pembangunan	Pelibatan masyarakat lokal dalam perencanaan pembangunan	Pelibatan komunitas adat terpencil (KAT) dalam proses pembangunan
	Meningkatnya akses perempuan untuk berpartisipasi dalam berbagai proses pembangunan	Pengarus-utamaan gender	Pelibatan perempuan dalam partai politik dan jabatan publik
			Persentase perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor formal non-pertanian
			Persentase lembaga pengarusutamaan gender yang mendapatkan pembinaan
	Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan	Pengembangan kepemudaan dan olah raga	Pengembangan sarana dan prasarana olah raga dan kewirausahaan pemuda; serta penanggulangan narkoba
	Meningkatnya promosi nilai-nilai kearifan lokal dalam pembangunan	Promosi nilai-nilai budaya lokal	Pengembangan nilai-nilai budaya lokal dan pengelolaan keragaman budaya
Meningkat-kan stabilitas sosial	Meningkatnya kerukunan, kemandirian dan ketertiban masyarakat	Penguatan forum adat dan forum keagamaan	Pengembangan wawasan kebangsaan bagi kelompok adat dan kelompok keagamaan
		Pengarusutamaan sistem keamanan berbasis masyarakat	Pengembangan kelompok-kelompok keamanan lingkungan di level komunitas
	Meningkatnya akses bantuan bagi masyarakat yang terkena bencana sosial	Penyediaan bantuan bagi korban bencana sosial	Pemberian bantuan bagi korban konflik sosial
	Meningkatnya kesiapsiagaan terhadap bencana alam	Promosi desa tanggap bencana	Penyediaan bantuan bagi korban bencana alam dan sosialisasi desa tanggap

			bencana
	Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat	Perlindungan dan pemberdayaan fakir miskin	Pemberian bantuan sosial bagi KK Miskin
		Perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas	Pemberian bantuan penyandang disabilitas
		Perlindungan dan pemberdayaan lanjut usia terlantar	Pemberian bantuan lanjut usia terlantar
		Perlindungan anak dan anak balita terlantar	Pemberian bantuan anak terlantar dan anak balita terlantar
		Perlindungan dan pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidna, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidna, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
		Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Penguatan kelembagaan dan organisasi sosial masyarakat
	Meningkatnya perlindungan bagi perempuan	Perlindungan perempuan	Peningkatan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan
	Meningkatnya pemenuhan hak anak	Promosi hak-hak anak	Peningkatan penanganan kasus kekerasan anak di rumah tangga (KDRT) Pengembangan kabupaten layak anak berbasis pada kampung/desa, sekolah dan puskesmas
Meningkatkan pengelolaan kependudukan	Meningkatnya ketersediaan data kependudukan yang selalu diperbaharui	Percepatan e-KTP	Peningkatan pelayanan e-KTP di tiap-tiap kecamatan

Seluruh uraian pada bab ini merupakan tahapan logis yang harus diikuti oleh penetapan program-program prioritas dan strategis yang ada di bab selanjutnya. Penentuan program-program ini selanjutnya harus bisa menjadi jawaban yang sinergis dan terhubung dengan strategi dan arah kebijakan yang sudah ditentukan, juga dengan jenis-jenis kegiatan pembangunan yang direncanakan. Strategi dan arah kebijakan adalah refleksi kritis mengenai bagaimana dan mengapa serta di mana sebuah program harus diimplementasikan. Alasan-alasan logis-rasional yang ada di bab 6 menjadi jaminan bahwa program dan kegiatan pembangunan yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya akan menjadi kristalisasi kajian dan analisis yang berkesinambungan.

RPJMD sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari janji-janji politik Kepala Daerah terpilih pada masa kampanye, maka arah kebijakan pelaksanaan program pembangunan Kabupaten Paser perlu memastikan konsepsi 70:30 (70 persen berbanding 30 persen) antara pembangunan perdesaan dan perkotaan. Oleh karena itu dalam hal perumusan program prioritas dan kebutuhan pendanaan indikatif dari masing-masing program yang diajukan di Bab VII dan Bab VIII harus mempertimbangkan konsepsi 70:30 tersebut.

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PRORAM PEMBANGUNAN DAERAH

Kebijakan umum dan program pembangunan Kabupaten Paser periode 2016 – 2021 akan dipaparkan di dalam Bab 7 ini. Kelima misi pembangunan tersebut sekaligus merupakan cerminan dari isu-isu paling strategis yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Paser sehingga dapat saling menopang dan berkontribusi dalam pencapaian visi secara berkelanjutan. Oleh karena itu dalam implementasi kelima misi tersebut dibutuhkan kesatuan yang sinergis dari setiap SKPD dalam merumuskan sasaran dalam indikator yang terukur, efektif dan tepat kepada kelompok sasaran. Agar mendapatkan gambaran yang lebih rinci, bagian ini akan lebih jelas memberikan uraian mulai dari tujuan pembangunan, sasaran yang akan dicapai, indikator capaian kinerja sampai pada SKPD yang bertanggung jawab atas setiap program pembangunan.

Suatu program pembangunan daerah secara teknokratis diterjemahkan dalam kinerja program berbasis urusan yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib atau pilihan) dapat diselenggarakan setiap tahun tanpa terpengaruh secara langsung dengan kepala daerah. Agar mendapatkan rumusan yang sistematis, rincian program prioritas dipaparkan dalam uraian sasaran dan program prioritas dibawah ini.

A. MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI, TELEKOMUNIKASI, ENERGI, AIR BERSIH, DAN PEMUKIMAN

Peningkatan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, energi, air bersih dan pemukiman adalah salah satu bagian strategis dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Paser periode 2016-2021. Untuk menguatkan misi ini ada beberapa sasaran yang nantinya akan diejawantahkan oleh program pembangunan yang tentunya harus dinahkodai oleh beberapa SKPD yang secara regulatif membidangi urusan baik wajib maupun pilihan.

1. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Layanan Dasar Bidang Infrastruktur

- a. Meningkatnya Kualitas Jalan dan Jembatan
 - 1) Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan

- 2) Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan
 - 3) Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
 - 4) Peningkatan Sistem Informasi dan Data Base Jalan dan Jembatan
 - 5) Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Jalan
 - 6) Pembangunan Infrastruktur Pemukiman
 - 7) Pembangunan Talud/Turap/Bronjong
 - 8) Meningkatnya Pelayanan Transportasi Publik
 - 9) Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
 - 10) Peningkatan Pelayanan Angkutan
 - 11) Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
- b. Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Pengguna Jalan
- 1) Peningkatan dan Pengamanan Lalulintas
 - 2) Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
- c. Meningkatnya Jangkauan Jaringan Komunikasi
- 1) Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa
- d. Meningkatnya Jangkauan Jaringan Internet
- 1) Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa
- e. Meningkatnya Akses Air Bersih
- 1) Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
 - 2) Pengembangan, Pengelolaan, dan Konversi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air lainnya
 - 3) Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
- f. Meningkatnya Kawasan Pemukiman Rakyat yang Berwawasan Lingkungan dan Antisipatif Bencana
- 1) Pengembangan Perumahan
 - 2) Pengendalian Banjir

g. Meningkatnya Kualitas Pemukiman Masyarakat

- 1) Lingkungan Sehat Perumahan
- 2) Peningkatan dan Fasilitasi Pengembangan Sarana dan Pra-sarana Kelistrikan
- 3) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- 4) Pengelolaan Areal Pemakaman
- 5) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Tabel 94: Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Pembangunan Infrastruktur Transportasi, Telekomunikasi, Energi, Air Bersih, dan Pemukiman

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Sasaran)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
1.1	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Peningkatan Akses dan Kualitas Jembatan untuk Memperlancar akses Desa-Pusat Kecamatan, dan Kecamatan-Pusat Kabupaten	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas jembatan Khususnya yang menghubungkan sentra-sentra perekonomian, pertanian, perkebunan Peningkatan akses, kualitas jembatan ke pusat-pusat layanan masyarakat Perlu ada upaya pemerataan pembangunan jembatan	Persentase jembatan yang sudah dibangun terhadap total kebutuhan	64%	90%	Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang
	Peningkatan dan Pengembangan Jalan dan Kualitas Jalan	Fokus: Kecamatan di Wilayah Selatan Pedalaman Long Kali dan Long Ikis Pesisir Long Ikis dan Kuaro	Panjang jalan kabupaten		246,99 Km	631,68 Km	Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan Peningkatan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekerjaan Umum	Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang Dinas Bina Marga,

							Sistem Informasi dan Data Base Jalan dan Jembatan	dan Penataan Ruang	Pengairan dan Tata Ruang
	Peningkatan Kualitas dan Kelas Jalan Lingkungan	Khususnya di desa - desa Tanjung Harapan, Muara Samu, Muara Komam dan Batu Engau	Persentase jalan kabupaten tertata	20%	100%	Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Cipta Karya
	Peningkatan dan Penerangan Jalan, Turap, Gorong - Gorong, Bronjong dan Fasilitas Pendukung Jalan	Pembangunan Turap di lokasi jalan yang rawan longsor dan amblas	Persentase turap di wilayah rawan longsor dan tanah amblas	10%	50%	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang
Urusan Wajib Perhubungan									
1.2	Meningkatnya pelayanan transportasi publik	Pembangunan dan peningkatan kualitas terminal angkutan darat terpadu	Pembangunan Terminal dan Terminal pendukung di semua Kecamatan (Fokus ke Kecamatan yang belum memiliki terminal/sentra perhubungan)	Presentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	40%	90%	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Perhubungan	Dinas Perhubungan
			Pengelolaan dan penambahan armada angkut				Peningkatan Pelayanan Angkutan	Perhubungan	Dinas Perhubungan
			Koordinasi dengan pihak swasta/pengusaha jasa transportasi	Persentase tingkat kepuasan masyarakat dalam	50%	100%	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Perhubungan	Dinas Perhubungan

			Pengembangan ijin trayek	pelayanan angkutan			Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Perhubungan	Dinas Perhubungan
1.3	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan pengguna jalan	Penambahan sarana pelengkap jalan	Peningkatan pengamanan lalu lintas di jalur padat lalu lintas	Tingkat kecelakaan lalu lintas di jalan raya (%)	1,57%	0%	Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	Perhubungan	Dinas Perhubungan
		Operasi kendaraan bermotor layak jalan	Cek fisik rutin kendaraan bermotor				Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Perhubungan	Dinas Perhubungan
Urusan Pilihan Komunikasi dan Informasi									
1.4	Meningkatnya jangkauan jaringan komunikasi	Pengembangan dan peningkatan jaringan komunikasi yang ada	Wilayah yang Belum Bisa mengakses Jaringan Komunikasi Seluler	Persentase Penduduk Pengguna Telepon Genggam	60%	80%	Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa (Jaringan Seluler)	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informasi
		Peningkatan kerjasama dengan media massa nasional/Lokal	Fokus Ke penyebaran dan penguatan sebaran informasi ke wilayah - wilayah perdesaan dan daerah yang sulit mengakses informasi publik				Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa (Media Massa)	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informasi
1.5	Meningkatnya jangkauan jaringan	Peningkatan akses internet	Kecamatan dan desa-desa yang belum bisa mengakses Internet	Cakupan Desa yang bisa	35%	95%	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informasi

internet				Mengakses Informasi			media Massa (Internet)		
Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
1.6	Meningkatnya akses Air Bersih	Peningkatan jumlah dan kualitas sarana penampungan air bersih	Desa - desa yang belum memiliki jaringan air bersih (mulai dari penampungan sampai instalasi RT) Distribusi air minum yang merata	Persentase Penampung an Air Bersih terhadap total desa	34%	90%	Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku (PDAM)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Cipta Karya
		Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas perpipaan	Desa - desa yang belum memiliki jaringan air bersih (mulai dari penampungan sampai instalasi RT)	Cakupan Instalasi Perpipaan terhadap Seluruh Kecamatan (Jumlah Kecamatan)	6	10	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Cipta Karya
		Peningkatan dan pemerataan jumlah rumah tangga pengguna layanan air bersih	Distribusi air minum yang merata	Presentase Desa yang bisa mengakses Air Bersih	25%	83%	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya (air minum)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Cipta Karya
		Peningkatan jumlah desa yang sudah menikmati fasilitas air bersih	Pemerataan dan prioritas desa - desa yang belum terlayani kebutuhan air bersih				Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku (Non PDAM)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Cipta Karya
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Urusan Pilihan Lingkungan Hidup									

1.7	Meningkatnya kawasan pemukiman rakyat yang berwawasan lingkungan dan antisipatif bencana	Peningkatan sistem pengelolaan banjir	Permukiman di wilayah perkotaan dan perdesaan	Persentase Cakupan pemukiman yang berwawasan lingkungan dan aplikatif bencana	50%	90%	Pengembangan Perumahan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Cipta Karya
			Kawasan permukiman				Pengendalian Banjir	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang
1.8	Meningkatnya kualitas pemukiman masyarakat	Peningkatan sanitasi pemukiman	Sampah dan limbah pemukiman perkotaan, pemukiman perdesaan dan pusat ekonomi	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Baik	64%	90%	Lingkungan Sehat Perumahan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Cipta Karya
							Peningkatan dan Fasilitasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Kelistrikan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perindustrian dan Energi
							Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup	Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Badan Lingkungan Hidup
			Penataan areal pemakaman dan terbuka hijau	Fokus pada penataan fisik dan non fisik areal pemakaman umum dan penataan arena - arena terbuka hijau			Pengelolaan Areal Pemakaman	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Sosial
						Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	

B. MENINGKATKAN PELAYANAN DASAR DI BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

Pada tahap pembangunan jangka menengah 2016-2021, salah satu prioritas rancangan pembangunan adalah peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan. Agar mendapatkan rumusan yang sistematis, rincian program prioritas dipaparkan dalam uraian sasaran dan program prioritas dibawah ini:

1. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Pendidikan

- a. Meningkatnya Angka Partisipasi Siswa Usia Sekolah
 - 1) Wajib Belajar Sembilan Tahun
 - 2) Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
- b. Meningkatnya angka partisipasi anak usia dini
 - 1) Pendidikan Anak Usia Dini
- c. Meningkatnya angka melek huruf
 - 1) Pendidikan non-formal
- d. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
 - 1) Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- e. Berkembangnya Pelayanan pendidikan yang Berdaya saing
 - 1) Pengembangan Manajemen Pelayanan pendidikan

2. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Kesehatan

- a. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Primer
 - 1) Pemerataan tenakes hingga tiap unit layanan
 - 2) Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana kesehatan Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Jaringannya
 - 3) Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
 - 4) Obat dan Perbekalan kesehatan
 - 5) Upaya kesehatan masyarakat

- b. Meningkatkan Cakupan Jaminan Kesehatan Masyarakat
 - 1) Peningkatan jaminan kesehatan masyarakat miskin
- c. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
 - 1) Pengembangan Lingkungan sehat
 - 2) Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
 - 3) Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
 - 4) Promosi kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat
 - 5) Perbaikan Gizi Masyarakat
 - 6) Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular
 - 7) Peningkatan pelayanan kesehatan lansia
 - 8) Pengawasan Obat dan Makanan
- d. Meningkatkan kualitas kesehatan keluarga
 - 1) Keluarga Berencana
 - 2) Kesehatan Reproduksi Remaja
 - 3) Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
 - 4) Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
 - 5) Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU
- e. Berkembangnya Pelayanan Kesehatan yang Berdaya saing
 - 1) Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan (Peningkatan kompetensi tenaga medis, paramedis dan administrasi kesehatan)
 - 2) Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Tabel 95: Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Pelayanan Dasar di Bidang Pendidikan dan Kesehatan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (sasaran)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
URUSUSAN WAJIB PENDIDIKAN									
2.1.	Meningkatnya Angka Partisipasi siswa usia sekolah	Menguatkan akses pendidikan kepada semua kalangan masyarakat	Peningkatan akses bagi anak usia sekolah baik dari level PAUD, SD, SMP dan SMA	APM SD	94.35	100	Wajib Belajar Sembilan Tahun	Pendidikan	Dinas Pendidikan
				APM SMP	67.42	80			
				APK SD	108.03	100			
				APK SMP	89.68	95			
				APS SD	99.73	100			
				APS SMP	97.12	100			
				Angka putus sekolah SD/MI	0.14	0	Pengembangan Budaya Baca dan pembinaan perpustakaan	Pendidikan	Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah
				Angka Putus sekolah SMP/MTs	0.45	0			
Angka kelulusan siswa SD/MI	93.2	96	Dinas Pendidikan						
Angka kelulusan siswa SMP/MTs	90.17	95							
2.2.	Meningkatnya angka partisipasi anak usia dini	Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan bagi anak usia dini	Peningkatan akses bagi pendidikan anak usia dini	Rasio sekolah/penduduk usia dini	88	50	Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan	Dinas Pendidikan
2.3.	Meningkatnya angka melek huruf	Peningkatan Keaksaraan Usaha Mandiri	Peningkatan Keaksaraan Usaha Mandiri dan Kesetaraan Pendidikan Masyarakat	IPM	69,87	80	Pendidikan Non-formal	Pendidikan	Dinas Pendidikan
2.4.	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Peningkatan kompetensi Guru	Peningkatan kompetensi guru berdasarkan pemetaan sekolah	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	83.8	100	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
				Persentase guru yang	46.7%	100%			

				tersertifikasi					
				Persentase sekolah yang memiliki tenaga kependidikan	14.8%	25%			
2.5.	Berkembangnya pelayanan pendidikan yang berdaya saing	Pengembangan Manajemen sekolah berbasis masyarakat	Pengembangan MBS, optimalisasi kerja Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan	Cakupan IKM Sekolah	NA	50	Pengembangan Manajemen Pelayanan pendidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Pengembangan pelayanan pendidikan yang kompetitif	Pengembangan standar pelayanan unit pendidikan dan hasil lulusan siswa yang kompetitif	Persentase sekolah yang terakreditasi sekolah	68.09%	100%			
URUSAN WAJIB KESEHATAN									
2.6.	Meningkatnya pelayanan kesehatan primer	Meningkatkan berbagai pelayanan primer hingga unit pelayanan terkecil	Peningkatan kualitas layanan dengan perbaikan sarana prasarana dari Rumah Sakit, Puskesmas, hingga Pustu/Pusban	Rasio tenaga kesehatan (per 1000 penduduk)	3.78	5	Pemerataan tenakes hingga tiap unit layanan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Persentase Puskesmas memiliki Alat Kesehatan sesuai standar	NA	80%	Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana kesehatan Puskesmas,	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Persentase Puskesmas yang memiliki fasilitas rawat inap	52.9 %	83%	Puskesmas Pembantu, dan Jaringannya		
				Bed Occupancy rate (BOR)	44.24	70	Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Kesehatan	Rumah Sakit
							Obat dan Perbekalan kesehatan		
							Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
2.7.	Meningkatnya	Peningkatan	Memastikan	Persentase	25%	100%	Peningkatan Jaminan	Kesehatan	Dinas

	cakupan jaminan kesehatan masyarakat	masyarakat yang mendapatkan jaminan kesehatan	masyarakat yang mendapatkan jaminan kesehatan terutama untuk warga miskin dan peningkatan pengguna BPJS	Cakupan masyarakat yang mendapatkan jaminan kesehatan			Kesehatan Masyarakat Miskin		Kesehatan
2.8.	Meningkatnya derajat kesehatan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan menurunkan resiko kematian dari penyakit	Peningkatan kualitas derajat kesehatan dengan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular	Angka Harapan Hidup	73.99 tahun	74 tahun	Pengembangan Lingkungan Sehat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				AKI (1000)	8 kasus	5 kasus	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita		
				AKB (1000)	13 kasus	7 kasus	Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak		
				AKABA	80 kasus	40 kasus	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat		
				Cakupan balita Gizi Buruk Yang mendapatkan perawatan	100%	100%	Perbaikan Gizi Masyarakat		
				Angka kesakitan per satuan penduduk	8.01	6	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
				Tingkat kesehatan lansia	45%	85%	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Program Pengawasan Obat dan Makanan		
URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA									
2.9.	Meningkatnya kualitas kesehatan keluarga	Peningkatan pelayanan kesehatan keluarga, remaja, dan balita	Penyelenggaraan pelayanan keluarga, kesehatan remaja, dan balita	Rata-rata jumlah anak per keluarga		2,6	2,2	Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, BPPKB
				Persentase keluarga sejahtera		81,08%	92%	Kesehatan Reproduksi Remaja	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
				Persentase Laju Pertumbuhan		2,47	1,50	Peningkatan Penanggulangan	Dinas Kesehatan,

				Pe nduduk			Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS		BPPKB
							Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR		BPPKB
							Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU		
2.10.	Berkembangnya Pelayanan Kesehatan yang berdaya saing	Peningkatan kualitas kelembagaan dan sumberdaya	Peningkatan kualitas unit layanan (puskesmas dan Rumah sakit) dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dan administrasi kesehatan	Tingkat Komplain Terhadap Layanan Kesehatan	NA	80%	Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan (Peningkatan kompetensi tenaga medis, paramedic dan administrasi kesehatan)	Kesehatan	Dinas Kesehatan
							Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan

C. MEMPERKUAT FONDASI PEREKONOMIAN YANG BERBASIS POTENSI LOKAL DAN BERKELANJUTAN

Fondasi ekonomi yang kuat dibangun berdasarkan pada potensi lokal. Potensi harus dikelola dengan baik dengan memperhatikan berbagai dimensi pembangunan berkelanjutan, seperti lingkungan, sosial dan ekonomi. Perhatian pada dimensi lingkungan dapat diperlihatkan pada arah kebijakan atau program ekonomi yang memperhatikan keseimbangan lingkungan dan mitigasi bencana. Sedangkan perhatian pada dimensi sosial dan ekonomi dapat diperlihatkan pada perhatian terhadap aspek partisipasi masyarakat dan pemerataan pertumbuhan ekonomi.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka disusunlah berbagai sasaran dan strategi pembangunan yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Sasaran dan strategi pembangunan tersebut harus dijabarkan lebih jauh ke dalam arah kebijakan dan program indikatif. Selanjutnya, sasaran dan program indikatif tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Pilihan Pertanian, Kelautan dan Perikanan serta Ketahanan Pangan

- a. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
 - 1) Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
 - 2) Peningkatan produksi pertanian/perkebunan
 - 3) Peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan
 - 4) Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
 - 5) Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya
 - 6) Peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan
 - 7) Peningkatan produksi pertanian/ perkebunan
 - 8) Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
 - 9) Peningkatan penerapan teknologi peternakan
 - 10) Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

- 11) Peningkatan produksi hasil peternakan
 - 12) Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
 - 13) Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
 - 14) Pengembangan budidaya perikanan
 - 15) Pengembangan perikanan tangkap
- b. Meningkatnya kualitas produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
- 1) Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
 - 2) Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
 - 3) Peningkatan Penerapan teknologi pertanian/perkebunan
 - 4) Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
 - 5) Peningkatan kesejahteraan petani
 - 6) Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
 - 7) Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

2. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Pilihan Pariwisata

- a. Berkembangnya sektor pariwisata
- 1) Pengembangan kemitraan
 - 2) Pengembangan destinasi pariwisata
 - 3) Pengembangan pemasaran pariwisata

3. Sasaran dan program prioritas urusan wajib non-pelayanan dasar koperasi dan Usaha Kecil Menengah

- a. Meningkatnya kinerja UMKM
- 1) Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM
 - 2) Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM
 - 3) Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif
- b. Meningkatnya koperasi aktif

- 1) Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

4. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Non-pelayanan Dasar Perdagangan

- a. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pasar tradisional
 - 1) Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
 - 2) Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
- b. Meningkatnya kinerja industri kecil dan menengah
 - 1) Pengembangan industri kecil dan menengah
 - 2) Pengembangan sentra-sentra industri potensial

5. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Non-pelayanan Dasar Tenaga Kerja

- a. Meningkatnya kualitas tenaga kerja
 - 1) Peningkatan kesempatan kerja
 - 2) Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
 - 3) Penempatan tenaga kerja
 - 4) Pembinaan hubungan industrial dan lembaga ketenagakerjaan

6. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Meningkatnya kinerja BUMDES
 - 1) Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

7. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Non-pelayanan Dasar Penanaman Modal

- a. Meningkatnya investasi
 - 1) Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah
 - 2) Peningkatan promosi dan kerjasama investasi
 - 3) Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

8. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Non-pelayanan Dasar Lingkungan Hidup

- a. Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup
 - 1) Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
 - 2) Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
 - 3) Perlindungan dan konservasi sumber daya alam
- b. Meningkatnya kualitas kawasan konservasi
 - 1) Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam
 - 2) Pengelolaan TAHURA

Pembangunan ekonomi di Kabupaten Paser akan diprioritaskan pada program-program yang diuraikan di dalam tabel berikut:

Tabel 96: Kebijakan Umum dan Pembangunan Daerah Perekonomian yang Berbasis Potensi Lokal dan Berkelanjutan

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Sasaran)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung-jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
URUSAN PILIHAN PERTANIAN									
3.1.	Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Peningkatan produktivitas pertanian	Pengembangan inovasi IPTEK, perlindungan lahan dan pemberdayaan penyuluh pertanian secara merata dan berkelanjutan	Produksi pertanian (Ton)	37,485	259,275	Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan (Pertanian dalam arti luas)	Pertanian	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian
				Persentase Indeks ketahanan pangan	40	45	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan (Tanaman Pangan)		Dinas Pertanian dan Perkebunan, UPTD Perkebunan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Dinas Pertanian dan Perkebunan dan UPTD Perkebunan
				Produktivitas pertanian (Ha)	86,18	87	Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan		Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dan Dinas Pertanian dan Perkebunan
							Peningkatan ketahanan pangan pertanian		Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian
							Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan		Dinas Pertanian dan Perkebunan,
							Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan lainnya	Pekerjaan Umum	Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang
		Peningkatan produktivitas perkebunan	Pengembangan inovasi IPTEK dan pemberdayaan	Produksi tanaman perkebunan	1.374.958,90	8.595.413,90	Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan (Khusus	Pertanian	Dinas Pertanian dan Perkebunan

			penyuluh lapangan perkebunan secara merata dan berkelanjutan	(Ton)			Perkebunan)		
		Peningkatan produktivitas peternakan	Pengembangan inovasi IPTEK dan penanggulangan penyakit ternak secara merata dan berkelanjutan	Populasi peternakan	28.866 Ekor	38.313 Ekor	Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan (Khusus Perkebunan) Peningkatan penerapan teknologi peternakan Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Peningkatan produksi hasil peternakan	Pertanian	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3.2.	Meningkatnya kualitas produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Peningkatan kualitas produk pertanian	Pengembangan kualitas produk pertanian Pengembangan sentra produksi pertanian	Kontribusi produk pertanian terhadap PDRB (%)	6,58 %	7,94%	Peningkatan penerapan teknologi pertanian/ pertanian (Kualitas Produk Pertanian) Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan (Sentra Produksi Pertanian) Peningkatan penerapan teknologi pertanian/ pertanian (Kualitas Produk Perkebunan) Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan (Sentra Produksi Perkebunan)	Pertanian	Dinas Pertanian dan Perkebunan dan UPTD Perkebunan
		Peningkatan kualitas produk perkebunan	Pengembangan kualitas produk perkebunan Pengembangan sentra produksi perkebunan	Nilai Tukar Tani (%)	98,00%	98,13%	Peningkatan Kesejahteraan Petani		
		Peningkatan kualitas produk peternakan	Pengembangan kualitas produk peternakan Pengembangan sentra produksi peternakan	Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	2%	3%	Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Pertanian	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, UPTD Pusat Kesehatan Hewan
URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN									
3.3.	Meningkatnya	Peningkatan	Pengembangan	Prodiksi	24.125	34.799	Pemberdayaan ekonomi	Kelautan dan	Dinas Kelautan dan

	kualitas produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Produktivitas Perikanan	perikanan secara berkelanjutan	Perikanan (Ton)			masyarakat pesisir Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar Pengembangan budidaya perikanan Pengembangan Perikanan Tangkap	Perikanan	Perikanan, UPTD Balai Benih Udang
		Peningkatan kualitas produk perikanan	Pengembangan kualitas produk perikanan Pengembangan sentra produksi perikanan	Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)	2%	3%	Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Pengembangan perikanan tangkap		
URUSAN PILIHAN PARIWISATA									
3.4.	Berkembangnya sektor pariwisata	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata	Pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata secara berkelanjutan	Jumlah kunjungan wisata	19.512 Orang	50.000 Orang	Pengembangan kemitraan Pengembangan destinasi pariwisata	Urusan Pilihan Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		Peningkatan kontribusi pariwisata terhadap perekonomian lokal	Pengembangan potensi wisata daerah dan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sektor pariwisata	Kontribusi sub sektor pariwisata terhadap PDRB	50.000.000	100.000.000	Pengembangan pemasaran pariwisata		
URUSAN WAJIB KOPERASI DAN UKM									
3.5.	Meningkatnya kinerja UMKM	Pengembangan UMKM	Pengembangan kapasitas manajemen UMKM secara menyeluruh dan berkelanjutan	Omzet UMKM (%)	20%	100%	Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	Koperasi dan UKM	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
3.6.	Meningkatnya koperasi aktif	Pengembangan koperasi aktif	Revitalisasi koperasi secara merata dan berkelanjutan	Presentase koperasi aktif	78%	100%	Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Koperasi dan UKM	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN									

3.7.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pasar tradisional	Peningkatan akses masyarakat terhadap pasar tradisional	Peningkatan akses masyarakat dan perlindungan pasar tradisional secara merata	Rasio pasar desa terhadap total desa	81 :139	86 : 139	Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Perdagangan	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, Aekretariat Daerah (Bagian Perekonomian)
URUSAN PERINDUSTRIAN									
3.8.	Meningkatnya industri kecil dan menengah	Pengembangan industri kecil dan menengah	Pengembangan industri pengolahan secara merata dan berkelanjutan	Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB	10%	50%	Pengembangan industri kecil dan menengah Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Energi
URUSAN TENAGA KERJA									
3.9.	Meningkatnya kualitas tenaga kerja	Peningkatan kualitas tenaga kerja	Peningkatan kualitas, produktivitas dan serapan tenaga kerja secara merata	Tingkat keterserapan tenaga kerja (%)	90,94%	93,30%	Peningkatan kesempatan kerja Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja Penempatan Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Tingkat pengangguran terbuka	9,06%	6,70%	Pembinaan hubungan industrial dan lembaga ketenagakerjaan		
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA									
10.	Meningkatnya kinerja BUMDES	Pemberdayaan BUMDES	Fasilitasi pembenahan pengelolaan BUMDES	Persentase BUMDES aktif	41,7%	100%	Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPD
URUSAN PENANAMAN MODAL DAERAH									
3.11	Meningkatnya investasi	Peningkatan investasi non tambang dan non-sawit serta peningkatan kinerja pelayanan perijinan terpadu	Peningkatan nilai investasi dan kinerja pelayanan perijinan secara berkelanjutan	Persentase pertumbuhan investasi	80%	100%	Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah Peningkatan promosi dan kerjasama investasi Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Penanaman Modal Daerah	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu
URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP									
3.12.	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup	Penguatan regulasi perlindungan dan	Penguatan regulasi, pemberdayaan masyarakat dan konservasi	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,00	82,00	Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Pengembangan kinerja	Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup

		pengelolaan lingkungan hidup	lingkungan secara berkelanjutan						pengelolaan persampahan Perlindungan dan konservasi sumber daya alam
3.13.	Meningkatnya kualitas kawasan konservasi	Perbaikan kawasan konservasi	Peningkatan konservasi wilayah DAS di Kabupaten Paser	area dan di	Luas kawasan konservasi	644.496,9 2 Ha	700.000,0 0 Ha		Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam Pengelolaan TAHURA

D. MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan menjadi bidang strategis dalam pelaksanaan pembangunan jangka menengah. Tata kelola pemerintahan merupakan syarat bagi pelaksanaan pembangunan yang terarah, terbuka dan bertanggungjawab pada publik. Di samping itu, tata kelola merupakan ruang interaksi konstruktif antara pemerintah daerah dengan berbagai elemen lain di daerah, atau dikenal dengan pembangunan partisipatif. Dalam rencana pembangunan jangka menengah periode 2016-2021, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dijalankan melalui berbagai sasaran dan program prioritas sebagai berikut :

1. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Meningkatnya sinergi antar dokumen perencanaan lainnya
 - 1) Perencanaan tata ruang
 - 2) Pengendalian pemanfaatan ruang

2. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
 - 1) Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

3. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
 - 1) Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal (operasi/patrol)
 - 2) Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal (SDM dan sarana & prasarana)
- b. Meningkatnya partisipasi masyarakat
 - 1) Pendidikan politik masyarakat (pilkada)
 - 2) Pendidikan politik masyarakat (pileg dan pilpres)

- 3) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan (konteks aduan masyarakat)

4. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
 - 1) Penataan administrasi kependudukan (KTP)
 - 2) Penataan administrasi kependudukan (KK)
 - 3) Penataan administrasi kependudukan (akta kelahiran)

5. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah
 - 1) Pembinaan dan fasilitasi perencanaan dan pengelolaan keuangan desa
 - 2) Peningkatan pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan pemdes
- b. Meningkatnya partisipasi publik
 - 1) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

6. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika

- a. Meningkatnya akses terhadap informasi publik
 - 1) Pengembangan kelembagaan keterbukaan informasi
 - 2) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
 - 3) Kerjasama informasi dan media masa

7. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar Statistik

- a. Meningkatnya akses terhadap informasi publik
 - 1) Pengembangan data/informasi/statistik daerah

8. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar Kearsipan

- a. Terciptanya birokrasi yang bersih dan dipercaya masyarakat

- 1) Perbaikan sistem administrasi kearsipan
- 2) Peningkatan kualitas pelayanan informasi
- 3) Penyelamatan dan pelestarian dokumen
- 4) Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana kearsipan

9. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Rutin Penunjang Urusan Pemerintahan

- a. Meningkatkan kapasitas aparaturnya pemerintah daerah
 - 1) Peningkatan disiplin aparaturnya
 - 2) pelayanan administrasi perkantoran (rutin SKPD)
 - 3) Peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya (rutin SKPD)
 - 4) Peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya/publik (khusus Cipta Karya)

10. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Perencanaan Penunjang Urusan Pemerintahan

- a. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah
 - 1) Pengadaan barang dan jasa secara elektronik
- b. Meningkatnya akses terhadap informasi publik
 - 1) Pengembangan data dan informasi
- c. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran
 - 1) Perencanaan pembangunan daerah (Khusus Bappeda)
 - 2) Perencanaan pembangunan daerah (Setiap SKPD)
 - 3) Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan
 - 4) Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah (Khusus Bappeda)
- d. Meningkatnya sinergi antar dokumen perencanaan lainnya
 - 1) Perencanaan wilayah strategis dan cepat tumbuh
 - 2) Perencanaan sosial budaya

- 3) Perencanaan pembangunan ekonomi
- 4) Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
- 5) Perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
- 6) Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah

11. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Keuangan Penunjang Urusan Pemerintahan

- a. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah
 - 1) Peningkatan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan
 - 2) Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
 - 3) Manajemen aset daerah
 - 4) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah
- b. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah
 - a. Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
- c. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran
 - 1) Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota

12. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Penunjang Urusan Pemerintahan

- a. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah
 - 1) Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (Khusus BKD)
 - 2) Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (setiap SKPD)
 - 3) Pembinaan dan pengembangan aparatur (Khusus BKD)
 - 4) Pendidikan kedinasan
 - 5) Pembinaan dan pengembangan aparatur (BKD dan Ortal)

13. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Penelitian dan Pengembangan Penunjang Urusan Pemerintahan

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

- 1) Pengembangan standarisasi pelayanan publik (SKPD urusan wajib pelayanan dasar)
 - 2) Pengembangan standarisasi pelayanan publik
- b. Terciptanya birokrasi yang bersih dan dipercaya masyarakat
- 1) Pengembangan inovasi daerah

14. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Sekretariat DPRD Penunjang Urusan Pemerintahan

- a. Meningkatnya partisipasi publik
 - 1) Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

15. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Sekretariat Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

- a. Meningkatnya sinergi antar dokumen perencanaan lainnya
 - 1) Pengembangan wilayah perbatasan
- b. b. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah
 - 1) Fasilitasi dan dukungan kelembagaan KORPRI
- c. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
 - 1) Perumusan kebijakan bidang pemerintahan
 - 2) Perumusan kebijakan bidang perekonomian, pembangunan dan kesra
 - 3) Perumusan kebijakan bidang administrasi umum
 - 4) Koordinasi bidang pemerintahan
 - 5) Koordinasi bidang perekonomian, pembangunan & Kesra
 - 6) Koordinasi bidang administrasi umum
 - 7) Pelayanan administrasi bidang pemerintahan
 - 8) Pelayanan administrasi bidang perekonomian, pembangunan & Kesra
 - 9) Pelayanan administrasi bidang administrasi umum
 - 10) Penataan peraturan perundang-undangan
- d. Meningkatnya partisipasi publik

- 1) Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

16. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Inspektorat Penunjang Urusan Pemerintahan

- a. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah
 - 1) Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
- b. Terciptanya birokrasi yang bersih dan dipercaya masyarakat
 - 1) Pencegahan dan pemberantasan korupsi

17. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Kecamatan Penunjang Urusan Pemerintahan

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
 - 1) Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum
 - 2) Koordinasi pemberdayaan masyarakat
 - 3) Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
 - 4) Koordinasi penerapan dan penegakkan perda dan perkada
 - 5) Koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum
 - 6) Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah lainnya
 - 7) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan

Tabel 97: Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (sasaran)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
4.1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Menjaga konsistensi pencapaian opini BPK WTP	Pelaksanaan APBD yang semakin efektif dan efisien	Opini BPK	WTP	WTP	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan	Keuangan	Setiap SKPD
		Pengoptimalan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah	Peningkatan efektivitas penggunaan SIMDA dan pengelolaan aset daerah	Nilai LKj	CC	A	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Keuangan	BPKAD
							Manajemen aset daerah	Keuangan	BPKAD
		Pengoptimalan kinerja penyelenggaraan SPIP dan TEPPRA	Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pengawasan secara berkala	Nilai LPPD	Tinggi (Peringkat 129)	Sangat tinggi (Peringkat 30)	Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	Keuangan	Setiap SKPD
							Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Keuangan	Setiap SKPD
		Peningkatan kualitas tata keuangan dan administrasi desa	Peningkatan kualitas penyusunan APBDes				Pembinaan dan fasilitasi perencanaan dan pengelolaan keuangan desa	Pemberdayaan masyarakat dan desa	BPMPD
							Peningkatan pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan pemdes		BPMPD
					Peningkatan penggunaan sistem elektronik dalam pengadaan barang dan jasa	Pengadaan barang dan jasa secara elektronik	Perencanaan	Bagian Pembangunan Setda	
4.2.	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber pendapatan	Pengelolaan parkir serta sumber-sumber pajak dan retribusi daerah	Indeks Kapasitas Fiskal	2,1146 (sangat tinggi)	Sangat tinggi	Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Keuangan	Dispenda

		daerah	lainnya							
4.3.	Meningkatnya akses terhadap informasi publik	Transparansi kinerja keuangan daerah dan capaian pembangunan sektoral	Transparansi alokasi belanja daerah dan kinerja pendapatan daerah Transparansi capaian kinerja sektoral atau setiap urusan pemerintahan	Persentase informasi statistik daerah yang valid	Tersedia	Tersedia	Pengembangan data/informasi/statistik daerah	Statistik	Bappeda; BPKAD; Dispenda; Bagian Hukum Setda	
								Pengembangan data dan informasi	Perencanaan	Setiap SKPD
		Penguatan kelembagaan pengelolaan informasi dan dokumen	Pembentukan PPID (Pejabat Pengelola Informasi Daerah) di setiap SKPD	Persentase tingkat kemudahan akses informasi publik	20%	70%	Pengembangan kelembagaan keterbukaan informasi	Komunikasi dan Informatika	Diskominfo; Bagian Humas & Protokol Setda	
		Pemanfaatan berbagai media sebagai sarana transparansi	Optimalisasi peran media dalam jaringan (online) sebagai sarana publikasi dan transparansi Peningkatan efektivitas dan cakupan media sebagai sarana publikasi	Jumlah informasi publik/pembangunan daerah yang dimuat di media cetak dan online	12	96	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Kerjasama informasi dan media masa	Komunikasi dan Informatika Komunikasi dan Informatika	Diskominfo; Dispenda; Bagian Humas & Protokol Setda Diskominfo; Sekretariat DPRD; Bagian Humas & Protokol Setda	
4.4.	Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggaran	Menjadikan RPJMD dan Renstra SKPD sebagai acuan penganggaran tahunan	Keterpaduan penganggaran dalam dokumen perencanaan jangka menengah Penyusunan dokumen penganggaran teknis berdasarkan pagu indikatif RPJMD dan Renstra SKPD	Persentase konsistensi perencanaan dan penganggaran	N/A	100%	Perencanaan pembangunan daerah (Khusus Bappeda)	Perencanaan	Bappeda	
							Perencanaan pembangunan daerah (Setiap SKPD)	Perencanaan	Setiap SKPD	
		Menjadikan	Penyusunan	Persentase	N/A	100%	Pengendalian dan	Perencanaan	Setiap SKPD	

		pelaksanaan RPJMD dan Renstra SKPD sesuai dengan dokumen perencanaan	dokumen pengendalian serta evaluasi RPJMD dan Renstar SKPD Alokasi anggaran pada setiap sektor/SKPD berdasarkan kerangka pendanaan program dan kegiatan pada renstra SKPD	konsistensi antar dokumen perencanaan			evaluasi perencanaan pembangunan		
							Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	Keuangan	Bappeda; BPKAD; Dispenda
							Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah (Khusus Bappeda)	Perencanaan	Bappeda
4.5.	Meningkatnya sinergi antar dokumen perencanaan lainnya	Peningkatan kepatuhan terhadap RTRW	Rencana penataan ruang dan pemanfaat ruang pada RPJMD, RKPD serta renstra dan renja SKPD berdasarkan zonasi dan pemanfaatan yang telah diatur dalam RTRW	Ketaatan terhadap RTRW	N/A	100	Perencanaan tata ruang	Pekerjaan dan penataan ruang	Dinas Bina Marga, Pengairan, dan Tata Ruang; Bappeda
		Peningkatan responsivitas terhadap dinamika sosial	Perencanaan pembangunan daerah yang memperhatikan perkembangan serta dinamika lingkungan regional maupun internasional	Persentase konsistensi antar dokumen perencanaan	N/A	100%	Perencanaan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Perencanaan	Bappeda
							Perencanaan sosial budaya	Perencanaan	Bappeda
							Perencanaan pembangunan ekonomi	Perencanaan	Bappeda
							Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Perencanaan	Bappeda
							Perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Perencanaan	Bappeda

			Penataan wilayah perbatasan	Persentase batas wilayah yang telah ditetapkan			Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	Perencanaan	Bappeda; Bagian Perekonomian Setda
							Pengembangan wilayah perbatasan	Sekretariat daerah	Bagian Tata Pemerintahan Setda
4.6.	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah	Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur	Pelaksanaan diklat struktural bagi pemangku jabatan baru	Cakupan PNS yang memiliki standar kompetensi yang disyaratkan	328	664	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (Khusus BKD)	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan	BKD
			Mengintensifkan pelaksanaan diklat fungsional dan pendalaman materi				Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (setiap SKPD)	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan	Setiap SKPD
		Mengintensifkan pembinaan dan pengembangan aparatur	Pengadaan CPNS berdasarkan analisis kebutuhan daerah yang urgen	Cakupan jabatan yang terisi berdasarkan analisis jabatan	N/A	100%	Pembinaan dan pengembangan aparatur (Khusus BKD)	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan	BKD
							Pendidikan kedinasan	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan	BKD
			Pemberian tunjangan berbasis kinerja				Pembinaan dan pengembangan aparatur	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan	BKD; Bagian Organisasi & Tata Laksana
		Peningkatan pengawasan internal di lingkungan pemerintah daerah	Penanganan kasus pengaduan dan temuan pengawasan secara tepat	Penanganan kasus pengaduan/temuan pengawasan di lingkungan pemerintah daerah	60	330	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Inspektorat	Bagian Umum; Bagian Keuangan; Inspektorat kabupaten
							Peningkatan disiplin aparatur	Rutin (non-urusan)	Setiap SKPD
		Peningkatan pelayanan perangkat daerah	Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur				Pelayanan administrasi perkantoran (rutin SKPD)	Rutin (non-urusan)	Setiap SKPD
							Peningkatan sarana	Rutin (non-urusan)	Setiap SKPD

		Penguatan kelembagaan KORPRI	Fasilitasi dan pemberian dukungan penguatan kelembagaan KORPRI					dan prasarana aparatur (rutin SKPD)	urusan)	
								Peningkatan sarana dan prasarana aparatur/publik (khusus Cipta Karya)	Rutin (non-urusan)	Dinas Cipta Karya
								Fasilitasi dan dukungan kelembagaan KORPRI	Sekretariat daerah	Sekretariat DP KORPRI
4.7.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Peningkatan standar pelayanan	Pelaksanaan SPM	Peringkat pelayanan publik skala Kaltim menurut Ombudsman				Pengembangan standarisasi pelayanan publik	Penelitian dan pengembangan	Dinas Pendidikan; Dinkes; RSUD Panglima Sebaya; Dinas Bina Marga, Pengairan & Tata Ruang; Dinas Cipta Karya; Kantor Kesbangpol; Dinsos; Bagian Organisasi & Tata Laksana
			Perumusan dan pelaksanaan standar pelayanan sebagai pengembangan SPM	Peringkat dan nilai EKPPD Indeks kepuasan Masyarakat	Predikat tinggi	Predikat sangat tinggi		Pengembangan standarisasi pelayanan publik	Penelitian dan pengembangan	Bagian Organisasi
		Peningkatan pelayanan terhadap kebutuhan keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat	Peningkatan sarana operasional penanggulangan bencana kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WМК)	15 menit	15 menit		Peningkatan kesiagaan dan pencegahan kebakaran	Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman	BPBD
			Peningkatan cakupan patroli Satpol PP	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3				Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak	Ketenteraman, ketertiban umum, dan	Satpol PP

	Menjaga ketersediaan SDM Satpol PP dan petugas Linmas dan sarana dan prasaranya	(Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)			kriminal (operasi/patrol)	perlindungan masyarakat	
					Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal (SDM dan sarana & prasarana)	Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	Kantor Kesbangpol; Satpol PP
Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan	Peningkatan akses pelayanan KTP	Data kependudukan yang valid	Tersedia	Tersedia	Penataan administrasi kependudukan (KTP)	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Disdukcapil; Kantor Camat; Kantor Lurah
	Peningkatan akses pelayanan KK				Penataan administrasi kependudukan (KK)	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Kantor Camat; Kantor Lurah
	Peningkatan akses pelayanan akta kelahiran				Penataan administrasi kependudukan (akte kelahiran)	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Disdukcapil; Kantor Camat; Kantor Lurah
Peningkatan perumusan kebijakan, koordinasi, dan pelayanan administrasi	Menguatkan peran strategis Sekretariat Daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi, dan pelayanan administrasi sesuai tugas dan fungsinya				Perumusan kebijakan bidang pemerintahan	Sekretariat daerah	Setda; Bagian Tata Pemerintahan; Bagian Hukum; Bagian Humas & Protokol
					Perumusan kebijakan bidang perekonomian, pembangunan dan kesra	Sekretariat daerah	Setda; Bagian Perekonomian; Bagian Pembangunan; Bagian Kesra
					Perumusan kebijakan bidang administrasi umum	Sekretariat daerah	Bagian Umum (Persandian); Bagian Organisasi; Bagian Umum; Bagian Keuangan
					Koordinasi bidang pemerintahan	Sekretariat daerah	Setda; Bagian Tata Pemerintahan; Bagian Hukum; Bagian Humas &

				Protokol
		Koordinasi bidang perekonomian, pembangunan & Kesra	Sekretariat daerah	Setda; Bagian Perekonomian; Bagian Pembangunan; Bagian Kesra
		Koordinasi bidang administrasi umum	Sekretariat daerah	Bagian Umum (Persandian); Bagian Organisasi; Bagian Umum; Bagian Keuangan
		Pelayanan administrasi bidang pemerintahan	Sekretariat daerah	Setda; Bagian Tata Pemerintahan; Bagian Hukum; Bagian Humas & Protokol
		Pelayanan administrasi bidang perekonomian, pembangunan & Kesra	Sekretariat daerah	Setda; Bagian Perekonomian; Bagian Pembangunan; Bagian Kesra
		Pelayanan administrasi bidang administrasi umum	Sekretariat daerah	Bagian Umum (Persandian); Bagian Organisasi; Bagian Umum; Bagian Keuangan
Peningkatan peran kecamatan	Peningkatan peran kecamatan sesuai amanat regulasi	Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Kecamatan	Kantor Camat; Kantor Lurah
		Koordinasi pemberdayaan masyarakat	Kecamatan	Kantor Camat; Kantor Lurah
		Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Kecamatan	Kantor Camat; Kantor Lurah
		Koordinasi penerapan dan penegakkan perda	Kecamatan	Kantor Camat; Kantor Lurah

						dan perkara			
						Koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Kecamatan	Kantor Camat; Kantor Lurah	
						Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah lainnya	Kecamatan	Kantor Camat; Kantor Lurah	
						Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	Kecamatan	Kantor Camat; Kantor Lurah	
		Penataan produk hukum daerah	Merumuskan dan menetapkan produk hukum daerah yang mendukung peningkatan pelayanan publik			Penataan peraturan perundang-undangan	Sekretariat daerah	Bagian Hukum Setda	
4.8.	Terciptanya birokrasi yang bersih dan dipercaya masyarakat	Penyusunan rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Membangun kemitraan dengan KPK dan aparat penegak hukum di daerah	Indeks Persepsi Korupsi Daerah		Pencegahan dan pemberantasan korupsi	Inspektorat	Inspektorat kabupaten	
		Pelebagaan dan peningkatan pelaksanaan inovasi daerah	Perumusan peraturan kepala daerah tentang inovasi daerah	Penghargaan inovasi		Pengembangan inovasi daerah	Penelitian dan pengembangan	Bappeda	
		Peningkatan pelayanan kearsipan	Peningkatan kualitas sistem administrasi pengarsipan	Persentase arsip daerah yang tertata	N/A	85%	Perbaikan sistem administrasi kearsipan	Kearsipan	Kantor Perpustakaan dan Arsip
			Peningkatan pelayanan informasi arsip				Peningkatan kualitas pelayanan informasi	Kearsipan	Kantor Perpustakaan dan Arsip

							Penyelamatan dan pelestarian dokumen	Kearsipan	Kantor Perpustakaan dan Arsip; Sekretariat DPRD
							Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana kearsipan	Kearsipan	Kantor Perpustakaan dan Arsip
4.9.	Meningkatnya partisipasi publik	Peningkatan forum partisipasi dan perluasan akses bagi masyarakat	Peningkatan pelaksanaan musrenbang di semua desa	Persentase masukan dalam Musrenbangdes/ musrenbangcam yang diakomodir	N/A	50%	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Pemberdayaan masyarakat dan desa	BPMPD; Bappeda
		Pengembangan saluran aspirasi masyarakat	Efektivitas pelaksanaan public hearing dan kegiatan reses anggota DPRD	Persentase aspirasi masyarakat melalui DPRD yang sesuai dengan RPJMD yang ditindaklanjuti	N/A	100%	Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
			Penguatan peran kedinasan dalam menjaring aspirasi dan pengaduan masyarakat	Persentase aspirasi/keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	N/A	90%	Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Sekretariat daerah	Setda; Bagian Umum; Bagian Humas & Protokol
		Peningkatan pendidikan politik masyarakat	Penguatan peran masyarakat sipil dalam pembangunan daerah	Angka partisipasi pemilih	60,7%	80%	Pendidikan politik masyarakat (pilkada)	Ketenteraman, Ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	Kantor Kesbangpol; Satpol PP; Bagian Tata Pemerintahan
			Peningkatan partisipasi pemilih dalam pemilihan umum				Pendidikan politik masyarakat (pileg dan pilpres)	Ketenteraman, Ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	Kantor Kesbangpol; Bagian Tata Pemerintahan
		Menjadikan aspirasi masyarakat sebagai basis	Peningkatan tindak lanjut dan realisasi atas aduan masyarakat yang	Persentase LSM, Ormas, OKP yang berpartisipasi dalam	N/A	90%	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan (konteks aduan	Ketenteraman, Ketertiban umum, dan perlindungan	Setiap SKPD di tingkat kabupaten

utama dalam perumusan kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah

masuk dalam unit layanan pengaduan

pembangunan daerah

masyarakat)

masyarakat

E. KOHESIVITAS SOSIAL, BUDAYA, DAN ADAT ISTIADAT LOKAL

Pencapaian misi ini selama lima tahun ke depan sangatlah vital karena mencakup empat pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib dalam pembangunan daerah yaitu (a) Urusan Sosial, (b) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (c) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan (d) Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil. Selain itu, untuk pencapaian visi kelima ini juga mencakup dua pelayanan dasar yang menjadi urusan pilihan dalam pembangunan daerah, yaitu: (a) Urusan Transmigrasi dan (b) Urusan Pemuda dan Olah Raga. Agar target sasaran dapat diimplementasikan dengan tepat, perencanaan harus dapat diterjemahkan dalam program prioritas yang relevan. Uraian perencanaan sasaran dan program prioritas pembangunan dapat dilihat kesesuaiannya dalam uraian dibawah ini:

1. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Sosial

- a. Meningkatnya akses masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam berbagai proses pembangunan
 - 1) Pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
 - 2) Penguatan/Revitalisasi lembaga adat
- b. Meningkatnya akses bantuan untuk masyarakat yang terkena bencana sosial
 - 1) Penanggulangan korban bencana sosial
 - 2) Rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana sosial
- c. Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat
 - 1) Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya
 - 2) Pembinaan para penyandang cacat dan trauma
 - 3) Pembinaan panti jompo
 - 4) Pemberdayaan lanjut usia
 - 5) Pembinaan Anak Terlantar

- 6) Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial
- 7) Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

2. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Meningkatnya akses perempuan untuk berpartisipasi dalam berbagai proses pembangunan
 - 1) Keserasian kebijakan peningkatan kualitas perempuan (jabatan politik dan publik)
 - 2) Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
 - 3) Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
- b. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan
 - 1) Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
- c. Meningkatnya pemenuhan hak anak
 - 1) Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak (kekerasan anak)
 - 2) Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak (layak anak)

3. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Kebudayaan

- a. Meningkatnya promosi nilai-nilai kearifan lokal dalam pembangunan
 - 1) Pengembangan Nilai Budaya
 - 2) Pengelolaan Keragaman Budaya
 - 3) Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

4. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- a. Meningkatnya kerukunan, keamanan dan ketertiban masyarakat
 - 1) Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 - 2) Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

b. Meningkatnya kesiapsiagaan terhadap bencana alam

1) Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

5. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

a. Meningkatnya ketersediaan data kependudukan yang selalu diperbaharui

1) Penataan Administrasi Kependudukan (e-KTP)

6. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga

a. Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan

1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

2) Peningkatan Peran serta Kepemudaan

3) Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

4) Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

7. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Pilihan Transmigrasi

a. Meningkatnya pengendalian dan pengelolaan migrasi

1) Pembangunan dan pengembangan wilayah transmigrasi

Tabel 98: Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kohesivitas Sosial, Budaya dan Adat Istiadat Lokal

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (sasaran)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
5.1.	Meningkatnya akses masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam berbagai proses pembangunan	Pelibatan masyarakat lokal dalam perencanaan pembangunan	Pelibatan komunitas adat terpencil (KAT) dalam proses pembangunan	Persentase komunitas adat terpencil (KAT) yang menjadi sasaran pembangunan	NA	100%	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Sosial	Dinas Sosial
							Penguatan/Revitalisasi Lembaga Adat	Kebudayaan	BPMPD
5.2.	Meningkatnya akses perempuan untuk berpartisipasi dalam berbagai proses pembangunan	Pengaruh-utamaan gender	Pelibatan perempuan dalam partai politik dan jabatan publik	Indeks pembangunan gender	68,58	87	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	BPPKB
			Pelibatan perempuan dalam partai politik dan jabatan publik						
			Persentase perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor formal non-pertanian						
		Persentase lembaga pengarusutamaan gender yang mendapatkan pembinaan					Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	BPPKB
5.3.	Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan	Pengembangan kepemudaan dan olah raga	Pengembangan sarana dan prasarana olah raga dan kewirausahaan pemuda; serta penanggulangan	Rasio sarana dan prasarana olah raga (per 1000 pemuda)	NA	NA	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Kepemudaan dan olahraga	Dibudparpora, Dinas Cipta Karya
				Persentase pemuda peserta			18%	100%	Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

			narkoba	pelatihan kewirausahaan yang menjadi wirausahawan mandiri					
				Jumlah pemuda pengguna narkoba yang direhabilitasi	NA	NA	Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Kepemudaan dan olahraga	Disbudparpora
5.4.	Meningkatnya promosi nilai-nilai kearifan lokal dalam pembangunan	Promosi nilai-nilai budaya lokal	Pengembangan nilai-nilai budaya lokal dan pengelolaan keragaman budaya	Persentase program pembangunan yang mengangkat nilai-nilai kearifan lokal	75%	100%	Pengembangan Nilai Budaya	Kebudayaan	Disbudparpora
							Pengelolaan Keragaman Budaya	Kebudayaan	Disbudparpora
							Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Kebudayaan	Disbudparpora
5.5.	Meningkatnya kerukunan, keamanan dan ketertiban masyarakat	Penguatan forum adat dan forum keagamaan	Pengembangan wawasan kebangsaan bagi kelompok adat dan kelompok keagamaan	Jumlah konflik berbau SARA	NA	NA	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kantor Kesbangpol
		Pengarusutamaan sistem keamanan berbasis masyarakat	Pengembangan kelompok-kelompok keamanan lingkungan di level komunitas	Angka kriminalitas	NA	NA	Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Satpol PP
5.6.	Meningkatnya akses bantuan bagi masyarakat yang terkena bencana sosial	Penyediaan bantuan bagi korban bencana sosial	Pemberian bantuan bagi korban konflik sosial	Persentase korban bencana sosial skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa	NA	NA	Penanggulangan korban bencana sosial	Sosial	BPBD, Dinas Sosial
							Rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana Sosial	Sosial	BPBD, Dinas Sosial

	Meningkatnya kesiapsiagaan terhadap bencana alam	Promosi desa tanggap bencana	Penyediaan bantuan bagi korban bencana alam dan sosialisasi desa tanggap bencana	tanggap darurat Persentase bencana yang ditangani	NA	NA	Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	BPBD
5.7.	Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat	Perlindungan dan pemberdayaan fakir miskin	Pemberian bantuan sosial bagi KK Miskin	Jumlah PMKS	26 Jenis	26 Jenis	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Sosial	Dinas Sosial
		Perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas	Pemberian bantuan penyandang disabilitas				Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma	Sosial	Dinas Sosial
		Perlindungan dan pemberdayaan lanjut usia terlantar	Pemberian bantuan lanjut usia terlantar				Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Sosial	Dinas Sosial
							Pemberdayaan lanjut usia	Sosial	Dinas Sosial
							Pembinaan panti jompo	Sosial	Dinas Sosial
5.8.	Meningkatnya perlindungan bagi perempuan	Perlindungan perempuan	Peningkatan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan	45 Kasus	15 Kasus	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	BPPKB
5.9.	Meningkatnya pemenuhan hak anak	Promosi hak-hak anak	Peningkatan penanganan kasus kekerasan anak di rumah tangga (KDRT)	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak	22	0	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BPPKB, P2TP2A
			Pengembangan kabupaten layak	Predikat kabupatenbn	60%	100%			

			anak berbasis pada kampung/desa, sekolah dan puskesmas	layak anak					
		Perlindungan anak dan anak balita terlantar	Pemberian bantuan anak terlantar dan anak balita terlantar	Jumlah anak dan balita terlantar			Pembinaan panti asuhan/panti jompo	Sosial	Dinas Sosial
5.10.	Meningkatnya ketersediaan data kependudukan yang selalu diperbaharui	Percepatan e- KTP	Peningkatan pelayanan e-KTP di tiap-tiap kecamatan	Cakupan penduduk yang sudah terdaftar e-ktp	78,69	92,30	Penataan administrasi kependudukan	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Disdukcapil
5.11.	Meningkatnya pengendalian dan pengelolaan migrasi	Penguatan akulturasi dan asimilasi antara penduduk asli dan pendatang	Pelibatan masyarakat lokal dalam pengembangan wilayah transmigrasi	Jumlah kawasan eks transmigrasi yang mandiri	0	5	Pembangunan dan pengembangan Wilayah Transmigrasi	Transmigrasi	Disnakertrans

Kebijakan umum pada bab ini menunjukkan sinkronisasi antara sasaran dan rencana implementasi dalam program prioritas pembangunan daerah. Proses untuk merumuskan program tersebut dapat diperoleh dari penentuan strategi dan arah kebijakan yang relevan dengan konteks daerah Kabupaten Paser. Bab selanjutnya akan menyajikan penjabaran program beserta target capaian dan pagu anggaran tahunan dalam lima tahun perencanaan secara lebih terperinci. Dengan demikian, perencanaan jangka menengah lima tahun akan dapat dirumuskan secara sistematis, terukur dan akuntabel.

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Bab ini diuraikan kelanjutan logis dari Bab VII khususnya dalam ulasan spesifik mengenai indikasi program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan. Proyeksi indikatif seputar dana dan biaya yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan program prioritas menjadi penting bagi perencanaan karena hal ini adalah intisari dari seberapa jauh perencanaan yang ideal bisa diukur dan memberi stimulan bagi efektivitas program dan kegiatan prioritas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Bab ini menggambarkan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD. Indikasi rencana program dirumuskan berdasarkan jenis urusan Pemerintah Kabupaten Paser pada periode 2016-2021. Dalam penyajiannya, ditampilkan pula pencapaian target indikator kinerja program pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan awal periode perencanaan. Tanpa penjelasan sistematis dan mengikuti pola pembiayaan yang terbaru dan disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan, begitu banyak dana pembangunan tidak akan diserap dengan baik dan ada peluang intervensi pembiayaan dari sisi politik yang terkadang menjadi hama bagi perencanaan teknokratik yang terukur. Selain beberapa hal mendasar di atas, Bab ini juga akan menjadi jawaban mengapa indikasi program yang dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan menjadi penting. Salah satu hal mendasar adalah kesesuaian pembiayaan dan kemampuan pemerintah dan birokrasi mengefektifkan perencanaan yang tepat sasaran. Ujung dari semua ini adalah tidak adanya implementasi kebijakan yang salah arah.

Sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2014, urusan merupakan tanggungjawab pemerintah daerah sesuai gradasi prioritas yang dibedakan menjadi tiga urusan yakni urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar dan Urusan pemerintahan pilihan. Urusan wajib adalah program-program pembangunan yang harus dilakukan oleh setiap daerah dengan tujuan untuk menyelaraskan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Daerah harus berkomitmen untuk menyelenggarakan program-program yang tercakup di dalam urusan wajib ini, Analisis kinerja dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan tiap urusan yang menjadi prioritas. Urusan tersebut mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan

kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab SKPD sesuai bidang-bidang berikut ini:

A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Menjadi Kabupaten yang kompetitif dan memiliki korelasi sinergis dengan Provinsi dan pusat mengandaikan ketelitian dan kecakapan Pemerintah Kabupaten Paser dalam mengikuti hasil analisis, regulasi dan desain pembangunan nasional yang terpadu serta kontekstual. Ketaatan pada regulasi dan pelaksanaan amanah pemerintah pusat dalam kinerja Dinas-dinas yang mengatur urusan-urusan wajib khususnya di bidang layanan dasar menjadi hal penting yang tidak boleh diabaikan. Sejauh ini, Kabupaten Paser sudah membuktikan dengan maksimal keseriusan khususnya dalam urusan wajib pelayanan dasar. Beberapa hal memang perlu diperbarui dan ditingkatkan.

Tabel 99: Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan SKPD Penanggung Jawab

No	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	SKPD Penanggung jawab
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan
2	Kesehatan	Dinas kesehatan
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Bina Marga, pengairan dan Tata Ruang, Dinas Cipta karya, kebersihan dan Perumahan
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Cipta Karya, Dinas Kebersihan dan Perumahan
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi PP, Sekretariat Daerah
6	Sosial	Dinas Sosial

B. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

Sama seperti urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar juga memperoleh porsi yang cukup proporsional dan seimbang. Hampir tiap SKPD yang menjadi penopang utama urusan wajib non pelayanan dasar bisa memaksimalkan kerjanya yang dengan sendirinya bisa membuka ruang bagi peningkatan kinerja dari tahun ke tahun.

Tabel 100: Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar dan SKPD Penanggung Jawab

No	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	SKPD Penanggung jawab
1	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
3	Pangan	BKH, Dinas Pertanian
4	Pertanahan	Badan Pertanahan Nasional
5	Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup
6	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	BPPKB, Dinas Kesehatan
9	Perhubungan	Dinas Perhubungan
10	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika, Sekretariat Daerah
11	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
12	Penanaman Modal	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu
13	Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
14	Statistik	Badan Pusat Statistik
15	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
16	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

C. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Beberapa hal karena regulasi harus ditarik ke level Provinsi dan Pusat, namun hal itu tidak berarti bahwa Kabupaten Paser tidak mengalokasikan sumber daya untuk pos-pos pilihan ini. Beberapa SKPD yang melayani masyarakat terkait urusan pemerintahan pilihan ini memang secara realistis terkendala oleh kualitas SDM, namun hal ini tidak lantas menjadikan urusan ini diabaikan.

Tabel 101: Urusan Pemerintahan Pilihan dan SKPD Penanggung Jawab

No	Urusan Pemerintahan Pilihan	SKPD Penanggung jawab
1	Pariwisata	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
2	Pertanian	Dinas Pertanian
3	Kehutanan	Dinas Kehutanan
4	Energi dan Sumberdaya Mineral	Dinas Perindustrian dan Energi
5	Perdagangan	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
6	Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Energi

Sebagai uraian yang detil tiap tahun dalam jangka waktu perencanaan, penyajian akan ditampilkan dalam tabel-tabel yang disesuaikan tiap misi.

- Tabel 102 Meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, energi, air bersih dan pemukiman
- Tabel 103. Meningkatkan pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan
- Tabel 104. Memperkuat fondasi perekonomian yang berbasis potensi lokal dan berkelanjutan
- Tabel 105. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan
- Tabel 106 Memperkuat kohesivitas sosial, budaya dan adat istiadat lokal

Lima tabel berikut menjadi bagian integral dari serangkaian upaya logis menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Paser lima tahun mendatang. Spesifikasi masing-masing misi dengan program-program prioritas dan juga indikasi pembiayaannya yang disesuaikan dengan target capaian setiap tahun dan jumlah taksasi biaya yang dibutuhkan setiap tahunnya menjadi benang merah yang bisa mendamaikan target capaian kinerja dan kerangka pendanaan yang akan dipilih.

Selain itu tabel-tabel ini sekaligus juga menjelaskan bagaimana konsistensi teknokratis dalam menghubungkan kerangka dasar perencanaan yang sudah saatnya disinergikan dengan kerangka pendanaan. Tanpa hubungan kritis-kausal di antara dua elemen besar ini, kerangka yang satu akan menghilangkan yang lainnya.

Tabel 102: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Transportasi, Energi, Air Bersih, dan Pemukiman

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD	SKPD Penanggungjawab
				2017		2018		2019		2020		2021			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Urusan Wajib Pekerjaan Umum															
1 03 15	Pembangunan dan rehabilitasi jembatan	Persentase jembatan kondisi baik	45,6%	65,6%	15.000.000.000	75%	15.000.000.000	85%	15.000.000.000	100%	15.784.214.809	100%	15.199.772.887	100%	Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang
1 03 15	Pembangunan dan rehabilitasi jalan	Panjang jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten (Km)	60 Km	85 Km	26.066260.483	162 Km	89.958.096.003	250 Km	97.579.554.729	355 Km	116.574.482.188	470 Km	124921055.450	470 Km	Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang
		Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	20%	40%	2.250.000.000	60%	2.300.000.000	80%	3.957.257.953	100%	3.400.000.000	100%	3.500.000.000	100%	Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang
1 03 21	Tanggap darurat jalan dan jembatan	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi darurat yang ditangani	Na	100%	9.056.450.000	100%	10.156.450.000	100%	10.156.450.000	100%	10.156.450.000	100%	10.156.450.000	100%	Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang
1 03 22	Peningkatan Sistem Informasi dan Data Base Jalan dan Jembatan	Sistem Data Base Jalan dan jembatan Kabupaten	Na	100%	200.000.000	100%	210.000.000	100%	210.000.000	100%	210.000.000	100%	210.000.000	100%	Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang
1 03 15	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Jalan	Persentase jalan yang mendapat lampu penerangan	33%	45%	1.553.272.000	57%	1.303.272.000	70%	1.303.272.000	83%	1.293.272.000	100%	1.303.272.000	100%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1 03 15	Pembangunan infrastruktur pemukiman	Persentase jalan perdesaan dalam kondisi baik	56%	60%	2.500.000.000	70%	2.625.000.000	80%	2.756.250.000	90%	2.894.062.500	100%	3.038.765.650	100%	Dinas Cipta Karya
1 03 17	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Persentase jalan kabupaten dengan turap/talud/bronjong dan gorong-gorong di wilayah rawan longsor	20%	30%	2.000.000.000	40%	4.000.000.000	50%	4.000.000.000	60%	4.000.000.000	70%	4.000.000.000	70%	Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang
Urusan Wajib Perhubungan															
1 07 18	Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Persentase terminal bus/angkutan dalam kondisi baik	40%	50%	-	60%	-	70%	154.655.483	80%	185.586.580	90%	372.703.896	90%	Dinas Perhubungan
		Persentase halte angkutan dalam kondisi baik	30%	40%	-	50%	200.000.000	60%	180.000.000	70%	135.000.000	80%	135.000.000	80%	Dinas Perhubungan
1 07 15	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase prasarana dan fasilitas perhubungan dalam kondisi baik	40%	70%	20.247899.550	75%	6.849.505.100	80%	5.366.975.265	85%	5.987.488.608	90%	4.787.359.966	90%	Dinas Perhubungan
1 07 17	Peningkatan pelayanan angkutan	Persentase angkutan umum dalam kondisi baik	50%	60%	1.502.561.700	70%	1.864.889.700	80%	2.375.210.235	90%	2.775.945.313	100%	3.253.666.361	100%	Dinas Perhubungan
1 07 19	Peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Persentase jalan kabupaten yang memiliki rambu lalu lintas	40%	45%	562.650.000	50%	1.323.462.500	55%	1.865.615.625	60%	2.719.251.093	65%	3.206.407.976	65%	Dinas Perhubungan
1 07 20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Persentase kendaraan layak operasi	50%	60%	198.550.000	70%	232.300.000	80%	1.089.800.000	90%	331.800.000	100%	1.303.575.000	100%	Dinas Perhubungan
Urusan Pilihan Komunikasi dan Informasi															

1	25	15	Pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa	Jumlah jaringan komunikasi	80	82	3.489.724.000	84	4.874.724.000	86	5.259.724.000	88	5.304.724.000	90	6.034.724.000	90	Dinas Komunikasi dan Informasi
				Publikasi informasi daerah di media masa cetak	2	2	6.079.598.379	2	6.801.304.233	2	7.039.158.224	2	7.451.946.611	2	7.791.449.183	2	Dinas Komunikasi dan Informasi
				Persentase desa yang bisa mengakses internet	30%	42%	2.421.848.000	54%	4.821.848.000	66%	6.231.848.000	78%	6.241.848.000	90%	6.281.848.000	90%	Dinas Komunikasi dan Informasi
Urusan Wajib Pekerjaan Umum																	
1	03	26	Pengembangan, pengelolaan, dan konversi sungai, danau, dan sumber daya air lainnya	Jumlah desa yang memiliki sarana air baku	3	5	3.179.942.175	7	3.000.000.000	9	3.000.000.000	11	3.000.000.000	13	3.000.000.000	13	Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang
1	03	24	Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Persentase kecamatan yang terinstalasi jaringan air bersih	60%	65%	2.400.000.000	75%	2.520.000.000	85%	2.646.000.000	95%	2.778.300.000	100%	2.917.215.000	100%	Dinas Cipta Karya
1	03	25	Penyediaan dan pengelolaan air baku	Persentase desa yang terjangkau jaringan air bersih PDAM	25%	43%	650.000.000	53%	682.500.000	63%	716.625.000	73%	752.456.250	83%	790.079.100	83%	Dinas Cipta Karya
				Cakupan desa yang telah memiliki sarana pengolahan air bersih	25%	45%	6.000.000.000	50	6.300.000.000	65%	6.615.000.000	70%	6.945.750.000	85%	7.293.037.500	85%	Dinas Cipta Karya
Urusan Wajib Penataan Ruang dan Urusan Pilihan Lingkungan Hidup																	
1	04	15	Pengembangan perumahan	Jumlah rumah yang berwawasan mitigasi bencana	20 unit	45 unit	1.750.000.000	70 unit	1.837.500.000	95 unit	1.929.375.000	120 unit	2.025.843.750	145 unit	2.127.135.950	145 unit	Dinas Cipta Karya
				Jumlah rumah layak huni yang terbangun	2.844 Unit	2.944 unit	4.050.000.000	3.444 unit	18.952.500.000	3.944 unit	19.900.125.000	4.444 unit	20.895.131.250	4.944 unit	21.939.887.825	4.944 Unit	Dinas Cipta Karya
1	03	28	Pengendalian banjir	Persentase luas areal genangan	2,3%	1,9	1.350.000.000	1,5	1.500.000.000	1,1	1.500.000.000	0,6	1.500.000.000	0	1.500.000.000	0	Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang
1	04	16	Lingkungan sehat perumahan	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	64%	69%	5.585.000.000	74%	5.864.250.000	79%	6.157.462.500	84%	6.465.335.625	90%	6.788.602.425	90%	Dinas Cipta Karya, Dinas Kebersihan dan Pertamanan
2	03	18	Peningkatan dan fasilitasi pengembangan sarana dan pra-sarana kelistrikan	Rasio elektrifikasi	0,70	0,75	3.905.646.000	0,80	4.635.372.201	0,85	4.808.332.018	0,90	4.895.656.378	0,90	5.384.75.536	0,90	Dinas Perindustrian dan Energi
1	08	15	Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Cakupan ibukota kecamatan yang memiliki fasilitas pengelolaan sampah	2 IKK	2 IKK	8.357.248.956	2 IKK	9.993.705.873	2 IKK	9.986.406.935	1 IKK	10.312.94.926	1 IKK	10.495.517.791	10 IKK	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
				Jumlah rumah tangga yang melakukan pengelolaan sampah secara mandiri	4.200	5.700	1.000.000.000	7.200	1.350.000.000	8.700	1.375.000.000	10.200	1.400.000.000	11.700	1.425.000.000	11.700	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1	04	20	Pengelolaan areal pemakaman	Persentase areal pemakaman dalam kondisi baik	14%	31%	1.242.103.100	48%	1.247.094.100	65%	1.251.826.600	82%	1.257.086.100	100%	1.262.078.100	100%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1	08	24	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Persentase RTH yang dalam kondisi baik	13,09%	17%	3.730.748.000	21%	3.980.748.000	24%	3.980.748.000	27%	3.980.748.000	34%	3.980.748.000	34%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Tabel 103: Meningkatkan Pelayanan Dasar di Bidang Pendidikan dan Kesehatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD Target	SKPD Penanggungjawab
				2017		2018		2019		2020		2021			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Urusan Wajib Pendidikan															
1 01 16	Wajib Belajar Sembilan tahun	Persentase Ruang Kelas SD dan SMP Kondisi baik	25 & 85,06	34 & 86,21	6.524.500.000	43 & 86,21	10.225.000.000	52 & 87,93	10.967.609.250	61 & 89,65	12.897.802.650	70 & 92	14.170.765.450	70 & 92	Dinas Pendidikan
		Persentase SD dan SMP yang memiliki Ruang UKS	37,61 & 46,05	40,81 & 50,90	800.000.000	47,21 & 60,60	800.000.000	53,60 & 70,30	800.000.000	56,80 & 75,15	1.000.000.000	60 & 80	1.200.000.000	60 & 80	
		Persentasi SD dan SMP yang Memiliki Laboratorium	0 & 51,47	1 & 54,41	1.100.000.000	2 & 54,41	2.200.000.000	3 & 57,35	3.600.000.000	4 & 60,29	3.900.000.000	6 & 63	4.850.000.000	6 & 63	
		Persentase unit pendidikan yang mengimplementasikan model unggulan mutu pendidikan	Na	2%	24.107.465.000	4%	27.263.284.350	6%	30.717.315.000	8%	36.802.305.000	10%	38.067.315.000	10%	
		Nilai Rata-rata UAN SD dan SMP	80 & 75	85 & 78	857.770.000	90 & 80	1.178.000.000	95 & 85	757.000.000	95 & 90	2.357.000.000	95 & 90	2.225.000.000	95 & 90	
1 01 21	Pengembangan Budaya Baca dan pembinaan perpustakaan	Cakupan kunjungan perpustakaan daerah (Orang)	66.807	67.000	637.439.100	67.500	678.835.100	68.000	795.953.070	68.500	832.519.297	69.000	1.020.935.961	69.000	Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah
		Cakupan perpustakaan yang dimiliki Desa (Unit)	96	102	204.389.000	108	218.724.000	114	229.724.000	120	244.724.000	129	256.724.000	129	
1 01 15	Pengembangan PAUD	APK PAUD	48,45	52,76	4.570.000.000	57,07	7.235.000.000	61,38	10.757.000	65,69	8.957.655.000	70	12.797.665.000	70	Dinas Pendidikan
		Persentase Guru PAUD Formal Bersertifikat	1,5%	5,2%	1.687.000.000	8,9%	1.747.000.000	12,6%	1.747.000.000	16,3%	1.747.000.000	20%	1.697.000.000	20%	
1 01 18	Pendidikan Non-formal	Angka putus sekolah masyarakat	1,17%	0,936%	340.000.000	0,702%	340.000.000	0,468%	340.000.000	0,234%	340.000.000	0%	340.000.000	0%	Dinas Pendidikan
		Jumlah lembaga pendidikan keterampilan (Unit)	11	12	150.000.000	14	150.000.000	16	150.000.000	18	150.000.000	20	150.000.000	20	
		Jumlah keaksaraan mandiri (Orang)	11.000	10.500	1.100.000.000	10.000	1.200.000.000	9.500	1.250.000.000	9.000	1.300.000.000	8.500	1.300.000.000	8.500	
		Persentase tenaga tutor yang memiliki kualifikasi	20%	24%	1.750.000.000	28%	1.410.000.000	32%	1.670.000.000	36%	1.585.000.000	40%	1.695.000.000	40%	
1 01 20	Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga Kependidikan	Persentase Guru SD dan SMP Bersertifikat	46,9 & 41,88	51,46 & 48,40	218.050.000	56,07 & 54,90	268.500.405	60,68 & 61,40	291.759.608	65,29 & 65,29	378.499.710	70 & 75	389.665.728	70 & 75	Dinas Pendidikan
		Persentase tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan	30%	35%	57.035.752.226	40%	59.246.644.159	40%	59.856.184.266	45%	61.257.949.446	50%	59.557.302.884	50%	
1 01 22		Persentase komite sekolah aktif	0	30		60		90		120		150		150	
	Pengembangan manajemen Pelayanan pendidikan	Persentase Strandar Pelayanan Minimum (SPM) yang sudah dicapai	60%	65%	4.220.000.000	70%	4.915.000.000	75%	4.778.000.000	85%	5.038.000.000	90%	4.678.000.000	90%	Dinas Pendidikan
Urusan Wajib Kesehatan															
1 02 33	Pemerataan tenaga kesehatan	Rasio Dokter (per 100.000 penduduk)	23,19	25	12.878.155.200	28	12.878.155.200	32	12.878.155.200	37	12.878.155.200	40	12.878.155.200	40	Dinas Kesehatan
1 02 25	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Puskesmas pembantu per 1000 penduduk	1,91	1,7	6.100.000.000	1,6	5.120.000.000	1,5	8.137.298.000	1,3	6.288.623.061	1,1	18.100.000.000	1,1	Dinas Kesehatan, Kantor Camat
		Cakupan Puskesmas pembantu (per jumlah desa)	77,69%	80%	2.880.000.000	85%	6.880.000.000	90%	6.480.000.000	95%	6.480.000.000	100%	7.480.000.000	100%	
1 02 26	Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana	Persentase kecukupan jaringan utilitas kawasan	50%	65%	45.193.354.460	70%	49.737.006.673	80%	54.935.270.312	90%	58.237.432.861	100%	59.854.111.546	100%	Dinas Kesehatan, RSUD

			rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	rumah sakit												Dinas Kesehatan, RSUD	
1	02	15	Obat dan Perbekalan kesehatan	Cakupan ketersediaan obat esensial generic di faskes	80%	100%	2.895.889.500	100%	3.684.920.865	100%	3.931.624.995	100%	4.208.452.459	100%	4.488.112.744	100%	
1	02	16	Upaya kesehatan masyarakat	Persentase masyarakat yang terlayani puskesmas	75%	78%	14.241.987.971	80%	17.210.131.305	85%	17.514.835.000	87%	17.514.835.000	90%	13.712.042.000	90%	
				Cakupan pelayanan rumah sakit	100%	100%	17.103.694.600	100%	17.682.746.341	100%	18.373.088.020	100%	19.000.960.531	100%	19.437.033.532	100%	Dinas Kesehatan, RSUD, Kantor Perpustakaan dan Arsip
1	02	24	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Presentase peserta jaminan pemeliharaan kesehatan di unit layanan	88.03%	90%	750.000.000	92%	750.000.000	94%	750.000.000	96%	750.000.000	98%	750.000.000	98%	Dinas Kesehatan, RSUD
1	02	21	Pengembangan Lingkungan Sehat	Rumah Tangga ber-PHBS	65%	67%	840.000.000	70%	852.000.000	75%	865.000.000	80%	880.000.000	85%	896.000.000	85%	Dinas Kesehatan
1	02	29	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Balita berat badan di bawah garis Merah (BGM)	108 anak	0 anak		0 anak	0 anak	0 anak	Dinas Kesehatan						
				Cakupan pelayanan kesehatan balita	55.54%	60%	1.450.390.000	65%	1.304.690.000	70%	1.352.190.000	75%	1.528.390.000	80%	1.575.890.000	80%	
				Rasio Posyandu per 1000 balita	357	360		365	370	375	375	375	380	380	380	380	
1	02	32	Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Persalinan ditolong tenaga kesehatan	77,58%	80%	457.920.000	83%	509.812.000	85%	545.602.000	87%	582.702.000	90%	629.702.000	90%	Dinas Kesehatan
				Pelayanan Ibu Nifas	78,40%	80%	359.772.500	83%	369.752.500	85%	386.752.550	87%	398.447.775	90%	409.597.275	90%	
				Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	29,23%	30%	1.651.200.000	40%	1.700.100.000	45%	1.766.350.000	50%	1.820.080.000	60%	1.909.615.000	60%	
1	02	19	Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan promosi kesehatan	70%	73%	771.140.000	74%	833.368.000	76%	1.073.161.000	78%	1.237.700.000	80%	1.416.710.000	80%	Dinas Kesehatan
1	02	20	Perbaikan Gizi Masyarakat	Presentase balita mendapat kapsul Vit A	74,18%	75%	1.554.409.500	76%	2.454.864.600	77%	2.527.514.950	78%	2.706.126.000	80%	2.761.126.000	80%	Dinas Kesehatan
				Presentase ibu hamil mendapat Fe 90	74,19%	75%	718.297.000	78%	885.551.000	80%	962.087.650	90%	1.019.087.650	100%	1.037.542.000	100%	
				Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	96	100	552.965.000	100	638.261.000	100	699.087.650	100	744.087.650	100%	747.542.000	100%	
1	02	22	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Penanganan Penderita Penyakit BC	70,80%	73%	1.905.000.000	74%	1.809.000.000	76%	2.224.000.000	78%	2.122.500.000	80%	2.337.500.000	80%	Dinas Kesehatan, RSUD
				Angka Prevalensi Kusta (per 10.000 penduduk)	2,86	2,5		2,0	1,8	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5		
				Angka Penemuan Penderita Penyakit DBD	232 kasus	200 kasus	950.000.000	180 kasus	1.150.000.000	159 kasus	1.070.000.000	120 kasus	1.250.000.000	100 kasus	1.350.000.000	100 kasus	
				Prevalensi hipertensi	22.284 kasus	20.000 kasus	720.000.000	19.000 kasus	730.000.000	18.000 kasus	980.000.000	16.000 kasus	1.040.000.000	15.000 kasus	1.080.000.000	15.000 kasus	
				Cakupan desa/kelurahan UCI (persen)	60,42	76	1.200.000.000	80	1.200.000.000	85	1.300.000.000	90	1.300.000.000	100	1.300.000.000	100	
1	02	30	Peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Cakupan Pelayanan kesehatan usia lanjut	14	20	477.153.000	25	486.648.300	30	464.293.100	45	622.452.400	50	653.907.600	50	Dinas Kesehatan
1	02	17	Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase obat dan makanan yang memenuhi syarat	60%	60%	400.000.000	65%	450.000.000	70%	400.000.000	75%	450.000.000	80%	400.000.000	80%	Dinas Kesehatan
Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera																	
1	12	15	Keluarga Berencana	Cakupan peserta KB aktif	73,2%	74%	223.000.000	74,5%	350.000.000	76,5%	258.000.000	76,5%	420.000.000	76%	618.000.000	76%	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
				Persentase ketersediaan sumber daya	30%	70%	250.000.000	80%	400.000.000	85%	220.500.000	85%	350.000.000	85%	320.000.000	85%	
				Persentase penurunan kehamilan tidak diinginkan dari WUS	7,7%	7%	204.165.339	6%	244.144.045	5%	154.868.802	4,5%	265.035.237	4%	209.582.551	4%	

				Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR) per WUS	2,6	2,55	212.000.000	2,5	250.000.000	2,45	262.000.000	2,4	330.000.000	2,2	262.000.000	2,2	
1	12	16	Kesehatan Reproduksi Remaja	Cakupan remaja yang mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi	Na	50 orang	249.402.500	50 orang	282.062.850	50 orang	313.872.250	50 orang	355.453.100	50 orang	430.000.000	250 orang	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
				Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan (UKP)	20.32%	20.37%		20.40%		20.42%		20.45%		20.50%	20.50%		
1	12	21	Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Cakupan sekolah yang mendapatkan penyuluhan bahaya narkoba dan PMS	0 sekolah	5 sekolah	260.000.000	10 sekolah	280.000.000	13 sekolah	465.000.000	16 sekolah	265.000.000	16 sekolah	370.000.000	19 sekolah	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Bagian Kesejahteraan Rakyat
1	12	20	Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Persentase remaja yang ikut dalam program GenRe (Generasi Berencana)	27	30	319.300.000	33	222.125.000	35	350.350.000	38	319.350.000	40	298.100.000	40	
1	12	24	Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU	Persentase Posyandu PADU	57,5%	60%	480.622.500	72,5 %	485.500.000	87,5%	540.315.850	100%	605.719.200	100%	600.000.000	100%	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
				Persentase keluarga balita, keluarga remaja, keluarga lansia yang ikut program BKB, BKR dan BKL	78.19%	79.20%	70.000.000	80.30%	70.000.000	81.25%	141.000.000	82.30%	152.000.000	83.16%	160.000.000	83.16%	
1	02	28	Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	70%	73%	25.000.000	75%	25.000.000	77%	25.000.000	80%	25.000.000	85%	25.000.000	85%	
				Cakupan masyarakat Paser yang memiliki jaminan kesehatan	100%	100%	25.025.000.000	100%	25.060.000.000	100%	25.065.000.000	100%	25.060.000.000	100%	25.065.000.000	100%	
1	02	23	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Tipe Rumah Sakit	C	B		B		B		B		B		B	
				Akreditasi Rumah Sakit	Na	B	930.000.000	B	963.000.000	B	1.199.300.000	B	1.239.230.000	B	1.283.153.000	B	
				Akreditasi Puskesmas	0%	25 %	500.000.000	45 %	500.000.000	65 %	350.000.000	80 %	500.000.000	95 %	350.000.000	95%	

Tabel 104: Memperkuat Fondasi Perekonomian yang Berbasis Potensi Lokal dan Berkelanjutan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD Target	SKPD Penanggungjawab	
				2017		2018		2019		2020		2021				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Urusan Pilihan Pertanian																
Pertanian, Perkebunan dan Peternakan																
2 1	0 2 1 0	Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Cakupan pendampingan dan penyuluhan (pertanian dalam arti luas)	68%	75%	4.889.595.635	80%	3.183.636.033	90%	3.621.208.235	95%	4.985.530.635	100%	3.045.468.109	100%	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
2 1	0 1 9	Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Luas lahan yang menghasilkan produksi pertanian	Padi : 9.373 Ha, Jagung : 334 Ha, Kedelai : 87 Ha, Bawang Merah : 20 Ha, Jeruk : 400 Ha	9.600 Ha 350 Ha 90 Ha 25 Ha 410	4.390.225.946	9.800 Ha 360 Ha 100 Ha 30 Ha 420	5.255.296.000	10.000 Ha 370 Ha 110 Ha 35 Ha 430	5.550.125.600	10.200 Ha 380 Ha 120 Ha 40 Ha 440 Ha	5.794.156.080	10.400 Ha 400 Ha 130 Ha 45 Ha 450 Ha	5.916.031.060	10.400 Ha, Jagung : 400 Ha Kedelai : 130 Ha 45 Ha 450 Ha	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Dinas Pertanian dan Perkebunan
2 1	0 1 6	Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Ketersediaan pangan utama pertanian	30%	35%	4.860.201.290	40%	5.501.567.378	45%	5.406.284.275	50%	5.607.594.326	55%	6.636.690.524	55%	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Dinas Pertanian dan Perkebunan
2 1	0 1 8	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Kelompok tani yang menerapkan teknologi pertanian guna meningkatkan produksi	50%	55%	1.153.624.000	60%	1.369.164.000	65%	1.445.924.000	70%	1.514.424.000	75%	1.579.294.000	75%	Dinas Pertanian dan Perkebunan
1 3	0 2 4	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan lainnya	Persentase kawasan pertanian yang memiliki jaringan irigasi sesuai standar	39,9%	42%	16.000.000.000	44%	15.198.313.391	46%	15.000.000.000	48%	14.800.000.000	50%	15.000.000.000	50%	Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang, Dinas Pertanian dan Perkebunan
2 1	0 1 8	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Kelompok tani yang menerapkan teknologi perkebunan	35%	40%	172.356.000	45%	191.968.000	50%	211.565.040	55%	220.428.492	60%	230.034.458	60%	Dinas Pertanian dan Perkebunan
2 1	0 1 9	Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Luas lahan yang menghasilkan produksi perkebunan	Kelapa Sawit : 90.410,91 Ha Karet : 6.216,5 Ha	91.000 6.300	2.172.368.000	92.000 6.400	2.548.404.690	93.000 6.500	2.831.221.913	94.000 6.000	2.943.952.509	95.000 6.650	3.042.633.710	95.000 Ha 6.650 Ha	Dinas Pertanian dan Perkebunan
2 1	0 1 8	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Persentase kelompok petani yang menerapkan teknologi pertanian guna meningkatkan kualitas produk	45%	50%	121.148.000	55%	156.148.000	60%	165.248.000	65%	172.203.000	70%	175.124.100	70%	Dinas Pertanian dan Perkebunan
2 1	0 1 7	Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Persentase produk pertanian yang memiliki standarisasi mutu	30%	35%	109.200.000	40%	131.040.000	45%	140.212.800	50%	147.223.440	55%	150.167.909	55%	Dinas Pertanian dan Perkebunan
2 1	0 1 8	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Tingkat penggunaan teknologi terapan perkebunan	50%	55%	290.932.100	60%	350.000.000	65%	370.000.000	70%	400.000.000	75%	450.000.000	75%	Dinas Pertanian dan Perkebunan
2 1	0 1 7	Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Persentase produk perkebunan yang memiliki standarisasi mutu	25%	30%	119.748.000	35%	138.468.000	40%	146.330.400	45%	152.339.520	50%	154.863.350	50%	Dinas Pertanian dan Perkebunan

2	0	1	Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase peningkatan pendapatan rata-rata petani	20%	21%	696.928.000	22%	798.308.000	23%	843.337.600	24%	877.753.080	25%	892.207.581	25%	Dinas Pertanian dan Perkebunan
2	0	2	Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Kelompok peternak yang menerapkan teknologi peternakan	10%	11%	724.470.000	12%	876.608.700	13%	937.971.309	14%	984.869.875	15%	1.014.415.971	15%	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2	0	2	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Rasio populasi ternak yang sehat terhadap jumlah ternak	70%	71%	2.558.980.400	72%	3.096.366.284	73%	3.313.111.923	74%	3.478.767.519	75%	3.548.342.870	75%	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2	0	2	Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Cakupan kelompok peternak yang diberdayakan	10%	11%	3.168.289.000	12%	3.808.129.690	13%	3.978.201.482	14%	4.151.042.810	15%	4.237.887.281	15%	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2	0	2	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan (kualitas produk)	Persentase produk peternakan yang memiliki standarisasi mutu	10%	12%	1.012.746.000	14%	1.372.168.633	16%	1.514.444.865	18%	1.586.550.908	20%	1.630.784.050	20%	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2	0	2	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan (sentra produksi)	Persentase produk peternakan yang memiliki standarisasi mutu	10%	12%	442.400.000	14%	542.152.000	16%	580.102.640	18%	609.107.772	20%	621.289.927	20%	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan																	
2	0	1	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perikanan	Cakupan masyarakat perikanan yang diberdayakan	10%	12,5%	399.288.000	15%	419.288.000	17,5%	469.288.000	20%	519.288.000	22,5%	519.288.000	22,5%	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	0	2	Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Luas kawasan budidaya perikanan	17.031 Ha	18.437,20 Ha	712.000.000	19.524,64 Ha	855.000.000	20.429,57 Ha	895.000.000	21.315,48 Ha	895.000.000	22.378,58 Ha	900.000.000	22.378,58 Ha	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	0	2	Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah produksi perikanan budidaya	13.673 ton	15.157 ton	1.414.673.825	15.552 ton	1.663.244.000	16.226 ton	1.701.456.000	17.062 ton	1.735.007.000	18.083 ton	1.791.098.000	18.083 ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	0	2	Pengembangan perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	10.451,8 ton	10.870 ton	1.825.953.000	11.305 ton	2.272.218.000	11.757 ton	2.465.249.000	12.227 ton	2.475.780.000	12.716 ton	2.506.481.000	12.716 ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	0	2	Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan (kualitas produk)	Persentase produk perikanan yang memiliki standarisasi mutu	70%	75%	255.000.000	80%	255.000.000	80%	255.000.000	80%	255.000.000	85%	255.000.000	85%	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	0	2	Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan (sentra produksi)	Jumlah produk olahan hasil perikanan	2.398 ton	2.422 ton	549.288.000	2.464 ton	706.788.000	2.503 ton	776.788.000	2.532 ton	1.046.788.000	2.584 ton	1.111.788.000	2.584 ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
Urusan Pilihan Pariwisata																	
2	0	1	Pengembangan kemitraan	Persentase lembaga mitra yang aktif berkerjasama	Na	100%	160.000.000	100%	160.000.000	100%	170.000.000	100%	190.000.000	100%	200.000.000	100%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	0	1	Pengembangan destinasi pariwisata	Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan	10 destinasi	11	683.324.000	12	868.324.000	13	908.326.020	14	944.676.021	15	953.326.022	15 destinasi	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	0	1	Pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah media pemasaran pariwisata Pemerintah Daerah	5 jenis	5 jenis	160.000.000	5 jenis	160.000.000	5 jenis	160.000.000	5 jenis	180.000.000	5 jenis	200.000.000	5 jenis	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Urusan Wajib Koperasi dan UKM																	
1	1	1	Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Presentase koperasi yang aktif	78,7%	80%	551.080.000	85%	572.173.318	90%	1.016.084.229	95%	856.400.000	100%	1.546.300.000	100%	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
1	1	1	Pengembangan	Cakupan UMKM yang	30%	40%	326.960.000	50%	339.730.000	60%	343.600.000	70%	414.160.000	80%	439.850.000	80%	Dinas

5	6	kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	diberdayakan													Perdagangan Koperasi dan UKM	
1	1	1	Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	Persentase UMKM yang mendapatkan kredit perbankan	0	15%	371.150.000	30%	84.300.000	45%	87.350.000	60%	154.550.254	75%	544.700.000	75%	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Energi
1	1	1	Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM	Cakupan produk UMKM yang mendapatkan permodalan	20 produk	50 produk	80.000.000	75 produk	84.300.000	100 produk		125 produk		150 produk	85.000.000	150 produk	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Energi
5	5	7		Media promosi bagi UMKM	0	1 jaringan	390.300.000	2 jaringan	208.400.000	3 jaringan	240.100.000	4 jaringan	246.600.000	4 jaringan	268.500.000	4 jaringan	
Urusan Pilihan Perdagangan																	
2	0	1	Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah peningkatan jumlah pasar tradisional	81 pasar	82 pasar	8.858.024.934	83 pasar	9.908.030.861	84 pasar	10.069.112.803	85 pasar	10.375.239.093	86 pasar	9.932.201.972	86 pasar	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, Bagian Perekonomian
6	6	8		Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	12,95%	13,50%	1.024.229.000	15%	1.068.500.000	16,50%	1.227.800.000	18%	1.279.200.000	20%	1.284.700.000	20%	
2	0	1	Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Persentase pedagang yang menempati lokasi sesuai ijin	60%	76%	130.000.000	80%	115.500.000	84%	100.300.000	94%	96.200.000	100%	97.200.000	100%	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
6	6	9		Persentase pedagang kaki lima dan asongan yang mendapatkan pembinaan	10%	20%	68.000.000	40%	70.000.000	60%	72.500.000	80%	75.000.000	100%	80.300.000	100%	
Urusan Pilihan Perindustrian																	
2	0	1	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor IKM	30%	40%	2.118.290.000	50%	2.423.507.400	60%	2.554.858.140	70%	2.956.443.954	80%	2.805.988.349	80%	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Energi
7	7	6		Jumlah produk IKM yang bersertifikasi	0 produk	7 produk	1.277.700.000	14 produk	1.137.630.100	21 produk	1.281.393.110	28 produk	1.327.532.421	35 produk	1.417.985.663	35 produk	
2	0	1	Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Kontribusi industri kecil menengah terhadap PDRB	30%	45%	1.012.500.000	60%	992.500.000	70%	1.088.750.000	80%	1.345.875.000	90%	1.311.087.500	90%	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Energi
7	7	9															
Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar																	
Tenaga Kerja																	
1	1	1	Perluasan kesempatan kerja	Jumlah wirausahawan baru	0 wirausahawan	50 wirausahawan	1.000.000.000	100 wirausahawan	879.950.200	150 wirausahawan	950.000.000	200 wirausahawan	964.000.000	250 wirausahawan	975.000.000	250 wirausahawan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4	4	6		Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	3,72%	2,64%	249.019.799	2,64%	312.653.037	2,64%	837.734.323	2,64%	1.006.763.836	3,30%	1.073.827.240	3,30%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
-	-	-	Penempatan tenaga kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	19,19%	25%	634.615.000	30%	679.800.000	35%	906.300.000	40%	1.003.000.000	50%	983.312.000	50%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1	1	1	Pembinaan hubungan industrial dan lembaga ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan	1%	5%	484.000.000	10%	490.000.000	15%	539.000.000	20%	610.000.000	25%	659.000.000	25%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4	4	7															
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																	

1	2	1	Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Persentase desa yang memiliki BUMDES	0%	20%	1.395.436.000	40%	1.427.436.000	60%	1.372.436.000	80%	1.232.436.000	100%	1.352.436.000	100%	BPMPPD
Penanaman Modal																	
1	1	1	Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Persentase pertumbuhan kinerja investasi	10%	20%	728.258.560	40%	890.691.175	60%	1.005.583.008	80%	1.074.418.663	100%	1.175.649.930	100%	BPMPPPT
1	1	1	Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Persentase peningkatan investasi PMA	10%	20%		35%		50%		70%		90%		90%	BPMPPPT
				Persentase peningkatan investasi PMDN	10%	20%	817.133.090	35%	787.434.455	50%	1.057.436.301	70%	890.411.161	90%	1.178.192.810	90%	
1	1	1	Peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Tingkat kemudahan proses perijinan	80%	82,5%	1.026.810.435	85%	1.516.573.405	90%	1.385.102.489	95%	1.778.338.388	100%	1.450.260.870	100%	BPMPPPT
Lingkungan Hidup																	
1	0	1	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Nilai status lingkungan hidup daerah	64,96	67,5	1.152.730.000	70,5	2.470.530.000	73,5	2.652.530.000	76,5	3.080.530.000	80	3.188.530.000	80	Badan Lingkungan Hidup
				Laju deforestasi	18,000 Ha/Tahun	17,400 Ha/Tahun		16,800 Ha/Tahun	125.000.000	16,200 Ha/Tahun	125.000.000	15,600 Ha/Tahun	125.000.000	15,000 Ha/Tahun	125.000.000	15,000 Ha/Tahun	
				Persentase sekolah yang mendapatkan penghargaan adiwiyata	2,21%	3,31%	70.000.000	4,42%	125.000.000	5,52%	150.000.000	6,63%	200.000.000	7,73%	225.000.000	7,73%	
				Jumlah Emisi yang diturunkan dari Pemanfaatan Lahan di areal APL (juta ton CO2 eq)	3,01 juta ton CO2 eq	2,63 juta ton CO2 eq	120.000.000	2,29 juta ton CO2 eq	360.000.000	2,01 juta ton CO2 eq	470.000.000	1,77 juta ton CO2 eq	700.000.000	1,58 juta ton CO2 eq	825.000.000	1,58 juta ton CO2 eq	
1	0	1	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase kecamatan yang sudah terlayani pengelolaan pesampahan	10%	24%		38%		52%		66%		80%		80%	Badan Lingkungan Hidup
1	0	1	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase luasan kawasan lindung terhadap luasan kabupaten	17,3%	19%	1.375.000.000	21,5%	1.795.000.000	24%	1.960.000.000	26,5%	2.125.000.000	30%	2.325.000.000	30%	Badan Lingkungan Hidup
1	0	1	Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Persentase peningkatan luas area DAS yang terkonservasi	6%	6,4%	190.000.000	6,8%	250.000.000	7,2%	275.000.000	7,6%	350.000.000	8%	375.000.000	8%	Badan Lingkungan Hidup
				Persentase luas HCV dalam kawasan izin pemanfaatan lahan	5%	6%		7%		8%		9%		10%		10%	
-	-	-	Pengelolaan TAHURA	Tingkat kelestarian TAHURA	60%	63%	16.479.338.000	66%	17.163.293.658	69%	17.927.818.939	72%	18.920.557.934	75%	19.723.903.232	75%	Dinas Kehutanan

Tabel 105: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun n)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD	SKPD Penanggungjawab	
				2017		2018		2019		2020		2021				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar															
1 03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang															
1 03 15	Perencanaan tata ruang	Cakupan kawasan yang sudah memiliki perda RDTR	0	3	911.402.000	6	2.500.000.000	9	2.500.000.000	12	2.500.000.000	15	2.500.000.000	15	Dinas Bina Marga, Pengairan, dan Tata Ruang; Bappeda	
1 03 17	Pengendalian pemanfaatan ruang	Cakupan penggunaan kawasan yang sesuai perda RTRW dan RDTR	0	1	990.000.000	2	875.000.000	3	1.010.000.000	4	1.020.000.000	5	1.020.000.000	5	Dinas Bina Marga, Pengairan, dan Tata Ruang; Bappeda	
1 04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman															
1 04 19	Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Kebakaran	Persentase sarana/prasarana penanggulangan bahaya kebakaran sesuai standar	3 Unit mobil PMK	1 Unit	1.175.221.896	1 Unit	1.252.889.000	1 Unit	1.248.114.000	1 Unit	1.308.114.001	1 Unit	1.267.948.149	9 Unit mobil PMK	BPBD	
		Jumlah sektor wilayah manajemen kebakaran	1	1		1	50.000.000	1	100.000.000	1		1		6		
1 05	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat															
1 05 16	Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal (operasi/patrol)	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	76 orang	76 orang	3.610.991.200	76 orang	3.876.038.000	76 orang	3.919.038.000	76 orang	3.721.038.000	76 orang	4.452.038.000	76 orang	Satpol PP	
1 05 16	Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal (SDM dan sarana & prasarana)	Jumlah linmas per 10.000 penduduk	890 orang	890 orang	70.000.000	890 orang	80.000.000	890 orang	90.000.000	890 orang	100.000.000	890 orang	120.000.000	890 orang	Kantor Kesbangpol; Satpol PP	
1 05 21	Pendidikan politik masyarakat (pilkada)	Jumlah aksi unjuk rasa anarkis	138 kasus	128 kasus	890.986.640	118 kasus	953.500.363	108 kasus	968.985.202	108 kasus	1.223.318.535	100 kasus	1.107.803.215	100 kasus	Kantor Kesbangpol; Satpol PP; Bagian Tata Pemerintahan	
		Partisipasi pemilih dalam pilkada	68,83%											75%		
		Partisipasi pemilih dalam pilgub	55,16%	70%										70%		
1 05 21	Pendidikan politik masyarakat (pileg & pilpres)	Partisipasi pemilih dalam pileg	71%		215.000.000		280.000.000	75%	403.485.000		468.318.000		459.703.000	75%	Kantor Kesbangpol; Bagian Tata Pemerintahan	
		Partisipasi pemilih dalam pilpres	65%					70%						70%		
1 05 23	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan (konteks	Cakupan lembaga kemasyarakatan dan organisasi yang	3	4	171.000.000	4	170.000.000	4	80.000.000	4	75.000.000	4	200.000.000	4	Setiap SKPD di tingkat kabupaten	

			aduan masyarakat	mendapatkan pembinaan pembangunan													
2			Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar														
2	06		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil														
2	06	15	Penataan administrasi kependudukan	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	67,08	68	700.000.000	69	795.000.000	70	817.000.000	70	875.000.000	70	875.000.000	70	Disdukcapil; Kantor Camat; Kantor Lurah
2	06	15	Penataan administrasi kependudukan (e-KTP)	Rasio penduduk yang berkartu keluarga per satuan penduduk	29,4961	31	57.500.000	32	57.500.000	32	57.500.000	32	57.500.000	32	57.500.000	32	Kantor Camat; Kantor Lurah
2	06	15		Kepemilikan akte lahir per 1000 penduduk	92,253	99,654		107,438		114,487		121,352		128,726		128,726	Disdukcapil; Kantor Camat; Kantor Lurah
				Cakupan penduduk yang sudah terdaftar dan mempunyai e-KTP	78,69	80,25	4.360.409.692	85,35	4.600.385.472	87,65	4.782.781.500	89,65	5.106.241.676	92,30	5.438.991.254	92,30	
2	07		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa														
2	07	17	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Cakupan desa yang menjalankan musrenbang	100%	100%	1.691.156.000	100%	1.743.156.000	100%	2.037.156.000	100%	2.282.156.000	100%	2.427.156.000	100%	BPMPPD; Bappeda
2	07	19	Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Persentase desa yang telah menyusun APBDes sesuai ketentuan	N/A	43%	301.584.000	61%	301.584.000	71%	311.584.000	82%	301.584.000	100%	311.584.000	100%	BPMPPD
				Persentase desa yang melaporkan dokumen APBDes tepat waktu	N/A	43%	891.736.000	61%	1.023.736.000	71%	1.053.736.000	82%	983.736.000	100%	1.013.736.000	100%	
2	07	20	Peningkatan pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/Kelurahan	Persentase desa yang menyusun dan melaporkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	24,46%	50%	1.665.331.540	75%	1.866.386.781	100%	2.134.187.470	100%	2.395.288.801	100%	2.417.460.563	100%	BPMPPD
2	10		Komunikasi dan Informatika														
2	10	18	Kerjasama informasi dan media masa	Jumlah media cetak yang memuat informasi pembangunan daerah	4 media cetak	4 media cetak	1.524.000.000	4 media cetak	1.616.958.273	4 media cetak	2.028.703.125	4 media cetak	1.747.294.922	4 media cetak	1.921.904.823	4 media cetak	Diskominfo; Sekretariat DPRD
2	10	19	Pengembangan kelembagaan keterbukaan informasi	Berfungsinya PPID	5	5	868.520.000	5	1.239.020.000	5	1.451.120.000	5	1.661.120.000	5	1.913.220.000	35	Diskominfo; Bagian Humas & Protokol Setda
				Persentase SKPD yang telah membentuk dan menjalankan PPID pembantu	28,57%	42,86%	175.000.000	57,14%	297.000.000	71,43%	377.000.000	85,71%	457.000.000	100%	537.000.000	100%	
2	10	23	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Website milik pemerintah daerah yang memuat informasi pembangunan daerah	12	17	791.600.700	22	139.2700.700	27	1.404.000.000	32	1.708.250.000	37	1.796.220.700	37	Diskominfo; Dispenda
2	14		Statistik														
2	14	15	Pengembangan data/informasi/statistik daerah	Sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi	N/A	100%	982.650.000	100%	1.020.300.292	100%	972.906.500	100%	1.076.716.123	100%	1.056.366.865	100%	Bappeda; BPKAD; Dispenda; Bagian Hukum Setda
2	18		Kearsipan														
2	18	15	Perbaikan sistem administrasi kearsipan	SKPD yang menerapkan arsip secara baku	11 SKPD	8 SKPD	188.443.985	10 SKPD	283.564.200	12 SKPD	348.912.595	14 SKPD	323.886.050	11 SKPD	220.313.054	55 SKPD	Kantor Perpustakaan dan Arsip

2	18	16	Penyelamatan dan pelestarian dokumen	Dokumen terselamatkan	593 ML (Meter Linier)	200 ML	180.726.400	200 ML	178.024.999	200 ML	207.126.401	200 ML	260.726.400	200 ML	283.726.400	1050 ML	Kantor Perpustakaan dan Arsip; Sekretariat DPRD
2	18	17	Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana kearsipan	Database arsip daerah	14.555 berkas	5.000 berkas	531.717.000	5.000 berkas	606.717.000	5.000 berkas	631.717.000	5.000 berkas	656.717.000	5.000 berkas	711.717.000	25.000 berkas	Kantor Perpustakaan dan Arsip
2	18	18	Peningkatan kualitas pelayanan informasi	Jumlah layanan informasi arsip	1 program (off line)	1 program (off line)	256.554.595	2 program (on line)	271.642.058	2 program (on line)	246.782.360	2 program (on line)	226.144.488	2 program (on line)	216.009.306	2 program (on line)	Kantor Perpustakaan dan Arsip
Penunjang Urusan Pemerintahan																	
00 Rutin penunjang urusan pemerintahan																	
00	01		Pelayanan administrasi perkantoran	Persentase SKPD yang terlayani	100%	100%	70.046.152.866	100%	72.955.366.964	100%	76.565.187.779	100%	79.849.533.841	100%	83.458.985.183	100%	Setiap SKPD
00	02		Peningkatan sarana dan prasarana aparatur (Setiap SKPD)	Persentase SKPD yang tercukupi sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja aparatur	100%	100%	48.937.307.838	100%	44.975.990.075	100%	45.306.525.695	100%	48.622.060.218	100%	48.636.201.268	100%	Setiap SKPD
00	02		Peningkatan sarana dan prasarana aparatur/publik (khusus Cipta Karya)	Jumlah sarana dan prasarana publik dalam kondisi baik	85	100	51.700.000.000	115	1.260.000.000	130	1.323.000.000	150	1.389.150.000	170	1.458.607.500	170	Dinas Cipta Karya
				Jumlah sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	31	37	5.000.000.000	43	5.250.000.000	49	5.512.500.000	55	5.788.125.000	61	6.077.531.250	61	
00	03		Peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin PNS	N/A	30%	515.089.600	30%	2.021.513.427	30%	596.689.600	30%	680.689.600	30%	505.289.600	150%	Setiap SKPD
				Persentase rata-rata kehadiran aparatur SKPD	N/A	100%	248.500.000	100%	375.500.000	100%	203.600.000	100%	149.900.000	100%	173.900.000	100%	
01 Perencanaan																	
01	15		Pengembangan data dan informasi	Persentase SKPD yang mempunyai data SIPD secara lengkap	10%	20%	859.100.000	40%	926.577.000	60%	934.922.500	80%	1.055.078.963	100%	1.029.297.675	100%	Setiap SKPD
				Persentase SKPD yang memiliki media diseminasi informasi	10%	20%	620.700.000	30%	649.700.000	40%	673.700.000	50%	684.092.500	60%	684.092.500	60%	
01	15		Pengembangan data dan informasi (khusus Bappeda)	Persentase SKPD yang menyusun perencanaan secara tepat waktu menggunakan simpepeda	N/A	100%	107.201.369	100%	105.000.000	100%	105.000.000	100%	107.625.000	100%	107.625.000	100%	Bappeda
01	18		Perencanaan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Cakupan wilayah strategis dan cepat tumbuh yang sudah memiliki payung hukum	1 kawasan	1 kawasan	112.237.541	1 kawasan	130.000.000	1 kawasan	140.000.000	1 kawasan	150.000.000	1 kawasan	160.000.000	1 kawasan	Bappeda
01	19		Perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Cakupan pengembangan kota menengah dan besar	N/A	30	252.370.352	50	150.000.000	60	160.000.000	80	165.000.000	100	170.000.000	100	Bappeda
01	20		Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah (khusus Bappeda)	Persentase aparatur perencana yang memiliki kompetensi perencana	30%	45%	55.000.000	60%	155.000.000	75%	55.000.000	85%	210.000.000	90%	55.000.000	90%	Bappeda
01	21		Perencanaan pembangunan daerah (khusus Bappeda)	Peringkat pangripta	4	4	35.850.000	3	35.850.000	3	35.850.000	3	41.227.500	3	41.227.500	3	Bappeda
				Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	N/A	100%	1.575.187.688	100%	1.653.937.688	100%	1.817.201.315	100%	1.655.496.133	100%	1.959.082.215	100%	Bappeda
01	21		Perencanaan pembangunan daerah	Persentase SKPD yang menyusun dan menetapkan	N/A	100%	1.010.670.899	100%	1.137.347.190	100%	999.228.109	100%	1.133.993.120	100%	2.576.186.332	100%	Setiap SKPD

		(setiap SKPD)	dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu													
01	22	Perencanaan pembangunan ekonomi	Capaian pembangunan bidang ekonomi	85%	86%	1.898.407.559	87%	1.906.979.999	88%	1.910.766.865	89%	2.224.131.111	90%	2.118.739.643	90%	Bappeda
01	23	Perencanaan sosial budaya	Capaian pembangunan sosial budaya	100%	100%	835.000.000	100%	922.000.000	100%	1.025.000.000	100%	1.092.000.000	100%	1.156.000.000	100%	Bappeda
01	24	Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Capaian pembangunan bidang prasarana wilayah dan SDA	75%	78%	1.000.000.000	81%	1.041.929.530	84%	1.084.883.851	87%	1.145.351.250	90%	1.100.000.000	90%	Bappeda
01	26	Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan (khusus Bappeda)	Persentase SKPD yang melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan	N/A	95%	540.000.000	95%	588.000.000	95%	666.000.000	95%	670.000.000	95%	727.000.000	95%	Bappeda
01	26	Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan	Persentase SKPD yang melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan	N/A	95%	287.500.000	95%	303.750.000	95%	323.200.000	95%	339.675.000	95%	364.900.000	95%	Setiap SKPD
01	27	Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti	100%	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	Bappeda;
01	28	Pengadaan barang dan jasa secara elektronik	Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik	51,56%	100%	598.105.000	100%	712.683.000	100%	770.001.000	100%	876.645.500	100%	909.757.000	100%	Bagian Pembangunan Setda
02		Kuangan														
02	6	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase SKPD yang menyusun Lkj tepat waktu	N/A	100%	2.709.351.700	100%	2.946.835.122	100%	3.071.501.870	100%	3.032.045.817	100%	3.123.672.867	100%	Setiap SKPD
02	17	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah (BPKAD)	Persentase SKPD yang menyusun laporan keuangan sesuai standar	N/A	100%	4.586.653.950	100%	4.711.078.500	100%	4.907.694.200	100%	5.479.631.605	100%	5.508.522.634	100%	BPKAD
02	17	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah (pendapatan)	Persentase kontribusi PAD terhadap total pendapatan	5%	6%	3.162.576.782	7%	3.286.960.000	8%	3.697.701.563	9%	3.833.004.700	10%	4.205.470.686	10%	Dispenda
02	18	Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	Persentase SKPD yang menyusun dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran sesuai ketentuan	75%	100%	169.766.951	100%	178.542.503	100%	189.263.121	100%	196.110.309	100%	201.697.855	100%	Bappeda; BPKAD; Dispenda
02	19	Manajemen aset daerah	Cakupan aset daerah yang dikelola secara baik	N/A	5%	1.048.323.983	10%	1.226.158.391	15%	1.350.650.150	20%	1.047.700.000	25%	1.174.293.304	25%	BPKAD
02	20	Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah (realisasi anggaran/semua SKPD)	Persentase SKPD yang menyusun LPPD tepat waktu	N/A	100%	603.800.000	100%	613.205.138	100%	660.742.147	100%	741.994.787	100%	1.065.237.796	100%	Setiap SKPD
03		Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan														
03	15	Pendidikan kedinasan	Jumlah calon praja IPDN yang lulus seleksi penerimaan IPDN	20	3	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	35	BKD
03	16	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (khusus BKD)	Persentase penetapan pejabat struktural berdasarkan hasil seleksi jabatan/assessment	0	100%	635.000.000	100%	635.000.000	100%	635.000.000	100%	635.000.000	100%	635.000.000	100%	BKD
			Persentase PNS yang telah lulus diklat PIM	100%	100%	2.502.071.643	100%	2.541.962.174	100%	2.689.584.999	100%	2.689.585.000	100%	2.689.585.000	100%	BKD
			Cakupan jabatan struktural yang diisi berdasarkan seleksi terbuka	0	100%	750.000.000	100%	750.000.000	100%	750.000.000	100%	750.000.000	100%	750.000.000	100%	BKD
03	16	Peningkatan kapasitas	Cakupan pejabat fungsional	100%	100%	1.338.000.000	100%	1.714.289.000	100%	1.611.250.000	100%	1.800.275.000	100%	1.695.400.000	100%	Setiap SKPD

		sumber daya aparatur (setiap SKPD)	yang telah mengikuti diklat fungsional													
			Jumlah tenaga pengawas yang bersertifikat	25	4	4	4	4	4	4	4	45				
			Jumlah aparatur yang memenuhi kompetensi sesuai standar	328	244	6.754.207.238	100	3.870.427.976	100	3.941.582.880	100	4.979.608.690	100	4.854.204.705	644	
03	17	Pembinaan dan pengembangan aparatur (khusus BKD)	Cakupan penerapan seleksi ASN berbasis komputer	0	247	1.920.151.400	153	2.056.028.400	137	1.875.151.400	137	2.241.028.400	177	1.875.151.400	851	BKD
			Cakupan pegawai yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian tepat waktu	0	100%	1.076.106.998	100%	1.171.106.998	100%	1.171.106.998	100%	1.191.106.998	100%	1.241.106.998	100%	
03	17	Pembinaan dan pengembangan aparatur (BKD dan Ortal)	Penilaian kinerja pegawai berdasarkan sistem informasi	0	0		100%		100%			100%		100%		BKD; Bagian Organisasi & Tata Laksana Setda
			Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Semua PD)	100	100	551.500.000	100	811.651.053	100	679.431.250	100	841.643.949	100	760.043.850	100	Semua SKPD
04 Penelitian dan Pengembangan																
04	1	Pengembangan inovasi daerah	Persentase SKPD yang mengembangkan inovasi pelayanan	10%	20%	150.000.000	30%	155.000.000	40%	160.000.000	50%	165.000.000	60%	170.000.000	60%	Bappeda
04	2	Pengembangan standarisasi pelayanan publik (SKPD urusan wajib pelayanan dasar)	Persentase SKPD yang memenuhi target SPM secara lengkap	53%	60%		73%		86%		93%		100%	100%		Dinas Pendidikan; Dinkes; RSUD Panglima Sebaya; Dinas Bina Marga, Pengairan & Tata Ruang; Dinas Cipta Karya; Kantor Kesbangpol; Dinsos; Bagian Organisasi & Tata Laksana
04	2	Pengembangan standarisasi pelayanan publik (Ortal)	Persentase SKPD yang telah merumuskan dan melaksanakan standar pelayanan publik (SPP)		100%	150.000.000	100%		100%	150.000.000	100%		100%	100%		Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda
			Persentase SKPD yang menyelenggarakan survey IKM	N/A	10 SKPD	100.000.000	20 SKPD	100.000.000	30 SKPD	100.000.000	35 SKPD	110.000.000	35 SKPD	110.000.000	35 SKPD	
05 Sekretariat DPRD																
05	15	Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Sistem penjarangan aspirasi masyarakat efektif	450	90 kali	5.243.834.881	90 kali	5.486.968.027	90 kali	5.170.324.067	90 kali	6.046.282.548	90 kali	6.122.505.082	450 kali	Sekretariat DPRD
06 Sekretariat Daerah																
06	1	Pengembangan wilayah perbatasan	Persentase batas wilayah kecamatan dan desa yang telah ditetapkan	N/A	10%	175.100.000	10%	214.461.000	10%	238.051.710	10%	316.385.398	10%	345.000.000	50%	Bagian Tata Pemerintahan Setda
			Persentase ketersediaan syarat-syarat penataan wilayah	60	70	76.400.000	80	135.000.000	90	150.000.000	100	166.500.000	100	184.815.000	100	
06	2	Fasilitasi dan dukungan kelembagaan KORPRI	Jumlah anggota KORPRI yang mendapat fasilitasi dan layanan yang disediakan KORPRI	0	1140	693.166.938	1140	916.166.939	1140	1.047.525.961	1140	890.775.962	1140	1.051.356.052	1140	Sekretariat DP KORPRI
06	3	Perumusan kebijakan bidang pemerintahan	Jumlah kebijakan bidang pemerintahan yang	N/A	17	600.000.000	17	792.664.038	17	675.664.038	17	746.000.000	17	779.050.255	75	Setda; Bagian Tata

			dirumuskan													Pemerintahan; Bagian Hukum; Bagian Humas & Protokol
06	4	Perumusan kebijakan bidang perekonomian, pembangunan dan kesra	Jumlah kebijakan bidang perekonomian, pembangunan dan kesra yang dirumuskan	N/A	16	42.350.611	16	45.839.949	16	88.579.354	16	127.239.771	16	111.336.094	80	Setda; Bagian Ekonomi; Bagian Pembangunan; Bagian Kesra
06	5	Perumusan kebijakan bidang administrasi umum	Jumlah kebijakan bidang administrasi umum yang dirumuskan	N/A	28		25		23		15		15		106	Bagian Umum Setda (Persandian); Bagian Organisasi dan Tata Laksana; Bagian Umum; Bagian Keuangan
06	6	Koordinasi bidang pemerintahan	Jumlah koordinasi bidang pemerintahan yang dilaksanakan	N/A	8	285.000.000	8	336.500.000	8	371.700.000	8	401.383.509	8	438.385.695	40	Setda; Bagian Tata Pemerintahan; Bagian Hukum; Bagian Humas & Protokol
06	7	Koordinasi bidang perekonomian, pembangunan dan kesra	Jumlah koordinasi bidang perekonomian, pembangunan dan kesra yang dilaksanakan	N/A	16	5.982.021.434	16	6.303.277.601	16	6.590.463.763	16	6.899.769.062	16	7.255.493.446	80	Setda; Bagian Ekonomi; Bagian Pembangunan; Bagian Kesra
06	8	Koordinasi bidang administrasi umum	Jumlah koordinasi bidang administrasi umum yang dilaksanakan	N/A	14	1.749.094.638	12	1.631.483.911	12	1.668.051.584	9	2.043.476.229	10	2.170.185.281	67	Bagian Umum Setda (Persandian); Bagian Organisasi dan Tata Laksana; Bagian Umum; Bagian Keuangan
06	9	Pelayanan administrasi bidang pemerintahan	Jumlah pelayanan administrasi bidang pemerintahan yang dilaksanakan	N/A	8	673.528.400	8	746.817.240	8	813.940.365	8	914.458.901	8	951.120.990	40	Setda; Bagian Tata Pemerintahan; Bagian Hukum; Bagian Humas & Protokol
06	10	Pelayanan administrasi bidang perekonomian, pembangunan dan kesra	Jumlah pelayanan administrasi bidang perekonomian, pembangunan dan kesra yang dilaksanakan	20	16	7.410.568.311	16	7.625.782.040	16	7.997.750.347	16	8.352.785.393	16	8.537.697.845	80	Setda; Bagian Ekonomi; Bagian Pembangunan; Bagian Kesra
06	11	Pelayanan administrasi bidang administrasi umum	Jumlah pelayanan administrasi bidang administrasi umum yang dilaksanakan	N/A	14	3.937.800.654	12	4.350.531.302	12	4.689.871.457	9	5.182.504.318	10	5.552.890.525	67	Bagian Umum Setda (Persandian); Bagian Organisasi dan Tata Laksana; Bagian Umum; Bagian Keuangan
06	16	Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Sistem informasi pelayanan pengaduan masyarakat	3	3	1.581.436.422	3	1.844.457.835	4	2.060.370.772	4	2.226.928.713	4	2.413.966.496	4	Bagian Umum; Bagian Humas & Protokol
06	26	Penataan peraturan perundang-undangan	Jumlah produk hukum daerah yang ditetapkan (perda, perbup, instruksi,	622	635	1.498.501.615	642	1.784.468.567	657	1.934.497.699	669	2.194.461.759	711	2.378.364.010	711	Bagian Hukum Setda

SK bupati)																
07	Inspektorat															
07	20	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase kasus pengaduan/temuan pengawasan di lingkungan pemerintah daerah yang ditindaklanjuti	60%	60%	2.166.358.000	65%	2.323.592.436	65%	2.445.409.068	70%	2.636.762.265	70%	2.715.762.265	70%	Inspektorat Kabupaten; Bagian Umum; Bagian Keuangan
07	28	Pencegahan dan pemberantasan korupsi	Jumlah kasus korupsi yang telah diputus secara hukum	3	3		3		3		3		3	15	Inspektorat Kabupaten	
			Persentase SKPD yang telah menerapkan zona WBK/WBM	2	2	508.224.000	2	605.489.120	2	612.550.800	3	644.925.180	3	656.651.100		12
08	Kecamatan															
08	1	Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Jumlah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum yang terkoordinasi dengan baik	N/A	71	3.997.706.868	71	4.570.729.493	71	4.751.999.948	71	5.204.742.631	71	5.356.770.957	355	Kantor Camat; Kantor Lurah
08	2	Koordinasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terkoordinasi dengan baik	N/A	43	3.050.477.178	43	3.789.130.435	43	4.055.353.932	43	4.458.213.033	43	4.413.152.540	215	Kantor Camat; Kantor Lurah
08	3	Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang terkoordinasi dengan baik	N/A	18	3.703.290.400	19	3.986.058.167	19	4.158.243.893	19	3.912.424.035	19	4.161.171.434	94	Kantor Camat; Kantor Lurah
08	4	Koordinasi penerapan dan penegakkan perda dan perkada	Jumlah kegiatan penerapan dan penegakkan perda dan perkada yang terkoordinasi dengan baik	N/A	20	455.280.000	20	553.884.898	20	681.785.354	20	733.540.000	20	956.151.254	100	Kantor Camat; Kantor Lurah
08	5	Koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum yang terkoordinasi dengan baik	N/A	32	1.698.361.400	32	2.163.907.205	32	2.395.882.485	32	2.396.545.013	32	2.506.545.957	160	Kantor Camat; Kantor Lurah
08	6	Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah lainnya	Jumlah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah lainnya yang terkoordinasi dengan baik	N/A	28	3.248.277.922	28	3.473.536.986	28	3.633.467.300	28	3.839.949.870	28	3.965.186.046	140	Kantor Camat; Kantor Lurah
08	7	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	Persentase desa yang menyusun dan melaporkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	24%	50%	1.665.331.540	75%	1.866.386.781	100%	2.134.187.470	100%	2.395.288.801	100%	2.417.460.563	100%	Kantor Camat; Kantor Lurah

Tabel 106: Kohesivitas Sosial, Budaya dan Adat Istiadat Lokal

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun n)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD	SKPD Penanggungjawab	
				2017		2018		2019		2020		2021				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
URUSAN WAJIB																
Urusan: Sosial																
1	13	15	Program pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	Dinas Sosial
1	13	22	Program penguatan/revitalisasi lembaga adat	Na	25	150.000.000	50	150.000.000	75	150.000.000	90	150.000.000	100	150.000.000	100	Dinas Sosial
1	17	15	Program pengembangan nilai budaya	Na	10	350.880.000	10	420.880.000	10	485.880.000	10	500.880.000	10	585.880.000	10	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
1	17	17	Program pengelolaan keragaman budaya	1	4		4		4		4		4		4	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
			Jumlah festival budaya yang diikuti (kali)	10	10	355.000.000	10	475.000.000	10	455.000.000	10	510.000.000	10	465.000.000	10	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
1	17	18	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Na	3	30.000.000	3	25.000.000	3	30.000.000	3	35.000.000	3	35.000.000	3	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
1	13	16	Program penanggulangan korban bencana sosial	Na	100%	72.525.000	100%	77.500.000	100%	82.500.000	100%	87.500.000	100%	92.500.000	100%	Dinas sosial
1	13	16	Program rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana sosial	Na	Na	-	Na	Dinas sosial								
1	19	22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Na	60%	1.251.809.000	70%	1.513.829.348	75%	1.582.285.310	80%	1.566.829.491	80%	1.379.835.998	80%	BPBD
1	13	15	Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	80	84	370.000.000	88	370.000.000	90	370.000.000	96	370.000.000	100	370.000.000	100	Dinas sosial
			Persentase KK miskin yang menerima bantuan sosial	5%	4%	100.000.000	4%	100.000.000	4%	100.000.000	4%	100.000.000	4%	100.000.000	20%	Dinas sosial
			Persentase KK miskin yang menerima pelatihan ketrampilan berusaha	100%	100%	100.000.000	100%	90.000.000	100%	95.000.000	100%	100.000.000	75%	105.000.000	100%	Dinas sosial
1	13	18	Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma	80	84	140.000.000	88	150.000.000	92	160.000.000	96	160.000.000	100	170.000.000	100	Dinas sosial
1	11	17	Program pemberdayaan lanjut usia	4%	5%	168.765.000	10%	190.845.000	15%	216.237.000	20%	255.171.400	25%	255.171.400	25%	Dinas sosial
1	13	19	Program pembinaan panti jompo	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	Dinas sosial
			Persentase warga panti jompo yang menerima pembinaan	100%	100%	912.469.626	100%	912.469.626	100%	912.469.626	100%	900.000.000	100%	912.469.626	100%	Dinas sosial
			Persentase lanjut usia terlantar yang telah menerima jaminan sosial	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	Dinas sosial
1	13	17	Program pembinaan	100%	100%	114.143.500	100%	153.765.025	100%	154.518.030	100%	187.421.636	100%	187.421.636	100%	Dinas sosial

			anak terlantar	terlantar yang menerima pembinaan														
1	13	20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Cakupan eks peyandang penyakit sosial yang menerima pembinaan	1675 Orang	380 Orang	284.530.000	330 Orang	386.550.000	325 Orang	386.550.000	320 Orang	378.550.000	320 Orang	384.550.000	1675 Orang	Dinas sosial	
1	13	21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Cakupan organisasi kesejahteraan sosial yang mendapatkan pembinaan	100%	100%	320.000.000	100%	400.000.000	100%	570.000.000	100%	920.000.000	100%	920.000.000	100%	Dinas sosial	
Urusan: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																		
1	11	15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas perempuan (jabatan politik dan publik)	Rasio perempuan terhadap laki-laki pada lembaga legislatif	6 : 30	6 : 30		6 : 30		6 : 30		10 : 30		10 : 30		10 : 30	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	
				Rasio PNS perempuan terhadap PNS laki-laki	2255 : 5582	2355 : 5582		2395 : 5582		2450 : 5582		2500 : 5582		2555 : 5582		2555 : 5582		
				Rasio pejabat struktural perempuan terhadap pejabat struktural laki-laki	217 : 787	237 : 787	175.000.000	250 : 787	350.000.000	265 : 787	414.000.000	285 : 787	234.000.000	300 ; 787	250.000.000	300 ; 787		
1	11	17	Program Peningkatan kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan (kekerasan perempuan)	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	65%	70%	290.000.000	80%	95.000.000	90%	318.888.888	100%	330.000.000	100%	350.000.000	100%	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	
1	11	18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Persentase perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor formal non-pertanian	53%	53,5%	255.809.650	54%	270.000.000	54,5%	298.000.000	55%	311.200.000	55%	326.600.000	55%	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	
1	11	16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase lembaga pengarusutamaan gender yang mendapatkan pembinaan	50%	100%	120.000.000	100%	90.000.000	100%	130.000.000	100%	130.000.000	100%	130.000.000	100%	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	
				Persentase SKPD yang menyusun PPRG	10%	26%	120.000.000	45%	100.000.000	62%	130.000.000	81%	130.000.000	100%	130.000.000	100%		
				Perda pengarusutamaan gender ditetapkan	1	0	50.000.000	1	105.000.000	0	38.000.000	0	51.000.000	0	55.000.000	1		
1	11	16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak (kekerasan anak)	Persentase kasus kekerasan anak yang ditangani	65%	70%	220.000.000	80%	260.000.000	90%	275.000.000	100%	280.000.000	100%	290.000.000	100%	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	
1	11	16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak (layak anak)	Kabupaten Layak Anak (%)	60%	70%	300.000.000	80%	265.000.000	90%	310.000.000	100%	320.000.000	100%	330.000.000	100%	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	
Urusan: Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat																		
1	19	17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah forum adat atau agama dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	12 forum	12 forum	385.000.000	12 forum	447.500.000	32 forum	481.985.000	52 forum	541.068.000	72 forum	659.503.000	72 forum	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
1	19	19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Jumlah satuan keamanan lingkungan di masyarakat (per RT)	Na	Na	-	Na										
Urusan: Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil																		
1	10	15	Program penataan administrasi kependudukan	Cakupan penduduk yang sudah terdaftar dan mempunyai e-ktip	78,69%	80,25%	4.360.409.692	85,35%	4.600.385.472	87,65%	4.782.781.500	89,65%	5.106.241.676	92,30 %	5.438.991.254	92,30%	Kantor kecamatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
				Rasio penduduk yang berkartu keluarga per satuan penduduk	29,4961	31	57.500.000	32	57.500.000	32	57.500.000	32	57.500.000	32	57.500.000	32		
				Kepemilikan akte lahir per 1000 penduduk	92,253	99,654		107,438		114,487		121,352		128,726		128,726		
URUSAN PILIHAN																		

Urusan: Transmigrasi																	
2	08	15	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi	0 kawasan	0	350.000.000	6	655.000.000	7	705.000.000	8	625.000.000	9	630.000.000	9	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Urusan: Pemuda dan Olah Raga																	
1	18	21	Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga	Jumlah sarana prasarana olahraga yang sesuai standar (Unit)	53	54	212.000.000	54	199.000.000	55	204.000.000	56	204.000.000	56	219.000.000	56	Dinas Sosial, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
1	18	20	Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga	Peringkat pekan olahraga pelajar tingkat provinsi	1 dari 10	0	367.000.000	5 dari 10	565.000.000	0	610.000.000	2 dari 10	685.000.000	0	710.000.000	1 dari 10	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
1	18	16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Cakupan pemuda yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (Orang)	105	120	1.391.584.000	135	1.076.584.000	150	1.176.584.000	165	1.301.584.000	180	1.341.584.000	180	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Sosial, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
1	12	21	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	Cakupan pemuda yang mendapatkan penyuluhan bahaya narkoba (Orang)	30	60	50.000.000	90	249.982.019	120%	200.000.000	150	150.000.000	180	150.000.000	180	Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Bagian Kesejahteraan Rakyat

Pembahasan mengenai indikasi program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan akan disempurnakan oleh adanya ulasan mengenai data dari masing-masing indikator kinerja utama yang ada di bab selanjutnya. Selain sebagai bukti mengenai berhasil atau tidaknya sebuah program, urgen atau tidaknya serta apakah program tersebut adalah program prioritas dari sisi teknokratis atau bukan, dengan menyelami indikator-indikator kinerja utama bahasan mengenai indikasi program prioritas akan disempurnakan.

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah didasarkan pada lampiran 1 Permendagri no. 54 tahun 2010.

Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan yang terdiri dari 3 (tiga) aspek yaitu:

- a. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - 1) Fokus: Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
 - 2) Fokus: Kesejahteraan Masyarakat
 - 3) Fokus: Seni Budaya dan Olahraga.
- b. Aspek Pelayanan Umum
 - 1) Fokus: Pelayanan Urusan Wajib
 - 2) Fokus Pelayanan Urusan Pilihan
- c. Aspek Daya Saing Daerah
 - 1) Fokus Pada Kemampuan Ekonomi
 - 2) Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
 - 3) Fokus Iklim Berinvestasi
 - 4) Fokus Sumberdaya Manusia

Penetapan indikator kinerja daerah selanjutnya disajikan dalam tabel sebagai berikut

Tabel 107: Indikator Kinerja Daerah

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
	Fokus: Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1	Pertumbuhan PDRB	-0,97	-0,97	-0,87	1,1	1,7	2,0	
1.2.	Laju inflasi di Kabupaten Paser	6,26	6,26	6,1	5,9	5,1	5,0	
1.3.	PDRB per kapita	145,92	145,92	150,0	152,01	161,0	165,02	
1.4.	Pemerataan pendapatan (Indeks Gini)	0,3070	0,3070	0,3070	0,2510	0,2452	0,2100	
1.5.	Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)							
1.6.	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	7,87	7,87	7,87	7,5	7,4	7,2	
1.7.	Angka kriminalitas yang tertangani	292 kasus	295 kasus	297 kasus	301 kasus	305 kasus	310 kasus	
	Fokus: Kesejahteraan Masyarakat							
1	Pendidikan							
1.1.	Angka melek huruf	97.13	97.75	98.50	98.99	99.20	99.00	99.00
1.2.	Angka rata-rata lama sekolah	8.51	9.70	10.00	10.25	11.50	11.75	11.75
1.3.	Angka partisipasi kasar	93.18	94.50	94.75	95.00	96.00	97.00	97.00
1.4	Angka partisipasi kasar SD/MI	108.03	100	100	100	100	100	100
1.5	Angka partisipasi kasar SMP/MTs	89.68	90	91	92	93	95	95
1.6.	Angka pendidikan yang ditamatkan	1.42	1.78	2.31	2.49	2.84	3.19	3.19
1.7.	Angka Partisipasi Murni	72.45	74.64	76.81	78.98	81.15	83.33	83.33
1.8.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	95.90	96.10	96.75	97.20	98.50	98.50	98.50
1.9.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	69.00	71.20	72.20	73.75	74.30	75.00	75.00

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1.10.	Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C	52.50	57.75	63.00	68.25	73.50	78.75	78.75
2	Kesehatan							
2.1.	Angka kelangsungan hidup bayi	13.4	13	12.6	11.8	10.7	10	10
2.2.	Angka usia harapan hidup	73.99	74	74.2	74.5	74.8	75	7
2.3.	Persentase balita gizi buruk	5.6	5.3	5	4.8	4.6	4.3	4
3	Pertanahan							
3.1	Persentase penduduk yang memiliki lahan							
4	Ketenagakerjaan							
4.1.	Jumlah penduduk yang bekerja Fokus: Seni Budaya dan Olahraga.	110.511	118.029	121.944	126.094	130.503	135.197	135.197
1	Kebudayaan							
1.1.	Jumlah grup kesenian	45	55	60	65	70	70	70
1.2.	Jumlah gedung kesenian	0	1	1	1	1	1	1
2	Pemuda dan Olahraga							
2.1.	Jumlah klub olahraga	201	202	202	203	205	205	205
2.2.	Jumlah gedung olahraga	36	36	37	37	37	37	37
	ASPEK PELAYANAN UMUM							
	Fokus: Pelayanan Urusan Wajib							
1	Pendidikan							
1.1.	Pendidikan dasar:							
1.1.1.	Angka partisipasi sekolah	98.31	98.51	98.70	98.90	99.10	100.00	100.00
1.1.2.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	115.10	117.40	119.70	122.01	123.31	126.61	126.61
1.1.3.	Rasio guru terhadap murid	13.75	15.06	16.36	17.67	18.98	20.28	20.28
1.2.	Pendidikan menengah							
1.2.1.	Angka partisipasi sekolah	80.75	83.98	87.21	90.44	93.67	96.9	96.9

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1.2.2.	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	77	79.31	81.62	83.93	86.24	88.55	88.55
1.2.3.	Rasio guru terhadap murid	12	13.80	15.60	17.40	19.20	21.00	21.00
1.2.4.	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	28	28.84	29.68	30.52	31.36	32.20	32.20
1.2.5.	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	97.13	97.364	97.598	97.832	98.066	98.3	98.3
1.3.	Fasilitas Pendidikan							
1.3.1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	27.42	32.904	38.388	43.872	49.356	54.84	54.84
1.3.2.	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	36.6 (94.77)	42.09	47.58	53.07	58.56	64.05	64.05
1.4.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):							
1.4.1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	73.34	76.27	79.20	82.14	85.07	88.00	88.00
1.5.	Angka Putus Sekolah:							
1.5.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0.14	0.13	0.11	0.10	0.08	0.07	0.07
1.5.2.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0.45	0.41	0.36	0.32	0.27	0.23	0.23
1.5.3.	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	1.43	1.29	1.14	1.00	0.86	0.72	0.72
1.6.	Angka Kelulusan:							
1.6.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	93.2	94.13	95.06	96.00	96.93	100	100
1.6.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	90.17	91.97	93.78	95.58	97.38	100	100
1.6.3.	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	98.07	98.46	98.85	99.25	99.64	100	100
1.6.4	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	97.09	97.67	98.26	98.84	99.42	100	100
1.6.5	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	96.08	96.09	97.71	98.53	99.53	100	100
1.6.6.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	83.8	87.15	90.50	93.86	97.21	100	100
2	Kesehatan							
2.1.	Rasio posyandu per satuan balita	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
2.2.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0.47	0.48	0.50	0.51	0.52	0.53	0.53
2.3.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0.0039	0.0039	0.0039	0.0039	0.004	0.004	0.004
2.4.	Rasio dokter per satuan penduduk	23.9	24	28	30	35	40	40
2.5.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	3.78	4	6	8	10	12	12
2.6.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	75%	77%	81%	84%	86%	90%	90%
2.7.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.8.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	73.6%	75%	80%	85%	90%	95%	95%
2.9.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.1	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	42%	45%	50%	55%	60%	65%	65%
2.11.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	48.25%	47.5%	47%	46.8%	46.5%	45%	45%
2.12.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	25%	30%	35%	40%	45%	50%	50%
2.13.	Cakupan kunjungan bayi	106%	80%	90%	100%	100%	100%	100%
2.14.	Jumlah puskesmas	18 unit	19 unit	19 unit	20 unit	21unit	22 unit	22 unit
2.15.	Cakupan pembantu puskesmas	73.75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
3	Pekerjaan Umum							
3.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	37,48%	39%	40%	41%	42%	43%	43%
3.2.	Rasio Jaringan Irigasi	4.83	7	10	13	16	20	
3.3.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk							
3.4.	Persentase rumah tinggal bersanitasi	28.48%	31.33%	34.18%	37.02%	39.87%	42.72%	42.72%
3.5.	Rasio tempat pemakaman umum per satuan	9.98	13	16	19	21	24	Pertumbuh

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
	penduduk							an 3%
3.6.	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	1:26	1:25	1:24	1:23	1:22	1:21	1:21
3.7.	Rasio rumah layak huni (Pertumbuhan 3%)	1:37	1:36	1:35	1:34	1:33	1:32	1:32
3.8.	Rasio permukiman layak huni	1:27	1:26	1:25	1:24	1:23	1:22	1:22
3.9.	Panjang jalan dilalui Roda 4	1049	1180	1312	1444	1576	1576	1576
3.10.	Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4)	215 KM	250km	300km	350km	400km	500.6km	500,6 km
3.11.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	310.74	320	340	360	380	400	400
3.12.	Panjang jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	310.74	320	340	360	380	400	400
3.13.	Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	10km	8km	6km	4km	4km	4km	4 km
3.14.	Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	10798m	10474m	10150m	9825m	9502m	9178m	9178m
3.15.	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	44.10%	49.10%	54.10%	59.10%	64.10%	69.10%	69.10%
3.16.	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota	800 m	800 m	850 m	850 m	850 m	850 m	850m
3.17.	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	114.500 m	115.000 m	116.000 m	117.000 m	118.000 m	119.000 m	119.000m
3.18.	Lingkungan Pemukiman	166 kompleks	167 kompleks	168 kompleks	169 kompleks	170 kompleks	171 kompleks	171 kompleks
4	Perumahan							
4.1.	Rumah tangga pengguna air bersih	22.004	22.504	23.004	23.504	24.004	24.504	24.504
4.2.	Rumah tangga pengguna listrik	26.062						
4.3.	Rumah tangga ber-Sanitasi	30.015 KK	30.615 kk	31.215 kk	31.815 kk	32.416 kk	33.016 kk	33.016 kk

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
4.4.	Lingkungan pemukiman kumuh	166 Ha	164,34 Ha	162,68 Ha	161,02 Ha	159,36 Ha	157,70 Ha	175,70 Ha
4.5.	Rumah layak huni	2.844 unit	2.944 unit	3.444 unit	3.944 unit	4.444 unit	4.944 unit	4.944 unit
5	Penataan Ruang							
5.1.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
5.2.	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan							
5.3.	Ruang publik yang berubah peruntukannya							
6	Perencanaan Pembangunan							
6.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dgn PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.4.	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7	Perhubungan							
7.1.	Jumlah arus penumpang angkutan udara umum	NA	-	-	-	-	-	-
7.2.	Rasio ijin trayek	NA	1:11	1:11	1:11	1:11	1:11	1:11
7.3.	Jumlah uji kir angkutan umum (pertumbuhan 1 %)	6016 unit	6076 unit	6136 unit	6198 unit	6260 unit	6322 unit	6322 unit
7.4.	Jumlah Pelabuhan Udara	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
7.5.	Angkutan darat	7631 unit	7859 unit	8095 unit	8338 unit	8588 unit	8846 unit	8846 unit
7.6.	Kepemilikan KIR angkutan umum	552 unit	557 unit	563 unit	568 unit	574 unit	580 unit	580 unit
7.7.	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	45 menit	45 menit	45 menit	45 menit	45 menit	45 menit	45 menit
7.8.	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	Rp 30.000	Rp 45.000	Rp. 45.000	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 60.000	Rp. 60.000
7.9.	Pemasangan Rambu-rambu	1.300 unit	1.800 unit	2.300 unit	2.800 unit	3.300 unit	3.800 unit	3.800 unit
8	Lingkungan Hidup							

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
8.1.	Persentase penanganan sampah	20%	32%	44%	56%	68%	80%	80%
8.2.	Persentase Penduduk berakses air minum	6,52%	7,38%	7,58%	7,81%	8,19%	8,57%	8,57%
8.3.	Persentase Luas pemukiman yang tertata	5%	6%	7%	8%	9%	10%	10%
8.4.	Pencemaran status mutu air	Berat	Berat	Berat	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
8.5.	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air	1%	2%	3%	4%	5%	6%	6%
8.6.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal (15%	17%	19%	21%	23%	25%	25%
8.7.	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	1/650	1/600	1/550	1/500	1/450	1/400	1/400
8.8.	Penegakan hukum lingkungan	5 Kasus	7 Kasus	9 Kasus	11 Kasus	13 Kasus	15 Kasus	15 Kasus
9	Pertanahan							
9.1.	Persentase luas lahan bersertifikat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
9.2.	Penyelesaian kasus tanah Negara	10 kasus	12 kasus	10 kasus	11 kasus	8 kasus	9 kasus	60 kasus
9.3.	Penyelesaian izin lokasi	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10	Kependudukan dan Catatan Sipil							
10.1.	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	67,08%	68%	69%	70%	70%	70%	70%
10.2.	Rasio bayi berakte kelahiran	61,25%	62.25%	63.25%	64.25%	65.25%	66.25%	66.25%
10.3.	Rasio pasangan berakte nikah	120%						
10.4.	Kepemilikan KTP							
10.5.	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	92.593	94.112	99.122	104.884	107.118	112.256	112.256
10.6.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
10.7.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	78.69%	80.25%	85.35%	87.65%	89.85%	92.30%	92.30%
11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
11.1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	33.23%	40.39%	42.90%	43.89%	44.78 %	45.77 %	45.77 %

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
11.2.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	55.73 %	56.5 %	57.5 %	58 %	59 %	60 %	60 %
11.3.	Rasio KDRT	0.0698	0.045	0.043	0.041	0.040	0.038	0.038
11.4.	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	Na	-	-	-	-	-	-
11.5.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	30.36 %	31.5 %	32 %	33 %	34 %	35 %	35 %
11.6.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	65 %	65 %	70 %	80 %	90 %	100 %	100 %
12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera							
12.1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2.6	2.6	2.5	2.4	2.3	2.2	2.2
12.2.	Rasio akseptor KB	10.498	12.850	15.247	17.980	20.187	20.187	20.187
12.3.	Cakupan peserta KB aktif	32.127	41.612	43.500	45.000	46.500	47.500	47.500
12.4.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	14.241	13.240	12.102	11.012	10.010	9.450	9.450
13	Sosial							
13.1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	17 buah	17 buah	17 buah	17 buah	17 buah	17 buah	17 buah
13.2.	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	26 jenis	21 jenis	21 jenis	21 jenis	21 jenis	21 jenis	21 jenis
13.3.	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan social	26	26	26	26	26	26	26
14	Ketenagakerjaan							
14.1.	Jumlah perselisihan hubungan industri	35	33	31	29	28	27	27
14.2.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	62.03	65.58	66.41	66.84	67.27	67.70	67.70
14.3.	Pencari kerja yang ditempatkan	465	600	600	600	600	600	600
14.4.	Tingkat pengangguran terbuka	9.25	8.18	7.85	7.49	7.11	6.70	6.70
15	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah							
15.1.	Persentase koperasi aktif	78.70%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
15.2.	Jumlah UKM non BPR/LKM	5625 Unit						
15.3.	Jumlah BPR/LKM							
15.4.	Usaha Mikro dan Kecil	5575 Unit						

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
16	Penanaman Modal							
16.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	60%	77%	81%	85%	90%	95%	95%
16.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	526.348.057.36 5	522.665.46 0.233	580.298.733. 245	609.313.669.90 7	633.779.35 3.403	671.768.32 1.073	671.768.32 1.073
16.3.	Rasio daya serap tenaga kerja	90.75						
16.4.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	28.76						
17	Kebudayaan							
17.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	4 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan
17.2.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	1 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
17.3.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit
18	Kepemudaan dan Olah Raga							
18.1.	Jumlah organisasi pemuda	37	40	40	40	40	40	40
18.2.	Jumlah organisasi olahraga	37	38	38	38	38	38	38
18.3.	Jumlah kegiatan kepemudaan	2	5	5	6	6	6	6
18.4.	Jumlah kegiatan olahraga	17	18	18	19	20	20	20
18.5.	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	2	2	3	4	5	5	5
18.6.	Lapangan olahraga	54	54	55	55	56	56	56
19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri							
19.1.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	2						
19.2.	Kegiatan pembinaan politik daerah	2						
20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
20.1.	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000	6	12	18	24	48	76	76

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
	penduduk							
20.2.	Rasio Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	34	34	34	34	34	34	34
20.3.	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan							
20.4.	Pertumbuhan ekonomi	8.79						
20.5.	Persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan	7.94						
20.6.	Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
20.7.	Penegakan PERDA	99 kasus	89 kasus	79 kasus	69 kasus	59 kasus	49 kasus	39 kasus
20.8.	Cakupan patroli petugas Satpol PP	32 orang	40 orang	50 orang	60 orang	70 orang	80 orang	332 orang
20.9.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	99 kasus	89 kasus	79 kasus	69 kasus	59 kasus	49 kasus	39 kasus
20.10.	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	766 orang	890 orang	890 orang	890 orang	890 orang	890 orang	890 orang
20.11.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	NA	100	100	100	100	100	100
20.12.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam
20.13.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	NA						
20.14.	Sistim Informasi Manajemen Pemda	9/ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	ada
20.15.	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat							
21	Ketahanan Pangan							
21.1.	Regulasi ketahanan pangan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
21.2.	Ketersediaan pangan utama	30%	35%	40%	45%	50%	55%	
22	Pemberdayaan Masyarakat Desa							
22.1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	1	2	3	4	5	6	6
22.2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	1	2	3	4	5	6	6
22.3.	Jumlah LSM	264	269	274	279	284	289	289
22.4.	LPM Berprestasi	1	1	1	1	1	1	1
22.5.	PKK aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
22.6.	Posyandu aktif	81%	81%	81%	85%	85%	85%	85%
22.7.	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	-	-	-	-	-	-	-
22.8.	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	-	-	-	-	-	-	-
23	Statistik							
23.1.	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
23.2.	Buku "PDRB kabupaten"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
24	Kearsipan							
24.1.	Pengelolaan arsip secara baku	11 SKPD	8 SKPD	10 SKPD	12 SKPD	14 SKPD	11 SKPD	55 SKPD
24.2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	30 org	30 org	30 org	30 org	30 org	-	120 org
25	Komunikasi dan Informatika							
25.1.	Jumlah jaringan komunikasi	80	82	84	86	88	90	90
25.2.	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk (Pertumbuhan warnet 0,05%)	0,06%	0,1%	0,15%	0,2%	0,25%	0,3%	0,3%
25.3.	Jumlah surat kabar nasional/lokal	3	5	5	5	5	5	5
25.4.	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	NA	12	24	36	48	60	60
25.5.	Web site milik pemerintah daerah	12	17	22	27	32	37	37
25.6.	Pameran/expo	1	1	1	1	1	1	1
26	Perpustakaan							

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
26.1.	Jumlah perpustakaan	288 unit	298 unit	334 unit	370 unit	397 unit	448 unit	448 unit
26.2.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	8.325 orang	15.000 orang	17.500 orang	20.000 orang	22.500 orang	25.000 orang	100.000 orang
26.3.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	49.345 eks	6.000 eks	8.000 eks	10.000 eks	12.000 eks	11.000 eks	47.000 eks
Fokus Pelayanan Urusan Pilihan								
1	Pertanian							
1.1.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	40,83 Ha/Kw	42,00 Ha/Kw	43,00 Ha/Kw	45,00 Ha/Kw	46,00 Ha/Kw	47,00 Ha/Kw	47,00 Ha/Kw
1.2.	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	12,05%	13,00%	14,00%	15,00%	16,00%	17,00%	17,00%
1.3.	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	1,3%	1,5%	1,6%	1,7%	1,8%	1,9%	1,9%
1.4.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	4.65%	5,00%	6,00%	7,00%	8,00%	9,00%	9,00%
1.5.	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	NA						
1.6.	Cakupan bina kelompok petani	20%	25%	30%	35%	40%	45%	45%
2	Kehutanan							
2.1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	2500 Ha	2660 Ha	2840 Ha	3044 Ha	3275 Ha	3537 Ha	3537 Ha
2.2.	Kerusakan Kawasan Hutan	18000 Ha/Th	17.400 Ha/Th	16.800 Ha/Th	16.200 Ha/Th	15.600 Ha/Th	15.000 Ha/Th	15.000 Ha
2.2.	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	1.21%	1,15%	1,09%	1,03%	0,97%	0,91%	0,91%
3	Energi dan Sumberdaya Mineral							
3.1.	Pertambangan tanpa ijin							
3.2.	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	76.32						
4	Pariwisata							
4.1.	Kunjungan wisata	16.512	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
4.2.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	0.01	90 juta	100 juta	100 juta	100 juta	100 juta	100 juta
5	Kelautan dan Perikanan							
5.1.	Produksi perikanan	24.577.3 ton	26.934,90 ton	30.848,14 ton	35.455,61 ton	40.890,84 ton	47.313,76 ton	47.313,76 ton
5.2.	Konsumsi ikan	51.3	51,92	52,54	53,16	53,78	54,40	54,40
5.3.	Cakupan bina kelompok nelayan	113	142,4	151,8	161,2	170,6	180	180
5.4.	Produksi perikanan kelompok nelayan	10.526,70	10.526,70	11.158,30	11.827,80	12.537,47	13.289,72	13.289,72
6	Perdagangan							
6.1.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	3.54%	3.71%	3.90%	4.09%	4.30%	4.51%	
6.2.	Ekspor Bersih Perdagangan	2,385,824,030	3,929,511,8 97,79	4,332,463,00 7,53	4,754,709,296,3 2	5,230,193,3 69,55	6,328,512, 706,50	
6.3.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal							
7	Perindustrian							
7.1.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	0.81	0.83	0.85	0.88	0.92	0.95	0.95
7.2.	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	5.50	5.65	5.81	5.99	6.17	6.35	6.35
7.3.	Pertumbuhan Industri.	7.05						
7.4..	Cakupan bina kelompok pengrajin	3 sentra industri	3 sentra industri	3 sentra industri	4 sentra industri	4 sentra industri	4 sentra industri	4 sentra industri
8	Ketransmigrasian							
8.1.	Jumlah kawasan perkantoran baru (KPD)	0	-	-	-	1	1	2
8.2.	Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB	NA	-	-	-	-	-	-
ASPEK DAYA SAING DAERAH								
Fokus Pada Kemampuan Ekonomi								
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1.1.	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita							
1.2.	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita							
1.3.	Produktivitas total daerah							
2	Pertanian							
2.1.	Nilai tukar petani							
	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur							
1	Perhubungan							
1.1.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (pertumbuhan kendaraan 3% per tahun)	1:12	1:13	1:14	1:15	1:16	1:17	1:17
1.2.	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	233863	234.363	234.863	235.363	235.863	236.363	236.363
1.3.	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	427242						
2	Penataan Ruang							
2.1.	Ketaatan terhadap RTRW	70%	72%	74%	76%	78%	80%	
2.2.	Luas wilayah produktif	872.488,86	-	-	-	-	-	
2.3.	Luas wilayah industri	3.532,47	3532,47	3532,47	3532,47	3532,47	3532,47	
2.4.	Luas wilayah banjir	155.301	150.241	145.181	140.120	135.060	130.000	
2.5.	Luas wilayah kekeringan	94.829	91.863	88.897	85.931	82.965	80.000	
2.6.	Luas wilayah perkotaan	10.667	10.720,34	10.773,94	10.827,81	10.881,94	10.936,35	
3	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
3.1.	Jenis dan jumlah bank dan cabang	9	9	9	10	10	11	11
3.2.	Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang							
3.3.	Jenis, kelas, dan jumlah restoran							
3.4.	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel	25	25	25	26	26	27	27

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	-9
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
4	Lingkungan Hidup							
4.1.	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	74,08%	79,26%	84,44%	89,63%	94,81%	100%	100%
5	Komunikasi dan Informatika							
5.1.	Rasio ketersediaan daya listrik							
5.2.	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	96.17						
5.3.	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	60%	64%	68%	72%	76%	80%	80%
	Fokus Iklim Berinvestasi							
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1.	Angka kriminalitas							
1.2.	Jumlah demo							
1.3.	Lama proses perijinan	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari
1.4.	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	57 Jenis	57 Jenis	57 Jenis	57 Jenis	57 Jenis	57 Jenis	57 Jenis
1.5.	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha							
1.6.	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa							
	Fokus Sumberdaya Manusia							
1	Ketenagakerjaan							
1.1.	Rasio lulusan S1/S2/S3	5.99						
1.2.	Rasio ketergantungan	52.3						

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser tahun 2016-2021 disusun berdasarkan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Paser 2005-2025 untuk tahapan pembangunan lima tahunan. Untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan di akhir periode RPJMD maka perlu ditetapkan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

A. PEDOMAN TRANSISI

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir, maka:

1. RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD masa transisi yaitu tahun pertama di bawah kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) pada periode berikutnya;
2. RPJMD sebagai pedoman dimaksud pada butir (1) antara lain bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi;
3. Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD dari kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih berdasarkan hasil Pemilukada pada periode berikutnya yang akan direvisi sesuai dengan RPJMD yang baru.

B. KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser tahun 2016-2021 merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih periode 2016-2021.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser tahun 2016-2021 menjadi pedoman bagi Dinas/Badan/dan Kantor dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas/Badan/Kantor. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas, Badan, Kantor, serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser tahun 2016-2021 sebaik-baiknya;
2. Dinas, Badan, dan Kantor berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas, Badan, dan Kantor yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser tahun 2016-2021;
3. Dinas, Badan, dan Kantor berkewajiban menjamin konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser tahun 2016-2021 dengan Rencana Strategis SKPD.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser tahun 2016-2021, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berkawajibkan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser tahun 2016-2021 ke dalam Rencana Strategis SKPD.